



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,



pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.



f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan



- 4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos - Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup



BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Tahun 2017, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,07% lebih tinggi dibanding Tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,03%. Peningkatan pertumbuhan ditopang oleh perbaikan ekspor dan investasi. Perbaikan pendapatan memberikan dukungan pada konsumsi rumah tangga sehingga tetap memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi dengan pangsa sekitar 54% terhadap perekonomian nasional. Perbaikan pertumbuhan ekspor nasional sebesar 9,09% (yoy) didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat. Realisasi pertumbuhan ekspor tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sementara, perbaikan pertumbuhan investasi pada 2017 menjadi sebesar 6,15% (yoy), dari pertumbuhan 2016 sebesar 4,47% (yoy), didorong oleh percepatan realisasi proyek infrastruktur Pemerintah khususnya sejak semester II 2017.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha, didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (20,16%); Pertanian Kehutanan dan Perikanan (13,14%); dan Perdagangan Besar - Eceran, Reparasi Mobil - Sepeda Motor (13,01%). Dari sisi pengeluaran, perekonomian Indonesia tahun 2017 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (56,13%) diikuti oleh komponen PMTB (32,16%) dan komponen ekspor barang dan jasa (20,37%).

Selanjutnya dari sisi inflasi tercatat bahwa inflasi nasional tahun 2017 sebesar 3,61% terjaga di kisaran target sasaran inflasi $4,0 \pm 1\%$. Pencapaian inflasi tersebut didukung oleh inflasi *volatile foods* yang rendah, tekanan permintaan yang terkelola dengan baik, dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) baik di tingkat pusat (TPIP) maupun daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas makroekonomi, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan.

Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh stagnan sebesar 5,27%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 5,07%. Struktur perekonomian Jawa Tengah menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (34,96%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,09%); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil Sepeda Motor (13,60%) serta Konstruksi (10,36%).



Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2017, Industri Pengolahan menyumbang sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,51%, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,88% serta Konstruksi sebesar 0,73%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor yang mencapai 7,83%, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,50%, dan Komponen Ekspor sebesar 7,34%.

Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada Tahun 2017 sebesar 3,71%, lebih tinggi jika dari angka inflasi Tahun 2016 sebesar 2,36% namun masih dibawah target tahun 2017 sebesar $4,5 \pm 1\%$. Meningkatnya inflasi tersebut antara lain disebabkan penyesuaian pada kelompok *administered prices* seperti penyesuaian tarif BBM dan BBM non subsidi, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan barang kena cukai. Disamping itu kelompok inti seperti biaya pendidikan dan tarif komunikasi juga mengalami peningkatan. Sedangkan komoditas *volatile food* relatif terkendali.

Relatif rendahnya inflasi tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah dalam mengendalikan inflasi melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga. Disamping itu, Bank Indonesia telah *me-launching* aplikasi SiHati Generasi III yang berfungsi untuk memantau informasi pasokan dan perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah.

Indeks Williamson merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota pada suatu kurun waktu tertentu. Semakin besar nilai indeks suatu daerah menunjukkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah. Kurun waktu tahun 2013 – 2016, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,64 menjadi 0,62. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,387 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2017 sebesar 0,365. Indeks Gini Jawa Tengah termasuk dalam kategori menengah.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yaitu bidang pendidikan (Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah), kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan ekonomi (pengeluaran per kapita disesuaikan). IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 69,98 di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 70,18 dan keduanya masuk dalam kategori sedang.

Jumlah penduduk miskin tahun 2017 (September) sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%), menurun sebesar 0,96 poin dibanding tahun 2016 (September) sebanyak 4,49 juta jiwa (13,19%). Penurunan persentase penduduk miskin tersebut yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan berbagai program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan mengurangi beban pengeluaran dan ketimpangan, meningkatkan pendapatan, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, pelibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan, unsur masyarakat, pemerintah pusat/kabupaten-kota.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah pada bulan Agustus 2017 sebesar 4,57% turun 0,06 poin dibandingkan dengan Agustus 2016 sebesar 4,63%, namun masih dibawah target yaitu 4,20%. Upaya yang telah dilakukan antara lain: menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perijinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyelenggaraan bursa kerja serta meningkatkan kegiatan kewirausahaan.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pengukuran NTP dilakukan dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Adapun capaian NTP sampai dengan Desember 2017 mencapai sebesar 103,48 lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 99,35.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah guna menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada implementasinya, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.



Mendasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah serta dengan memperhatikan hasil tahun 2016 dan lingkungan strategis, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan Jawa Tengah tahun 2017 sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan;
2. Cukup banyaknya jumlah pengangguran yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja;
3. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat belum berdaulat utamanya untuk kedelai, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;
4. Rendahnya kualitas produksi garam;
5. Belum tercukupinya kebutuhan air baku;
6. Masih adanya masyarakat yang belum terlayani energi listrik;
7. Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil;
8. Masih rendahnya peran UMKM sebagai salah satu penyangga dan penggerak perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;
9. Belum memadainya penyelenggaraan pendidikan ditunjukkan dengan sarana prasarana pendidikan yang belum sesuai standar nasional, tenaga pendidik belum seluruhnya memiliki sertifikat dan berkualifikasi S1/DIV, kualitas lulusan siswa dikmen dan diksus belum sesuai tuntutan pasar kerja, selain itu masih banyaknya siswa miskin yang belum menerima bantuan siswa miskin;
10. Masih cukup rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama terkait kematian ibu dan bayi, balita dengan gizi buruk, dan penyakit menular;
11. Perlu peningkatan pelayanan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata dan pengurangan kemiskinan.

Dengan melihat berbagai permasalahan pembangunan daerah di Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup



banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, akses air minum aman, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

2. Pengurangan Pengangguran

Isu pengangguran di Jawa Tengah hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

3. Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal penting dalam keberlanjutan penghidupan bagi masyarakat. Saat ini, situasi pangan di Jawa Tengah berada pada tataran konstruksi ketahanan pangan, walaupun secara statistik Jawa Tengah berada pada surplus komoditas pangan dan merupakan kontributor pangan nasional. Namun yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tata kelola produksi pangan justru membuka ruang yang sangat luas bagi pemilik modal dan industri besar untuk memproduksi pangan secara massal, sehingga produsen pangan kecil menjadi tidak berdaya dan rakyat menjadi tergantung pada produk pangan massal. Sehingga dalam konteks ini, persoalan terbesar pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adalah pada ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.

Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian



dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati.

4. Kedaulatan Energi

Kebutuhan energi di Jawa Tengah juga memiliki kecenderungan dan pola yang sama dengan nasional. Ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan bekerjanya rantai ekonomi energi dalam moda transportasi, listrik, maupun industri yang menggunakan pasokan energi fosil. Sementara pemanfaatan potensi sumber energi non fosil, terutama sumber EBT di Jawa Tengah masih belum optimal. Sedangkan potensi sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif baru cukup besar seperti panas bumi, air, serta potensi lahan yang cukup luas sebagai area pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Upaya penanganan isu strategis kedaulatan energi ini bukan merupakan upaya jangka pendek maupun menengah, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang harus dirintis sejak saat ini, sebelum ketergantungan terhadap energi fosil semakin tak terkendali. Upaya kunci yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara mandiri di level lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah. Upaya tersebut juga perlu diikuti dengan upaya pengembangan budaya hemat energi, yang akan mendorong masyarakat untuk lebih pintar dalam memanfaatkan energi secara berdaulat.

5. Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, baik secara regional, nasional maupun internasional, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak terbatas



pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang

Belum optimalnya kualitas dan kapasitas infrastruktur, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya yang akan mempengaruhi daya saingnya. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur agar wilayah selatan produktivitasnya semakin meningkat. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana angkutan massal hingga di pedesaan juga menjadi hal penting dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan bencana alam yang juga memerlukan pembenahan sebagai penyeimbang dari pembangunan infrastruktur fisik.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah rasio elektrifikasi di Jawa Tengah, mengingat terutama di wilayah pedesaan masih belum sepenuhnya terlayani pasokan listrik. Untuk itu pembangunan infrastruktur energi perlu ditingkatkan melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan serta pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, solar cell, dan panas bumi.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Selain itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air utamanya untuk mengantisipasi banjir dan kekeringan yang merupakan fenomena tahunan yang semakin anomali, sehingga antisipasi dan langkah-langkah mitigasi harus semakin ditingkatkan dan tersinkronisasi. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Perlindungan dilakukan dengan membangun sebanyak mungkin tampungan air dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Pembangunan irigasi dilakukan dengan



tetap memperhatikan ketepatan lokasi dengan mengutamakan pada wilayah lumbung padi dan wilayah yang termasuk dalam LP2B.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif. Selain itu juga, dengan pengembangan teknologi informasi dapat untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta fungsi kontrol dari masyarakat terhadap proses pembangunan daerah.

Pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mem-pertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional dan juga Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik serta mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Langkah-langkah konkrit utamanya terkait serah terima P3D, peningkatan kapasitas aparatur serta manajemen kepegawaian (rekrutmen, pengembangan karir, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara) menjadi isu yang paling strategis.

Terkait dengan perwujudan demokrasi di daerah, maka peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi di antaranya keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum rembug.



Kondusifitas daerah juga masih perlu ditingkatkan terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak pada Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, serta dilaksanakan secara terpadu bersama dinas/instansi terkait dan komponen masyarakat dalam rangka pencegahan dan penghentian konflik sosial, serta terorisme, peningkatan pemahaman nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, sosialisasi wawasan kebangsaan, pengembangan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendasarkan permasalahan dan isu strategis, serta upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”. Guna mendorong pencapaian tujuan tersebut, maka pembangunan daerah Tahun 2017 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; pendataan petani dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan;
 - b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan;
 - c. Peningkatan kualitas mutu dan SDM IKM garam; dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat;
 - d. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
 - e. Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;



- f. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar;
 - h. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memper-banyak pembangunan embung/tambungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
 - i. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi; serta optimalisasi pemanfaatan potensi pertambangan melalui penerapan *good mining practice*;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan, difokuskan pada:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan:
 - 1) Pemberian jaminan perlindungan sosial bagi kepala rumah tangga non produktif (penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis), fokus pada kepala rumah tangga yang belum mendapatkan program nasional;
 - 2) Pola *sharing* program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a) Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola *sharing* yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar;
 - b) Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;



- 3) Stimulan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 4) Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/ Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi;
 - 5) Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran;
 - 6) Fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan;
 - 7) Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS;
 - 8) Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar;
 - 9) Peningkatan kesejahteraan pekerja dengan fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
- b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain:
- 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan melibatkan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha;
 - 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan;
 - 3) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan peningkatan prasarana, sarana, kurikulum dan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk;
- c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan, antara lain dengan:
- 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga;
 - 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha;
 - 4) Peningkatan keterampilan petani dan nelayan;



3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan bagi siswa SMK serta penguasaan Bahasa Inggris bagi siswa SMA dan SMK; peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tenaga kependidikan; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR;
 - b. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*;
 - d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB;
 - e. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, dan pembinaan kelompok binaan PMKS non panti;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis



- kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi;
- b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja;
 - c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - d. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah;
 - e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta penegakkan norma dan perlindungan ketenagakerjaan;
 - f. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada:
- a. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas jalan provinsi eks alih status dari jalan kewenangan kabupaten/kota;
 - b. Penanganan infrastruktur mendukung pengembangan wilayah (kabupaten yang tingkat ekonominya di bawah rata-rata provinsi) serta penghubung pusat kegiatan wilayah melalui peningkatan jalan penghubung Pantura-Pansela, jalur alternatif pantura, serta kawasan perbatasan antar provinsi;
 - c. Penanganan infrastruktur pendukung pariwisata utamanya melalui peningkatan jalan dan perlengkapannya (Kawasan Dieng, Solo-Selo Borobudur, Sangiran, Curugsewu, Candi Gedongsongo, Agro Wisata Bandungan, Bledug Kuwu, Baturaden), serta peningkatan pelayanan transportasi (penyelesaian pengembangan Bandara A. Yani, Bandara Dewandaru, Bandara Tunggul Wulung, Bandara Wirasaba, Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Karimunjawa);
 - d. Penanganan infrastruktur pendukung pengurangan kemiskinan melalui peningkatan aksesibilitas, cakupan layanan akses air minum dan sanitasi;



- e. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain pelebaran Klampok - Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal - Purwokerto);
 - f. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
 - g. Rehabilitasi untuk menurunkan luas lahan kritis serta konservasi DAS dengan penanaman vegetatif dan sipil teknis;
 - h. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM;
 - i. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; Penangan darurat pasca banjir/longsor;
 - j. Koordinasi keberlanjutan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA Regional);;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
- a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
 - 1) **Organisasi**, meliputi penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural;
 - 2) **Tatalaksana**, meliputi penyusunan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik;
 - 3) **Peraturan perundang-undangan**, meliputi regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, melalui harmonisasi peraturan perundangan daerah



yang disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat diikuti dengan penindakan pelanggaran peraturan daerah;

- 4) **Sumber daya manusia aparatur**, meliputi penciptaan aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi tersebut ditempuh melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu/khusus, pengadaan pegawai pada formasi tertentu dengan seleksi/tes *Computer Assisted Test* (CAT) dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
 - 5) **Pengawasan**, meliputi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Implementasi aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemanfaatan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media;
 - 6) **Akuntabilitas**, melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7) **Pelayanan publik**, meliputi pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan pasti; penanganan pengaduan masyarakat; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008;
 - 8) **Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultural set*)**, meliputi birokrasi yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja;
- b. Pemantapan kondusivitas wilayah terhadap potensi gangguan keamanan dan antisipasi pasca pelaksanaan Pilkada;
 - c. Penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan aset daerah;
 - d. Pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni;
 - e. Penataan administrasi kependudukan guna peningkatan kualitas penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat;



- f. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah, serta pengembangan jaringan kemitraan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian upaya yaitu :

1. Optimalisasi pungutan PAD;
2. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
5. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
6. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;
7. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
8. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
9. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
10. Meningkatkan kontribusi BUMD;
11. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;



3. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
4. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
6. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
8. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi:

a. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Pegawai, antara lain untuk gaji dan tunjangan;
- 2) Belanja Hibah dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebagai upaya mengurangi kesenjangan fiskal,



pemerataan pembangunan antar wilayah dan dukungan pembangunan infrastruktur strategis;

- 6) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk :

- 1) Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS;
- 2) Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas;
- 3) Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, kontruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan, buku/kepustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
 2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk :



- a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. Pembentukan dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

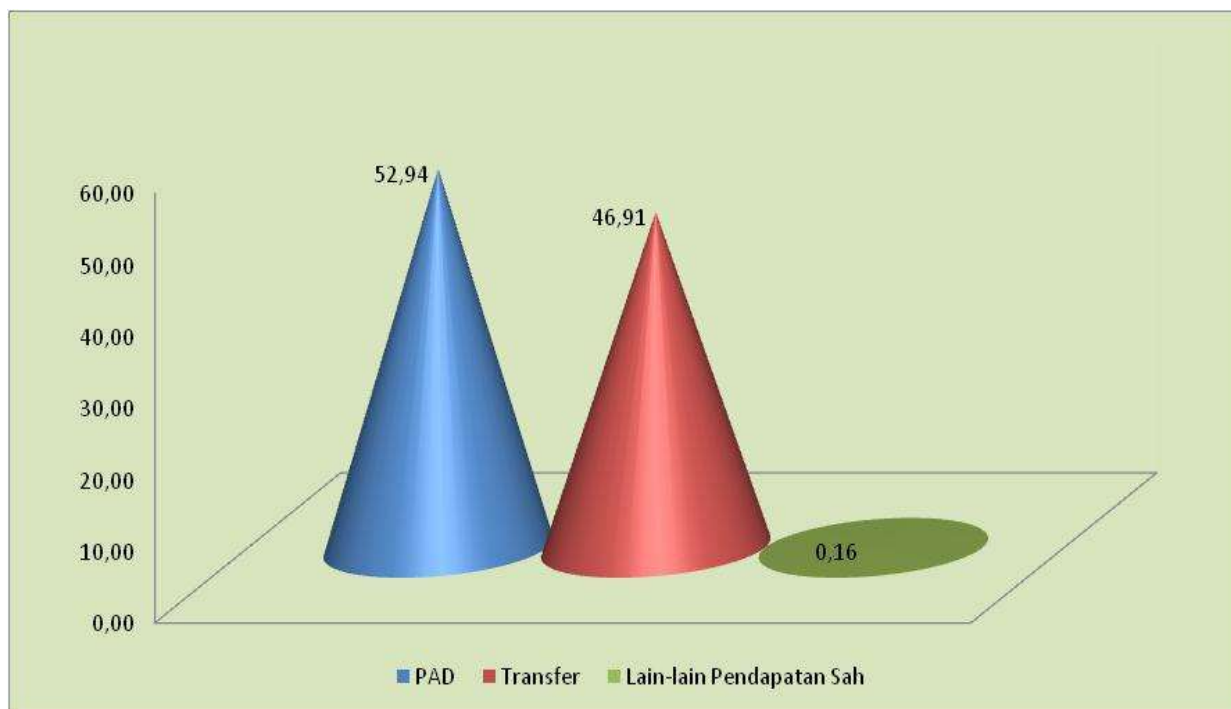
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Provinsi Jawa Tengah TA. 2017 sejumlah Rp23.613.056.128.000,00 terealisasi sejumlah Rp23.703.174.631.507,00 atau 100,38% dari target, mengalami peningkatan sejumlah Rp4.070.597.494.617,00 atau 20,73% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2016 sejumlah Rp19.632.577.136.889,70.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD sebesar Rp12.547.513.389.400,00 (52,94% dari total pendapatan); Pendapatan transfer sebesar Rp11.117.984.434.093,00 (46,91% dari total pendapatan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp37.676.808.014,00 (0,16% dari total pendapatan), sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1

GAMBAR 3.1
PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017 (DALAM %)



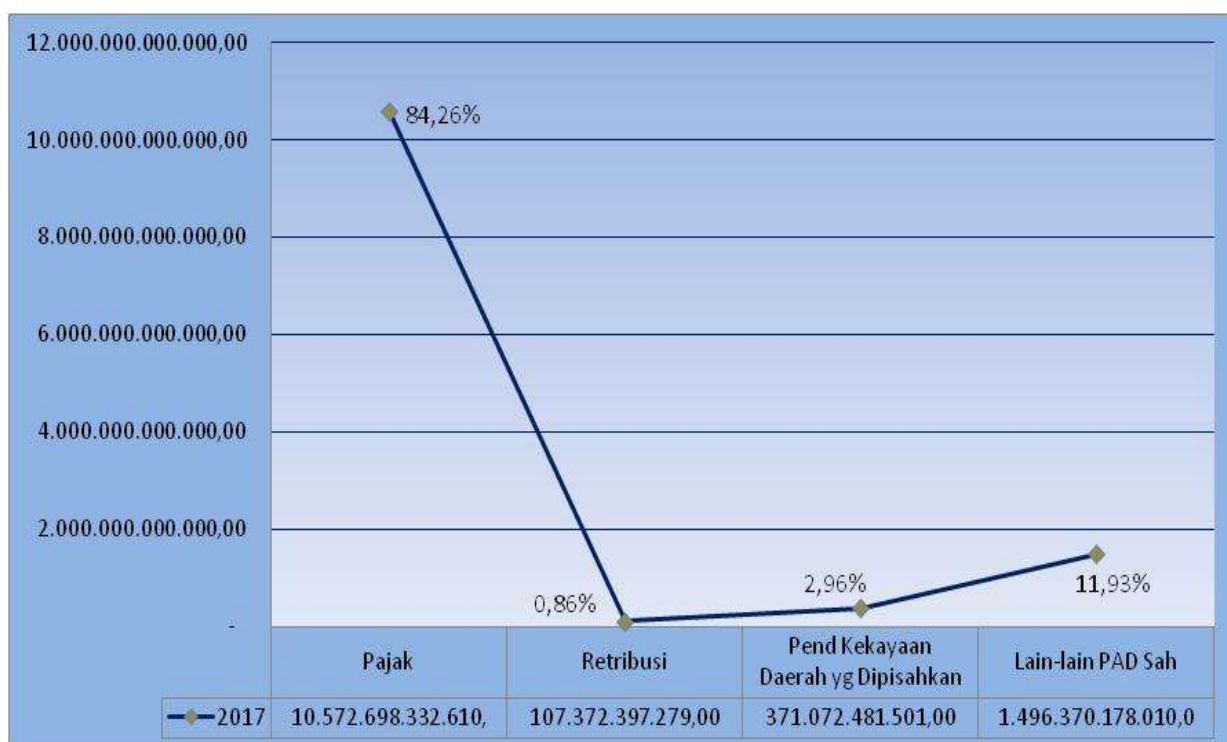
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017



Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 sejumlah Rp12.126.880.430.000,00 terealisasi sejumlah Rp12.547.513.389.400,00 (103,47%). Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp11.541.029.720.309,70 maka realisasi PAD mengalami kenaikan sejumlah Rp1.006.483.669.090,00 atau 8,72%.

Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp10.572.698.332.610,00 (84,26%); Pendapatan Retribusi Daerah Rp107.372.397.279,00 (0,86%); Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp371.072.481.501,00 (2,96%) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.496.370.178.010,00 (11,93%) sebagaimana Gambar 3.2 berikut :

GAMBAR 3.2
PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017 (DALAM %)

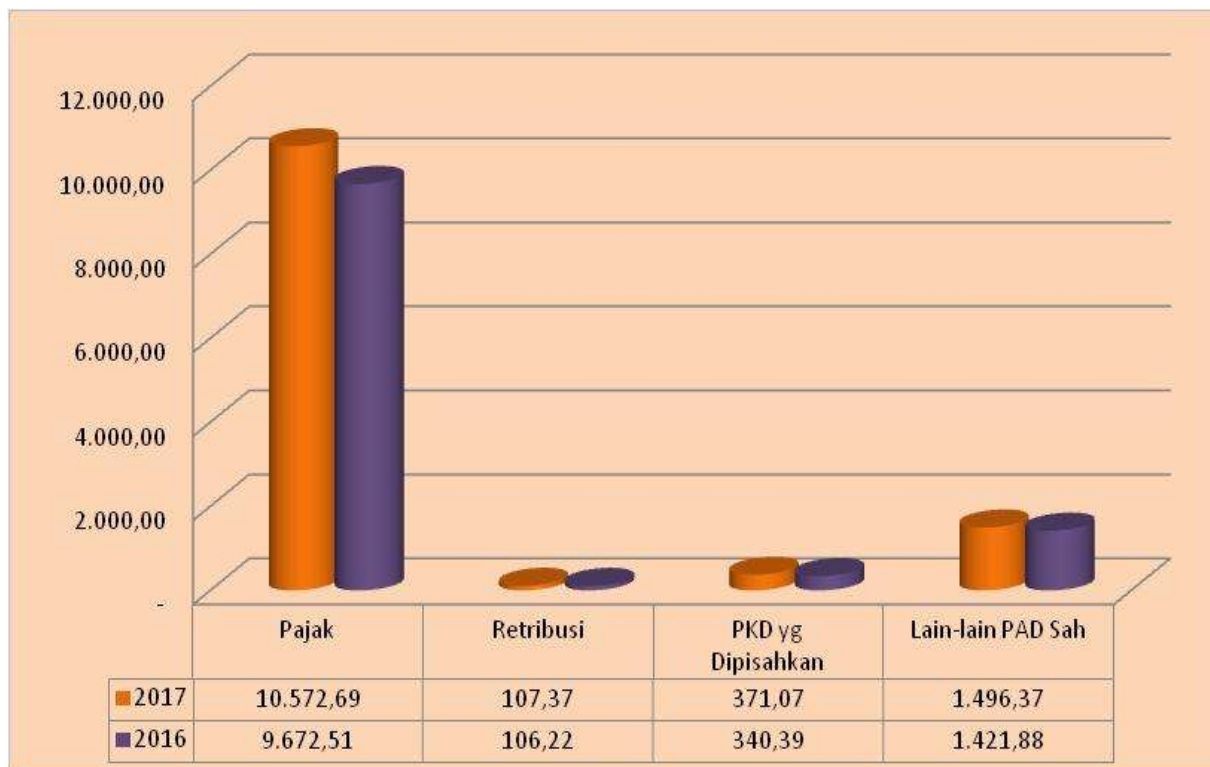


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2017 dan perbandingannya dengan tahun anggaran 2016 ditunjukkan dalam Gambar 3.3 berikut :



GAMBAR 3.3
PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017 (MILYAR RUPIAH)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2017 maupun 2016 sumber utama PAD adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp900.180.143.186,00 atau (9,31%) dibandingkan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp9.672.518.189.424,00. Target Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp10.216.892.000.000,00, terealisasi sebesar Rp10.572.698.332.610,00 (103,48%).

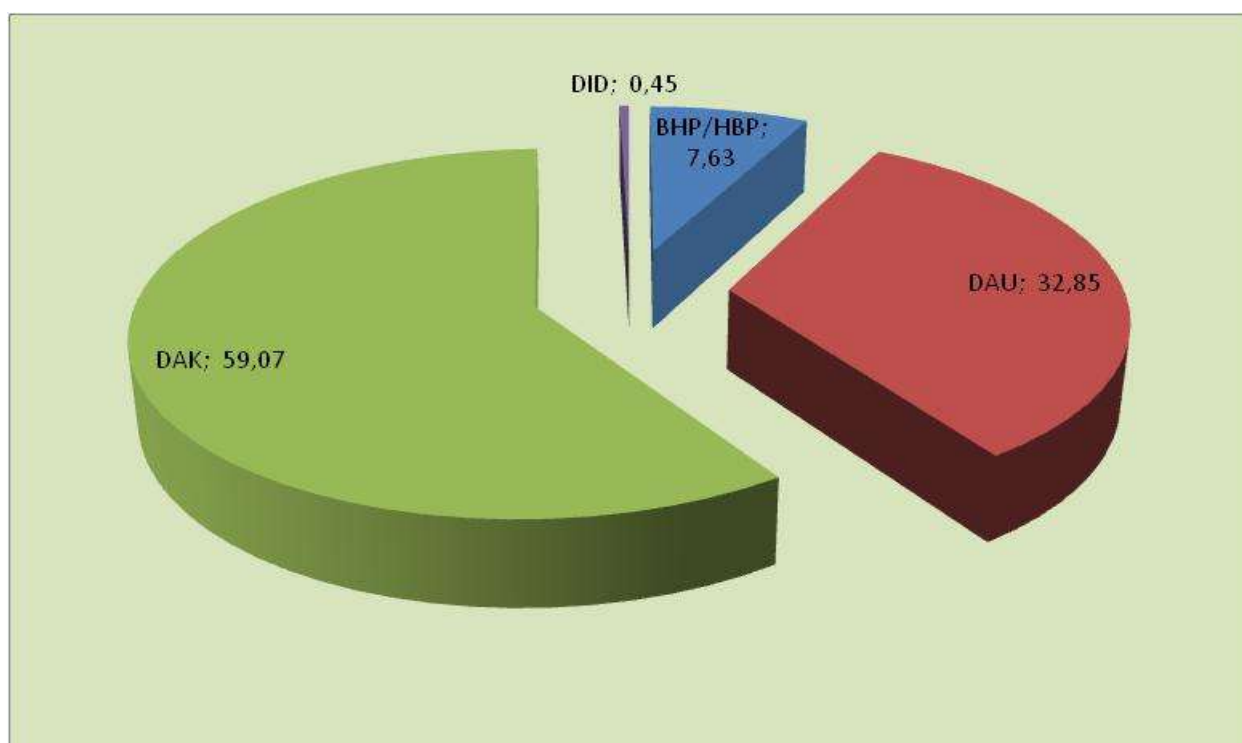
Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp107.372.397.279,00 (105,67%) dari target sebesar Rp101.608.925.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.147.338.713,00 (1,08%) dibandingkan tahun anggaran 2016.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2017 sebesar Rp371.072.481.501,00 (99,96%) dari target sebesar Rp371.233.579.000,00, atau bila dibandingkan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp30.675.370.134,00 (9,01%).



Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2017 dibandingkan tahun anggaran 2016 juga mengalami peningkatan sebesar Rp74.480.817.057,00 (5,24%), dengan realisasi sebesar Rp1.496.370.178.010,00 (104,12%) dari target sebesar Rp1.437.145.926.000,00.

GAMBAR 3.4
PROPORSI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 (DALAM %)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

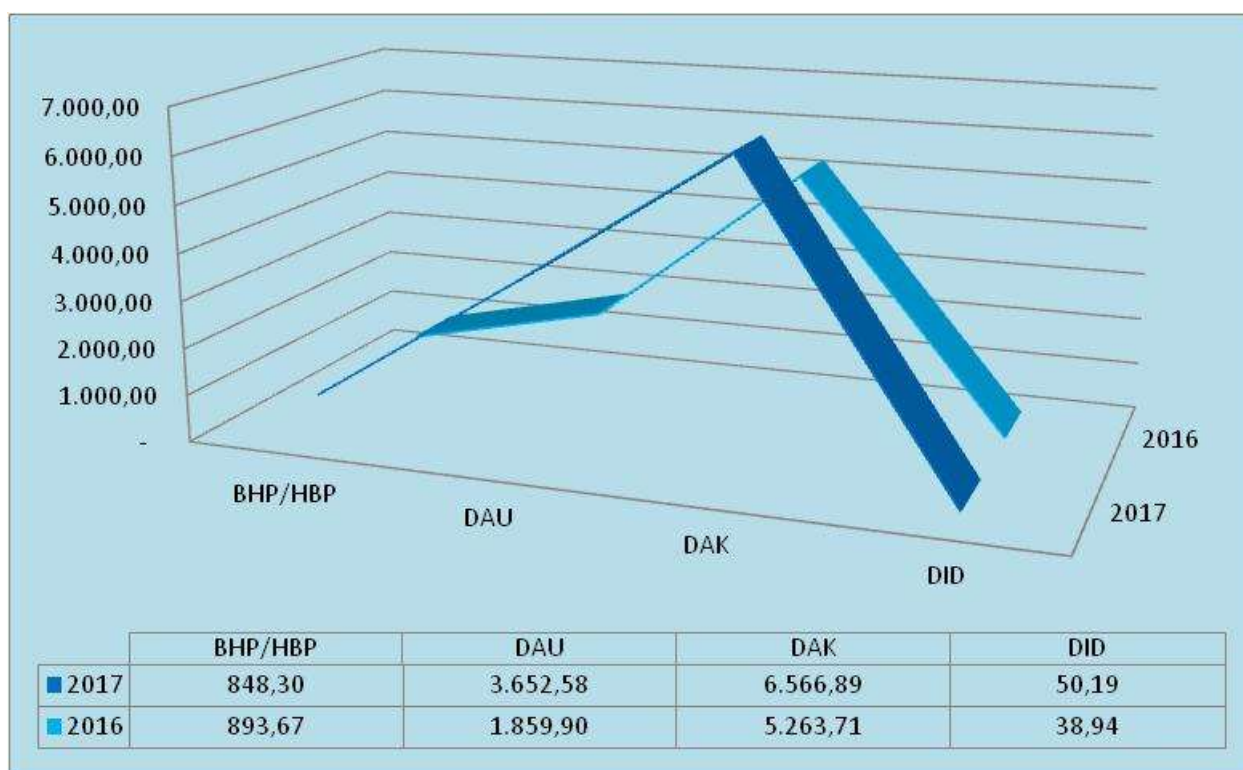
Tahun anggaran 2017, target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp11.399.678.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.067.786.491.093,00 (97,09%), target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp50.197.943.000,00 realisasinya sebesar Rp50.197.943.000,00 (100%).

Sebagaimana ditunjukkan gambar 3.4., proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2017, yakni sebagai berikut: Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp848.309.911.393,00 (7,63%); Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.652.586.431.000,00 (32,85%); Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.566.890.148.700,00 (59,07%); dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp50.197.943.000,00 (0,45%).



Secara keseluruhan pencapaian kinerja Transfer dari Pemerintah Pusat selama tahun anggaran 2017 dan perbandingannya dengan tahun anggaran 2016 ditunjukkan dalam Gambar 3.5 berikut :

GAMBAR 3.5
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 (MILYAR RUPIAH)
TAHUN ANGGARAN 2016 (MILYAR RUPIAH)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak bersumber dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2017 sebesar Rp848.309.911.393,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp893.673.221.918,00, mengalami penurunan sebesar Rp45.363.310.525,00 (5,08%);

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.859.907.223.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.792.679.208.000,00 (96,39%);

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.566.890.148.700,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.263.717.151.065,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.303.172.997.635 (24,76%);



Realisasi Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp50.197.943.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp38.947.186.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.250.757.000 (28,89%);

Tahun anggaran 2017, target komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp36.299.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.676.808.014,00 (103,79%) lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp35.302.634.597,00. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp36.938.923.844,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dr Pemda Lainnya sebesar Rp737.884.170.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain :

1. Perhitungan terhadap proyeksi pendapatan sebagian besar masih mendasarkan pada *trend* penerimaan tahun-tahun lalu dan kurangnya ketersediaan data inventarisasi potensi pendapatan yang ada pada masing-masing pengelola pendapatan.
2. Pelaporan pendapatan masih bersifat parsial pada masing-masing entitas penanggungjawab administrasi pendapatan.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.
4. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan yang mudah, cepat, murah dan akuntabel.
5. Perencanaan pendapatan pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam jangka menengah belum mencerminkan pengembangan rencana bisnis secara simultan.
6. Kecenderungan menurunnya jumlah pasien-pasien psikotik pada RSJ Provinsi dikarenakan penyesuaian regulasi BPJS untuk pembiayaan pasien psikotik diarahkan/dirujuk ke RSUD Kabupaten/Kota yang juga mempunyai poli psikotik dan belum tersedianya layanan unggulan pada RSUD Provinsi.
7. Aset *idle* tanpa didukung dengan pengamanan fisik dan administrasi yang memadai sehingga berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan serta menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan aset.

Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

1. Penyempurnaan mekanisme perencanaan pendapatan melalui penyusunan metodologi akurasi proyeksi pendapatan dengan memperhitungkan dinamika variabel-variabel ekonomi makro tingkat regional sehingga potensi penerimaan pendapatan dapat diproyeksikan sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada.



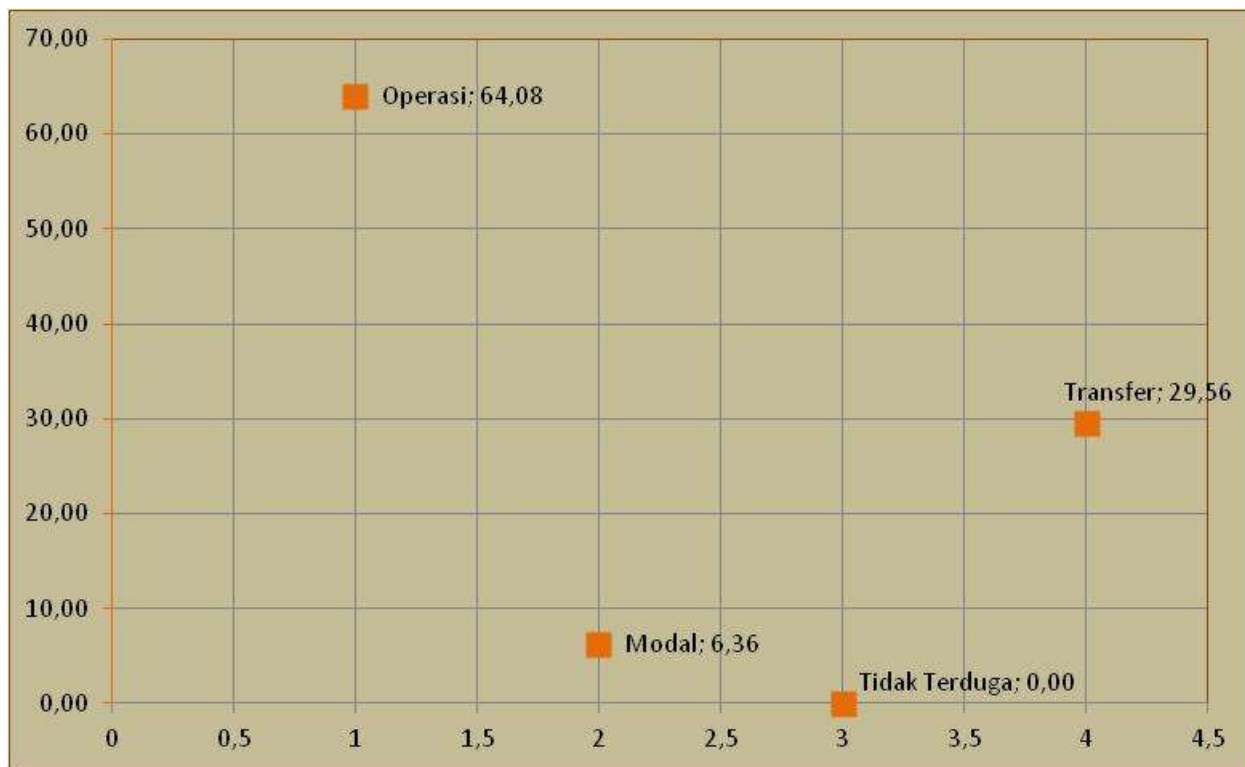
2. Pengembangan sistem pelaporan pendapatan terintegrasi dalam rangka pencapaian administrasi pendapatan yang cepat dan akurat.
3. Melakukan penagihan tunggakan pajak dengan metode *door to door*, menggelar razia kendaraan bermotor bersama kepolisian serta memberikan insentif perpajakan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak.
4. Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan pembayaran elektronik (*e-samsat*) SAKPOLE berbasis android sehingga mudah diakses masyarakat tanpa batasan waktu dan tempat (dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja), menambah jumlah titik layanan serta memperluas mobilitas pelayanan melalui mobil *samsat* keliling dan *samsat* siaga sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat..
5. Mendorong pengelola pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan untuk membuat *Grand Design* pendapatan termasuk memperkirakan besarnya investasi yang direncanakan untuk meningkatkan nilai aset dan pendapatannya melalui kegiatan desk pendapatan.
6. Mendorong lebih pasti peningkatan fungsi RSJ dari yang bersifat spesialis (hanya menangani pasien psikotik) menjadi generalis (mengembangkan pelayanan pasien umum) serta pembentukan unit-unit layanan unggulan sehingga bisa menjadi ciri khas BLUD RSUD Provinsi secara lebih terprogram dengan peningkatan sumber daya medis dan sarana prasarana.
7. Inventarisasi ulang atas aset tetap secara komprehensif dengan melibatkan tim appraisal independen guna pengamanan dan perolehan penghitungan nilai ekonomis aset, koordinasi lintas SKPD dalam upaya pengamanan dan pemanfaatan aset mangkrak, mempromosikan aset melalui spanduk, media massa dan Sistem Informasi Komprehensif Bidang Aset Daerah (Sikom-BAD).

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.6 di bawah ini, target anggaran belanja dan transfer tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp23.955.179.003.000,00 realisasinya mencapai 95,53% atau sebesar Rp22.884.713.018.754,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp14.664.990.098.901,00 atau 64,08%, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.454.598.084.464,00 atau 6,36%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.130.950.000,00 atau 0,00% dan Belanja Transfer sebesar Rp6.763.993.885.389,00 atau 29,56%



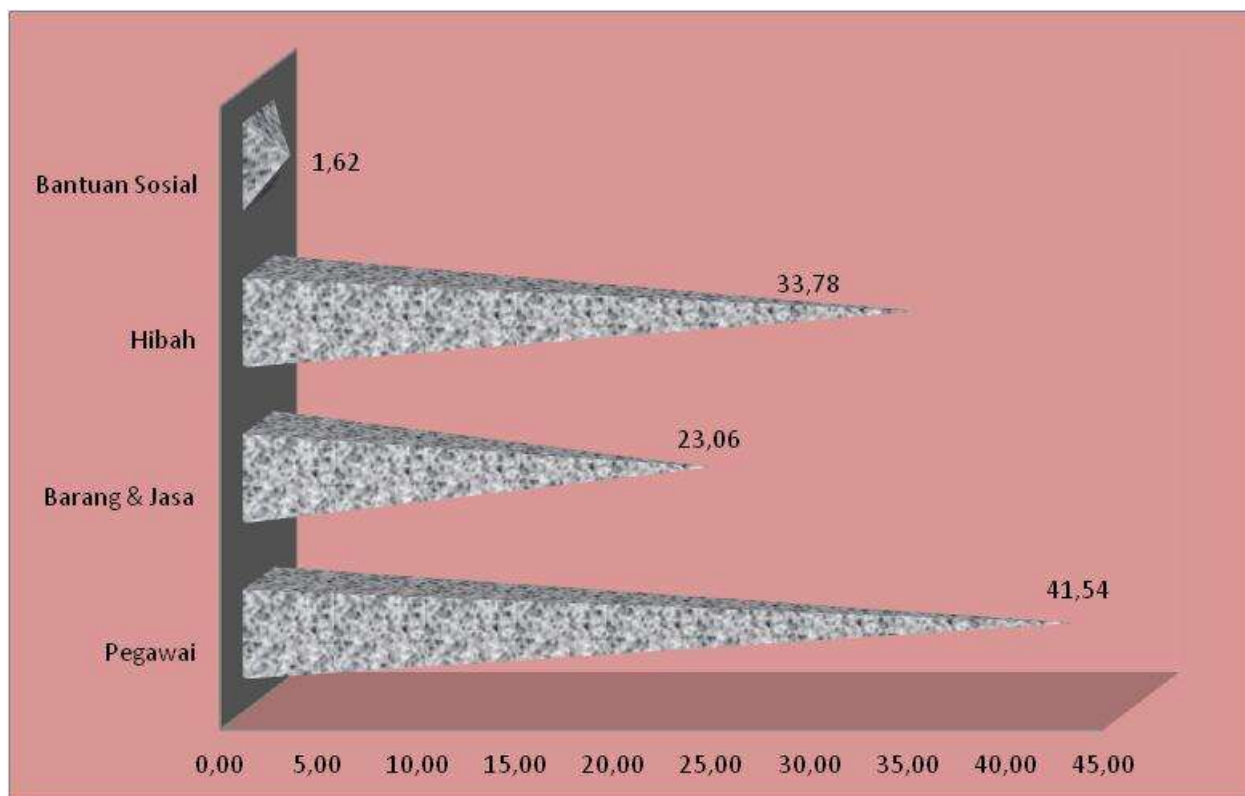
GAMBAR 3.6
PROPORSI BELANJA DAN TRANSFER
TAHUN ANGGARAN 2017 (DALAM %)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2017 terdiri dari belanja pegawai Rp6.092.077.750.517,00 atau 41,54%, belanja barang sebesar Rp3.381.260.846.633,00 atau 23,06%, belanja hibah Rp4.953.383.281.751,00 atau 33,78%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp238.268.220.000,00 atau 1,62% seperti ditunjukkan dalam gambar 3.7.berikut :

GAMBAR 3.7
PROPORSI BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2017 (DALAM %)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Perbandingan kinerja belanja operasi tahun anggaran 2017 dan 2016 ditunjukkan dalam grafik 3.8 di bawah. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.092.077.750.517,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.567.876.390.675,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.524.201.359.842,00 (137,24%);

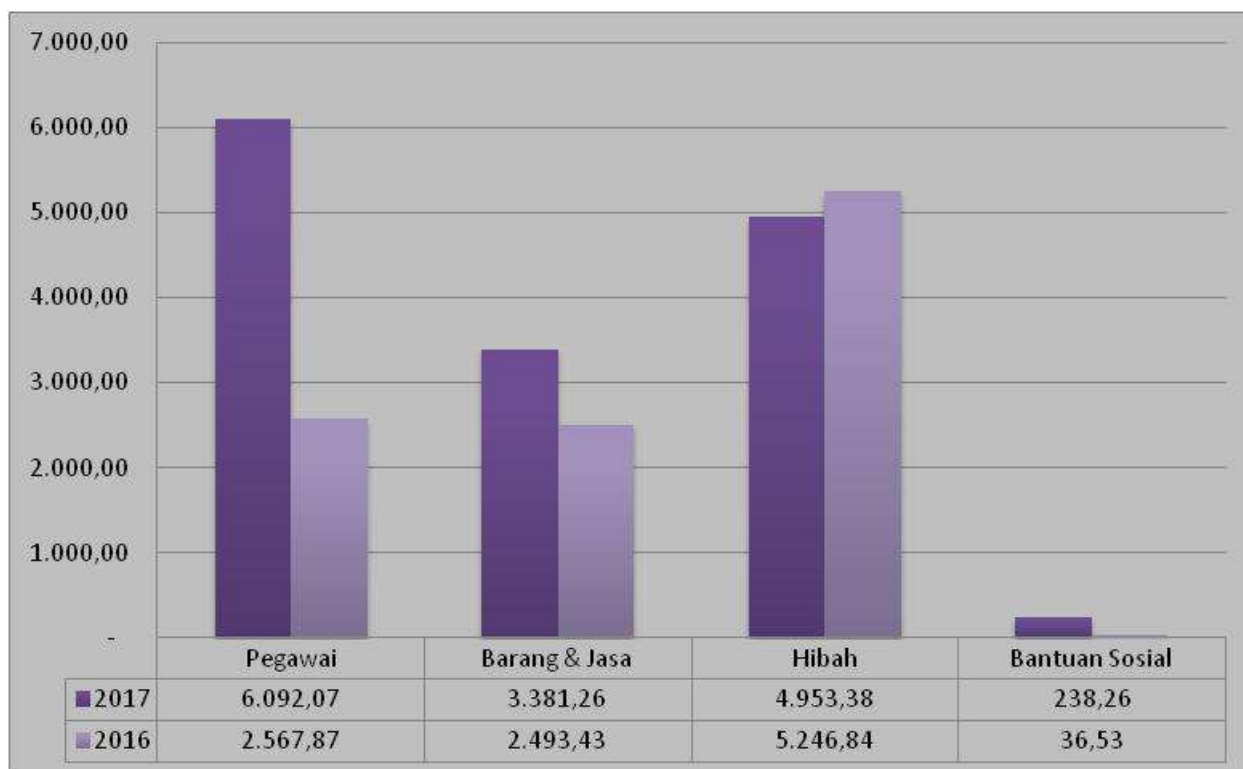
Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.381.260.846.633,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.493.431.626.164,00 mengalami kenaikan sebesar Rp887.829.220.469,00 (35,61%);

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.953.383.281.751,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp5.246.848.624.464,00 mengalami penurunan sebesar Rp293.465.342.713,00 (-5,59%);



Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2017 sebesar Rp238.268.220.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp36.531.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp201.736.720.000,00 (552,23%);

GAMBAR 3.8
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2017 (MILYAR RUPIAH)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Pada komponen belanja modal tahun anggaran 2017, proporsi belanja modal tanah sebesar Rp21.650.743.424,00 (1,49%), belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp321.441.003.601,00 (22,10%), belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp308.934.759.265,00 (21,24%), belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp799.019.206.624,00 (54,93%), dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.794.491.050,00 (0,19%) dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp757.880.500,00 (0,05%), sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 3.9.



GAMBAR 3.9
PROPORSI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2017 (DALAM %)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Perkembangan realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2016 ditunjukkan dalam grafik 3.10. Secara keseluruhan, belanja modal tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.361.080.095.986,00 (-48,34%) dari sebesar Rp2.815.678.180.450,00 tahun 2016 menjadi Rp1.454.598.084.464,00 pada tahun 2017.

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2017 sebesar Rp21.650.743.424,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp9.126.628.025,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.524.115.399,00 (137,23%);

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2017 sebesar Rp321.441.003.601,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp321.146.639.091,00 mengalami kenaikan sebesar Rp294.364.510,00 (0,09%);

Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2017 sebesar Rp308.934.759.265,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp245.973.084.291,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.961.674.974,00 (25,60%);

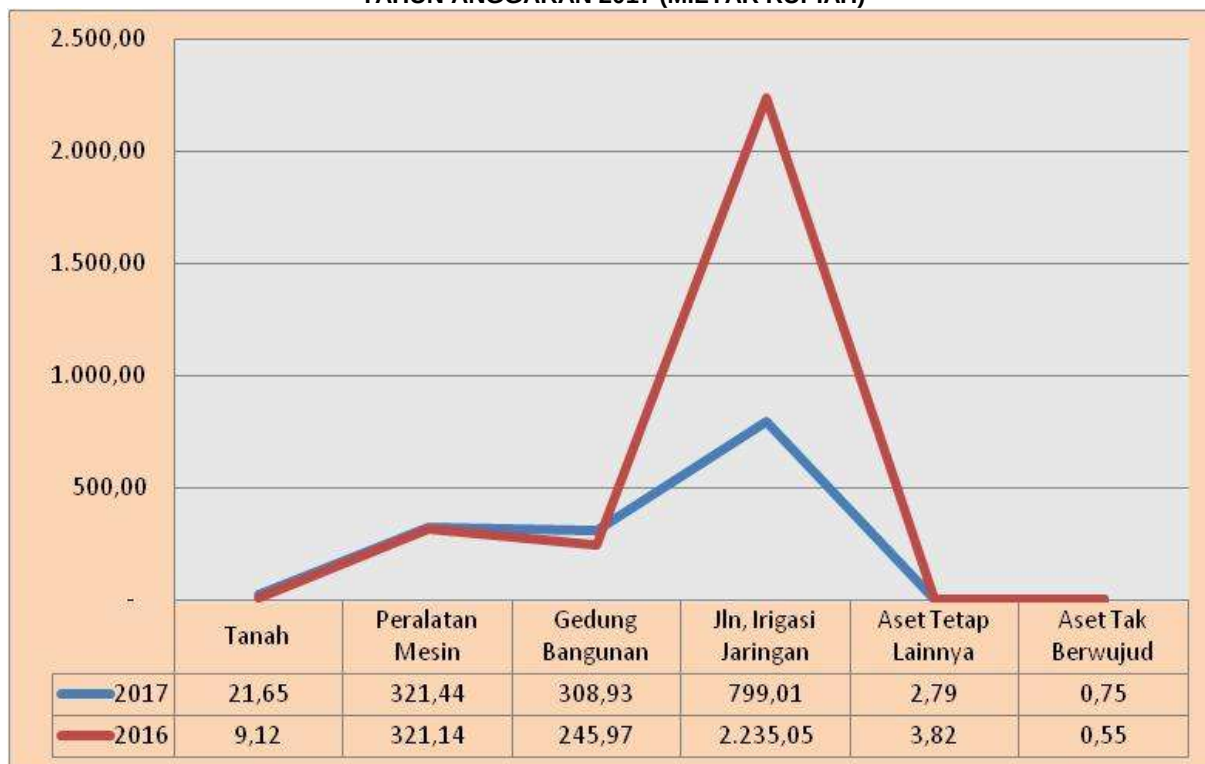


Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2017 sebesar Rp799.019.206.624,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.235.056.391.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.436.037.185.034,00 (-64,25%);

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.794.491.050,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp3.821.647.385,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.027.156.335,00 (-26,88%);

Realisasi belanja modal aset tak berwujud tahun anggaran 2017 sebesar Rp757.880.500,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp553.790.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp204.090.500,00 (36,85%).

GAMBAR 3.10
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2017 (MILYAR RUPIAH)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya pada UPT/Balai SOTK baru terhadap sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi.
2. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kabupaten/kota.



3. Penyusunan SOTK baru sebagai konsekuensi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan anggaran unit kerja baru.
4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan barang khususnya pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB.

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

1. Melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi serta menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai di tingkat UPT/Balai dan PPK-SKPD.
2. Melakukan monitoring untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota.
3. Mengoptimalkan pembiayaan dari SKPD induk serta diakomodir pada perencanaan anggaran tahun 2018.
4. Menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah dan sosialisasi pelaporan keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp646.122.875.000,00 terealisasi sejumlah Rp646.575.639.754,00 atau 100,07%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp228.655.075.503,00 atau 54,71% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA. 2016 sejumlah Rp417.920.564.252,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp304.000.000.000,00 terealisasi Rp304.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mengalami kenaikan Rp254.000.000.000,00 atau 508,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 sejumlah Rp50.000.000.000,00.



1. URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.1.399.453.324.000,00 realisasi sebesar Rp 1.212.803.495.356,00 atau 86,66% yang terdiri dari 11 program dan 190 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	25.012.398.000	23.311.299.439		93,20
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Pendidikan	200.504.000	116.778.430	100	58,24
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	10.875.000	10.875.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	18.750.000	18.750.000	100	100,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	13.725.000	13.725.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.000.000	679.000	100	13,58
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	11.250.000	9.074.500	100	80,66
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Taman Budaya Jawa Tengah	15.000.000	14.983.055	100	99,89
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Pendidikan	2.066.000.000	1.873.936.345	100	90,70
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	765.000.000	630.829.077	100	82,46
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	785.000.000	752.068.312	100	95,80



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	225.000.000	131.037.934	100	58,24
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	112.500.000	61.414.506	100	54,59
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	456.000.000	357.082.258	100	78,31
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Taman Budaya Jawa Tengah	217.000.000	198.424.120	100	91,44
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan	201.750.000	52.463.000	100	26,00
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	125.000.000	125.000.000	100	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	12.575.000	2.500.000	100	19,88
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	15.000.000	13.050.000	100	87,00
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Taman Budaya Jawa Tengah	15.000.000	15.000.000	100	100,00
20	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan	400.000.000	379.408.000	100	94,85
21	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	14.850.000	14.787.000	100	99,58
22	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	35.000.000	34.782.000	100	99,38
23	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Taman Budaya Jawa Tengah	30.500.000	30.332.000	100	99,45
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah	45.000.000	44.790.000	100	99,53



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
	Dinas Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	180.000.000	179.400.000	100	99,67
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Taman Budaya Jawa Tengah	198.000.000	196.800.000	100	99,39
27	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	1.035.000.000	1.033.531.400	100	99,86
28	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	45.000.000	45.000.000	100	100,00
29	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	93.750.000	93.750.000	100	100,00
30	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	18.087.000	17.928.000	100	99,12
31	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	20.250.000	19.433.000	100	95,97
32	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	21.000.000	21.000.000	100	100,00
33	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	18.750.000	17.536.500	100	93,53
34	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Pendidikan	784.000.000	748.327.410	100	95,45
35	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	86.250.000	86.250.000	100	100,00
36	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	75.000.000	75.000.000	100	100,00
37	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	47.723.000	47.623.000	100	99,79
38	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	35.100.000	13.641.200	100	38,86



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
39	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	30.000.000	30.000.000	100	100,00
40	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Taman Budaya Jawa Tengah	15.375.000	15.235.000	100	99,09
41	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	214.800.000	207.722.050	100	96,70
42	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	48.750.000	48.750.000	100	100,00
43	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	37.500.000	37.500.000	100	100,00
44	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	13.814.000	13.814.000	100	100,00
45	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8.345.000	8.338.000	100	99,92
46	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	32.000.000	32.000.000	100	100,00
47	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	30.500.000	30.499.950	100	100,00
48	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	337.500.000	336.370.000	100	99,67
49	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pendidikan	369.000.000	359.686.950	100	97,48
50	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Pendidikan	51.750.000	51.750.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
	Kejuruan				
51	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	56.250.000	51.323.450	100	91,24
52	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	22.801.000	22.801.000	100	100,00
53	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.625.000	5.610.000	100	99,73
54	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	22.500.000	22.500.000	100	100,00
55	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Taman Budaya Jawa Tengah	15.000.000	14.994.000	100	99,96
56	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Pendidikan	120.000.000	96.307.000	100	80,26
57	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	26.250.000	26.250.000	100	100,00
58	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	45.000.000	45.000.000	100	100,00
59	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	4.500.000	4.500.000	100	100,00
60	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.375.000	3.345.000	100	99,11
61	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	9.375.000	7.825.000	100	83,47



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
62	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Taman Budaya Jawa Tengah	4.500.000	4.500.000	100	100,00
63	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Pendidikan	553.500.000	480.583.500	100	86,83
64	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	48.600.000	48.600.000	100	100,00
65	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	37.500.000	37.500.000	100	100,00
66	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	12.960.000	12.960.000	100	100,00
67	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	33.750.000	14.740.000	100	43,67
68	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	22.500.000	22.495.000	100	99,98
69	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Taman Budaya Jawa Tengah	22.500.000	22.500.000	100	100,00
70	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan	1.085.686.000	1.071.335.592	100	98,68
71	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	75.000.000	73.331.900	100	97,78
72	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	56.250.000	55.818.550	100	99,23
73	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	45.000.000	44.989.000	100	99,98
74	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	202.500.000	141.035.750	100	69,65



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
	Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata				
75	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	48.750.000	45.642.900	100	93,63
76	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Taman Budaya Jawa Tengah	65.152.000	64.419.000	100	98,87
77	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan	5.314.475.000	5.009.812.500	100	94,27
78	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	162.000.000	159.000.000	100	98,15
79	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	179.291.000	156.736.000	100	87,42
80	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	266.257.000	259.731.000	100	97,55
81	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Taman Budaya Jawa Tengah	227.820.000	209.700.000	100	92,05
82	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Unit Utama	6.574.208.000	6.406.757.300	100	97,45
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.506.942.000	8.233.120.136		96,75
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	479.403.000	451.952.000	100	94,27
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pendidikan	55.125.000	37.275.000	100	67,62
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	375.000.000	372.150.000	100	99,24
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	262.500.000	261.359.000	100	99,57
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	225.000.000	224.999.400	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
6	Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	150.000.000	149.716.000	100	99,81
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	50.000.000	48.334.000	100	96,67
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	500.000.000	495.076.500	100	99,02
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	450.000.000	438.500.000	100	97,44
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan	262.500.000	244.915.000	100	93,30
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	29.043.000	29.043.000	100	100,00
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	47.625.000	24.277.436	100	50,98
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	6.000.000	6.000.000	100	100,00
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Taman Budaya Jawa Tengah	20.625.000	20.625.000	100	100,00
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	225.000.000	224.797.000	100	99,91
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	75.000.000	75.000.000	100	100,00
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi	75.000.000	75.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
18	Pendidikan Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	150.000.000	149.940.000	100	99,96
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.850.000	5.850.000	100	100,00
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	35.000.000	34.995.900	100	99,99
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	27.000.000	27.000.000	100	100,00
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	262.500.000	257.018.000	100	97,91
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	112.500.000	112.500.000	100	100,00
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	112.500.000	111.694.000	100	99,28
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	7.917.000	6.950.000	100	87,79
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	33.000.000	33.000.000	100	100,00
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	38.000.000	38.000.000	100	100,00
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.375.000	3.375.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	11.250.000	11.250.000	100	100,00
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Taman Budaya Jawa Tengah	22.500.000	22.500.000	100	100,00
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	75.000.000	75.000.000	100	100,00
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	11.250.000	8.450.000	100	75,11
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	26.250.000	26.250.000	100	100,00
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Taman Budaya Jawa Tengah	22.500.000	22.500.000	100	100,00
35	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.500.000	1.500.000	100	100,00
36	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	3.750.000	3.750.000	100	100,00
37	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Taman Budaya Jawa Tengah	2.812.000	2.812.000	100	100,00
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Pendidikan	75.000.000	75.000.000	100	100,00
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Pendidikan	11.250.000	11.250.000	100	100,00
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	80.000.000	79.525.000	100	99,41
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Taman Budaya Jawa Tengah	80.000.000	80.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	262.500.000	262.500.000	100	100,00
43	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	1.617.082.000	1.528.149.900	100	94,50
44	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	225.000.000	220.575.000	100	98,03
45	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	616.335.000	613.216.000	100	99,49
46	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	187.500.000	186.823.000	100	99,64
47	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	300.000.000	298.837.000	100	99,61
48	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	300.000.000	278.390.000	100	92,80
49	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	500.000.000	465.500.000	100	93,10
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.715.241.000	1.345.530.800		78,45
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	15.750.000	6.000.000	100	38,10
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Pendidikan	112.500.000	71.255.500	100	63,34
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dinas Pendidikan	150.000.000	147.686.000	100	98,46
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Pendidikan	675.000.000	374.129.300	100	55,43
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Balai Pengembangan Pendidikan	112.500.000	111.760.000	100	99,34



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
6	Kejuruan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebendarawanan	649.491.000	634.700.000	100	97,72
4	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1.313.750.238.000	1.135.621.979.346		84,31
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah	489.463.000	489.463.000	100	100,00
2	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMA	81.193.760.000	61.734.677.500	100	76,03
3	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK	129.433.246.000	59.858.642.151	100	46,25
4	Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMA	86.692.022.000	63.890.487.578	74,27	73,70
5	Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	106.188.495.000	73.026.412.312	69,62	68,77
6	Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA	205.000.000	202.000.000	100	98,54
7	Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK	335.000.000	324.580.000	100	96,89
8	Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMA	1.262.600.000	1.253.786.600	100	99,30
9	Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK	3.324.610.000	3.314.073.500	100	99,68
10	Kegiatan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah	124.850.202.000	117.970.820.947	100	94,49
11	Kegiatan BOS Pendidikan Menengah (Pusat)	779.775.840.000	753.557.035.758	100	98,70
5	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS	11.653.854.000	11.360.199.830		97,48
1	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus	2.209.058.000	2.127.879.000	100	96,33
2	Kegiatan Pemenuhan Sarpras Pendidikan Khusus	149.400.000	121.862.000	100	81,57
3	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Khusus	316.300.000	306.302.000	100	96,84
4	Kegiatan Koordinasi pengembangan kurikulum Pendidikan Khusus	213.235.000	212.985.000	100	99,88
5	Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Khusus	100.000.000	98.648.802	100	98,65
6	Kegiatan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus	8.665.861.000	8.492.523.028	100	98,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.500.000.000	3.049.141.500		87,12
1	Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik Dikmen	475.000.000	443.179.000	100	93,30
2	Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Pendidik Dikmen	580.000.000	556.652.000	100	95,97
3	Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen	300.000.000	260.262.000	100	86,75
4	Kegiatan Penghargaan. Perlindungan dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen	850.000.000	640.050.000	100	75,30
5	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen	450.000.000	419.544.500	100	93,23
6	Kegiatan Penghargaan. Perlindungan dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen	475.000.000	359.866.000	100	75,76
7	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Kejuruan	370.000.000	369.588.000	100	99,89
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	10.597.352.000	8.441.327.532		79,66
1	Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan	500.000.000	233.538.000	55,48	46,71
2	Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan	650.000.000	477.851.600	100	73,52
3	Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik	4.239.393.000	3.978.833.500	100	93,85
4	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	1.000.000.000	649.681.682	100	64,97
5	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah(US/M) dan Ujian Nasional (UN)	2.832.569.000	1.948.563.850	100	68,79
6	Kegiatan Pemetaan Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan	1.000.000.000	857.884.000	100	85,79
7	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi LNS/Lembaga Non Struktural (Dewan Pendidikan dan BAP-S/M)	375.390.000	294.974.900	100	78,58



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
8	PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN	4.724.939.000	3.984.380.950		84,33
1	Kegiatan Koordinasi Pendidikan Untuk Semua	200.000.000	161.258.000	100	80,63
2	Kegiatan Pembinaan Nasionalisme Pendidikan	1.000.000.000	850.230.750	100	85,02
3	Kegiatan Koordinasi Publikasi Kinerja Pendidikan	800.000.000	714.092.500	100	89,26
4	Kegiatan Pendidikan Mitigasi Bencana Alam	440.524.000	374.842.500	100	85,09
5	Kegiatan Koordinasi Pengembangan PAUD	418.854.000	408.354.000	100	97,49
6	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Dikdas	954.430.000	694.975.700	100	72,82
7	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal	458.929.000	367.830.500	100	80,15
8	Kegiatan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	452.202.000	412.797.000	100	91,29
9	PROGRAM PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	650.000.000	639.030.000		98,31
1	Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan	650.000.000	639.030.000	100	98,31
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN Kesenian dan Cagar Budaya	5.500.000.000	5.024.384.928		91,35
1	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman	1.300.000.000	1.191.127.600	100	91,63
2	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Museum	500.000.000	476.778.500	100	95,36
3	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana TBJT	1.000.000.000	844.458.000	100	84,45
4	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Karya Seni dan Apresiasi Masyarakat di TBJT	1.150.000.000	1.135.829.128	100	98,77
5	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Museum	850.000.000	778.621.900	100	91,60
6	Kegiatan Eksplorasi Sumber Daya Budaya Kawasan Situs/BCB dan Pelestarian	700.000.000	597.569.800	100	85,37



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
11	Warisan Budaya PROGRAM PEMBINAAN TRADISI, Kesenian dan Nilai Budaya	13.842.360.000	11.793.100.895		85,20
1	Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya	897.960.000	879.543.000	100	97,95
2	Kegiatan Pembinaan Kesenian	10.328.400.000	8.468.501.940	89,28	81,99
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	750.000.000	690.009.000	100	92,00
4	Kegiatan Pengkajian dan Pelestarian Budaya Tradisi	750.000.000	719.305.655	100	95,91
5	Kegiatan Koordinasi Bidang Kebudayaan	216.000.000	204.644.500	100	94,74
6	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Antar Museum	400.000.000	381.526.000	100	95,38
7	Kegiatan pengembangan kesenian dan nilai budaya	500.000.000	449.570.800	100	89,91

2. URUSAN KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kesehatan sebesar Rp 1.802.872.716.000,00 realisasi sebesar Rp 1.621.175.937.654,00 atau 89,92% yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yakni

a). DINAS KESEHATAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 176.610.054.000,00 realisasi sebesar Rp 155.006.161.767,00 atau 87,77% yang terdiri dari 12 program dan 251 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	28.636.752.000	25.212.631.216		88,04
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Kesehatan	32.250.000	27.824.710	100	86,28
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laboratorium Kesehatan Semarang	11.250.000	11.250.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	4.900.000	4.899.970	100	100,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	5.600.000	5.216.970	100	93,16



5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	5.250.000	5.183.850	100	98,74
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	5.950.000	5.949.000	100	99,98
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	2.000.000	1.999.880	100	99,99
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	5.100.000	4.935.350	100	96,77
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	5.600.000	4.889.510	100	87,31
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Kesehatan	2.174.792.000	1.888.221.830	100	86,82
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Laboratorium Kesehatan Semarang	570.000.000	520.863.862	100	91,38
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	360.000.000	346.204.936	100	96,17
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	195.000.000	170.017.740	100	87,19
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	166.850.000	99.332.925	100	59,53
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	195.000.000	151.312.116	100	77,60
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	266.500.000	179.862.672	100	67,49
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	355.400.000	322.450.924	100	90,73
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	383.100.000	265.690.929	100	69,35
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Kesehatan	134.250.000	91.864.227	100	68,43
20	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Kesehatan	500.000.000	480.375.000	100	96,08
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Kesehatan	487.960.000	487.936.370	100	100,00
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Laboratorium Kesehatan Semarang	117.000.000	116.827.920	100	99,85



23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	262.500.000	262.464.200	100	99,99
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	225.000.000	212.215.005	100	94,32
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	150.000.000	146.061.000	100	97,37
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	237.500.000	222.049.674	100	93,49
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	225.000.000	214.187.572	100	95,19
28	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	152.400.000	149.564.039	100	98,14
29	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	82.000.000	81.455.000	100	99,34
30	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	293.500.000	293.478.800	100	99,99
31	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Laboratorium Kesehatan Semarang	75.000.000	74.805.570	100	99,74
32	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	112.500.000	112.466.400	100	99,97
33	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	67.500.000	65.971.950	100	97,74
34	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	37.500.000	36.410.000	100	97,09
35	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	63.750.000	63.142.582	100	99,05
36	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	56.250.000	52.132.555	100	92,68
37	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	90.000.000	89.520.400	100	99,47
38	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	63.750.000	63.750.000	100	100,00
39	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Kesehatan	319.000.000	226.074.380	100	70,87
40	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Laboratorium Kesehatan Semarang	80.000.000	80.000.000	100	100,00
41	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	250.000.000	249.953.750	100	99,98
42	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	80.000.000	79.982.800	100	99,98



43	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	80.000.000	78.602.800	100	98,25
44	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	102.340.000	96.206.705	100	94,01
45	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	60.000.000	57.719.450	100	96,20
46	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	120.000.000	111.187.665	100	92,66
47	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	40.000.000	39.999.980	100	100,00
48	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	42.750.000	42.706.000	100	99,90
49	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Laboratorium Kesehatan Semarang	17.100.000	17.057.000	100	99,75
50	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	23.750.000	23.749.800	100	100,00
51	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	14.250.000	13.314.254	100	93,43
52	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	14.250.000	13.926.000	100	97,73
53	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	23.750.000	23.632.400	100	99,50
54	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	14.250.000	14.250.000	100	100,00
55	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	14.250.000	12.414.000	100	87,12
56	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	23.750.000	23.730.000	100	99,92
57	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kesehatan	63.750.000	56.068.250	100	87,95
58	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Laboratorium Kesehatan Semarang	52.500.000	51.546.600	100	98,18
59	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	56.250.000	56.167.000	100	99,85



60	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	75.000.000	58.457.699	100	77,94
61	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	52.500.000	46.173.055	100	87,95
62	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	56.250.000	55.617.500	100	98,88
63	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	56.250.000	53.534.800	100	95,17
64	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	60.000.000	47.370.674	100	78,95
65	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	53.200.000	52.718.000	100	99,09
66	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Kesehatan	19.000.000	18.096.300	100	95,24
67	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Laboratorium Kesehatan Semarang	2.700.000	2.700.000	100	100,00
68	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	3.800.000	3.800.000	100	100,00
69	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	3.800.000	3.681.750	100	96,89
70	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	3.325.000	2.115.000	100	63,61
71	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	3.800.000	3.789.200	100	99,72
72	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	1.615.000	1.613.000	100	99,88
73	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	1.615.000	1.180.000	100	73,07
74	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	4.750.000	3.598.500	100	75,76
75	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Laboratorium Kesehatan Semarang	1.213.785.000	1.200.386.800	100	98,90
76	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	1.603.750.000	1.602.223.560	100	99,90
77	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	1.227.000.000	1.022.371.969	100	83,32



78	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	850.000.000	761.287.116	100	89,56
79	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	1.500.000.000	1.370.182.809	100	91,35
80	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	851.250.000	803.344.285	100	94,37
81	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	2.000.000.000	1.763.189.274	100	88,16
82	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Kesehatan	420.000.000	355.872.281	100	84,73
83	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Laboratorium Kesehatan Semarang	98.680.000	98.673.000	100	99,99
84	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	115.000.000	114.982.200	100	99,98
85	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	575.000.000	240.431.000	100	41,81
86	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	72.470.000	63.317.500	100	87,37
87	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	193.440.000	119.589.000	100	61,82
88	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	70.280.000	65.601.370	100	93,34
89	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	47.500.000	19.932.000	100	41,96
90	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	44.000.000	43.945.000	100	99,88
91	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Kesehatan	695.000.000	642.758.905	100	92,48
92	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Laboratorium Kesehatan Semarang	142.500.000	142.499.626	100	100,00
93	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	225.000.000	211.406.150	100	93,96
94	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	142.500.000	137.431.084	100	96,44
95	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	142.500.000	134.352.717	100	94,28
96	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	123.500.000	115.438.000	100	93,47



97	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	123.500.000	119.352.700	100	96,64
98	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	142.500.000	79.828.500	100	56,02
99	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	178.000.000	175.273.328	100	98,47
100	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Kesehatan	4.165.000.000	3.372.706.240	100	80,98
101	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Laboratorium Kesehatan Semarang	240.000.000	237.436.088	100	98,93
102	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	270.000.000	266.200.000	100	98,59
103	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	270.000.000	152.820.000	100	56,60
104	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	250.000.000	174.000.000	100	69,60
105	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	87.150.000	81.000.000	100	92,94
106	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	150.000.000	150.000.000	100	100,00
107	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	180.000.000	169.228.964	100	94,02
108	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	160.000.000	150.050.000	100	93,78
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.304.425.000	5.708.264.438		90,54
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	410.000.000	392.200.000	100	95,66
2	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	112.500.000	106.117.195	100	94,33
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Kesehatan	150.000.000	107.529.000	100	71,69
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	780.000.000	748.960.400	100	96,02
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Laboratorium Kesehatan Semarang	270.000.000	268.740.000	100	99,53



6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	297.500.000	297.499.300	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	50.000.000	49.592.070	100	99,18
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	225.000.000	188.052.850	100	83,58
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	297.500.000	295.655.580	100	99,38
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	45.000.000	43.320.900	100	96,27
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	45.000.000	44.969.900	100	99,93
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	100.000.000	99.709.500	100	99,71
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Kesehatan	261.438.000	259.269.231	100	99,17
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Laboratorium Kesehatan Semarang	84.000.000	83.455.279	100	99,35
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	70.000.000	68.637.350	100	98,05
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	37.500.000	37.019.474	100	98,72
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	37.500.000	36.994.475	100	98,65
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	71.500.000	66.346.149	100	92,79
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	38.062.000	36.288.575	100	95,34
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	37.500.000	30.599.703	100	81,60
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	37.500.000	36.944.341	100	98,52
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	150.000.000	146.402.500	100	97,60



23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	56.250.000	56.249.050	100	100,00
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	25.000.000	20.968.250	100	83,87
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	37.500.000	36.858.000	100	98,29
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	37.500.000	15.798.000	100	42,13
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	37.500.000	36.042.600	100	96,11
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	18.750.000	14.544.880	100	77,57
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	30.000.000	30.000.000	100	100,00
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	189.500.000	155.929.000	100	82,28
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Laboratorium Kesehatan Semarang	37.875.000	37.175.000	100	98,15
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	37.500.000	37.496.584	100	99,99
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	37.500.000	35.964.660	100	95,91
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	37.500.000	35.964.660	100	95,91
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	22.500.000	22.499.500	100	100,00
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kesehatan	32.250.000	31.687.000	100	98,25
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Laboratorium Kesehatan Semarang	3.750.000	3.750.000	100	100,00
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	9.100.000	9.100.000	100	100,00



39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	10.500.000	9.990.000	100	95,14
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	3.750.000	3.750.000	100	100,00
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	9.000.000	7.430.000	100	82,56
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	7.500.000	3.092.000	100	41,23
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	6.000.000	1.510.000	100	25,17
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	3.000.000	3.000.000	100	100,00
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kesehatan	86.250.000	63.038.500	100	73,09
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Laboratorium Kesehatan Semarang	48.750.000	48.406.000	100	99,29
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	45.000.000	44.812.876	100	99,58
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	37.500.000	34.195.075	100	91,19
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	30.000.000	29.830.000	100	99,43
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	30.000.000	22.439.650	100	74,80
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	22.500.000	19.722.000	100	87,65
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	37.500.000	32.373.500	100	86,33
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	37.500.000	37.365.000	100	99,64
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Laboratorium Kesehatan Semarang	225.000.000	144.827.200	100	64,37
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	117.041.000	117.038.550	100	100,00



56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	67.500.000	62.445.800	100	92,51
57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	58.500.000	55.867.046	100	95,50
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	112.500.000	72.665.552	100	64,59
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	48.750.000	25.570.000	100	52,45
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	75.000.000	49.385.970	100	65,85
61	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	5.000.000	5.000.000	100	100,00
62	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Kesehatan	30.000.000	29.943.100	100	99,81
63	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Sekretariat Dinas Kesehatan	52.500.000	52.220.000	100	99,47
64	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Laboratorium Kesehatan Semarang	18.750.000	18.750.000	100	100,00
65	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	18.750.000	18.750.000	100	100,00
66	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	18.750.000	18.750.000	100	100,00
67	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	18.750.000	18.704.460	100	99,76
68	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	18.750.000	18.750.000	100	100,00
69	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	18.750.000	170.000	100	0,91



70	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	15.000.000	15.000.000	100	100,00
71	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kesehatan	275.000.000	237.962.000	100	86,53
72	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Laboratorium Kesehatan Semarang	37.500.000	37.500.000	100	100,00
73	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	37.500.000	35.900.000	100	95,73
74	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	37.500.000	35.157.863	100	93,75
75	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	37.500.000	26.700.000	100	71,20
76	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	37.500.000	36.290.000	100	96,77
77	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	37.500.000	36.875.000	100	98,33
78	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	190.000.000	160.165.000	100	84,30
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	40.500.000	39.917.768		98,56
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Laboratorium Kesehatan Semarang	8.000.000	8.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	7.500.000	7.500.000	100	100,00
3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	15.000.000	14.640.000	100	97,60
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	10.000.000	9.777.768	100	97,78
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	458.392.000	364.189.350		79,45
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Kesehatan	199.642.000	137.118.000	100	68,68
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Laboratorium Kesehatan Semarang	45.000.000	29.850.000	100	66,33
3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	86.250.000	85.330.000	100	98,93
4	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	26.250.000	24.100.000	100	91,81



5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	18.750.000	14.075.000	100	75,07
6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	18.750.000	11.500.000	100	61,33
7	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	33.750.000	33.636.350	100	99,66
8	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan Gombong	5.000.000	4.700.000	100	94,00
9	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Magelang	25.000.000	23.880.000	100	95,52
5	PROGRAM JASA PELAYANAN KESEHATAN	16.676.000.000	16.298.201.731		97,73
1	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Semarang	2.142.000.000	1.953.049.779	100	91,18
2	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang	2.405.000.000	2.404.488.110	100	99,98
3	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Klaten	3.125.000.000	2.979.538.400	100	95,35
4	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Pati	1.000.000.000	969.969.707	100	97,00
5	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wil. Magelang	1.806.000.000	1.799.732.085	100	99,65
6	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Ambarawa	991.000.000	985.268.700	100	99,42
7	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang	5.207.000.000	5.206.154.950	100	99,98
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT	12.073.297.000	11.063.849.810		91,64
1	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9.723.297.000	8.891.769.319	98,61	91,45
2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TIDAK Menular	600.000.000	571.934.136	100	95,32
3	Kegiatan Surveillance Epidemiologi. Penanganan KLB & Bencana. Penyiapan Pelayanan Kesehatan Haji dan Imunisasi	1.750.000.000	1.600.146.355	100	91,44
7	PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	4.900.000.000	4.484.580.656		91,52
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan serta Distribusi Sediaan Farmasi dan Perbekes	4.800.000.000	4.414.759.456	100	91,97



2	Kegiatan Pembinaan serta Pengawasan Makanan Minuman	100.000.000	69.821.200	100	69,82
8	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	20.492.908.000	17.719.479.058		86,47
1	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar	1.000.000.000	873.171.735	96,18	87,32
2	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000.000	2.953.655.000	100	98,46
3	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat	500.000.000	459.326.800	100	91,87
4	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan tk Provinsi	900.000.000	800.120.000	100	88,90
5	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di BKPM Semarang	980.000.000	896.717.500	100	91,50
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di BKPM Pati	980.000.000	817.027.551	100	83,37
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di BKPM Magelang	880.000.000	750.166.855	100	85,25
8	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di BKPM Klaten	1.080.000.000	891.779.781	100	82,57
9	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di BKPM Ambarawa	700.000.000	502.436.800	76,94	71,78
10	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di BKIM	820.000.000	563.088.350	100	68,67
11	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Balabkes	750.000.000	547.383.075	100	72,98
12	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan di BKPM Magelang	415.000.000	359.528.826	100	86,63
13	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan di BKIM	415.000.000	361.874.099	100	87,20
14	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Balabkes	200.000.000	198.672.000	100	99,34
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (BKPM Semarang)	1.830.000.000	1.569.829.000	99,09	85,78
16	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (BKPM Ambarawa)	1.775.000.000	1.505.384.902	100	84,81
17	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Labkes)	1.400.000.000	1.268.460.500	100	90,60
18	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok di Balkesmas Wilayah Tegal	1.500.000.000	1.226.218.934	100	81,75
19	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	1.367.908.000	1.174.637.350	100	85,87



9	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN	3.950.000.000	3.069.700.825		77,71
1	Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar	3.350.000.000	2.572.839.603	100	76,80
2	Pengawasan Hygiene dan sanitasi TTU dan TPM	600.000.000	496.861.222	100	82,81
10	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.100.000.000	2.777.169.817		89,59
1	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	300.000.000	252.872.161	100	84,29
2	Penyelenggaraan Pelatihan di BTPK Gombong	1.800.000.000	1.609.928.156	100	89,44
3	Kegiatan Institusi Pendidikan Kesehatan	1.000.000.000	914.369.500	100	91,44
11	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	76.757.930.000	65.538.678.929		85,38
1	Kegiatan Penyelenggaran promosi kesehatan tk provinsi	500.000.000	452.595.110	100	90,52
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	1.350.000.000	1.142.840.374	100	84,65
3	Pembiayaan Kesehatan	72.507.930.000	61.704.361.150	97,42	85,10
4	Kegiatan Penyelenggaran promosi & pemberdayaan kesehatan di BKPM Semarang	450.000.000	444.076.703	100	98,68
5	Kegiatan Penyelenggaran promosi & pemberdayaan kesehatan di BKPM Pati	450.000.000	382.009.900	100	84,89
6	Kegiatan Penyelenggaran promosi & pemberdayaan kesehatan di BKPM Magelang	450.000.000	424.957.650	100	94,44
7	Kegiatan Penyelenggaran promosi & pemberdayaan kesehatan di BKPM Klaten	300.000.000	283.800.750	100	94,60
8	Kegiatan Penyelenggaran promosi & pemberdayaan kesehatan di BKPM Ambarawa	450.000.000	440.383.900	100	97,86
9	Kegiatan Penyelenggaran promosi & pemberdayaan kesehatan di BKIM	300.000.000	263.653.392	100	87,88
12	PROGRAM MANAJEMEN. INFORMASI & REGULASI KESEHATAN	3.219.850.000	2.729.498.169		84,77
1	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesehatan	1.500.000.000	1.208.187.765	100	80,55
2	Pengkajian dan Diseminasi Pembangunan Kesehatan	200.000.000	189.735.000	100	94,87
3	Penyusunan Regulasi Kesehatan Daerah	200.000.000	159.680.500	100	79,84
4	Penyelenggaran sistem informasi kesehatan	600.000.000	557.141.340	100	92,86
5	Pengendalian pendapatan dan Penyusunan Laporan Akuntansi	400.000.000	332.433.250	100	83,11
6	Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan KIP & Pelayanan kehumasan	150.000.000	137.589.800	100	91,73
7	Pembinaan Kinerja Pegawai dan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Strategis & Barang Milik Daerah	169.850.000	144.730.514	100	85,21



b). RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp 703.153.097.000,00 realisasi sebesar Rp 643.224.247.542,00 atau 91,48% yang terdiri dari 5 program dan 6 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.893.900.000	8.892.988.084		99,99
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	8.893.900.000	8.892.988.084	100	99,99
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	624.189.979.000	565.403.760.049		90,58
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	624.189.979.000	565.403.760.049	99,73	90,58
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	69.404.218.000	68.455.100.220		98,63
1	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.082.143.000	23.307.420.460	96,78	96,78
3	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	45.322.075.000	45.147.679.760	100	99,62
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	285.000.000	176.271.489		61,85
1	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan	285.000.000	176.271.489	100	61,85
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	380.000.000	296.127.700		77,93
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	380.000.000	296.127.700	100	77,93

c). RSUD PROF. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp 455.306.210.000,00 realisasi sebesar Rp 395.225.808.724,00 atau 86,80% yang terdiri dari 3 program dan 4 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	20.000.000.000	19.998.886.614		99,99
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	20.000.000.000	19.998.886.614	100	99,99
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	388.857.982.000	329.107.048.157		84,63
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	388.857.982.000	329.107.048.157	97,12	84,63
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	46.448.228.000	46.119.873.953		99,29
1	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan	15.600.000.000	15.348.145.783	100	98,39
2	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	30.848.228.000	30.771.728.170	100	99,75

d). RSUD TUGUREJO SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp 228.193.752.000,00 realisasi sebesar Rp 205.712.021.958,00 atau 90,15% yang terdiri dari 4 program dan 6 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.016.050.000	5.015.977.561		100,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	5.016.050.000	5.015.977.561	100	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	155.175.482.000	138.235.868.444		89,08
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	155.175.482.000	138.235.868.444	95,55	89,08
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	67.927.220.000	62.388.860.370		91,85
1	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	6.860.183.000	100	98,00
2	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan	16.025.000.000	12.339.635.000	100	77,00



3	Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	44.902.220.000	43.189.042.370	100	96,18
4	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	75.000.000	71.315.583		95,09
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	75.000.000	71.315.583	100	95,09

e). RSUD KELET DONOREJO JEPARA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program setelah perubahan untuk dan kegiatan yang dialokasikan pada RSUD Kelet Donorejo Jepara sebesar Rp 62.611.551.000,00 realisasi sebesar Rp 61.621.0146.794,00 atau 98,42% yang terdiri dari 5 program dan 6 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.759.580.000	16.705.723.188		99,68
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	16.759.580.000	16.705.723.188	100	99,68
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	520.000.000	500.000.000		96,15
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	520.000.000	500.000.000	100	96,15
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	29.921.642.000	29.187.257.229		97,55
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	29.921.642.000	29.187.257.229	100	97,55
4	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	14.968.988.000	14.789.559.583		98,80
1	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.979.153.000	12.800.435.160	100	98,62
2	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	1.989.835.000	1.989.124.423	100	99,96
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	441.341.000	438.474.794		99,35
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	441.341.000	438.474.794	100	99,35



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100

f). RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSJD Amino Gondohutomo Semarang sebesar Rp 65.296.278.000,00 realisasi sebesar Rp 60.905.536.806,00 atau 93,28% yang terdiri dari 5 program dan 6 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.787.460.000	7.672.850.501	100	98,53
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	7.787.460.000	7.672.850.501	100	98,53
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	35.773.498.000	34.258.614.563	100	95,77
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	35.773.498.000	34.258.614.563	100	95,77
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	21.385.320.000	18.656.042.442	100	87,24
1	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.385.120.000	17.732.660.750	100	86,99
2	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	1.000.200.000	923.381.692	100	92,32
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	150.000.000	148.089.100	100	98,73
1	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan	150.000.000	148.089.100	100	98,73
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	200.000.000	169.940.200	100	84,97
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	200.000.000	169.940.200	100	84,97



g). RSJD SURAKARTA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSJD Surakarta sebesar Rp 65.566.382.000,00 realisasi sebesar Rp 56.746.825.708,00 atau 86,55% yang terdiri dari 5 program dan 7 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.767.206.000	10.569.914.770		98,17
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	10.767.206.000	10.569.914.770	100	98,17
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	38.743.054.000	30.705.874.857		79,26
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	38.743.054.000	30.705.874.857	100	79,26
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	15.419.091.000	14.869.013.300		96,43
1	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000	1.315.049.000	100	87,67
2	Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.579.091.000	12.219.856.000	97,14	97,14
3	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	1.340.000.000	1.334.108.300	100	99,56
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	342.804.000	324.587.266		94,69
1	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan	342.804.000	324.587.266	100	94,69
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	294.227.000	277.435.515		94,29
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	294.227.000	277.435.515	100	94,29

h). RSJD Dr. RM SOEDJARWADI KLATEN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada RSJD Klaten sebesar Rp 46.135.392.000,00 realisasi sebesar Rp 42.734.320.355,00 atau 92,63% yang terdiri dari 5 program dan 6 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.387.969.000	1.386.980.619		99,93
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.387.969.000	1.386.980.619	100	99,93
2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD (URUSAN KESEHATAN)	41.380.392.000	38.075.237.862		92,01
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	41.380.392.000	38.075.237.862	100	92,01
3	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	2.730.000.000	2.650.798.398		97,10
1	Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan	1.700.000.000	1.668.663.198	100	98,16
2	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	1.030.000.000	982.135.200	100	95,35
4	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	342.804.000	337.744.545		98,52
1	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan	342.804.000	337.744.545	100	98,52
5	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	294.227.000	283.558.931		96,37
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	294.227.000	283.558.931	100	96,37

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.080.851.741.000,00 realisasi sebesar Rp 1.032.946.659.061,00 atau 95,57% yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu

a). DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp 820.836.234,00 realisasi sebesar Rp 795.214.842.930,00 atau 96,88% yang terdiri dari 8 program dan 185 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.390.103.000	5.587.436.575		87,44
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Bina Marga	6.000.000	5.485.780	100	91,43
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Semarang	1.500.000	1.500.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	2.000.000	1.982.000	100	99,10
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Pati	2.000.000	1.500.000	100	75,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	2.250.000	2.250.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Tegal	2.000.000	1.992.000	100	99,60
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Magelang	2.100.000	2.100.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	1.500.000	1.444.500	100	96,30
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	1.500.000	1.500.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	2.000.000	1.995.000	100	99,75
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Bina Marga	725.000.000	596.411.195	100	82,26
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Semarang	94.500.000	71.109.737	100	75,25
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	100.000.000	54.623.994	100	54,62
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Pati	77.000.000	48.012.009	100	62,35
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	89.000.000	63.799.073	100	71,68
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Tegal	60.000.000	54.433.927	100	90,72
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Magelang	55.000.000	54.508.079	100	99,11
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	50.000.000	36.573.944	100	73,15
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	52.000.000	32.208.340	100	61,94
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	81.000.000	65.285.352	100	80,60
21	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	81.064.558	100	95,37
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	318.000.000	293.994.000	100	92,45



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
23	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Bina Marga	160.000.000	146.231.000	100	91,39
24	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Semarang	25.500.000	25.500.000	100	100,00
25	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	35.422.000	33.188.000	100	93,69
26	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Pati	33.000.000	32.622.400	100	98,86
27	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	25.000.000	25.000.000	100	100,00
28	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Tegal	30.000.000	29.513.000	100	98,38
29	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Magelang	27.100.000	27.099.700	100	100,00
30	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	25.000.000	25.000.000	100	100,00
31	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	25.000.000	24.999.600	100	100,00
32	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	38.000.000	38.000.000	100	100,00
33	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Bina Marga	275.000.000	255.901.275	100	93,06
34	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Semarang	35.500.000	35.441.400	100	99,83
35	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	40.000.000	39.766.750	100	99,42
36	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Pati	39.000.000	34.572.375	100	88,65
37	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	35.000.000	35.000.000	100	100,00
38	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Tegal	37.000.000	36.950.000	100	99,86
39	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Magelang	35.000.000	32.538.850	100	92,97
40	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	35.000.000	35.000.000	100	100,00
41	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	35.000.000	35.000.000	100	100,00
42	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	39.750.000	39.750.000	100	100,00
43	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Bina Marga	30.000.000	29.771.000	100	99,24
44	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Semarang	4.500.000	4.500.000	100	100,00
45	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	11.015.000	11.015.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
46	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Pati	7.465.000	7.403.000	100	99,17
47	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	4.000.000	4.000.000	100	100,00
48	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Tegal	4.000.000	3.990.000	100	99,75
49	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Magelang	5.040.000	5.022.500	100	99,65
50	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	4.000.000	4.000.000	100	100,00
51	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	4.000.000	4.000.000	100	100,00
52	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	18.650.000	18.062.800	100	96,85
53	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.631.200	100	92,62
54	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Bina Marga	80.000.000	79.929.000	100	99,91
55	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Semarang	8.500.000	8.486.400	100	99,84
56	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	10.000.000	9.806.000	100	98,06
57	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Pati	6.404.000	6.313.000	100	98,58
58	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100	100,00
59	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Tegal	8.000.000	5.470.000	100	68,38
60	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Magelang	9.000.000	8.980.000	100	99,78
61	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	8.000.000	8.000.000	100	100,00
62	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	8.000.000	8.000.000	100	100,00
63	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	10.000.000	10.000.000	100	100,00
64	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	16.474.000	100	65,90
65	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Bina Marga	160.000.000	126.894.029	100	79,31
66	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Semarang	20.500.000	20.115.000	100	98,12
67	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	27.000.000	26.775.000	100	99,17
68	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Pati	24.750.000	24.675.000	100	99,70
69	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	20.000.000	20.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
70	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Tegal	20.000.000	20.000.000	100	100,00
71	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Magelang	24.000.000	20.755.000	100	86,48
72	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	20.000.000	19.800.000	100	99,00
73	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	20.000.000	19.035.000	100	95,18
74	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	25.000.000	24.975.000	100	99,90
75	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Bina Marga	575.000.000	470.694.079	100	81,86
76	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Semarang	30.000.000	21.566.826	100	71,89
77	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	50.000.000	45.771.283	100	91,54
78	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Pati	50.000.000	44.019.400	100	88,04
79	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	40.000.000	40.000.000	100	100,00
80	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Tegal	40.000.000	39.919.000	100	99,80
81	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Magelang	54.480.000	54.468.450	100	99,98
82	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	40.000.000	39.980.000	100	99,95
83	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	40.000.000	29.194.500	100	72,99
84	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	50.000.000	37.570.000	100	75,14
85	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.681.177.000	1.620.031.000	100	96,36
86	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	260.000.000	94.496.270	100	36,34
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.362.097.000	3.857.045.613		88,42
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	10.000.000	9.980.000	100	99,80
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Pati	10.000.000	9.454.000	100	94,54
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	8.000.000	7.964.500	100	99,56



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Tegal	8.000.000	7.430.000	100	92,88
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Magelang	8.000.000	7.850.500	100	98,13
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	8.000.000	7.976.781	100	99,71
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	4.000.000	3.965.000	100	99,13
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	50.000.000	49.964.000	100	99,93
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Bina Marga	530.000.000	399.881.819	100	75,45
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Semarang	200.000.000	195.897.000	100	97,95
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	200.000.000	199.420.000	100	99,71
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Pati	200.000.000	191.709.000	100	95,85
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	200.000.000	190.956.000	100	95,48
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Tegal	200.000.000	197.491.000	100	98,75
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Magelang	200.000.000	198.043.000	100	99,02
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	200.000.000	197.519.900	100	98,76
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	200.000.000	191.955.000	100	95,98
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	200.000.000	199.990.000	100	100,00
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Bina Marga	488.297.000	267.710.688	100	54,83
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Semarang	73.500.000	52.416.050	100	71,31
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	80.000.000	77.605.950	100	97,01
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Pati	76.000.000	63.732.500	100	83,86
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	72.500.000	72.407.175	100	99,87
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Tegal	70.000.000	68.647.150	100	98,07
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Magelang	82.800.000	78.176.600	100	94,42
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	70.000.000	64.960.000	100	92,80



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	80.000.000	76.945.125	100	96,18
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	80.000.000	77.053.675	100	96,32
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Bina Marga	115.000.000	114.020.500	100	99,15
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Bina Marga	100.000.000	96.389.200	100	96,39
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Semarang	8.500.000	7.460.000	100	87,76
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Purwodadi	8.000.000	6.200.000	100	77,50
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Pati	13.000.000	12.577.000	100	96,75
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100	100,00
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Tegal	8.000.000	7.900.000	100	98,75
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Magelang	11.500.000	11.461.500	100	99,67
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Surakarta	8.000.000	7.800.000	100	97,50
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo	12.000.000	12.000.000	100	100,00
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPT Bina Marga Wilayah Cilacap	13.000.000	13.000.000	100	100,00
40	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	448.000.000	393.135.000	100	87,75
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	6.797.500		6,80
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	0	0	0,00
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	6.797.500	100	13,60
4	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	222.160.474.000	219.194.803.267		98,67
1	Kegiatan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	5.000.000.000	4.630.808.437	100	92,62



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 1	5.639.888.000	5.623.515.082	100	99,71
3	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 1	16.235.538.000	16.203.078.646	100	99,80
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Semarang 2	3.937.350.000	3.806.523.415	100	96,68
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati 1	6.285.069.000	6.245.341.775	100	99,37
6	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pati 1	16.464.973.000	16.319.896.000	100	99,12
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati 2	7.218.176.000	7.131.562.250	100	98,80
8	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pati 2	2.990.102.000	2.979.249.000	100	99,64
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 1	8.808.551.000	8.748.312.667	100	99,32
10	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 1	11.440.580.000	11.361.861.127	100	99,31
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 2	9.760.637.000	9.673.959.987	100	99,11
12	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi 2	5.029.026.000	5.009.448.000	100	99,61
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 1	6.898.396.000	6.853.605.370	100	99,35
14	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 1	2.167.787.000	2.158.434.000	100	99,57
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 2	10.811.953.000	10.632.423.140	100	98,34
16	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta 2	6.865.252.000	6.833.577.000	100	99,54
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 1	4.327.426.000	4.297.212.800	100	99,30
18	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 1	4.571.718.000	4.557.632.000	100	99,69
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 2	5.429.189.000	5.325.820.350	100	98,10
20	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Magelang 2	5.486.166.000	5.460.267.000	100	99,53
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 1	5.622.723.000	5.586.385.500	100	99,35
22	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 1	6.590.250.000	6.564.090.000	100	99,60



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 2	4.211.247.000	4.188.015.800	100	99,45
24	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo 2	6.477.469.000	6.443.258.900	100	99,47
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 1	3.831.961.000	3.815.506.100	100	99,57
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 2	3.373.559.000	3.357.769.421	100	99,53
27	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap 2	3.443.683.000	3.413.151.800	100	99,11
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 1	3.492.949.000	3.419.823.500	100	97,91
29	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 1	8.294.908.000	8.094.943.300	100	97,59
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 2	4.567.650.000	4.459.370.150	100	97,63
31	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Tegal 2	2.623.510.000	2.551.240.000	100	97,25
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 1	7.228.350.000	7.097.710.500	100	98,19
33	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 1	6.425.892.000	5.843.338.000	100	90,93
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 2	4.218.090.000	4.139.642.250	100	98,14
35	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan 2	6.390.456.000	6.368.030.000	100	99,65
5	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN PENGANTIAN JEMBATAN	557.235.120.000	539.504.837.544		96,82
1	Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah	16.597.117.000	9.858.994.776	98,91	59,40
2	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat I	76.400.981.000	75.946.989.250	100	99,41
3	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat 2	146.033.213.000	145.537.918.450	100	99,66
4	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur I	161.736.797.000	155.901.661.218	100	96,39
5	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur 2	156.467.012.000	152.259.273.850	100	97,31
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	20.371.639.000	18.297.043.315		89,82



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi	10.602.275.000	9.921.295.797	100	93,58
2	Kegiatan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	250.000.000	193.470.351	100	77,39
3	Kegiatan Pembuatan Leger Jalan dan Perhitungan Lalu Lintas	1.052.644.000	1.044.625.538	100	99,24
4	Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan	866.024.000	858.816.388	100	99,17
5	Kegiatan Pengadaan Alat Berat	5.167.253.000	4.183.953.000	100	80,97
6	Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium.	500.000.000	355.353.700	100	71,07
7	Kegiatan Pengadaan dan Pedayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan Provinsi Jateng.	610.243.000	605.596.333	100	99,24
8	Kegiatan Perbaikan Peralatan Alat Berat	1.323.200.000	1.133.932.208	100	85,70
7	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI	5.463.751.000	4.988.081.658		91,29
1	Kegiatan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi	406.725.000	127.791.080	100	31,42
2	Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS	500.000.000	436.962.982	100	87,39
3	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	4.157.026.000	4.083.459.934	100	98,23
4	Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman	400.000.000	339.867.662	100	84,97
8	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.753.050.000	3.778.797.458		79,50
1	Kegiatan Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	1.825.800.000	1.482.234.436	97,26	81,18
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik	1.060.000.000	943.268.831	100	88,99
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kontruksi	650.000.000	295.699.987	80,19	45,49
4	Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah	1.067.250.000	921.045.204	100	86,30
5	Kegiatan Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah	150.000.000	136.549.000	100	91,03

b). DINAS PEKERJAAN UMUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp 260.015.507.000,00 realisasi sebesar Rp.237.731.816.131,00 atau 91,43% yang terdiri dari 9 program dan 198 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.279.006.000	6.539.803.388		89,84
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA	4.000.000	3.360.000	100	84,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	858.000	858.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	858.000	848.900	100	98,94
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	858.000	857.500	100	99,94
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	858.000	858.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	858.000	854.900	100	99,64
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	858.000	858.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas PSDA	584.448.000	506.242.784	100	86,62
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	145.926.000	124.580.906	100	85,37
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	128.712.000	111.054.378	100	86,28
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	119.260.000	108.074.831	100	90,62
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	136.298.000	81.705.767	100	59,95
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	87.120.000	67.542.615	100	77,53
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	97.149.000	77.475.980	100	79,75
15	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PSDA	86.900.000	84.866.000	100	97,66
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA	158.256.000	158.256.000	100	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	24.948.000	24.948.000	100	100,00
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	24.948.000	24.948.000	100	100,00
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	24.948.000	24.894.000	100	99,78



20	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	24.948.000	24.000.000	100	96,20
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	24.948.000	24.829.200	100	99,52
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	24.948.000	23.760.000	100	95,24
23	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas PSDA	75.000.000	74.989.900	100	99,99
24	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	12.375.000	12.375.000	100	100,00
25	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	19.800.000	19.800.000	100	100,00
26	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	13.200.000	13.199.190	100	99,99
27	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	16.500.000	15.927.500	100	96,53
28	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	12.375.000	12.374.250	100	99,99
29	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	12.375.000	12.374.000	100	99,99
30	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas PSDA	75.000.000	74.272.800	100	99,03
31	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	16.500.000	16.484.000	100	99,90
32	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	16.500.000	16.480.000	100	99,88
33	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	16.500.000	16.447.300	100	99,68
34	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	16.500.000	16.431.000	100	99,58
35	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	16.500.000	16.488.000	100	99,93
36	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	16.500.000	16.448.500	100	99,69
37	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PSDA	67.000.000	50.755.800	100	75,75
38	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	6.984.000	6.981.000	100	99,96
39	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	7.188.000	7.188.000	100	100,00
40	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	46.732.000	46.714.000	100	99,96



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

41	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	16.837.000	16.224.000	100	96,36
43	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	6.429.000	6.415.500	100	99,79
44	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	6.731.000	6.707.000	100	99,64
45	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas PSDA	2.000.000.000	1.739.222.300	100	86,96
46	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA	25.000.000	23.887.300	100	95,55
47	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	4.981.000	4.981.000	100	100,00
48	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	4.793.000	4.793.000	100	100,00
49	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	5.418.000	5.416.750	100	99,98
50	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	6.596.000	6.355.500	100	96,35
51	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	5.202.000	5.108.000	100	98,19
52	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	5.098.000	5.094.000	100	99,92
53	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas PSDA	7.590.000	7.200.000	100	94,86
54	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	1.485.000	1.485.000	100	100,00
55	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	1.485.000	1.485.000	100	100,00
56	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	1.485.000	1.472.000	100	99,12
57	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	1.485.000	1.190.000	100	80,13
58	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	1.485.000	1.485.000	100	100,00
59	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	1.485.000	1.320.000	100	88,89
60	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas PSDA	30.000.000	29.812.500	100	99,38
61	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	6.311.000	6.308.000	100	99,95



62	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	6.311.000	6.111.000	100	96,83
63	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	6.311.000	6.295.000	100	99,75
64	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	6.311.000	6.302.400	100	99,86
65	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	6.311.000	6.299.000	100	99,81
66	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	6.311.000	6.281.000	100	99,52
67	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas PSDA	425.000.000	419.772.448	100	98,77
68	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	40.941.000	40.889.800	100	99,87
69	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	23.165.000	23.080.000	100	99,63
70	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	27.030.000	26.827.998	100	99,25
71	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	40.809.000	40.808.300	100	100,00
72	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	44.888.000	44.748.091	100	99,69
73	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	39.117.000	39.097.500	100	99,95
74	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas PSDA	2.300.171.000	2.075.925.000	100	90,25
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.785.967.000	6.665.480.123		98,22
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA	2.193.478.000	2.137.109.000	100	97,43
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas PSDA	30.000.000	29.437.000	100	98,12
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	50.000.000	49.942.000	100	99,88
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	50.000.000	48.000.000	100	96,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	50.000.000	49.968.000	100	99,94
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	50.000.000	49.600.000	100	99,20
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	50.000.000	49.777.000	100	99,55



8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	50.000.000	49.940.000	100	99,88
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA	400.000.000	384.485.000	100	96,12
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	100.000.000	99.966.000	100	99,97
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	100.000.000	97.000.000	100	97,00
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	100.000.000	99.992.000	100	99,99
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	100.000.000	99.186.000	100	99,19
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	100.000.000	98.142.000	100	98,14
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	100.000.000	99.569.000	100	99,57
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas PSDA	742.500.000	738.931.825	100	99,52
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	136.398.000	134.908.650	100	98,91
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	160.028.000	159.813.275	100	99,87
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	118.974.000	117.944.750	100	99,13
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	148.914.000	148.499.100	100	99,72
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	103.567.000	101.656.673	100	98,16
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	128.706.000	128.281.450	100	99,67
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA	27.225.000	27.222.000	100	99,99
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas PSDA	7.334.000	7.257.000	100	98,95
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	1.803.000	1.800.000	100	99,83
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	1.803.000	1.803.000	100	100,00
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	1.803.000	1.800.000	100	99,83



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	1.803.000	1.798.000	100	99,72
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	1.803.000	1.753.000	100	97,23
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	1.803.000	1.803.000	100	100,00
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas PSDA	57.750.000	57.727.000	100	99,96
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	36.663.000	36.619.000	100	99,88
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	33.355.000	33.355.000	100	100,00
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	37.274.000	37.115.000	100	99,57
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	34.344.000	34.315.150	100	99,92
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	35.690.000	35.635.000	100	99,85
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	34.701.000	34.683.000	100	99,95
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas PSDA	2.458.000	2.442.000	100	99,35
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	965.000	965.000	100	100,00
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	965.000	965.000	100	100,00
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	965.000	963.200	100	99,81
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	965.000	957.000	100	99,17
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	965.000	954.000	100	98,86
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citandui	965.000	963.000	100	99,79
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat	950.000.000	931.579.050	100	98,06
46	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Sekretariat Dinas PSDA	450.000.000	438.858.000	100	97,52
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.100.000.000	1.891.849.532		90,09
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas PSDA	1.920.000.000	1.715.963.932	100	89,37



2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas PSDA	60.000.000	58.975.000	100	98,29
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dinas PSDA	120.000.000	116.910.600	100	97,43
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI. RAWA SERTA JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	89.201.110.000	82.043.484.101		91,98
1	Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	4.646.069.000	4.260.768.127	100	91,71
2	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	21.734.051.000	19.448.041.879	100	89,48
3	Kegiatan Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi	469.590.000	448.588.000	100	95,53
4	Kegiatan Pendampingan WISMP 2	6.000.000.000	5.314.306.773	100	88,57
5	Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA	1.000.000.000	613.268.300	100	61,33
6	Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA	491.431.000	467.215.222	100	95,07
7	Kegiatan Pemantauan. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA	600.638.000	562.309.167	100	93,62
8	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal	8.327.050.000	8.219.557.500	100	98,71
9	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang	6.999.543.000	6.818.666.400	100	97,42
10	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna	5.775.277.000	5.759.814.964	100	99,73
11	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo	10.536.411.000	10.274.451.700	100	97,51
12	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo	3.151.350.000	2.930.799.550	100	93,00
13	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy	4.777.200.000	4.688.141.100	100	98,14
14	Kegiatan WISMP 2	14.692.500.000	12.237.555.419	100	83,29
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	83.870.012.000	73.209.825.046		87,29
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	12.740.445.000	11.990.558.351	100	94,11
2	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	67.556.903.000	57.768.805.127	87,95	85,51
3	Kegiatan Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku	311.040.000	299.336.950	100	96,24
4	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal	888.600.000	887.305.500	100	99,85
5	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung Tuntang	629.936.000	601.936.400	100	95,56
6	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna	334.384.000	333.104.620	100	99,62
7	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo	337.712.000	328.110.700	100	97,16
8	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo	348.832.000	289.846.898	100	83,09
9	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu Citanduy	722.160.000	710.820.500	100	98,43



6	PROGRAM PENGEMBANGAN. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	29.250.520.000	27.048.531.511		92,47
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi	2.016.000.000	1.590.295.825	100	78,88
2	Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi	1.225.316.000	1.170.776.802	100	95,55
3	Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA	1.863.391.000	1.773.434.746	100	95,17
4	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA	914.859.000	658.894.461	100	72,02
5	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi	2.323.437.000	2.228.275.757	100	95,90
6	Kegiatan Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan	385.528.000	362.443.480	100	94,01
7	Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat	385.528.000	374.524.600	100	97,15
8	Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu	530.000.000	448.023.102	100	84,53
9	Kegiatan Pengadaan Tanah	7.297.197.000	6.756.238.648	100	92,59
10	Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan	1.200.000.000	1.002.843.915	100	83,57
11	Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA	700.000.000	672.513.300	100	96,07
12	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal	1.156.585.000	997.091.500	100	86,21
13	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal	385.528.000	383.040.832	100	99,35
14	Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal	597.569.000	596.145.016	100	99,76
15	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang	771.057.000	767.957.100	100	99,60
16	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang	385.528.000	385.137.800	100	99,90
17	Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang	655.398.000	641.421.300	100	97,87
18	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna	424.081.000	422.837.600	100	99,71
19	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna	385.528.000	382.962.350	100	99,33
20	Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Seluna	597.569.000	594.742.415	100	99,53
21	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo	790.333.000	771.494.500	100	97,62
22	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo	433.719.000	431.630.300	100	99,52
23	Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo	597.569.000	587.931.500	100	98,39
24	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo	819.248.000	794.444.450	100	96,97
25	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo	269.870.000	267.446.050	100	99,10
26	Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo	597.569.000	592.901.862	100	99,22
27	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu Citanduy	269.870.000	263.923.000	100	97,80
28	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy	385.528.000	377.082.800	100	97,81
29	Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Serayu Citanduy	597.569.000	514.124.800	100	86,04
30	Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Bberbasis Gender	289.146.000	237.951.700	100	82,29



7	PROGRAM PEGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI	38.582.091.000	37.480.519.730		97,14
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	2.056.635.000	1.830.403.708	100	89,00
2	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	20.020.399.000	19.822.008.941	100	99,01
3	Kegiatan Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	359.993.000	340.752.798	100	94,66
4	Kegiatan Posko Banjir	729.987.000	727.477.500	100	99,66
5	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	2.750.000.000	2.411.346.000	100	87,69
6	Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Pemali Comal	729.987.000	728.005.000	100	99,73
7	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang	2.750.000.000	2.744.309.700	100	99,79
8	Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Jragung Tuntang	819.985.000	815.101.250	100	99,40
9	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Seluna	907.989.000	782.561.710	100	86,19
10	Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Seluna	774.986.000	770.962.825	100	99,48
11	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo	575.988.000	561.981.800	100	97,57
12	Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo	459.993.000	459.028.050	100	99,79
13	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Probolo	539.989.000	471.934.264	100	87,40
14	Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Probolo	549.991.000	525.074.576	100	95,47
15	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy	557.989.000	551.122.000	100	98,77
16	Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy	729.987.000	689.206.110	100	94,41
17	Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir	3.268.193.000	3.249.243.498	100	99,42
8	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.927.466.000	1.853.733.600		96,17
1	Kegiatan Pembinaan penyusunan/review RTR Kab/Kota	400.000.000	367.353.300	100	91,84
2	Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah	827.466.000	820.587.000	100	99,17
3	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang	700.000.000	665.793.300	100	95,11
9	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG	1.019.335.000	998.589.100		97,96
1	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	275.000.000	262.395.000	100	95,42



2	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	744.335.000	736.194.100	100	98,91

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 16.603.852.000,00 realisasi sebesar Rp 15.567.674.203,00 atau 93,76% yang terdiri dari 8 program dan 37 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.689.800.000	2.595.922.053		96,51
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	565.000.000	544.197.239	100	96,32
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	125.000.000	121.184.000	100	96,95
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	200.000.000	195.424.800	100	97,71
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	100.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	100.000.000	99.999.900	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.962.800	100	99,91
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	40.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.978.000	100	99,93
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	122.500.000	122.500.000	100	100,00
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	600.000.000	599.450.914	100	99,91
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	727.300.000	665.376.400	100	91,49
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000	27.848.000	100	92,83
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.140.000.000	1.076.815.550		94,46
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000.000	299.830.000	100	99,94
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000	461.525.550	100	92,31
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	45.000.000	45.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	100	100,00
5	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	245.000.000	220.460.000	100	89,98
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	102.000.000	59.383.000		58,22
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	102.000.000	59.383.000	100	58,22



4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	93.500.000	90.106.000		96,37
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	19.400.000	100	97,00
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	23.500.000	21.046.000	100	89,56
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	49.660.000	100	99,32
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN	780.000.000	725.158.000		92,97
1	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan	250.000.000	236.385.000	100	94,55
2	Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kabupaten/Kota	280.000.000	262.530.000	99,94	93,76
3	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana pada KTP2D	250.000.000	226.243.000	100	90,50
6	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	8.218.552.000	7.626.654.250		92,80
1	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat	443.837.000	410.937.000	100	92,59
2	Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH	7.624.715.000	7.081.865.250	100	92,88
3	Kegiatan penanganan kawasan permukiman terdampak bencana	150.000.000	133.852.000	100	89,23
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	2.280.000.000	2.155.588.850		94,54
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah	2.000.000.000	1.922.479.850	100	96,12
2	Kegiatan Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW	280.000.000	233.109.000	100	83,25
8	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	1.300.000.000	1.238.046.500		95,23
1	Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi	125.000.000	124.817.000	100	99,85
2	Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU	175.000.000	175.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa	100.000.000	100.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari	300.000.000	287.927.500	100	95,98
5	Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah	200.000.000	200.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Pemantauan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	250.000.000	200.553.000	100	80,22
7	Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	150.000.000	149.749.000	100	99,83

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 37.807.894.000,00 realisasi sebesar



Rp 36.578.530.723,00 atau 96,75% yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

a). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 13.264.009.000,00 realisasi sebesar Rp13.001.310.694,00 atau 98,02% yang terdiri dari 9 program dan 51 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.694.548.000	2.544.032.511		94,41
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.990.350	100	99,68
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431.449.000	367.806.574	100	85,25
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	72.000.000	70.908.000	100	98,48
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.000.000	73.970.483	100	99,96
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	60.000.000	59.987.500	100	99,98
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.943.700	100	99,72
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.099.000	103.932.215	100	99,84
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	70.000.000	69.885.300	100	99,84
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	600.000.000	599.691.389	100	99,95
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.250.000.000	1.164.917.000	100	93,19
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.729.358.000	2.715.459.405		99,49
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	498.000.000	496.320.000	100	99,66
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	360.000.000	357.798.000	100	99,39
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	245.580.405	100	98,23
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	96.810.000	93.280.000	100	96,35
5	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	259.200.000	258.200.000	100	99,61
6	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Satpol PP	1.265.348.000	1.264.281.000	100	99,92
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	178.170.000	178.170.000		100,00
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	178.170.000	178.170.000	100	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	280.000.000	279.441.750		99,80
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	29.834.750	100	99,45
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	250.000.000	249.607.000	100	99,84



5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.163.932.000	1.156.229.000		99,34
1	Kegiatan pembinaan Tranmas	100.000.000	93.577.500	100	93,58
2	Kegiatan Monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib	125.000.000	124.997.500	100	100,00
3	Kegiatan Simulasi Dakhura, penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenterman dan ketertiban umum	100.000.000	99.222.500	100	99,22
4	Kegiatan Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenterman dan ketertiban umum	488.932.000	488.932.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib	350.000.000	349.499.500	100	99,86
6	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1.465.490.000	1.439.582.350		98,23
1	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penegakan Perda dan Tibumtranmas di Daerah Perbatasan	142.910.000	135.620.900	100	94,90
2	Kegiatan Pengendalian dan penanganan ketenterman dan ketertiban umum	953.000.000	936.622.750	100	98,28
3	Kegiatan Pengendalian Unjuk rasa di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	73.760.000	73.702.500	100	99,92
4	Kegiatan Sarasehan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	63.920.000	62.797.500	100	98,24
5	Kegiatan Sinergitas Penegakan Perda dan Tramtibum di Jawa Tengah	116.900.000	115.838.950	100	99,09
6	Kegiatan Forum Aparatur Satpol PP	115.000.000	114.999.750	100	100,00
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.439.198.000	1.385.265.778		96,25
1	Kegiatan Pembinaan Tramtib Bagi Kasie Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kab/Kota Se Jateng	75.000.000	69.333.500	100	92,44
2	Kegiatan Rakor regional tramtib dan penegakan perda	67.868.000	67.867.400	100	100,00
3	Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah (FORKOMKON)	75.000.000	70.668.000	100	94,22
4	Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah	1.221.330.000	1.177.396.878	100	96,40
8	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH)	1.467.400.000	1.465.010.000		99,84
1	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas	100.000.000	100.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng	293.400.000	293.400.000	100	100,00
3	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas	120.000.000	120.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan penyelamatan di Air	119.400.000	118.700.000	100	99,41
5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas	50.000.000	50.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa	99.700.000	99.370.000	100	99,67
7	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas	99.700.000	99.370.000	100	99,67



8	Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan	100.000.000	100.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas	119.400.000	118.700.000	100	99,41
10	Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu	115.800.000	115.800.000	100	100,00
11	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan	100.000.000	99.670.000	100	99,67
12	Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah	100.000.000	100.000.000	100	100,00
13	Kegiatan Penguatan Karakter bagi Garda Bangsa	50.000.000	50.000.000	100	100,00
9	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.845.913.000	1.838.119.900		99,58
1	Kegiatan Koordinasi peningkatan efektifitas pelaksanaan perda	80.000.000	79.894.000	100	99,87
2	Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi	1.615.913.000	1.611.023.000	100	99,70
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS	150.000.000	147.202.900	100	98,14

b). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 24.543.885.000,00 realisasi sebesar Rp 23.577.220.029,00 atau 96,06% yang terdiri dari 9 program dan 72 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.349.000.000	2.117.910.758		90,16
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	493.800.000	322.443.256	100	65,30
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	80.000.000	79.897.600	100	99,87
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	157.500.000	157.493.900	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	106.500.000	106.340.000	100	99,85
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.000.000	45.999.400	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.250.000	40.271.250	100	97,63
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.750.000	21.082.000	100	96,93
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	94.500.000	68.562.200	100	72,55
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	300.000.000	289.289.272	100	96,43
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.002.700.000	981.531.880	100	97,89
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.455.100.000	1.336.620.471		91,86



1	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	100.000.000	98.790.000	100	98,79
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	542.600.000	528.414.000	100	97,39
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	562.500.000	482.753.375	100	85,82
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	26.000.000	25.390.000	100	97,65
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	189.000.000	176.423.096	100	93,35
6	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi	35.000.000	24.850.000	100	71,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	41.568.000	38.540.000		92,72
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	41.568.000	38.540.000	100	92,72
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	715.094.000	706.740.950		98,83
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.000.000	50.190.950	100	88,05
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	122.422.000	121.985.000	100	99,64
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	535.672.000	534.565.000	100	99,79
5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.174.023.000	7.057.808.500		98,38
1	Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas	1.100.000.000	1.072.000.000	100	97,45
2	Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan	400.000.000	384.384.500	100	96,10
3	Kegiatan Pengawasan Orang Asing	268.479.000	268.479.000	100	100,00
4	Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah	300.519.000	298.800.000	100	99,43
5	Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah	190.000.000	180.143.000	100	94,81
6	Kegiatan Pembinaan Sosial Politik	340.000.000	338.025.000	100	99,42
7	Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah	300.000.000	298.194.000	100	99,40
8	Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan	270.000.000	268.417.000	100	99,41
9	Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik	250.000.000	244.405.000	100	97,76
10	Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi	250.000.000	234.233.000	100	93,69
11	Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat	275.000.000	273.385.000	100	99,41
12	Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan	220.225.000	217.600.000	100	98,81
13	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	530.000.000	518.489.000	100	97,83
14	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	325.000.000	325.000.000	100	100,00
15	Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial	219.600.000	218.750.000	100	99,61
16	Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN	650.000.000	649.239.000	100	99,88
17	Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013)	350.000.000	350.000.000	100	100,00
18	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi	685.000.000	668.615.000	100	97,61



19	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	250.200.000	249.650.000	100	99,78
6	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	3.990.000.000	3.921.111.500		98,27
1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	200.000.000	199.031.000	100	99,52
2	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara	200.000.000	199.405.000	100	99,70
3	Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Validasi Data Perkembangan Fahaman Lain	180.000.000	180.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang	215.000.000	214.352.500	100	99,70
5	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah	300.000.000	294.268.000	100	98,09
6	Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan	1.000.000.000	997.091.000	100	99,71
7	Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya	270.000.000	268.967.000	100	99,62
8	Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	270.000.000	266.195.000	100	98,59
9	Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politik	300.000.000	255.965.000	100	85,32
10	Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik	150.000.000	145.615.000	100	97,08
11	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa	190.000.000	190.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan	185.000.000	182.733.000	100	98,77
13	Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK (Amanat Permendagri 72 /2012)	130.000.000	129.470.000	100	99,59
14	Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila BAGI Perempuan	150.000.000	148.494.000	100	99,00
15	Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda	250.000.000	249.525.000	100	99,81
7	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	1.575.000.000	1.496.848.300		95,04
1	Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah	300.000.000	265.310.000	100	88,44
2	Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat	275.000.000	274.560.000	100	99,84
3	Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan	450.000.000	449.685.000	100	99,93
4	Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara	250.000.000	248.975.000	100	99,59
5	Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar	300.000.000	258.318.300	100	86,11
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.975.000.000	1.974.600.000		99,98



1	Kegiatan Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)	250.000.000	250.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial	225.000.000	224.600.000	100	99,82
3	Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	1.500.000.000	1.500.000.000	100	100,00
9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	5.269.100.000	4.927.039.550		93,51
1	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga	350.000.000	328.825.000	100	93,95
2	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik	700.000.000	587.186.500	100	83,88
3	Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada	600.000.000	575.329.500	100	95,89
4	Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat	800.000.000	693.042.500	100	86,63
5	Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada	959.000.000	911.015.400	100	95,00
6	Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah	325.000.000	315.920.000	100	97,21
7	Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan	550.000.000	546.755.000	100	99,41
8	Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	380.000.000	379.590.000	100	99,89
9	Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik	605.100.000	589.375.650	100	97,40

6. URUSAN SOSIAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Sosial sebesar Rp91.821.760.000 realisasi sebesar Rp90.105.178.485,00 atau 98,13% yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu

a). DINAS SOSIAL

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp 80.380.760.000,00 realisasi sebesar Rp 79.474.370.963,00 atau 98,87% yang terdiri dari 9 program dan 509 kegiatan, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	54.965.878.000	54.508.186.699		99,17
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Sosial	34.000.000	34.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	1.500.000	1.500.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	1.500.000	1.500.000	100	100,00



4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	1.500.000	1.500.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	1.500.000	1.500.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	1.500.000	1.500.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	2.052.000	2.052.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	1.500.000	1.500.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	1.500.000	1.500.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	720.000	720.000	100	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	1.500.000	1.500.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	1.500.000	1.500.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	3.000.000	3.000.000	100	100,00
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	1.500.000	1.500.000	100	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	2.400.000	2.400.000	100	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	1.500.000	1.500.000	100	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	1.500.000	1.500.000	100	100,00
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	2.266.000	2.266.000	100	100,00
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	3.000.000	3.000.000	100	100,00
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	2.130.000	2.130.000	100	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	1.500.000	1.500.000	100	100,00
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	1.794.000	1.794.000	100	100,00
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	1.500.000	1.500.000	100	100,00
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	1.500.000	1.500.000	100	100,00



25	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	2.496.000	2.496.000	100	100,00
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	1.500.000	1.500.000	100	100,00
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	1.500.000	1.500.000	100	100,00
28	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	2.130.000	2.130.000	100	100,00
29	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Sosial	890.000.000	870.192.613	100	97,77
30	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	80.400.000	78.164.965	100	97,22
31	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	41.946.000	41.154.156	100	98,11
32	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	126.000.000	110.430.363	100	87,64
33	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	27.500.000	25.492.146	100	92,70
34	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	69.000.000	68.167.983	100	98,79
35	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	37.680.000	35.430.751	100	94,03
36	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	118.800.000	118.481.762	100	99,73
37	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	65.700.000	65.494.586	100	99,69
38	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	88.600.000	85.104.100	100	96,05
39	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	67.010.000	62.001.293	100	92,53
40	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	110.400.000	104.655.398	100	94,80
41	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	91.200.000	91.127.500	100	99,92
42	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	66.060.000	60.372.454	100	91,39
43	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	72.600.000	68.346.870	100	94,14



44	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	76.500.000	72.813.248	100	95,18
45	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	53.100.000	52.765.429	100	99,37
46	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	55.800.000	45.462.126	100	81,47
47	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	73.200.000	70.154.735	100	95,84
48	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	42.900.000	42.899.787	100	100,00
49	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	66.600.000	65.727.264	100	98,69
50	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	55.339.000	54.993.923	100	99,38
51	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	72.000.000	63.601.233	100	88,34
52	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	109.954.000	105.605.213	100	96,04
53	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	87.100.000	86.961.550	100	99,84
54	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	40.500.000	39.368.136	100	97,21
55	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	60.713.000	59.790.569	100	98,48
56	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	67.020.000	62.567.884	100	93,36
57	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Sosial	542.300.000	540.645.000	100	99,69
58	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Sosial	30.000.000	29.407.000	100	98,02
59	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Sosial	300.000.000	299.991.000	100	100,00
60	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Sosial	197.166.000	196.662.800	100	99,74
61	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
62	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
63	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
64	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
65	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	15.000.000	15.000.000	100	100,00



66	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	15.000.000	14.995.600	100	99,97
67	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	14.900.000	14.859.250	100	99,73
68	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	15.000.000	15.000.000	100	100,00
69	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	14.371.000	14.371.000	100	100,00
70	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	15.000.000	15.000.000	100	100,00
71	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	8.929.000	8.929.000	100	100,00
72	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	14.410.000	14.410.000	100	100,00
73	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	15.000.000	15.000.000	100	100,00
74	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	18.000.000	18.000.000	100	100,00
75	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	15.000.000	15.000.000	100	100,00
76	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	15.000.000	15.000.000	100	100,00
77	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	13.666.000	13.666.000	100	100,00
78	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	19.050.000	19.050.000	100	100,00
79	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
80	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	15.000.000	15.000.000	100	100,00
81	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	15.000.000	15.000.000	100	100,00
82	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	15.000.000	15.000.000	100	100,00
83	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	10.000.000	10.000.000	100	100,00
84	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	12.000.000	12.000.000	100	100,00
85	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
86	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	15.000.000	15.000.000	100	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

87	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	20.760.000	20.760.000	100	100,00
88	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Sosial	239.440.000	233.840.000	100	97,66
89	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
90	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
91	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
92	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	1.250.000	1.250.000	100	100,00
93	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	6.000.000	6.000.000	100	100,00
94	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	6.000.000	5.992.000	100	99,87
95	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	4.990.000	4.990.000	100	100,00
96	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	5.000.000	5.000.000	100	100,00
97	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	3.939.000	3.934.006	100	99,87
98	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	5.400.000	5.400.000	100	100,00
99	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	3.630.000	3.630.000	100	100,00
100	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	5.000.000	5.000.000	100	100,00
101	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	6.000.000	6.000.000	100	100,00
102	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	5.000.000	5.000.000	100	100,00
103	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	3.000.000	3.000.000	100	100,00
104	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	5.400.000	5.400.000	100	100,00
105	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	6.240.000	6.240.000	100	100,00
106	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	6.000.000	6.000.000	100	100,00
107	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	6.000.000	6.000.000	100	100,00



108	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	6.000.000	6.000.000	100	100,00
109	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	3.500.000	3.500.000	100	100,00
110	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	4.940.000	4.940.000	100	100,00
111	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	3.704.000	3.704.000	100	100,00
112	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	4.000.000	4.000.000	100	100,00
113	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	2.600.000	2.600.000	100	100,00
114	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	2.400.000	2.400.000	100	100,00
115	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	3.510.000	3.510.000	100	100,00
116	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Sosial	50.000.000	49.856.500	100	99,71
117	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
118	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
119	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
120	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	2.800.000	2.800.000	100	100,00
121	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	6.000.000	6.000.000	100	100,00
122	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	6.000.000	6.000.000	100	100,00
123	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	6.000.000	6.000.000	100	100,00
124	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	6.000.000	6.000.000	100	100,00
125	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	5.601.000	5.601.000	100	100,00



126	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	3.984.000	3.984.000	100	100,00
127	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	6.630.000	6.630.000	100	100,00
128	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	6.146.000	6.146.000	100	100,00
129	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	6.000.000	6.000.000	100	100,00
130	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	6.000.000	6.000.000	100	100,00
131	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	6.000.000	6.000.000	100	100,00
132	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	6.000.000	6.000.000	100	100,00
133	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	11.972.000	11.972.000	100	100,00
134	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
135	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	6.000.000	6.000.000	100	100,00
136	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	6.000.000	6.000.000	100	100,00
137	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	6.000.000	6.000.000	100	100,00
138	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
139	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	5.000.000	5.000.000	100	100,00
140	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	6.000.000	6.000.000	100	100,00



141	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	6.000.000	6.000.000	100	100,00
142	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	6.915.000	6.915.000	100	100,00
143	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Sosial	545.000.000	538.530.800	100	98,81
144	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	105.397.000	105.397.000	100	100,00
145	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	100.000.000	100.000.000	100	100,00
146	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	100.000.000	100.000.000	100	100,00
147	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	72.380.000	72.380.000	100	100,00
148	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	150.000.000	150.000.000	100	100,00
149	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	100.371.000	100.371.000	100	100,00
150	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	55.500.000	55.466.000	100	99,94
151	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	100.000.000	100.000.000	100	100,00
152	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	131.464.000	131.464.000	100	100,00
153	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	96.580.000	90.728.000	100	93,94
154	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	99.610.000	99.610.000	100	100,00
155	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	102.865.000	102.865.000	100	100,00
156	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	98.810.000	98.810.000	100	100,00
157	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	100.000.000	100.000.000	100	100,00
158	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	100.000.000	100.000.000	100	100,00
159	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	95.632.000	95.632.000	100	100,00
160	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	125.377.000	125.377.000	100	100,00



161	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	129.718.000	126.150.000	100	97,25
162	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	100.000.000	100.000.000	100	100,00
163	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	112.840.000	112.840.000	100	100,00
164	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	105.758.000	105.758.000	100	100,00
165	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	138.872.000	138.872.000	100	100,00
166	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrastra Pemalang	104.937.000	104.937.000	100	100,00
167	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	85.370.000	85.370.000	100	100,00
168	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	114.760.000	114.760.000	100	100,00
169	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	81.492.000	81.492.000	100	100,00
170	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	117.402.000	117.402.000	100	100,00
171	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Sosial	25.000.000	24.954.500	100	99,82
172	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	1.000.000	1.000.000	100	100,00
173	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	1.210.000	1.210.000	100	100,00
174	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	2.640.000	2.640.000	100	100,00
175	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	1.440.000	1.440.000	100	100,00
176	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	1.000.000	1.000.000	100	100,00
177	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	2.610.000	2.515.000	100	96,36
178	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	1.000.000	1.000.000	100	100,00
179	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	2.000.000	2.000.000	100	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

180	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	1.173.000	1.173.000	100	100,00
181	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	1.000.000	1.000.000	100	100,00
182	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	1.000.000	1.000.000	100	100,00
183	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	1.200.000	1.200.000	100	100,00
184	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	1.000.000	1.000.000	100	100,00
185	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	1.000.000	1.000.000	100	100,00
186	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	2.640.000	2.610.000	100	98,86
187	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	1.200.000	1.200.000	100	100,00
188	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	1.370.000	1.370.000	100	100,00
189	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	1.000.000	1.000.000	100	100,00
190	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	1.200.000	1.200.000	100	100,00
191	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	1.720.000	1.720.000	100	100,00
192	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	1.200.000	1.200.000	100	100,00
193	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	1.000.000	1.000.000	100	100,00
194	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	1.620.000	1.620.000	100	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

195	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	1.000.000	1.000.000	100	100,00
196	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	2.640.000	2.640.000	100	100,00
197	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat Dinas Sosial	132.500.000	132.400.000	100	99,92
198	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	30.000.000	30.000.000	100	100,00
199	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	32.437.000	32.437.000	100	100,00
200	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	40.000.000	40.000.000	100	100,00
201	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	40.000.000	40.000.000	100	100,00
202	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	45.000.000	44.997.850	100	100,00
203	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	21.000.000	21.000.000	100	100,00
204	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	7.000.000	7.000.000	100	100,00
205	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	20.000.000	20.000.000	100	100,00
206	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	40.000.000	40.000.000	100	100,00
207	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	3.600.000	3.600.000	100	100,00
208	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	40.000.000	40.000.000	100	100,00
209	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	15.000.000	15.000.000	100	100,00
210	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	11.043.000	11.043.000	100	100,00
211	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	19.964.000	19.964.000	100	100,00
212	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	37.319.000	37.319.000	100	100,00
213	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	40.000.000	40.000.000	100	100,00
214	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	38.935.000	38.935.000	100	100,00



215	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	40.000.000	40.000.000	100	100,00
216	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	26.915.000	26.915.000	100	100,00
217	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	20.000.000	20.000.000	100	100,00
218	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	26.724.000	26.724.000	100	100,00
219	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	24.994.000	24.994.000	100	100,00
220	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Kerti Pemalang	33.920.000	33.920.000	100	100,00
221	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	17.950.000	17.950.000	100	100,00
222	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	10.060.000	10.060.000	100	100,00
223	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Sosial	1.738.341.000	1.722.940.250	100	99,11
224	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	740.000.000	740.000.000	100	100,00
225	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	1.105.000.000	1.105.000.000	100	100,00
226	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	1.178.000.000	1.178.000.000	100	100,00
227	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	838.600.000	838.600.000	100	100,00
228	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	1.470.000.000	1.470.000.000	100	100,00
229	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	958.151.000	958.144.000	100	100,00
230	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	1.211.000.000	1.211.000.000	100	100,00
231	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	1.099.862.000	1.099.862.000	100	100,00
232	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	958.890.000	958.890.000	100	100,00
233	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	951.700.000	951.700.000	100	100,00
234	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	1.277.500.000	1.277.500.000	100	100,00
235	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	1.071.345.000	1.071.345.000	100	100,00



236	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	843.844.000	843.844.000	100	100,00
237	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	982.800.000	982.800.000	100	100,00
238	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	956.200.000	956.200.000	100	100,00
239	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	1.322.580.000	1.322.580.000	100	100,00
240	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	1.560.764.000	1.560.050.000	100	99,95
241	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	1.141.525.000	1.141.525.000	100	100,00
242	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	1.104.425.000	1.104.425.000	100	100,00
243	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	1.287.500.000	1.287.500.000	100	100,00
244	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	917.648.000	917.648.000	100	100,00
245	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	1.181.132.000	1.181.132.000	100	100,00
246	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	886.000.000	886.000.000	100	100,00
247	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	1.032.000.000	1.032.000.000	100	100,00
248	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	922.500.000	922.500.000	100	100,00
249	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	968.800.000	968.800.000	100	100,00
250	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	1.032.000.000	1.032.000.000	100	100,00
251	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Sosial	1.234.511.000	1.057.104.356	100	85,63
252	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	34.963.000	34.925.500	100	99,89
253	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	30.000.000	30.000.000	100	100,00
254	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	30.000.000	30.000.000	100	100,00
255	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	30.000.000	30.000.000	100	100,00



256	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	30.000.000	30.000.000	100	100,00
257	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	50.550.000	50.550.000	100	100,00
258	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	27.000.000	27.000.000	100	100,00
259	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	40.000.000	40.000.000	100	100,00
260	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	24.060.000	24.060.000	100	100,00
261	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	30.750.000	30.750.000	100	100,00
262	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	34.200.000	34.200.000	100	100,00
263	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	41.760.000	41.760.000	100	100,00
264	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	35.400.000	35.400.000	100	100,00
265	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	31.650.000	31.650.000	100	100,00
266	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	30.000.000	30.000.000	100	100,00
267	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	32.440.000	32.440.000	100	100,00
268	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	33.460.000	33.410.000	100	99,85
269	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	45.345.000	45.310.000	100	99,92
270	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	40.000.000	40.000.000	100	100,00
271	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	40.000.000	40.000.000	100	100,00
272	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	38.890.000	38.890.000	100	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

273	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	45.500.000	45.492.000	100	99,98
274	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	44.000.000	44.000.000	100	100,00
275	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	40.000.000	40.000.000	100	100,00
276	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	43.550.000	43.550.000	100	100,00
277	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	30.620.000	30.620.000	100	100,00
278	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	49.540.000	49.540.000	100	100,00
279	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Sosial	2.305.680.000	2.249.694.250	100	97,57
280	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	220.800.000	218.600.000	100	99,00
281	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	264.600.000	254.850.000	100	96,32
282	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	587.960.000	587.960.000	100	100,00
283	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	357.990.000	357.390.000	100	99,83
284	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	255.600.000	255.600.000	100	100,00
285	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	284.820.000	284.820.000	100	100,00
286	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	618.480.000	599.730.000	100	96,97
287	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	306.640.000	305.340.000	100	99,58
288	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	534.235.000	522.985.000	100	97,89
289	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	653.280.000	652.080.000	100	99,82
290	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	537.780.000	537.780.000	100	100,00
291	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	290.250.000	290.250.000	100	100,00



292	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	425.690.000	425.690.000	100	100,00
293	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	331.240.000	330.040.000	100	99,64
294	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	370.780.000	370.780.000	100	100,00
295	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	280.400.000	280.400.000	100	100,00
296	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	443.660.000	425.160.000	100	95,83
297	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	387.585.000	385.585.000	100	99,48
298	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	274.100.000	272.900.000	100	99,56
299	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	472.000.000	471.000.000	100	99,79
300	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	267.300.000	267.300.000	100	100,00
301	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	559.140.000	557.640.000	100	99,73
302	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrastra Pemalang	326.530.000	326.530.000	100	100,00
303	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	272.980.000	268.830.000	100	98,48
304	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	205.650.000	205.650.000	100	100,00
305	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	482.000.000	482.000.000	100	100,00
306	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	496.400.000	494.005.000	100	99,52
307	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	4.500.000	4.500.000	100	100,00
308	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suk Mulyo Tegal	3.000.000	3.000.000	100	100,00
309	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Samektokarti Pemalang	3.500.000	3.500.000	100	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.620.836.000	3.574.212.976		98,71
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	35.000.000	35.000.000	100	100,00



2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	57.000.000	57.000.000	100	100,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	20.000.000	20.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	15.000.000	15.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	14.000.000	14.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	11.000.000	11.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	15.000.000	15.000.000	100	100,00
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	15.000.000	15.000.000	100	100,00
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	15.000.000	15.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	15.000.000	15.000.000	100	100,00
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	33.728.000	33.728.000	100	100,00
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	25.600.000	25.600.000	100	100,00
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	63.000.000	63.000.000	100	100,00
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	20.000.000	20.000.000	100	100,00
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	15.000.000	15.000.000	100	100,00
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	30.000.000	30.000.000	100	100,00
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	8.000.000	8.000.000	100	100,00



22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	13.000.000	13.000.000	100	100,00
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Sosial	650.000.000	640.264.732	100	98,50
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	45.000.000	44.890.000	100	99,76
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	63.500.000	63.500.000	100	100,00
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	10.000.000	10.000.000	100	100,00
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	45.119.000	45.119.000	100	100,00
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	15.000.000	15.000.000	100	100,00
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	15.000.000	15.000.000	100	100,00
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	6.000.000	6.000.000	100	100,00
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	10.000.000	10.000.000	100	100,00
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	15.000.000	15.000.000	100	100,00
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	15.000.000	15.000.000	100	100,00
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	15.000.000	15.000.000	100	100,00
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	15.000.000	15.000.000	100	100,00
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	65.000.000	64.800.000	100	99,69
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	20.700.000	20.700.000	100	100,00
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	66.900.000	66.900.000	100	100,00
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	25.000.000	25.000.000	100	100,00
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	15.000.000	15.000.000	100	100,00



43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrastra Pemalang	40.000.000	40.000.000	100	100,00
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	5.220.000	5.220.000	100	100,00
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	8.000.000	8.000.000	100	100,00
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	38.000.000	38.000.000	100	100,00
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Sekretariat Dinas Sosial	50.000.000	50.000.000	100	100,00
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Sosial	323.500.000	313.908.675	100	97,04
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	44.440.000	44.440.000	100	100,00
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	23.500.000	23.500.000	100	100,00
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	27.900.000	27.900.000	100	100,00
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	22.500.000	22.500.000	100	100,00
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	22.500.000	22.500.000	100	100,00
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	43.995.000	43.607.000	100	99,12
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	22.500.000	22.500.000	100	100,00
57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	12.150.000	12.150.000	100	100,00
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	28.500.000	25.915.600	100	90,93
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	19.306.000	19.306.000	100	100,00
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	22.500.000	22.500.000	100	100,00
61	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	22.500.000	22.500.000	100	100,00



62	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	20.000.000	20.000.000	100	100,00
63	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	22.500.000	22.500.000	100	100,00
64	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	22.500.000	22.500.000	100	100,00
65	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	15.843.000	15.843.000	100	100,00
66	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	17.230.000	17.230.000	100	100,00
67	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	29.502.000	29.502.000	100	100,00
68	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	22.500.000	22.500.000	100	100,00
69	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	22.500.000	22.500.000	100	100,00
70	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	22.500.000	22.500.000	100	100,00
71	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	20.900.000	19.745.469	100	94,48
72	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	15.000.000	14.845.000	100	98,97
73	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	22.500.000	22.500.000	100	100,00
74	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	14.028.000	14.028.000	100	100,00
75	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	22.500.000	22.500.000	100	100,00
76	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	34.800.000	34.450.000	100	98,99
77	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Sosial	102.500.000	99.575.000	100	97,15
78	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	2.650.000	2.650.000	100	100,00
79	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	3.550.000	3.550.000	100	100,00



80	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	3.700.000	3.700.000	100	100,00
81	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	3.700.000	3.700.000	100	100,00
82	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	3.700.000	3.700.000	100	100,00
83	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	4.000.000	4.000.000	100	100,00
84	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	2.000.000	2.000.000	100	100,00
85	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	2.400.000	2.400.000	100	100,00
86	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	1.000.000	1.000.000	100	100,00
87	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	2.000.000	2.000.000	100	100,00
88	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	2.650.000	2.650.000	100	100,00
89	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	3.000.000	3.000.000	100	100,00
90	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	1.000.000	1.000.000	100	100,00
91	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	1.000.000	1.000.000	100	100,00
92	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	1.000.000	1.000.000	100	100,00
93	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	2.500.000	2.500.000	100	100,00
94	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	1.500.000	1.500.000	100	100,00
95	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	1.000.000	1.000.000	100	100,00
96	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	1.500.000	1.500.000	100	100,00
97	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	1.000.000	1.000.000	100	100,00
98	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	1.700.000	1.700.000	100	100,00



99	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	500.000	500.000	100	100,00
100	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	1.500.000	1.500.000	100	100,00
101	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	2.000.000	2.000.000	100	100,00
102	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	1.000.000	1.000.000	100	100,00
103	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Sosial	38.000.000	37.710.000	100	99,24
104	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	3.700.000	3.700.000	100	100,00
105	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	5.825.000	5.825.000	100	100,00
106	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	7.500.000	7.500.000	100	100,00
107	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	7.500.000	7.500.000	100	100,00
108	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	4.500.000	4.500.000	100	100,00
109	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	5.100.000	5.100.000	100	100,00
110	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	3.000.000	3.000.000	100	100,00
111	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	1.850.000	1.850.000	100	100,00
112	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	2.250.000	2.250.000	100	100,00
113	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	1.500.000	1.500.000	100	100,00
114	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	2.400.000	2.400.000	100	100,00
115	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	5.000.000	5.000.000	100	100,00
116	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	3.000.000	3.000.000	100	100,00
117	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	2.500.000	2.500.000	100	100,00



118	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	2.000.000	2.000.000	100	100,00
119	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	3.000.000	3.000.000	100	100,00
120	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	4.900.000	4.900.000	100	100,00
121	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	1.200.000	1.200.000	100	100,00
122	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	2.500.000	2.500.000	100	100,00
123	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	1.400.000	1.400.000	100	100,00
124	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	3.000.000	3.000.000	100	100,00
125	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	2.250.000	2.250.000	100	100,00
126	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti	1.700.000	1.700.000	100	100,00
127	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	6.000.000	6.000.000	100	100,00
128	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Sosial	67.500.000	67.340.000	100	99,76
129	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	2.100.000	2.100.000	100	100,00
130	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Balai Rehabilitasi Sosial Anak Budhi Sakti Banyumas	5.500.000	5.500.000	100	100,00
131	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang	7.000.000	7.000.000	100	100,00
132	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	2.000.000	2.000.000	100	100,00
133	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Sosial	379.500.000	360.520.500	100	95,00
134	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen	16.600.000	16.600.000	100	100,00
135	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	66.550.000	66.550.000	100	100,00
136	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	49.100.000	49.100.000	100	100,00
137	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Rehabilitasi Sosial Eks NAPZA Mandiri Semarang	10.000.000	10.000.000	100	100,00



3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.532.385.000	1.531.920.000		99,97
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang	25.000.000	25.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang	75.000.000	75.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza Mandiri Semarang	60.000.000	60.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	50.000.000	50.000.000	100	100,00
5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta	52.800.000	52.800.000	100	100,00
6	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas	35.410.000	35.410.000	100	100,00
7	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran	75.000.000	74.700.000	100	99,60
8	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo	51.000.000	51.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal	47.240.000	47.240.000	100	100,00
10	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	42.000.000	42.000.000	100	100,00
11	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Dharma Putera Purworejo	75.000.000	74.910.000	100	99,88
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pematang	37.500.000	37.500.000	100	100,00
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	60.000.000	60.000.000	100	100,00
14	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Penganthi Temanggung	63.700.000	63.700.000	100	100,00
15	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	52.500.000	52.500.000	100	100,00
16	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap	37.500.000	37.500.000	100	100,00
17	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal	87.600.000	87.600.000	100	100,00
18	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Pendowo Kudus	53.960.000	53.960.000	100	100,00
19	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang	56.250.000	56.175.000	100	99,87
20	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo	67.500.000	67.500.000	100	100,00



21	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda Raharjo Sragen	48.000.000	48.000.000	100	100,00
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	60.000.000	60.000.000	100	100,00
23	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang	71.250.000	71.250.000	100	100,00
24	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang	89.500.000	89.500.000	100	100,00
25	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Pgot Dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang	29.375.000	29.375.000	100	100,00
26	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	67.500.000	67.500.000	100	100,00
27	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sunu Ngestitomo Jepara	61.800.000	61.800.000	100	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.982.410.000	1.982.410.000		100,00
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Sosial	1.018.120.000	1.018.120.000	100	100,00
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kumuda Putera Puteri Magelang	226.790.000	226.790.000	100	100,00
3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga	150.000.000	150.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Kasih Mesra Demak	100.000.000	100.000.000	100	100,00
5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali	112.500.000	112.500.000	100	100,00
6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal	140.000.000	140.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kartini Tawangmangu	130.000.000	130.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Panti Rehabilitas Sosial Anak Harapan Bangsa Rembang	105.000.000	105.000.000	100	100,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	5.508.400.000	5.495.871.000		99,77
1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	3.458.400.000	3.454.720.000	100	99,89
2	Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional. Veteran dan Keluarganya	1.000.000.000	993.730.000	100	99,37
3	Kegiatan Penyusunan SPM keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	150.000.000	150.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	500.000.000	498.635.000	100	99,73



5	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui Desa Sejahtera	400.000.000	398.786.000	100	99,70
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	5.532.551.000	5.415.198.538		97,88
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat	1.000.000.000	993.600.000	100	99,36
2	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap PMKS	800.000.000	787.272.500	100	98,41
3	Kegiatan Perlindungan Sosial Terhadap Lanjut Usia	882.551.000	854.433.950	100	96,81
4	Kegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial terhadap Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	500.000.000	489.915.088	100	97,98
5	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti - Panti Sosial Pemda Jawa Tengah	1.150.000.000	1.122.181.000	100	97,58
6	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Nakal / ABH	400.000.000	388.713.000	100	97,18
7	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap anak Jalanan	400.000.000	380.513.000	100	95,13
8	Kegiatan Penanganan Anak Terlantar	400.000.000	398.570.000	100	99,64
7	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	1.700.000.000	1.685.981.000		99,18
1	Kegiatan Pembinaan PMKS melalui Warung Sosial	600.000.000	588.041.000	100	98,01
2	Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	300.000.000	299.480.000	100	99,83
3	Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	300.000.000	299.725.000	100	99,91
4	Kegiatan Penjaringan dan Pendamping Sosial bagi Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan Kelompok Rentan	500.000.000	498.735.000	100	99,75
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	4.338.300.000	4.318.226.250		99,54
1	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan karang Taruna	900.000.000	893.321.250	100	99,26
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha	300.000.000	299.000.000	100	99,67
3	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	100.000.000	94.030.000	100	94,03
4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Orsos yang bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS)	300.000.000	299.190.000	100	99,73
5	Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan Kesetiakawanan sosial	400.000.000	400.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa Tengah	175.000.000	174.685.000	100	99,82
7	Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	2.063.300.000	2.063.300.000	100	100,00
8	Kegiatan Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga	100.000.000	94.700.000	100	94,70
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.200.000.000	962.364.500		80,20



1	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana	600.000.000	396.792.500	100	66,13
2	Kegiatan Pengerahan Taruna Siaga Bencana(TAGANA) dalam bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana)	400.000.000	368.382.000	100	92,10
3	Kegiatan Pemantapan TAGANA	200.000.000	197.190.000	100	98,60

b). SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 11.441.000.000,00 realisasi sebesar Rp 10.630.807.522,00 atau 92,92% yang terdiri dari 7 program dan 60 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.780.105.000	2.716.555.081		97,71
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	13.240.500	100	69,69
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	522.000.000	497.626.801	100	95,33
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	100.000.000	99.949.600	100	99,95
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	343.837.000	343.450.000	100	99,89
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	44.739.400	100	99,42
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	47.000.000	46.566.820	100	99,08
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.960.000	17.700.100	100	98,55
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.308.000	24.565.145	100	93,38
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	14.000.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	57.000.000	36.992.535	100	64,90
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	840.000.000	839.824.180	100	99,98
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	748.000.000	737.900.000	100	98,65
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	698.595.000	667.954.830		95,61
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	141.000.000	136.960.200	100	97,13
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	370.000.000	346.116.475	100	93,54
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	90.000.000	87.478.655	100	97,20
4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	97.595.000	97.399.500	100	99,80
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	179.000.000	161.693.930		90,33



1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000	44.060.415	100	97,91
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	44.504.911	100	98,90
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	43.761.580	100	97,25
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	44.000.000	29.367.024	100	66,74
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	6.738.800.000	6.089.118.978		90,36
1	Kegiatan Penyusunan Peta Resiko Bencana Provinsi Jawa Tengah	142.500.000	139.054.000	100	97,58
2	Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana	47.500.000	42.864.500	100	90,24
3	Kegiatan Gladi Manajemen Bencana	190.000.000	183.988.600	100	96,84
4	Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat	720.000.000	260.835.500	100	36,23
5	Kegiatan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana	95.000.000	94.287.000	100	99,25
6	Kegiatan Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggara Bencana	45.000.000	44.192.050	100	98,20
7	Kegiatan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah	95.000.000	94.100.000	100	99,05
8	Kegiatan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah	47.500.000	47.000.000	100	98,95
9	Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan	43.000.000	34.868.170	100	81,09
10	Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah	95.000.000	89.369.275	100	94,07
11	Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	47.500.000	42.676.600	100	89,85
12	Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	95.000.000	92.774.800	100	97,66
13	Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana	95.000.000	82.991.500	100	87,36
14	Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi (Contingency Plan)	142.500.000	135.320.000	100	94,96
15	Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)	47.500.000	45.731.300	100	96,28
16	Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	114.000.000	107.468.000	100	94,27
17	Kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat	589.000.000	583.319.425	100	99,04
18	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana	160.000.000	159.760.000	100	99,85
19	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	139.500.000	139.235.200	100	99,81
20	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana	90.000.000	83.813.664	100	93,13
21	Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana	95.000.000	94.299.260	100	99,26
22	Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Losses Assessment) dan JITU PB	190.000.000	190.000.000	100	100,00
23	Kegiatan Koordinasi Penanganan Bencana	90.000.000	74.431.239	100	82,70
24	Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	760.000.000	718.061.225	100	94,48



25	Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana	140.000.000	130.094.900	100	92,92
26	Kegiatan Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB	140.000.000	132.123.120	100	94,37
27	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng	510.000.000	507.131.950	100	99,44
28	Kegiatan Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	1.450.000.000	1.420.526.100	100	97,97
29	Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng	236.000.000	236.000.000	100	100,00
30	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi	87.300.000	82.801.600	100	94,85
5	PROGRAM POS. TELEKOMUNIKASI DAN SAR	526.500.000	501.736.797		95,30
1	Kegiatan Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan	110.000.000	104.385.797	100	94,90
2	Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan. Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	200.000.000	184.834.300	100	92,42
3	Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR	90.000.000	87.800.500	100	97,56
4	Kegiatan SAR pada Event Angkutan Lebaran. Natal. Tahun Baru. dan sedekah Laut/Sura	60.000.000	58.216.200	100	97,03
5	Kegiatan Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana	66.500.000	66.500.000	100	100,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI. INFORMASI DAN MEDIA MASSA	170.000.000	159.730.359		93,96
1	Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah	170.000.000	159.730.359	100	93,96
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA	348.000.000	334.017.547		95,98
1	Kegiatan Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)	53.000.000	47.497.063	100	89,62
2	Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan	150.000.000	144.652.125	100	96,43
3	Kegiatan Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan	100.000.000	99.606.000	100	99,61
4	Kegiatan Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan	45.000.000	42.262.359	100	93,92

7. URUSAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 34.210.600.000,00 realisasi sebesar Rp 31.386.279.693,00 atau 91,74% yang terdiri dari 7 program dan 191 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.783.814.000	10.018.636.524		92,90
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	40.000.000	37.642.410	100	94,11
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Latihan Kerja Industri	8.000.000	5.103.000	100	63,79
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Latihan Kerja Pertanian	10.000.000	9.995.600	100	99,96
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Latihan Kerja Luar Negeri	6.000.000	6.000.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	8.000.000	7.994.560	100	99,93
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	8.000.000	7.998.550	100	99,98
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	5.000.000	4.827.000	100	96,54
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	1.124.000.000	903.890.073	100	80,42
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Latihan Kerja Industri	159.000.000	146.510.162	100	92,14
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Latihan Kerja Pertanian	82.000.000	71.275.035	100	86,92
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Latihan Kerja Luar Negeri	375.000.000	209.168.696	100	55,78
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	158.400.000	133.407.474	100	84,22
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	97.035.000	81.940.428	100	84,44
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat	140.000.000	120.554.845	100	86,11
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	70.000.000	68.794.406	100	98,28
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	360.000.000	345.390.000	100	95,94
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Latihan Kerja Pertanian	17.400.000	17.400.000	100	100,00



18	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	60.000.000	59.696.000	100	99,49
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	67.000.000	67.000.000	100	100,00
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	22.500.000	22.500.000	100	100,00
21	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	100.000.000	99.882.000	100	99,88
22	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	22.500.000	22.350.000	100	99,33
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	594.000.000	594.000.000	100	100,00
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Industri	213.000.000	211.331.811	100	99,22
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Pertanian	140.000.000	138.772.084	100	99,12
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Luar Negeri	275.000.000	235.384.700	100	85,59
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	150.000.000	149.778.050	100	99,85
28	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	90.000.000	89.909.461	100	99,90
29	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	135.597.000	134.063.160	100	98,87
30	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	125.000.000	124.645.100	100	99,72
31	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Latihan Kerja Industri	28.000.000	28.000.000	100	100,00
32	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Latihan Kerja Pertanian	28.000.000	28.000.000	100	100,00
33	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	26.000.000	26.000.000	100	100,00
34	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	30.000.000	29.998.000	100	99,99
35	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	35.000.000	34.999.900	100	100,00
36	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	30.000.000	30.000.000	100	100,00
37	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	185.840.000	185.382.790	100	99,75
38	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Latihan Kerja Industri	28.000.000	27.991.700	100	99,97
39	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Latihan Kerja Pertanian	40.000.000	40.000.000	100	100,00
40	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Latihan Kerja Luar Negeri	26.000.000	26.000.000	100	100,00



41	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	26.000.000	25.999.900	100	100,00
42	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	40.000.000	39.999.900	100	100,00
43	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	27.000.000	26.999.000	100	100,00
44	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	40.000.000	36.499.000	100	91,25
45	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Latihan Kerja Industri	18.700.000	18.700.000	100	100,00
46	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Latihan Kerja Pertanian	15.000.000	15.000.000	100	100,00
47	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	80.000.000	80.000.000	100	100,00
48	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	50.400.000	50.400.000	100	100,00
49	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	11.000.000	10.967.400	100	99,70
50	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	10.000.000	10.000.000	100	100,00
51	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	60.000.000	59.528.700	100	99,21
52	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Latihan Kerja Industri	9.500.000	9.125.000	100	96,05
53	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Latihan Kerja Pertanian	20.000.000	19.834.000	100	99,17
54	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Latihan Kerja Luar Negeri	20.000.000	20.000.000	100	100,00
55	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	13.000.000	12.972.000	100	99,78
56	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	10.000.000	9.924.465	100	99,24
57	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	10.000.000	9.842.000	100	98,42
58	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	10.000.000	9.863.000	100	98,63
59	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Latihan Kerja Industri	4.000.000	2.820.000	100	70,50
60	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Latihan Kerja Pertanian	6.757.000	6.756.400	100	99,99



61	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Latihan Kerja Luar Negeri	4.000.000	4.000.000	100	100,00
62	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	4.000.000	3.977.500	100	99,44
63	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	4.000.000	3.973.250	100	99,33
64	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	6.000.000	5.901.000	100	98,35
65	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	320.000.000	274.639.000	100	85,82
66	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Latihan Kerja Industri	15.000.000	10.087.300	100	67,25
67	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Latihan Kerja Pertanian	15.000.000	14.984.000	100	99,89
68	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Latihan Kerja Luar Negeri	15.000.000	15.000.000	100	100,00
69	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	15.000.000	14.994.300	100	99,96
70	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	15.000.000	14.987.600	100	99,92
71	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	15.000.000	15.000.000	100	100,00
72	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	1.307.688.000	1.305.267.819	100	99,81
73	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Latihan Kerja Industri	126.700.000	124.402.000	100	98,19
74	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Latihan Kerja Pertanian	100.000.000	99.717.500	100	99,72
75	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Latihan Kerja Luar Negeri	100.000.000	99.839.830	100	99,84
76	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	100.000.000	98.969.380	100	98,97
77	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	94.965.000	94.964.498	100	100,00
78	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	110.000.000	109.866.000	100	99,88
79	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	1.166.802.000	1.094.568.105	100	93,81
80	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri	371.914.000	293.904.000	100	79,02
81	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Latihan Kerja Pertanian	164.000.000	163.933.200	100	99,96



82	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Latihan Kerja Luar Negeri	300.000.000	296.957.600	100	98,99
83	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	453.500.000	443.860.100	100	97,87
84	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	195.454.000	192.666.687	100	98,57
85	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	164.162.000	163.368.095	100	99,52
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.593.697.000	3.492.110.206		97,17
1	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	140.000.000	139.800.000	100	99,86
2	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Latihan Kerja Industri	57.500.000	57.170.000	100	99,43
3	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Latihan Kerja Pertanian	85.743.000	85.343.000	100	99,53
4	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Latihan Kerja Luar Negeri	75.000.000	74.800.000	100	99,73
5	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	224.400.000	222.628.000	100	99,21
6	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	50.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	75.000.000	74.492.393	100	99,32
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	200.000.000	197.589.700	100	98,79
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Industri	50.000.000	50.000.000	100	100,00
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Pertanian	50.000.000	48.913.282	100	97,83
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	150.000.000	149.583.000	100	99,72
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Industri	75.000.000	74.908.000	100	99,88
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Pertanian	100.000.000	98.709.000	100	98,71
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	100.000.000	99.000.000	100	99,00
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	79.709.000	79.279.000	100	99,46
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	50.000.000	100	100,00



17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	50.000.000	49.700.000	100	99,40
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	255.000.000	249.685.225	100	97,92
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Latihan Kerja Industri	60.000.000	59.554.298	100	99,26
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Latihan Kerja Pertanian	35.000.000	33.770.840	100	96,49
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Latihan Kerja Luar Negeri	60.000.000	59.984.500	100	99,97
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	71.000.000	70.779.200	100	99,69
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	49.904.450	100	99,81
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	60.000.000	59.980.418	100	99,97
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	145.750.000	100.765.000	70,6	69,14
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Industri	30.000.000	30.000.000	100	100,00
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Pertanian	20.000.000	18.807.500	100	94,04
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	50.000.000	50.000.000	100	100,00
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	38.500.000	38.390.000	100	99,71
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	12.000.000	12.000.000	100	100,00
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	15.000.000	14.328.000	100	95,52
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	30.000.000	13.440.000	100	44,80
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Industri	14.000.000	14.000.000	100	100,00
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Pertanian	7.000.000	6.880.000	100	98,29
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri	15.000.000	15.000.000	100	100,00



36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	3.320.000	3.320.000	100	100,00
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	3.000.000	2.955.000	100	98,50
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	9.000.000	9.000.000	100	100,00
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	15.000.000	9.300.000	100	62,00
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Latihan Kerja Industri	7.000.000	7.000.000	100	100,00
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Latihan Kerja Pertanian	7.000.000	7.000.000	100	100,00
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Latihan Kerja Luar Negeri	25.000.000	25.000.000	100	100,00
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	3.000.000	3.000.000	100	100,00
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	3.000.000	3.000.000	100	100,00
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	8.000.000	8.000.000	100	100,00
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	200.000.000	189.914.000	100	94,96
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Latihan Kerja Industri	35.000.000	34.996.000	100	99,99
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Latihan Kerja Pertanian	29.000.000	28.600.000	100	98,62
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Latihan Kerja Luar Negeri	50.000.000	50.000.000	100	100,00
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	45.000.000	44.647.000	100	99,22
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	66.000.000	66.000.000	100	100,00
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	20.000.000	19.728.000	100	98,64
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Latihan Kerja Industri	50.000.000	50.000.000	100	100,00
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Latihan Kerja Pertanian	12.100.000	11.975.400	100	98,97
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	60.175.000	58.223.000	100	96,76
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi Dan Kependudukan	30.000.000	29.914.000	100	99,71



57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Latihan Kerja Industri	20.000.000	20.000.000	100	100,00
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Latihan Kerja Pertanian	250.000.000	248.875.000	100	99,55
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Latihan Kerja Luar Negeri	20.000.000	20.000.000	100	100,00
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes	20.000.000	19.998.000	100	99,99
61	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	7.500.000	7.500.000	100	100,00
62	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian. Tanaman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	15.000.000	14.980.000	100	99,87
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	140.000.000	139.778.872		99,84
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	140.000.000	139.778.872	100	99,84
4	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	2.790.000.000	2.688.630.360		96,37
1	Kegiatan pembinaan masy penganggur melalui pengembangan kewirausahaan	521.074.000	508.236.200	100	97,54
2	Kegiatan Pelayanan. penempatan. pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri	1.145.000.000	1.105.473.164	100	96,55
3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	508.926.000	489.622.900	100	96,21
4	Kegiatan Penyusunan Database Ketenagakerjaan	75.000.000	74.512.750	100	99,35
5	Kegiatan Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKAD	165.000.000	151.164.500	100	91,61
6	Kegiatan Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000	138.607.930	100	92,41
7	Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Perencanaan Bidang Nakertransduk	225.000.000	221.012.916	100	98,23
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.140.141.000	7.786.615.100		95,66
1	Kegiatan Pelatihan Kerja bagi CTKI LN	1.095.000.000	1.066.645.800	100	97,41
2	Kegiatan Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM	193.240.000	175.550.000	100	90,85
3	Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pelatihan Kerja	200.000.000	194.000.000	100	97,00
4	Kegiatan Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS	200.000.000	195.877.650	100	97,94
5	Pelatihan pertanian di sektor rokok/cukai rokok (DBHCHT)	1.622.000.000	1.597.438.600	100	98,49
6	Peningkatan peran dan fungsi BLKP melalui ISO 9001 : 2008	60.000.000	58.699.500	100	97,83
7	Pelatihan dan Pemagangan dalam dan Luar Negeri	523.856.000	495.578.050	100	94,60
8	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	205.000.000	197.765.000	100	96,47



9	Pelatihan. pengukuran dan pemeliharaan produktivitas	307.957.000	301.336.000	100	97,85
10	Pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri	566.974.000	484.054.000	100	85,37
11	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Produktivitas	189.000.000	185.234.500	100	98,01
12	Kegiatan Uji Kompetensi. Identifikasi Data Pilah Responsif Gender yang Tersertifikasi dan Data Base Standarisasi dan Sertifikasi	271.570.000	243.696.000	100	89,74
13	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	150.000.000	139.690.000	100	93,13
14	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi DBHCHT di BLKI Cilacap	1.500.000.000	1.448.442.000	100	96,56
15	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau Daerah penghasil bahan baku industri hasil Tembakau	1.055.544.000	1.002.608.000	100	94,98
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN LEMBAGA	5.922.138.000	5.702.520.231		96,29
1	Penetapan Upah Minimum	751.372.000	742.201.500	100	98,78
2	Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	351.679.000	340.726.700	100	96,89
3	Penanganan Kasus Kecelakaan Kerja/Jamsostek dan Penempatan TKI	100.920.000	97.730.000	100	96,84
4	Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri	196.099.000	155.216.300	100	79,15
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/ SB	395.374.000	347.115.701	100	87,79
6	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jamsos	150.000.000	148.688.000	100	99,13
7	Pembinaan syarat kerja dan Jaminan Sosial di dalam dan di luar Hubungan Kerja	122.496.000	117.669.000	100	96,06
8	Kegiatan Pengujian lingkungan sektor industri. ambient dan emisi stack	1.513.280.000	1.501.083.000	100	99,19
9	Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan	250.000.000	219.773.616	100	87,91
10	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja di Sektor Industri	150.000.000	142.310.012	100	94,87
11	Kegiatan Pengembangan dan Akreditasi Laboratorium BPPKH Prov. Jateng	75.300.000	69.415.032	100	92,18
12	Kegiatan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	186.590.000	183.507.000	100	98,35
13	Forum koordinasi LKS Tripartite	529.661.000	506.464.500	100	95,62
14	Kegiatan Penyelesaian PHI/PHK/Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan	234.367.000	233.829.000	100	99,77
15	Kegiatan Penyelesaian kasus TKI bermasalah	150.000.000	140.582.000	100	93,72
16	Pengembangan data base kasus ketenagakerjaan	115.000.000	112.291.000	100	97,64
17	Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	500.000.000	496.060.700	100	99,21
18	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana Kesejahteraan Pekerja	150.000.000	147.857.170	100	98,57
7	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	2.840.810.000	1.557.988.400		54,84
1	Kegiatan Pelatihan transmigrasi	150.000.000	78.796.350	100	52,53
2	Kegiatan Penyiapan. Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi	2.615.810.000	1.413.616.750	100	54,04
3	Pemantauan Transmigran Pasca Penempatan	75.000.000	65.575.300	100	87,43



8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemberdayaan Perempuan yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 12.696.981.000,00 realisasi sebesar Rp 12.415.708.440,00 atau 97,78% yang terdiri dari 12 program dan 60 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.582.409.000	1.578.101.873		99,73
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.207.000	415.543.873	100	99,36
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	45.000.000	44.534.000	100	98,96
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.500.000	52.500.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	51.231.000	51.231.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.115.000	5.085.000	100	99,41
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.756.000	13.756.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	76.500.000	76.500.000	100	100,00
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	375.000.000	374.996.000	100	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	528.600.000	527.456.000	100	99,78
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	503.403.000	500.257.725		99,38
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	223.650.000	223.642.000	100	100,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	116.253.000	115.639.725	100	99,47
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	107.400.000	104.900.000	100	97,67
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	33.600.000	33.576.000	100	99,93
5	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	5.000.000	5.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	17.500.000	17.500.000	100	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	14.000.000	7.500.000		53,57
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	14.000.000	7.500.000	100	53,57
4	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK	150.000.000	139.288.000		92,86



1	Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Perda Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	75.000.000	73.402.000	100	97,87
2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan PUG	75.000.000	65.886.000	100	87,85
5	PROGRAM KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	876.325.000	858.148.400		97,93
1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah	123.928.000	118.764.000	100	95,83
2	Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	209.357.000	208.582.000	100	99,63
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA	12.814.000	12.814.000	100	100,00
4	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A	26.311.000	26.311.000	100	100,00
5	Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders	100.000.000	99.859.000	100	99,86
6	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota	346.925.000	334.828.400	100	96,51
7	Kegiatan Advokasi Penganggaran Responsif Anak	56.990.000	56.990.000	100	100,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	2.887.052.000	2.762.102.492		95,67
1	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan bayi	119.923.000	115.703.000	100	96,48
2	Kegiatan advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	115.000.000	101.800.700	100	88,52
3	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	100.000.000	99.250.000	100	99,25
4	Kegiatan Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak.	23.483.000	23.483.000	100	100,00
5	Kegiatan Peningkatan Layanan Terpadu Korban Kekerasan	100.000.000	99.282.000	100	99,28
6	Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota	200.000.000	182.132.000	100	91,07
7	Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking	500.000.000	439.223.942	100	87,84
8	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Perempuan Penderita HIV - AIDS	41.142.000	41.142.000	100	100,00
9	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Lansia Perempuan	54.586.000	54.586.000	100	100,00
10	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Untuk Buruh Migran Perempuan	40.428.000	40.428.000	100	100,00
11	Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan	350.000.000	350.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Lembaga-Lembaga Pengambil Keputusan	800.000.000	797.168.500	100	99,65
13	Kegiatan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak	50.000.000	49.500.000	100	99,00
14	Kegiatan Pengembangan Model Media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah	182.490.000	175.668.550	100	96,26
15	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Trafficking Terhadap Anak	150.000.000	132.764.800	100	88,51



16	Kegiatan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	60.000.000	59.970.000	100	99,95
7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	1.118.615.000	1.092.592.600		97,67
1	Kegiatan Peningkatan Peranserta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender	575.000.000	572.970.000	100	99,65
2	Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak	150.000.000	150.000.000	100	100,00
3	Peningkatan kapasitas Pengelola Program Penanggulangan kemiskinan dalam implementasi Strategi PUG	51.785.000	51.785.000	100	100,00
4	Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG Kepada DPRD	65.000.000	54.505.000	100	83,85
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah	26.830.000	26.830.000	100	100,00
6	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	250.000.000	236.502.600	100	94,60
8	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	4.189.834.000	4.164.183.850		99,39
1	Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I	3.720.000.000	3.704.533.000	100	99,58
2	Kegiatan Peningkatan peran serta Perusahaan dan masyarakat dalam program KB	195.966.000	195.966.000	100	100,00
3	Kegiatan pengembangan model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah	250.000.000	239.816.850	100	95,93
4	Kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS	23.868.000	23.868.000	100	100,00
9	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	155.650.000	152.245.500		97,81
1	Kegiatan Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR	100.000.000	99.900.000	100	99,90
2	Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS	55.650.000	52.345.500	100	94,06
10	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL BKB - POSYANDU – PAUD	294.693.000	282.059.300		95,71
1	Kegiatan Peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga.	189.693.000	188.819.300	100	99,54
2	Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah.	105.000.000	93.240.000	100	88,80
11	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB MANDIRI	150.000.000	150.000.000		100,00
1	Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesetaraan KB Mandiri	150.000.000	150.000.000	100	100,00
12	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU - BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK BINA KELUARGA DAN BINA BALITA	775.000.000	729.228.700		94,09
1	Kegiatan Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat institusi masyarakat (IMP) terhadap KB-KS	675.000.000	629.238.700	100	93,22
2	Kegiatan Peningkatan kualitas pelemagaan Keluarga Kecil Berkualitas	100.000.000	99.990.000	100	99,99



9. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran program dan kegiatan untuk Urusan Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp37.177.181.000.000,00 realisasi sebesar Rp35.704.601.384,00 atau 96,04% yang terdiri dari 15 program dan 169 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.526.237.000	4.365.939.016		96,46
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.000.000	74.295.170	100	99,06
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	1.174.000	641.400	100	54,63
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	1.463.000	1.273.610	100	87,05
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	1.125.000	873.500	100	77,64
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Tanaman Hutan	1.200.000	1.198.590	100	99,88
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	761.250.000	753.021.935	100	98,92
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	27.900.000	27.415.036	100	98,26
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	33.900.000	33.900.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	26.250.000	24.893.357	100	94,83
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	26.250.000	26.176.999	100	99,72
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Tanaman Hutan	8.250.000	8.208.663	100	99,50
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	22.500.000	22.500.000	100	100,00
13	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	105.750.000	104.861.000	100	99,16
14	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	8.250.000	8.250.000	100	100,00
15	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	7.125.000	7.125.000	100	100,00
16	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	26.250.000	25.808.000	100	98,32
17	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	25.950.000	24.101.448	100	92,88



18	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Perbenihan Tanaman Hutan	6.375.000	4.088.709	100	64,14
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	335.500.000	335.485.900	100	100,00
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	15.300.000	15.300.000	100	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	15.300.000	15.300.000	100	100,00
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	30.600.000	28.000.000	100	91,50
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	45.900.000	42.000.000	100	91,50
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Perbenihan Tanaman Hutan	30.600.000	19.200.000	100	62,75
25	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	74.717.300	100	99,62
26	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	7.352.000	7.215.500	100	98,14
27	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	7.508.000	7.343.750	100	97,81
28	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	7.500.000	7.480.000	100	99,73
29	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	5.625.000	5.610.000	100	99,73
30	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan	6.750.000	6.558.000	100	97,16
31	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	75.552.000	75.490.110	100	99,92
32	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	7.674.000	7.259.000	100	94,59
33	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	4.973.000	4.898.000	100	98,49
34	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	11.250.000	11.250.000	100	100,00
35	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	8.437.000	8.010.000	100	94,94
36	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan	9.750.000	9.733.600	100	99,83
37	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.750.000	33.747.750	100	99,99
38	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	4.826.000	4.826.000	100	100,00
39	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	3.069.000	2.973.000	100	96,87
40	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	9.375.000	9.375.000	100	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

41	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	7.500.000	7.500.000	100	100,00
42	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan	4.500.000	4.356.000	100	96,80
43	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.469.000	21.463.602	100	99,97
44	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.250.000	71.044.289	100	99,71
45	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	5.033.000	4.952.750	100	98,41
46	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	6.375.000	5.991.500	100	93,98
47	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	13.050.000	12.800.000	100	98,08
48	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	12.600.000	12.530.000	100	99,44
49	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Perbenihan Tanaman Hutan	6.375.000	6.200.000	100	97,25
50	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.563.000	21.560.000	100	99,99
51	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	65.625.000	65.611.389	100	99,98
52	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	8.250.000	8.250.000	100	100,00
53	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	5.062.000	2.700.000	100	53,34
54	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	11.850.000	11.835.020	100	99,87
55	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	9.375.000	9.055.000	100	96,59
56	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Perbenihan Tanaman Hutan	4.140.000	4.090.000	100	98,79
57	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	567.931.000	567.472.459	100	99,92
58	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	75.000.000	74.534.465	100	99,38
59	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	80.733.000	75.568.055	100	93,60
60	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	37.500.000	35.651.390	100	95,07
61	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	41.250.000	37.440.426	100	90,76
62	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Perbenihan Tanaman Hutan	41.250.000	41.024.450	100	99,45
63	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	832.013.000	808.890.000	100	97,22
64	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengendali Pemanfaatan	60.696.000	60.600.000	100	99,84



	Hasil Hutan Wilayah I				
65	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	54.796.000	45.600.000	100	83,22
66	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	135.151.000	124.800.500	100	92,34
67	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	174.356.000	173.000.000	100	99,22
68	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Perbenihan Tanaman Hutan	121.491.000	78.700.000	100	64,78
69	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	97.500.000	87.562.394	100	89,81
70	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	15.000.000	4.750.000	100	31,67
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.348.971.000	3.253.886.676		97,16
1	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	322.500.000	302.720.000	100	93,87
2	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	114.900.000	113.695.000	100	98,95
3	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	41.250.000	40.335.000	100	97,78
4	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	431.250.000	423.320.600	100	98,16
5	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Balai Perbenihan Tanaman Hutan	470.784.000	467.650.000	100	99,33
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	77.625.000	75.500.000	100	97,26
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	112.500.000	109.770.000	100	97,57
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	44.241.000	43.732.000	100	98,85
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	20.625.000	20.525.500	100	99,52
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	35.625.000	35.574.000	100	99,86
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan	52.035.000	51.520.000	100	99,01
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	459.589.000	459.385.566	100	99,96
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	39.000.000	37.230.500	100	95,46
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	30.000.000	28.993.005	100	96,64



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	45.000.000	36.531.445	100	81,18
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Perbenihan Tanaman Hutan	33.262.000	31.599.500	100	95,00
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22.500.000	22.497.500	100	99,99
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	7.065.000	6.805.000	100	96,32
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	4.500.000	2.000.000	100	44,44
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan	4.500.000	4.450.000	100	98,89
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	37.500.000	37.410.800	100	99,76
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	5.625.000	5.465.000	100	97,16
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	34.500.000	34.470.000	100	99,91
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	21.500.000	21.493.000	100	99,97
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	6.000.000	6.000.000	100	100,00
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	3.375.000	997.500	100	29,56
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	5.625.000	5.500.000	100	97,78
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	750.000	750.000	100	100,00
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Perbenihan Tanaman Hutan	3.750.000	3.750.000	100	100,00
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	99.375.000	99.370.800	100	100,00
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	6.525.000	6.525.000	100	100,00
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	5.625.000	5.555.000	100	98,76
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	5.625.000	5.619.000	100	99,89
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Perbenihan Tanaman Hutan	4.875.000	4.875.000	100	100,00
35	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	4.135.000	4.110.000	100	99,40
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	1.875.000	1.875.000	100	100,00
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Taman dan Taman. Perkebunan. Peternakan serta Perikanan	5.625.000	5.482.000	100	97,46



38	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi	26.250.000	26.153.100	100	99,63
39	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	2.175.000	2.175.000	100	100,00
40	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	1.125.000	1.125.000	100	100,00
41	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	3.750.000	3.750.000	100	100,00
42	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	750.000	565.000	100	75,33
43	Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan	2.250.000	2.250.000	100	100,00
44	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	112.500.000	111.900.000	100	99,47
45	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I	105.443.000	94.618.860	100	89,73
46	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II	112.500.000	106.509.000	100	94,67
47	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	105.442.000	99.420.000	100	94,29
48	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	180.750.000	176.488.000	100	97,64
49	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perbenihan Tanaman Hutan	75.000.000	65.850.000	100	87,80
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.325.000	5.325.000		100,00
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden	5.325.000	5.325.000	100	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	153.562.000	122.348.500		79,67
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	48.750.000	47.740.000	100	97,93
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Kehutanan	93.562.000	63.508.500	100	67,88
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.250.000	11.100.000	100	98,67
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	8.898.037.000	8.601.835.620		96,67
1	Kegiatan Koordinasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di Kab./Kota dalam rangka Adipura	500.000.000	497.841.250	100	99,57
2	Kegiatan Peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa lingkungan	450.000.000	447.651.500	100	99,48
3	Kegiatan Pengembangan Perangkat Lunak dan Teknologi Lingkungan di Jawa Tengah	300.000.000	221.197.953	100	73,73
4	Kegiatan Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha / kegiatan	347.900.000	341.435.146	100	98,14
5	Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air dan Penetapan Kelas Air Sungai Untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Minimal Bidang LH Bagi Masyarakat	650.137.000	626.562.400	100	96,37



6	Kegiatan Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil	800.000.000	777.440.150	100	97,18
7	Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL	650.000.000	615.399.785	100	94,68
8	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Air, Udara, Biologi dan Tanah bagi Industri dan Masyarakat	550.000.000	543.896.586	100	98,89
9	Kegiatan Penghitungan Daya Dukung	300.000.000	255.616.600	100	85,21
10	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	1.000.000.000	976.483.500	100	97,65
11	Kegiatan Standarisasi kualitas bahan baku	2.000.000.000	1.953.957.050	100	97,70
12	Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas Air Limbah dan Air Permukaan di Jawa Tengah	700.000.000	694.940.350	100	99,28
13	Kegiatan Pengujian dan Pemantauan Kualitas Udara di Jawa Tengah	650.000.000	649.413.350	100	99,91
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSEVASI SUMBER DAYA ALAM	350.000.000	338.339.000		96,67
1	Kegiatan Pengelolaan masalah sosial masyarakat di sekitar WKO	50.000.000	48.667.100	100	97,33
2	Kegiatan Koordinasi Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	300.000.000	289.671.900	100	96,56
7	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	300.000.000	287.985.000		96,00
1	Kegiatan Peningkatan dan Pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaan.	300.000.000	287.985.000	100	96,00
8	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	940.000.000	896.486.976		95,37
1	Kegiatan Penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara	640.000.000	604.610.276	100	94,47
2	Kegiatan Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global	300.000.000	291.876.700	100	97,29
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LH	2.000.000.000	1.808.045.301		90,40
1	Pelatihan Efisiensi dan Produksi Ramah Lingkungan serta Penguatan Kelembagaan & Pengembangan Teknologi Konservasi pada daerah tangkapan air ekosistem dataran tinggi	350.000.000	299.336.423	100	85,52
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perdesaan dan warga sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	300.000.000	294.734.023	100	98,24
3	Kegiatan Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup	500.000.000	423.391.855	100	84,68
4	Kegiatan Koordinasi Peningkatan peran serta Kaum Perempuan dalam Pengelolaan LH untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat	300.000.000	284.828.000	100	94,94
5	Kegiatan Koordinasi Kecintaan Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan	550.000.000	505.755.000	100	91,96



10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	188.560.848		94,28
1	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan bagi Masyarakat	200.000.000	188.560.848	100	94,28
11	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	8.373.480.000	8.081.898.558		96,52
1	Kegiatan Bantuan Bibit, Perbenihan dan Pengembangan Budidaya Tanaman Kehutanan	3.327.200.000	3.259.666.900	100	97,97
2	Kegiatan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan	1.340.280.000	1.208.207.856	100	90,15
3	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	520.020.000	518.024.500	100	99,62
4	Kegiatan Pengelolaan Kebun Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS (Persemaian Permanen)	3.185.980.000	3.095.999.302	100	97,18
12	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	1.604.900.000	1.538.255.416		95,85
1	Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan.	219.700.000	218.587.200	100	99,49
2	Kegiatan Pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan.	260.000.000	232.007.500	100	89,23
3	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan	463.400.000	456.820.000	100	98,58
4	Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I	330.900.000	329.158.706	100	99,47
5	Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II	330.900.000	301.682.010	100	91,17
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	1.891.569.000	1.787.602.366		94,50
1	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan.	592.369.000	516.497.140	100	87,19
2	Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan.	378.200.000	369.389.275	100	97,67
3	Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan	353.700.000	351.051.900	100	99,25
4	Kegiatan Penatagunaan Hutan	567.300.000	550.664.051	100	97,07
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN	1.748.900.000	1.684.270.577		96,30
1	Kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung.	756.300.000	744.746.075	100	98,47
2	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).	756.300.000	704.822.502	100	93,19
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Sekitar Hutan	141.800.000	140.812.000	100	99,30
4	Kegiatan Pendampingan Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)	94.500.000	93.890.000	100	99,35
15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	2.836.200.000	2.743.822.980		96,74
1	Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	425.400.000	423.791.500	100	99,62



2	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Flora Fauna dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan	614.500.000	602.675.000	100	98,08
3	Kegiatan Rehabilitasi Pengelolaan dan Pengamanan Tahura KGPA Mangkunegoro	567.300.000	563.427.259	100	99,32
4	Kegiatan Pengembangan Kebun Raya Baturaden	756.300.000	754.990.865	100	99,83
5	Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I	472.700.000	398.938.356	100	84,40

10. URUSAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 14.654.144.000,00 realisasi sebesar Rp14.416.469.893,00 atau 98,38% yang terdiri dari 6 program dan 43 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.114.000.000	2.094.019.895		99,05
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	20.000.000	19.998.000	100	99,99
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	178.000.000	173.878.802	100	97,68
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	27.000.000	24.150.407	100	89,45
5	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	85.000.000	80.531.000	100	94,74
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	174.000.000	173.700.000	100	99,83
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	95.000.000	94.973.500	100	99,97
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	15.000.000	15.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	75.000.000	72.030.000	100	96,04
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	5.000.000	4.994.000	100	99,88
11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	18.000.000	17.922.000	100	99,57
12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	3.000.000	3.000.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	35.000.000	34.987.000	100	99,96



14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	10.000.000	10.000.000	100	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	15.000.000	15.000.000	100	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	4.000.000	4.000.000	100	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	20.000.000	19.970.000	100	99,85
18	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	3.000.000	3.000.000	100	100,00
19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	500.000.000	498.805.186	100	99,76
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	697.000.000	693.580.000	100	99,51
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	95.000.000	94.500.000	100	99,47
22	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	35.000.000	35.000.000	100	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	643.000.000	641.303.722		99,74
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	230.000.000	228.483.520	100	99,34
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	258.000.000	257.829.473	100	99,93
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	58.000.000	57.998.729	100	100,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	45.000.000	44.992.000	100	99,98
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	10.000.000	10.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	4.000.000	4.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	3.000.000	3.000.000	100	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000	49.860.000		99,72
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	50.000.000	49.860.000	100	99,72



4	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	8.077.453.000	8.008.835.576		99,15
1	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	2.067.144.000	2.064.466.500	100	99,87
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	600.000.000	580.489.900	100	96,75
3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1.058.347.000	1.050.082.000	100	99,22
4	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	199.564.000	198.597.876	100	99,52
5	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	2.707.544.000	2.690.374.000	100	99,37
6	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	644.854.000	635.075.300	100	98,48
7	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	800.000.000	789.750.000	100	98,72
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI DAN POLA KONSUMSI PANGAN	2.349.691.000	2.239.706.100		95,32
1	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	1.600.000.000	1.516.791.000	100	94,80
2	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	749.691.000	722.915.100	100	96,43
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	1.420.000.000	1.382.744.600		97,38
1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	680.000.000	662.377.000	100	97,41
2	Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	740.000.000	720.367.600	100	97,35

**12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp19.615.344.000,00 realisasi sebesar Rp 18.801.142.409,00 atau 95,85% terdiri dari 7 program dan 36 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.801.986.000	2.723.445.102		97,20
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.725.000	19.724.800	100	100,00



2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	625.769.035	100	96,27
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	105.000.000	103.040.000	100	98,13
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	149.741.500	100	99,83
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	176.011.000	176.009.500	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	181.250.000	180.241.100	100	99,44
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000	17.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	122.000.000	122.000.000	100	100,00
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	600.000.000	583.749.167	100	97,29
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	761.000.000	726.170.000	100	95,42
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.946.250.000	2.914.916.177		98,94
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.950.000.000	1.931.107.097	100	99,03
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	275.000.000	274.203.750	100	99,71
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	117.500.000	117.070.000	100	99,63
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	18.750.000	18.130.000	100	96,69
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	135.000.000	134.791.200	100	99,85
6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	450.000.000	439.614.130	100	97,69
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000	39.200.000		98,00
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000	39.200.000	100	98,00
4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.827.108.000	4.514.334.753		93,52
1	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.721.559.000	1.613.684.225	100	93,73
2	Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	2.052.391.000	1.903.760.893	100	92,76
3	Kegiatan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah	1.053.158.000	996.889.635	100	94,66
5	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	2.050.000.000	1.954.433.090		95,34
1	Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	300.000.000	293.832.589	100	97,94
2	Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/LEM	300.000.000	289.351.176	100	96,45
3	Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di kawasan penghasil Tembakau	1.000.000.000	935.534.600	100	93,55
4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan	450.000.000	435.714.725	100	96,83
6	PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN DESA	2.150.000.000	1.971.984.810		91,72



1	Kegiatan Perencanaan Partisipatif pembangunan, Perlombaan Desa & Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, evaluasi bantuan Pemerintahan desa di Jawa Tengah	850.000.000	795.169.686	100	93,55
2	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan	300.000.000	289.927.500	100	96,64
3	Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1.000.000.000	886.887.624	100	88,69
7	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	4.800.000.000	4.682.828.477		97,56
1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan Posyandu	400.000.000	396.889.230	100	99,22
2	Kegiatan Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat desa/Kelurahan	650.000.000	629.178.278	100	96,80
3	Kegiatan Pelestarian Dan pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Prov Jateng	200.000.000	199.660.623	100	99,83
4	Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	650.000.000	635.528.750	100	97,77
5	Kegiatan Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat	850.000.000	812.988.014	100	95,65
6	Kegiatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan	750.000.000	723.798.265	100	96,51
7	Kegiatan Pemantapan Unit Pengaduan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan	100.000.000	98.880.029	100	98,88
8	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan PKK di Jawa Tengah	1.200.000.000	1.185.905.288	100	98,83

12. URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 44.528.716.000,00 realisasi sebesar Rp41.817.292.045,00 atau 93,91% terdiri dari 6 program dan 59 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.671.908.000	10.439.387.956		89,44
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.150.000	15.150.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.344.736.000	1.034.558.325	100	76,93
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	162.000.000	161.988.188	100	99,99
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	162.700.000	161.386.230	100	99,19
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika	115.500.000	108.729.000	100	94,14
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Magelang	9.750.000	9.750.000	100	100,00



7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Pati	8.250.000	7.405.000	100	89,76
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Pekalongan	9.000.000	8.912.000	100	99,02
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Surakarta	10.500.000	10.284.000	100	97,94
10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Banyumas	8.250.000	8.198.000	100	99,37
11	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPP Wilayah Semarang	9.000.000	9.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika	225.000.000	172.353.195	100	76,60
13	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Magelang	7.500.000	7.187.500	100	95,83
14	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Pati	7.500.000	7.057.000	100	94,09
15	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Pekalongan	7.500.000	7.159.100	100	95,45
16	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Surakarta	7.500.000	7.195.500	100	95,94
17	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Banyumas	7.500.000	7.500.000	100	100,00
18	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPP Wilayah Semarang	7.500.000	7.500.000	100	100,00
19	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	59.580.800	100	99,30
20	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika	48.750.000	48.219.900	100	98,91
21	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.938.000	30.936.450	100	99,99
22	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika	150.000.000	149.970.000	100	99,98
23	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.312.000.000	1.311.657.581	100	99,97
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	7.930.384.000	7.073.173.787	100	89,19
25	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	14.536.400	100	96,91
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.788.413.000	4.485.037.874		93,66
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	25.000.000	24.464.000	100	97,86
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.225.000.000	1.159.430.000	100	94,65
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	895.500.000	735.272.124	100	82,11
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	154.518.000	147.925.000	100	95,73
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	20.000.000	19.477.000	100	97,39
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	349.020.000	329.768.250	100	94,48
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel	174.375.000	173.144.000	100	99,29
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.945.000.000	1.895.557.500	100	97,46



3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	75.000.000	73.801.000		98,40
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	75.000.000	73.801.000	100	98,40
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	67.657.118		67,66
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	67.657.118	100	67,66
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	25.092.720.000	23.987.459.415		95,60
1	Kegiatan Lomba Tertib LLAJ Se-Jateng	34.400.000	34.349.840	100	99,85
2	Kegiatan Peningkatan pelayanan Angkutan Umum di Jawa Tengah	10.483.370.000	9.919.367.540	100	94,62
3	Pengembangan Rencana bidang Hubkominfo	105.000.000	104.452.000	100	99,48
4	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati	927.951.000	877.277.500	100	94,54
5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang	817.948.000	802.571.500	100	98,12
6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan	817.948.000	791.563.900	100	96,77
7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang	1.017.948.000	994.075.000	100	97,65
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta	817.948.000	717.057.000	100	87,67
9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Banyumas	1.410.448.000	1.341.797.500	100	95,13
10	Kegiatan Peningkatan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum se Jateng	250.000.000	218.004.400	100	87,20
11	Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Provinsi di Jawa Tengah	950.000.000	946.043.250	100	99,58
12	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Rambu Portable	535.000.000	505.567.750	100	94,50
13	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Terminal di Jawa Tengah	240.000.000	236.913.200	100	98,71
14	Pembinaan dan Penyuluhan Pengemudi Angkutan Umum. Penumpang dan Barang (AKUT)	200.000.000	187.141.600	100	93,57
15	Pelaksanaan Forum LLAJ	100.000.000	99.631.000	100	99,63
16	Pengawasan angkutan umum	200.000.000	190.413.800	100	95,21
17	Kegiatan Pembangunan Fasilitas ASDP di Jateng	174.100.000	170.295.700	100	97,81
18	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan ASDP dan KA	1.913.191.000	1.837.595.500	100	96,05
19	Kegiatan Pembangunan Intelligence Transport System	2.847.468.000	2.811.833.300	100	98,75
20	Posko Angkutan Lebaran. Natal dan Tahun Baru	1.250.000.000	1.201.508.135	100	96,12
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	2.800.675.000	2.763.948.682		98,69
1	Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini 1	2.357.000.000	2.322.525.441	100	98,54
2	Kegiatan Fasilitas Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah	113.675.000	112.897.500	100	99,32
3	Pengawasan dan pengendalian angkutan laut	150.000.000	149.143.760	100	99,43
4	Pengembangan Pelabuhan di Jateng	180.000.000	179.381.981	100	99,66

13. URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 31.564.907.000,00 realisasi sebesar Rp 29.629.637.724,00 atau 93,87% terdiri dari 11 program dan 52 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.820.930.000	11.054.462.794		93,52
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.400.000	10.004.600	100	37,90
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.869.540.000	7.433.323.815	100	94,46
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	65.000.000	64.626.140	100	99,42
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	21.500.000	21.240.130	100	98,79
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	196.500.000	195.468.250	100	99,47
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	230.000.000	224.266.900	100	97,51
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.250.000	45.036.000	100	97,38
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.937.000	60.771.000	100	99,73
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.108.000	13.020.000	100	76,10
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	172.500.000	170.912.210	100	99,08
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	917.320.000	915.429.587	100	99,79
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.182.875.000	1.885.484.162	100	86,38
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	14.880.000	100	99,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.918.063.000	2.723.460.798		93,33
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	675.000.000	671.437.080	100	99,47
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	597.520.000	468.304.839	100	78,37
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	112.500.000	96.357.354	100	85,65
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	18.750.000	17.721.425	100	94,51
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	229.793.000	224.915.000	100	97,88
6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.284.500.000	1.244.725.100	100	96,90
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	205.200.000	199.852.000		97,39
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	205.200.000	199.852.000	100	97,39



4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	93.950.000		93,95
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	93.950.000	100	93,95
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	1.200.000.000	1.198.545.586		99,88
1	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1.200.000.000	1.198.545.586	100	99,88
6	PROGRAM PENINGKATAN PERSANDIAN DAERAH	285.000.000	260.945.400		91,56
1	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian	285.000.000	260.945.400	100	91,56
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	8.014.895.000	7.634.215.731		95,25
1	Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid	450.000.000	388.452.000	100	86,32
2	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi	140.000.000	120.023.800	100	85,73
3	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi	420.000.000	413.976.156	100	98,57
4	Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online	4.700.000.000	4.607.803.800	100	98,04
5	Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)	200.000.000	177.820.700	100	88,91
6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi	1.520.000.000	1.356.122.275	100	89,22
7	Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa	117.621.000	116.912.000	100	99,40
8	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bidang Penyiaran	295.000.000	281.330.000	100	95,37
9	Kegiatan Peningkatan kapasitas/kualitas SDM Bidang Penyiaran	172.274.000	171.775.000	100	99,71
8	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	4.410.819.000	4.077.229.883		92,44
1	Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Media Massa	112.500.000	88.231.400	100	78,43
2	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	172.000.000	149.456.400	100	86,89
3	Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot	886.500.000	696.752.500	100	78,60
4	Kegiatan Dialog Interaktif di Radio/Televisi tentang isu-isu penyiaran	101.340.000	101.120.000	100	99,78
5	Kegiatan Pengawasan isi siaran Lembaga Penyiaran	120.573.000	117.948.750	100	97,82
6	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan lembaga komunikasi Masyarakat	100.000.000	80.972.500	100	80,97
7	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan melalui Ormas/LSM dan OPP	114.500.000	103.068.600	100	90,02
8	Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	1.800.000.000	1.787.394.372	100	99,30
9	Pengembangan Media Center	200.000.000	188.902.150	100	94,45
10	Kegiatan Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah	210.700.000	209.780.000	100	99,56
11	Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran	298.734.000	272.561.211	100	91,24
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau isi siaran yang telah terbentuk	180.000.000	175.148.000	100	97,30
13	Kegiatan Kajian dan Analisa hasil Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah	113.972.000	105.894.000	100	92,91



9	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	560.000.000	438.214.500		78,25
1	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum	450.000.000	354.592.500	100	78,80
2	Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah	110.000.000	83.622.000	100	76,02
10	PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	750.000.000	713.968.140		95,20
1	Kegiatan Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	750.000.000	713.968.140	100	95,20
11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1.300.000.000	1.234.792.892		94,98
1	Pengelolaan layanan sistem LPSE	700.000.000	692.093.526	100	98,87
2	Penguatan kelembagaan PPID	200.000.000	197.242.166	100	98,62
3	Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa	350.000.000	302.545.200	100	86,44
4	Pengembangan pelayanan informasi kebijakan daerah	50.000.000	42.912.000	100	85,82

14. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dialokasikan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp 33.130.033.000,00 realisasi sebesar Rp 31.332.540.039,00 atau 94,57% yang terdiri dari 7 program dan 51 kegiatan, yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.051.000.000	4.912.603.522		97,26
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	12.000.000	10.481.730	100	87,35
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	7.000.000	6.999.060	100	99,99
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	620.000.000	607.390.393	100	97,97
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	330.000.000	293.874.977	100	89,05
5	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	70.000.000	69.678.131	100	99,54
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	510.000.000	504.150.820	100	98,85
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	248.981.800	100	99,59



8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	200.000.000	167.838.000	100	83,92
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	50.000.000	49.479.250	100	98,96
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	50.000.000	49.940.000	100	99,88
11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	25.000.000	25.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	50.000.000	41.006.000	100	82,01
13	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	50.000.000	49.651.000	100	99,30
14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	20.000.000	19.626.000	100	98,13
15	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	10.000.000	10.000.000	100	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	24.000.000	23.925.000	100	99,69
17	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	10.000.000	9.970.000	100	99,70
18	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	75.000.000	74.920.000	100	99,89
19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	1.135.000.000	1.117.995.593	100	98,50
20	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	75.000.000	71.799.925	100	95,73
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	765.000.000	755.311.843	100	98,73
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	113.000.000	112.572.000	100	99,62
23	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	600.000.000	592.012.000	100	98,67
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.634.000.000	1.615.500.707		98,87
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	450.000.000	445.204.708	100	98,93
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	48.000.000	47.999.970	100	100,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	350.000.000	348.950.329	100	99,70
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	20.000.000	20.000.000	100	100,00



5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	20.000.000	20.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	250.000.000	248.185.700	100	99,27
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	50.000.000	49.950.000	100	99,90
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	380.000.000	369.949.000	100	97,36
9	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	66.000.000	65.261.000	100	98,88
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000	44.652.000		89,30
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Koperasi Dan UMKM	50.000.000	44.652.000	100	89,30
4	PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM	6.564.033.000	6.296.225.650		95,92
1	Kegiatan Peningkatan Pemasarakatan dan Kelembagaan Koperasi	812.500.000	759.578.200	100	93,49
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.812.500.000	1.763.776.300	100	97,31
3	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	1.512.500.000	1.479.638.450	100	97,83
4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	914.033.000	846.712.900	100	92,63
5	Kegiatan Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	1.512.500.000	1.446.519.800	100	95,64
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA	3.025.000.000	2.728.727.970		90,21
1	Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama(MPU)	300.000.000	244.765.614	100	81,59
2	Kegiatan Akses Pemasaran Bagi Produk KUMKM	2.396.650.000	2.161.374.956	100	90,18
3	Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha Bagi KUMKM	325.000.000	319.237.400	100	98,23
4	Kegiatan Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM	3.350.000	3.350.000	100	100,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM KUMKM	5.575.000.000	5.520.752.700		99,03
1	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	3.925.000.000	3.883.968.800	100	98,95
2	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	1.650.000.000	1.636.783.900	100	99,20
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	9.531.000.000	8.747.726.900		91,78
1	Kegiatan Perlindungan Produk UMKM	500.000.000	441.472.500	100	88,29
2	Kegiatan Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	6.350.000.000	5.811.470.100	100	91,52



3	Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1.400.000.000	1.336.553.100	100	95,47
4	Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumen	681.000.000	590.618.900	100	86,73
5	Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	600.000.000	567.612.300	100	94,60
7	PROGRAM PENGEMBANGAN AKSES PERMODALAN DAN EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN	1.700.000.000	1.466.350.590		86,26
1	Kegiatan Akses Permodalan bagi KUMKM	1.300.000.000	1.116.293.790	100	85,87
2	Kegiatan Pengendalian Pembiayaan KUMKM	400.000.000	350.056.800	100	87,51

15. URUSAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 10.776.209.000,00 realisasi sebesar Rp 10.261.706.200,00 atau 95,23% yang terdiri dari 6 program dan 32 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.852.000.000	2.619.321.014		91,84
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	19.658.060	100	72,81
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.000.000	584.727.548	100	92,08
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	20.000.000	19.960.000	100	99,80
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	68.000.000	8.340.700	100	12,27
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	198.000.000	197.855.667	100	99,93
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000	179.451.650	100	99,70
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	135.000.000	134.985.930	100	99,99
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.135.000	100	95,68
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.455.800	100	97,28
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.000.000	46.284.500	100	87,33
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	191.000.000	190.990.000	100	99,99
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	385.000.000	352.840.623	100	91,65
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	920.000.000	845.635.536	100	91,92
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.217.100.000	2.115.989.251		95,44



1	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	1.360.000.000	1.283.916.905	100	94,41
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	293.250.000	290.248.400	100	98,98
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	375.000.000	367.549.446	100	98,01
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	137.850.000	129.613.500	100	94,03
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	15.000.000	14.961.000	100	99,74
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	36.000.000	29.700.000	100	82,50
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000	27.888.000		92,96
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	10.000.000	100	100,00
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	20.000.000	17.888.000	100	89,44
4	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	421.846.000	419.857.795		99,53
1	Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan dan Penyediaan Kewilayahan Investasi	211.723.000	209.735.500	100	99,06
2	Kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi	210.123.000	210.122.295	100	100,00
5	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI	3.488.282.000	3.378.793.990		96,86
1	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	327.750.000	311.450.000	100	95,03
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Investasi	470.480.000	445.346.800	100	94,66
3	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	661.160.000	648.987.455	100	98,16
4	Kegiatan Peningkatan Kinerja PTSP	343.577.000	326.136.900	100	94,92
5	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang Kesra dan Lingkungan	1.490.265.000	1.469.232.935	100	98,59
6	Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaporan	195.050.000	177.639.900	100	91,07
6	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	1.766.981.000	1.699.856.150		96,20
1	Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri	1.289.181.000	1.224.929.550	100	95,02
2	Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	242.250.000	239.724.250	100	98,96
3	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Melalui Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya	235.550.000	235.202.350	100	99,85

16. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp230.664.679.000,00 realisasi sebesar Rp 204.874.779.284,00 atau 88,82% yang terdiri dari 12 program dan 77 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.732.318.000	11.237.181.484		88,26
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.000.000	34.699.910	100	59,83
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	900.000	897.660	100	99,74
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.106.000.000	1.659.730.566	100	78,81
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	500.000.000	363.571.564	100	72,71
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	60.000.000	60.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	5.000.000	4.791.267	100	95,83
7	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	200.000.000	198.557.000	100	99,28
8	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	40.000.000	39.882.000	100	99,71
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.892.060.000	1.867.792.100	100	98,72
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	182.000.000	154.600.000	100	84,95
11	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	169.523.000	169.270.950	100	99,85
12	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	15.000.000	14.822.313	100	98,82
13	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	160.530.000	158.987.985	100	99,04
14	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	34.645.125	100	98,99
15	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.960.000	52.486.000	100	79,57
16	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	34.522.000	100	98,63
17	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.014.000	32.472.500	100	77,29
18	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	115.000.000	113.119.200	100	98,36
19	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.777.000	13.567.000	100	91,81
20	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	7.500.000	7.500.000	100	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	261.275.000	158.490.000	100	60,66



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
22	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	42.000.000	41.762.450	100	99,43
23	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.531.089.000	1.447.381.091	100	94,53
24	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	50.000.000	38.355.400	100	76,71
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	4.406.190.000	3.860.328.063	100	87,61
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	702.500.000	644.660.750	100	91,77
27	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	35.000.000	30.288.590	100	86,54
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.880.145.000	3.657.825.233		94,27
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	48.000.000	44.560.000	100	92,83
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.263.000.000	1.199.437.650	100	94,97
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	381.000.000	344.846.884	100	90,51
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	508.000.000	436.471.722	100	85,92
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	15.000.000	9.896.200	100	65,97
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	26.000.000	26.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	21.297.600	100	60,85
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	35.000.000	35.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	50.000.000	49.991.976	100	99,98
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	10.500.000	10.500.000	100	100,00
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	34.082.000	100	97,38
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	170.000.000	164.270.000	100	96,63



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	32.462.851	100	92,75
14	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.000.000	549.200	100	10,98
15	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.218.645.000	1.203.613.800	100	98,77
16	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	45.000.000	44.845.350	100	99,66
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	280.000.000	243.500.000		86,96
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	210.000.000	174.400.000	100	83,05
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	69.100.000	100	98,71
4	PROGRAM PEMBIBITAN, PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	78.338.983.000	70.527.072.149		90,03
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	9.278.234.000	8.745.391.465	100	94,26
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	65.151.749.000	58.324.009.684	100	89,52
3	Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	680.000.000	440.415.000	100	64,77
4	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	1.229.000.000	1.057.781.000	100	86,07
5	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	2.000.000.000	1.959.475.000	100	97,97
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	95.237.480.000	80.476.351.520		84,50
1	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	95.237.480.000	80.476.351.520	86,81	84,50
6	PROGRAM PENINGKATAN PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN	3.596.587.000	3.390.314.900		94,26
1	Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda	646.605.000	620.153.000	100	95,91
2	Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	1.300.000.000	1.184.650.000	100	91,13
3	Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	500.000.000	470.744.900	100	94,15
4	Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB	761.000.000	734.135.000	100	96,47
5	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	388.982.000	380.632.000	100	97,85
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	864.000.000	859.540.000		99,48



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	864.000.000	859.540.000	100	99,48
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	1.387.500.000	1.323.326.845		95,37
1	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	211.500.000	206.050.000	100	97,42
2	Kegiatan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	761.800.000	709.440.000	100	93,13
3	Kegiatan Pengembangan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	414.200.000	407.836.845	100	98,46
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/ORGANISASI OLAH RAGA	16.970.648.000	16.892.623.000		99,54
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	16.475.830.000	16.410.625.000	100	99,60
2	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	157.999.000	151.979.000	100	96,19
3	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	189.220.000	183.470.000	100	96,96
4	Kegiatan Pengembangan industri Olahraga	147.599.000	146.549.000	100	99,29
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	6.569.965.000	6.062.196.925		92,27
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata	2.463.215.000	2.393.493.069	100	97,17
2	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri	475.000.000	373.986.824	100	78,73
3	Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng	593.750.000	512.040.000	100	86,24
4	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri	2.000.000.000	1.902.587.600	100	95,13
5	Kegiatan pengembangan pasar pariwisata	1.038.000.000	880.089.432	100	84,79
11	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	9.286.380.000	8.781.630.761		94,56
1	Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata	625.000.000	608.520.860	100	97,36
2	Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata	6.371.380.000	6.160.494.600	100	96,69
3	Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata	1.190.000.000	1.066.864.700	100	89,65
4	Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng	600.000.000	447.377.461	100	74,56
5	Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata	500.000.000	498.373.140	100	99,67
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.520.673.000	1.423.216.467		93,59
1	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	475.000.000	458.766.497	100	96,58
2	Kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	845.673.000	784.583.400	100	92,78



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
3	Kegiatan Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pariwisata	200.000.000	179.866.570	100	89,93

17. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp14.442.275.000,00 realisasi sebesar Rp 14.080.070.881,00 atau 97,49% yang terdiri dari 12 program dan 67 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.200.375.000	4.079.823.121		97,13
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	10.000.000	9.993.250	100	99,93
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Perpustakaan Daerah	5.250.000	5.246.600	100	99,94
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.406.400.000	1.330.174.671	100	94,58
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	32.100.000	31.524.000	100	98,21
5	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	125.000.000	124.771.000	100	99,82
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	195.000.000	193.220.350	100	99,09
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UPT Perpustakaan Daerah	172.000.000	172.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	135.500.000	135.500.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Perpustakaan Daerah	67.500.000	67.500.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	142.500.000	142.044.850	100	99,68
11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPT Perpustakaan Daerah	45.000.000	45.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	56.250.000	56.250.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT Perpustakaan Daerah	15.000.000	15.000.000	100	100,00
14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Badan Arsip dan	56.250.000	53.790.000	100	95,63



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
	Perpustakaan				
15	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT Perpustakaan Daerah	15.000.000	13.340.000	100	88,93
16	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	21.000.000	21.000.000	100	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPT Perpustakaan Daerah	26.250.000	26.247.900	100	99,99
18	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	84.125.000	84.034.500	100	99,89
19	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Perpustakaan Daerah	18.750.000	18.356.800	100	97,90
20	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	385.000.000	385.000.000	100	100,00
21	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UPT Perpustakaan Daerah	30.000.000	28.725.000	100	95,75
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.156.500.000	1.121.104.200	100	96,94
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.590.130.000	1.577.188.500		99,19
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	150.000.000	149.475.000	100	99,65
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT Perpustakaan Daerah	131.250.000	131.229.100	100	99,98
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	219.480.000	218.320.125	100	99,47
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UPT Perpustakaan Daerah	225.000.000	221.566.775	100	98,47
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	155.000.000	154.760.500	100	99,85
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPT Perpustakaan Daerah	67.500.000	67.499.800	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	18.750.000	18.750.000	100	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UPT Perpustakaan Daerah	13.500.000	13.500.000	100	100,00
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	93.750.000	93.600.000	100	99,84
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UPT Perpustakaan Daerah	56.250.000	56.245.000	100	99,99



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
11	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan UPT Perpustakaan Daerah	45.000.000	44.568.700	100	99,04
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	93.750.000	92.790.000	100	98,98
13	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	219.650.000	216.448.500	100	98,54
14	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Perpustakaan Daerah	101.250.000	98.435.000	100	97,22
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	37.500.000	37.500.000		100,00
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	37.500.000	37.500.000	100	100,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	239.625.000	237.152.150	100	98,97
1	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan	239.625.000	237.152.150	100	98,97
5	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN	551.000.000	538.660.000		97,76
1	Kegiatan Evaluasi Layanan Perpustakaan	101.000.000	98.564.500	100	97,59
2	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan	200.000.000	197.280.900	100	98,64
3	Kegiatan Up Dating Bidang Perpustakaan	100.000.000	94.743.550	100	94,74
4	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan	150.000.000	148.071.050	100	98,71
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	2.045.020.000	1.937.605.800		94,75
1	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Daerah	950.000.000	897.540.000	100	94,48
2	Kegiatan Penerbitan Literatur Skunder dan Pelaksanaan Karya Cetak Karya Rekam	130.000.000	129.968.500	100	99,98
3	Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit	100.000.000	99.996.000	100	100,00
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perpustakaan	265.020.000	264.173.800	100	99,68
5	Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling	600.000.000	545.927.500	100	90,99
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	120.000.000	119.672.500		99,73
1	Kegiatan Pengembangan layanan informasi kearsipan	120.000.000	119.672.500	100	99,73
8	PROGRAM PENINGKATAN SDM PERPUSTAKAAN	200.000.000	194.030.800		97,02
1	Bintek Pengelola Perpustakaan	200.000.000	194.030.800	100	97,02
9	PROGRAM PENINGKATAN PEMASYARAKATAN KEARSIPAN KEPADA MASYARAKAT	457.700.000	456.092.000		99,65
1	Kegiatan Pemasyarakatan kearsipan	457.700.000	456.092.000	100	99,65



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
10	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	1.102.000.000	1.059.283.000		96,12
1	Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah	250.000.000	239.116.500	100	95,65
2	Kegiatan Kerjasama pengelolaan kearsipan	50.000.000	49.739.550	100	99,48
3	Kegiatan Program arsip vital	107.000.000	101.686.500	100	95,03
4	Kegiatan Peningkatan kualitas informasi arsip	215.000.000	211.654.100	100	98,44
5	Kegiatan Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis	250.000.000	235.988.350	100	94,40
6	Kegiatan Digitalisasi arsip statis	230.000.000	221.098.000	100	96,13
11	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	2.525.325.000	2.483.569.290		98,35
1	Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan Daerah	1.385.000.000	1.375.191.600	100	99,29
2	Kegiatan Promosi Minat Baca	375.000.000	369.803.890	100	98,61
3	Kegiatan Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah	75.000.000	73.650.000	100	98,20
4	Kegiatan Buletin Perpustakaan	125.000.000	120.660.800	100	96,53
5	Kegiatan Ekspo Perpustakaan Daerah	175.000.000	171.584.000	100	98,05
6	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di Bidang Perpustakaan	140.325.000	132.399.000	100	94,35
7	Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah	250.000.000	240.280.000	100	96,11
12	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	1.373.600.000	1.359.493.720		98,97
1	Kegiatan Pembinaan kearsipan	632.000.000	624.771.300	100	98,86
2	Kegiatan Pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan	225.000.000	219.352.000	100	97,49
3	Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan	316.600.000	315.790.420	100	99,74
4	Kegiatan Evaluasi Kearsipan	200.000.000	199.580.000	100	99,79

18. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp53.716.230.000,00 realisasi sebesar Rp49.951.656.244,00 atau 92,99% yang terdiri dari 9 program dan 75 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.102.151.000	6.188.621.887		87,14



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Kelautan Dan Perikanan	27.350.000	27.350.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	300.000	300.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	300.000	183.940	100	61,31
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	300.000	300.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	300.000	300.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	300.000	300.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	300.000	300.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	300.000	260.950	100	86,98
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	300.000	300.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	300.000	300.000	100	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laboratorium Pengujian & Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Semarang	300.000	300.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laboratorium Pengujian & Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Pekalongan	300.000	300.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar	300.000	300.000	100	100,00
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut	300.000	300.000	100	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.445.000.000	1.173.423.428	100	81,21
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	450.000.000	435.866.890	100	96,86
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	35.000.000	24.545.017	100	70,13
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	35.000.000	27.556.500	100	78,73
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	30.000.000	23.823.243	100	79,41
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	30.000.000	12.412.708	100	41,38
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	35.000.000	32.586.471	100	93,10
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	35.000.000	22.996.444	100	65,70



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	30.000.000	25.179.714	100	83,93
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	30.000.000	23.526.731	100	78,42
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laboratorium Pengujian & Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Semarang	50.000.000	48.539.741	100	97,08
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laboratorium Pengujian & Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Pekalongan	40.000.000	34.708.877	100	86,77
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar	75.000.000	71.447.118	100	95,26
28	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut	75.000.000	69.485.413	100	92,65
29	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	30.000.000	29.971.427	100	99,90
30	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	77.907.000	77.907.000	100	100,00
31	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	85.000.000	85.000.000	100	100,00
32	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.000.000	60.985.000	100	99,98
33	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.000.000	32.629.500	100	98,88
34	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.292.000	24.139.000	100	99,37
35	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000	75.610.300	100	94,51
36	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.000.000.000	999.607.209	100	99,96
37	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	3.237.600.000	2.698.844.330	100	83,36
38	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	47.102.000	46.734.936	100	99,22
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.043.296.000	2.010.846.074		98,41
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	50.000.000	49.350.000	100	98,70
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	250.000.000	249.763.570	100	99,91
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	618.296.000	593.170.405	100	95,94
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	55.000.000	54.917.500	100	99,85
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	20.000.000	19.650.000	100	98,25
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	75.000.000	74.255.266	100	99,01
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Besar dan Berat	20.000.000	19.924.513	100	99,62
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	355.000.000	350.438.000	100	98,71



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
9	Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber pendapatan UPT	600.000.000	599.376.820	100	99,90
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000	47.803.950		95,61
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	47.803.950	100	95,61
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	16.960.175.000	16.082.899.888		94,83
1	Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan statistik perikanan tangkap	700.000.000	666.564.000	100	95,22
2	Kegiatan Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai jawa tengah	8.660.175.000	8.198.389.300	100	94,67
3	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP tasikagung	900.000.000	893.960.000	100	99,33
4	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp bajomulyo	750.000.000	668.496.750	93,38	89,13
5	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa	900.000.000	698.236.000	81,33	77,58
6	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Morodemak	750.000.000	743.362.000	100	99,11
7	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp tawang	750.000.000	749.434.000	100	99,92
8	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp klidanglor	800.000.000	798.199.200	100	99,77
9	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp wonokerto	600.000.000	591.064.000	100	98,51
10	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp asemdayong	750.000.000	748.950.000	100	99,86
11	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp tegalsari	1.400.000.000	1.326.244.638	100	94,73
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.451.608.000	13.698.578.413		94,79
1	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air tawar	1.700.000.000	1.661.992.500	100	97,76
2	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut	1.500.000.000	1.491.464.713	100	99,43
3	Kegiatan pengelolaan lingkungan dan statistik perikanan budidaya	2.278.808.000	2.195.801.500	100	96,36
4	Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar	4.957.000.000	4.649.115.700	100	93,79
5	Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau	4.015.800.000	3.700.204.000	100	92,14
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	750.000.000	666.964.000		88,93
1	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	750.000.000	666.964.000	100	88,93
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.759.000.000	5.374.329.350		93,32
1	Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan	5.759.000.000	5.374.329.350	100	93,32



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
8	Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	4.400.000.000	4.037.191.182		91,75
1	Kegiatan Pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan	1.400.000.000	1.198.105.414	92,63	85,58
2	Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP Pekalongan	700.000.000	641.700.905	100	91,67
3	Kegiatan peningkatan pelayanan mutu usaha perikanan	250.000.000	236.633.500	100	94,65
4	Kegiatan peningkatan perluasan usaha dan koordinasi kelembagaan pelaku usaha perikanan	450.000.000	444.186.000	100	98,71
5	Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP Semarang	700.000.000	690.515.763	100	98,65
6	Kegiatan pengembangan perencanaan dan monitoring evaluasi program kegiatan kelautan dan perikanan	900.000.000	826.049.600	100	91,78
9	PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.200.000.000	1.844.421.500		83,84
1	Kegiatan Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	850.000.000	819.296.500	100	96,39
2	Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital	850.000.000	820.771.000	100	96,56
3	Kegiatan Penyusunan Revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Povinsi Jawa Tengah	500.000.000	204.354.000	40,87	40,87

19. URUSAN PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pertanian sebesar Rp 250.349.282.000,00 realisasi sebesar Rp 221.979.958.752,00 atau 88,67% yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu

a). DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp183.183.876.000,00 realisasi sebesar Rp160.973.517.115,00 atau 87,88 yang terdiri dari 6 program dan 311 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.928.850.000	10.298.996.691		86,34



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0	0,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.000.000	6.884.000	100	45,89
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	5.000.000	4.992.380	100	99,85
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	5.000.000	3.281.650	100	65,63
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	5.000.000	4.999.300	100	99,99
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	5.000.000	4.999.510	100	99,99
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	5.000.000	4.604.320	100	92,09
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	5.000.000	4.998.000	100	99,96
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	5.000.000	4.071.450	100	81,43
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SPMA H Moenadi Ungaran	5.000.000	3.525.660	100	70,51
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Perkebunan	25.000.000	11.461.660	100	45,85
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	2.000.000	2.000.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	500.000	483.450	100	96,69
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembenuhan Dan Kebun Produksi Perkebunan	2.000.000	1.999.900	100	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	87.418.042	100	43,71
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	600.000.000	521.031.308	100	86,84
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	120.000.000	84.699.004	100	70,58
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	147.600.000	135.043.746	100	91,49
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	120.000.000	86.785.182	100	72,32
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	160.000.000	122.478.273	100	76,55



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	107.071.000	90.425.212	100	84,45
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	144.500.000	123.990.575	100	85,81
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	120.000.000	78.166.558	100	65,14
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SPMA H Moenadi Ungaran	90.000.000	53.431.674	100	59,37
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perkebunan	380.000.000	214.609.717	100	56,48
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	50.000.000	41.045.559	100	82,09
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	80.000.000	59.875.316	100	74,84
28	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	190.000.000	170.594.633	100	89,79
29	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	150.000.000	148.767.000	100	99,18
30	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	20.000.000	19.900.000	100	99,50
31	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	20.000.000	3.621.050	100	18,11
32	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	20.000.000	3.337.500	100	16,69
33	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	20.000.000	19.434.000	100	97,17
34	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	12.529.000	12.529.000	100	100,00
35	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	20.000.000	19.800.000	100	99,00
36	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	20.000.000	9.955.500	100	49,78
37	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah SPMA H Moenadi Ungaran	20.000.000	19.750.000	100	98,75
38	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perkebunan	50.000.000	49.791.000	100	99,58
39	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	150.000.000	149.999.400	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
40	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	60.000.000	59.016.000	100	98,36
41	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	60.000.000	59.926.500	100	99,88
42	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	60.000.000	60.000.000	100	100,00
43	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	60.000.000	60.000.000	100	100,00
44	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	50.400.000	50.400.000	100	100,00
45	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	60.000.000	45.000.000	100	75,00
46	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	60.000.000	60.000.000	100	100,00
47	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas SPMA H Moenadi Ungaran	60.000.000	59.967.156	100	99,95
48	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perkebunan	200.000.000	199.948.500	100	99,97
49	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	38.000.000	37.999.992	100	100,00
50	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	85.000.000	85.000.000	100	100,00
51	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	54.000.000	54.000.000	100	100,00
52	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	80.000.000	80.000.000	100	100,00
53	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	8.000.000	8.000.000	100	100,00
54	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	8.000.000	7.805.000	100	97,56
55	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	8.000.000	7.996.400	100	99,96
56	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	8.000.000	7.948.000	100	99,35
57	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	8.000.000	7.950.000	100	99,38



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
58	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	8.000.000	8.000.000	100	100,00
59	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	8.000.000	7.932.000	100	99,15
60	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor SPMA H Moenadi Ungaran	8.000.000	8.000.000	100	100,00
61	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan	50.000.000	30.302.000	100	60,60
62	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	20.000.000	20.000.000	100	100,00
63	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	20.000.000	18.419.000	100	92,10
64	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembenuhan Dan Kebun Produksi Perkebunan	20.000.000	19.999.250	100	100,00
65	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	50.000.000	45.105.650	100	90,21
66	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	5.000.000	5.000.000	100	100,00
67	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	5.000.000	4.975.000	100	99,50
68	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	5.000.000	5.000.000	100	100,00
69	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	5.000.000	5.000.000	100	100,00
70	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	5.000.000	4.380.000	100	87,60
71	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	5.000.000	5.000.000	100	100,00
72	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	5.000.000	5.000.000	100	100,00
73	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan SPMA H Moenadi Ungaran	5.000.000	4.750.000	100	95,00
74	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Perkebunan	50.000.000	40.007.500	100	80,02
75	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	5.000.000	5.000.000	100	100,00
76	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	5.000.000	4.050.000	100	81,00
77	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Pembenuhan Dan Kebun Produksi Perkebunan	9.500.000	9.500.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
78	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.000.000	30.000.000	100	100,00
79	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	5.000.000	5.000.000	100	100,00
80	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	5.000.000	3.868.000	100	77,36
81	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	5.000.000	5.000.000	100	100,00
82	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	5.000.000	5.000.000	100	100,00
83	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	5.000.000	5.000.000	100	100,00
84	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	5.000.000	5.000.000	100	100,00
85	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	5.000.000	5.000.000	100	100,00
86	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SPMA H Moenadi Ungaran	5.000.000	5.000.000	100	100,00
87	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan	33.250.000	33.064.000	100	99,44
88	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	7.500.000	7.500.000	100	100,00
89	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	7.500.000	6.865.000	100	91,53
90	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembenuhan Dan Kebun Produksi Perkebunan	11.500.000	11.500.000	100	100,00
91	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	75.000.000	69.575.000	100	92,77
92	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	30.000.000	29.982.000	100	99,94
93	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	30.000.000	29.395.000	100	97,98



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
94	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	30.000.000	30.000.000	100	100,00
95	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	30.000.000	29.500.000	100	98,33
96	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	30.000.000	29.900.000	100	99,67
97	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	30.000.000	30.000.000	100	100,00
98	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	30.000.000	29.350.000	100	97,83
99	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SPMA H Moenadi Ungaran	30.000.000	29.480.000	100	98,27
100	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	40.000.000	37.000.000	100	92,50
101	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	5.000.000	5.000.000	100	100,00
102	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	5.000.000	4.842.000	100	96,84
103	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	5.000.000	4.680.000	100	93,60
104	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	5.000.000	5.000.000	100	100,00
105	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	5.000.000	5.000.000	100	100,00
106	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	5.000.000	5.000.000	100	100,00
107	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	5.000.000	5.000.000	100	100,00
108	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SPMA H Moenadi Ungaran	5.000.000	4.990.000	100	99,80
109	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	40.000.000	39.900.000	100	99,75
110	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	5.000.000	5.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
111	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	5.000.000	4.512.000	100	90,24
112	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	5.000.000	4.992.000	100	99,84
113	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	5.000.000	4.992.000	100	99,84
114	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	5.000.000	5.000.000	100	100,00
115	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	5.000.000	4.602.000	100	92,04
116	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	5.000.000	4.550.000	100	91,00
117	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SPMA H Moenadi Ungaran	5.000.000	4.940.000	100	98,80
118	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perkebunan	14.000.000	13.936.000	100	99,54
119	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	50.000.000	27.890.000	100	55,78
120	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	7.000.000	7.000.000	100	100,00
121	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	7.000.000	7.000.000	100	100,00
122	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	7.000.000	7.000.000	100	100,00
123	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	7.000.000	6.600.000	100	94,29
124	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	7.000.000	7.000.000	100	100,00
125	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	7.000.000	7.000.000	100	100,00
126	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	7.000.000	7.000.000	100	100,00
127	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman SPMA H Moenadi Ungaran	7.000.000	3.800.000	100	54,29



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
128	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perkebunan	60.000.000	59.996.350	100	99,99
129	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	400.000.000	383.700.726	100	95,93
130	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	35.000.000	33.847.177	100	96,71
131	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	35.000.000	26.292.500	100	75,12
132	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	35.000.000	28.599.200	100	81,71
133	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	35.000.000	30.507.950	100	87,17
134	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalgondo Klaten	35.000.000	28.636.000	100	81,82
135	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	35.000.000	34.211.200	100	97,75
136	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	35.000.000	34.970.770	100	99,92
137	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah SPMA H Moenadi Ungaran	55.000.000	23.313.000	100	42,39
138	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perkebunan	300.000.000	287.491.515	100	95,83
139	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	370.000.000	191.997.432	100	51,89
140	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.902.000.000	3.787.797.348	100	97,07
141	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perkebunan	1.350.000.000	921.899.196	100	68,29
142	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	70.000.000	68.000.000	100	97,14
143	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	10.000.000	10.000.000	100	100,00
144	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	10.000.000	8.500.000	100	85,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
145	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	10.000.000	10.000.000	100	100,00
146	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	10.000.000	9.880.000	100	98,80
147	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	10.000.000	9.992.550	100	99,93
148	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	10.000.000	9.900.000	100	99,00
149	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	10.000.000	9.100.300	100	91,00
150	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi SPMA H Moenadi Ungaran	15.000.000	15.000.000	100	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.681.976.000	9.217.203.071		95,20
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	500.000.000	478.866.000	100	95,77
2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	19.000.000	19.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	25.000.000	24.850.000	100	99,40
4	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	19.000.000	19.000.000	100	100,00
5	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan	40.000.000	39.950.000	100	99,88
6	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	40.000.000	39.600.000	100	99,00
7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	40.000.000	38.000.000	100	95,00
8	Kegiatan Pengadaan Mebeleur Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	24.000.000	24.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Pengadaan Mebeleur Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	21.000.000	21.000.000	100	100,00
10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	24.000.000	24.000.000	100	100,00
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	150.000.000	145.348.000	100	96,90
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	100.000.000	97.064.000	100	97,06
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	100.000.000	98.332.200	100	98,33



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	80.000.000	79.750.000	100	99,69
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	80.000.000	79.655.000	100	99,57
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	80.000.000	79.548.000	100	99,44
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	80.000.000	79.709.000	100	99,64
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	19.000.000	18.946.000	100	99,72
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	18.000.000	18.000.000	100	100,00
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	6.000.000	6.000.000	100	100,00
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000	92.736.500	100	92,74
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	65.000.000	64.718.963	100	99,57
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	65.000.000	64.971.000	100	99,96
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	65.000.000	64.807.000	100	99,70
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	65.000.000	64.662.000	100	99,48
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	65.000.000	64.980.400	100	99,97
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	65.000.000	64.857.000	100	99,78
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	65.000.000	64.125.000	100	98,65
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SPMA H Moenadi Ungaran	65.000.000	64.725.000	100	99,58
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan	116.485.000	108.373.905	100	93,04
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	100.000.000	99.646.000	100	99,65
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	150.000.000	147.572.000	100	98,38
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	130.000.000	128.960.000	100	99,20



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	500.000.000	399.145.026	100	79,83
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	11.000.000	10.970.706	100	99,73
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	11.000.000	10.217.750	100	92,89
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	11.000.000	9.858.828	100	89,63
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	11.000.000	10.607.280	100	96,43
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	11.000.000	9.728.600	100	88,44
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	11.000.000	10.447.017	100	94,97
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	11.000.000	10.985.640	100	99,87
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SPMA H Moenadi Ungaran	11.000.000	0	0	0,00
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perkebunan	150.000.000	122.833.275	100	81,89
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	25.000.000	21.267.845	100	85,07
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	67.000.000	62.605.400	100	93,44
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	70.000.000	69.925.500	100	99,89
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan	65.000.000	64.893.500	100	99,84
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	15.000.000	15.000.000	100	100,00
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.000.000	29.917.250	100	99,72



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	15.000.000	15.000.000	100	100,00
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	15.000.000	14.990.000	100	99,93
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	15.000.000	14.995.000	100	99,97
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	15.000.000	15.000.000	100	100,00
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	15.000.000	15.000.000	100	100,00
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	15.000.000	14.976.000	100	99,84
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	15.000.000	14.848.000	100	98,99
57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair SPMA H Moenadi Ungaran	15.000.000	14.973.750	100	99,83
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perkebunan	25.000.000	24.580.500	100	98,32
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	7.000.000	7.000.000	100	100,00
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	3.000.000	3.000.000	100	100,00
61	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	6.000.000	6.000.000	100	100,00
62	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	50.000.000	49.500.000	100	99,00
63	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	40.000.000	40.000.000	100	100,00
64	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	30.000.000	25.399.000	100	84,66
65	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	30.000.000	29.950.000	100	99,83
66	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	30.000.000	30.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
67	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	30.000.000	28.920.000	100	96,40
68	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	30.000.000	29.976.000	100	99,92
69	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	30.000.000	29.615.000	100	98,72
70	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga SPMA H Moenadi Ungaran	40.000.000	39.050.000	100	97,63
71	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perkebunan	28.000.000	27.818.150	100	99,35
72	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	36.000.000	15.625.000	100	43,40
73	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pembenuhan Dan Kebun Produksi Perkebunan	6.000.000	6.000.000	100	100,00
74	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.000.000	10.000.000	100	100,00
75	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.000.000	29.900.000	100	99,67
76	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.000.000	9.990.000	100	99,90
77	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	10.000.000	9.819.800	100	98,20
78	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	10.000.000	9.989.000	100	99,89
79	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel SPMA H Moenadi Ungaran	10.000.000	10.000.000	100	100,00
80	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	65.000.000	59.853.046	100	92,08
81	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	50.000.000	48.922.500	100	97,85
82	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	70.000.000	69.991.000	100	99,99



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
83	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	80.000.000	79.748.000	100	99,69
84	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	80.000.000	79.970.000	100	99,96
85	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Sekretariat Dinas Perkebunan	35.000.000	35.000.000	100	100,00
86	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	10.000.000	10.000.000	100	100,00
87	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun	20.000.000	11.910.000	100	59,55
88	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Pembenuhan Dan Kebun Produksi Perkebunan	80.000.000	80.000.000	100	100,00
89	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	150.000.000	146.850.000	100	97,90
90	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	50.000.000	48.587.500	100	97,18
91	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	50.000.000	46.710.000	100	93,42
92	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	50.000.000	49.800.000	100	99,60
93	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	50.000.000	49.650.000	100	99,30
94	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	50.000.000	47.445.000	100	94,89
95	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	678.000.000	643.392.500	100	94,90
96	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	50.000.000	49.700.000	100	99,40
97	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor SPMA H Moenadi Ungaran	50.000.000	49.520.000	100	99,04
98	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan	150.000.000	142.520.800	100	95,01
99	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	57.000.000	56.725.000	100	99,52



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
100	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan	90.000.000	89.500.000	100	99,44
101	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	150.000.000	137.859.440	100	91,91
102	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang	50.000.000	48.962.000	100	97,92
103	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta	50.000.000	49.497.000	100	98,99
104	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas	50.000.000	49.850.000	100	99,70
105	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Tengah	50.000.000	49.717.000	100	99,43
106	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tegalondo Klaten	50.000.000	49.334.000	100	98,67
107	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian	3.004.491.000	2.860.872.500	100	95,22
108	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	50.000.000	49.647.000	100	99,29
109	Kegiatan Rehab Gedung Kantor SPMA H Moenadi Ungaran	50.000.000	49.597.000	100	99,19
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	230.000.000	156.259.850		67,94
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	200.000.000	130.659.850	100	65,33
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Perkebunan	15.000.000	11.000.000	100	73,33
3	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perkebunan	15.000.000	14.600.000	100	97,33
4	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	2.400.000.000	2.008.786.600		83,70
1	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Daya saing Pendidikan SPMA Moenadi	2.400.000.000	2.008.786.600	100	83,70
5	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	137.283.474.000	120.739.451.004		87,95
1	Kegiatan Peningkatan Mutu Perencanaan, Pematapan Data Statistik, Monev, dan Pengendalian Program	650.000.000	625.625.312	100	96,25
2	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertanian	1.500.000.000	806.006.445	100	53,73
3	Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	1.000.000.000	692.468.000	100	69,25
4	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan produksi sarana pengendalian OPT	500.000.000	461.898.000	100	92,38



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
5	Kegiatan Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan	500.000.000	455.810.943	100	91,16
6	Kegiatan pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan	500.000.000	459.090.000	100	91,82
7	Kegiatan Peningkatan kualitas benih dan pengembangan kebun dinas	3.000.000.000	2.980.770.000	100	99,36
8	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan	631.250.000	343.168.200	100	54,36
9	Kegiatan Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan	780.775.000	780.774.163	100	100,00
10	Kegiatan Pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perkebunan	500.000.000	479.560.000	100	95,91
11	Kegiatan pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran	750.000.000	672.290.000	100	89,64
12	Kegiatan Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah	3.750.000.000	2.659.863.000	100	70,93
13	Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku	10.500.000.000	9.598.939.250	100	91,42
14	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	7.000.000.000	5.466.224.000	100	78,09
15	Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku	16.500.000.000	12.614.863.000	96,68	76,45
16	Kegiatan Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian	1.000.000.000	899.425.000	100	89,94
17	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	49.079.918.000	44.468.492.183	99,91	90,60
18	Peningkatan Produksi Hortikultura	5.473.705.000	5.140.563.961	100	93,91
19	Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemantauan Bencana	2.000.000.000	1.830.658.599	100	91,53
20	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Banyumas	6.000.000.000	5.647.875.390	100	94,13
21	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang	5.789.826.000	5.734.179.667	100	99,04
22	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta	6.000.000.000	5.455.434.678	100	90,92
23	Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih	1.000.000.000	905.811.161	100	90,58
24	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	2.778.000.000	2.492.434.021	100	89,72
25	Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana di Lahan WISMP 2 Pertanian Jawa Tengah	250.000.000	210.120.546	100	84,05
26	Kegiatan Peningkatan Alsintan dan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.500.000.000	1.232.123.209	100	82,14
27	Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian, Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Peningkatan SDM Kelembagaan	2.500.000.000	2.290.154.266	100	91,61
28	Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan P4S	1.500.000.000	1.497.662.000	100	99,84
29	Kegiatan Gelar Promosi Agribisnis/Soropadan Agro Expo	500.000.000	492.019.960	100	98,40
30	Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkebunan	750.000.000	691.039.400	100	92,14
31	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Menggunakan Benih/Bibit Unggul	450.000.000	351.370.800	100	78,08
32	Kegiatan Penanaman dan Intensifikasi Tebu	750.000.000	679.110.000	100	90,55



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
33	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	450.000.000	355.000.000	100	78,89
34	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Petani Dalam Mengadopsi Teknologi	450.000.000	440.849.000	100	97,97
35	Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	500.000.000	457.616.850	100	91,52
36	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan Kering dan Sarana Pengairan Untuk Pengembangan Komoditas Pangan	500.000.000	370.160.000	100	74,03
6	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PENYULUHAN PERTANIAN	21.659.576.000	18.552.819.899		85,66
1	Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluhan	150.000.000	131.587.600	100	87,73
2	Kegiatan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan	10.007.866.000	9.899.255.413	100	98,91
3	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan	150.000.000	145.365.000	100	96,91
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	100.000.000	91.980.000	100	91,98
5	Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K)	250.000.000	215.155.000	100	86,06
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Penyuluh dan Pelaku Utama/Pelaku Usaha	7.200.000.000	4.403.555.320	100	61,16
7	Kegiatan Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh serta Pelaku Utama/Usaha	375.000.000	338.907.100	100	90,38
8	Kegiatan Pembinaan SDM Penyuluh	350.000.000	328.385.016	100	93,82
9	Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program	56.710.000	55.890.000	100	98,55
10	Kegiatan penguatan kelompok penerima Puap, KRPL dan replikasi FMA	100.000.000	81.854.000	100	81,85
11	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Pedesaan	920.000.000	900.477.100	100	97,88
12	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Penyuluhan	2.000.000.000	1.960.408.350	100	98,02

b). DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp 67.165.406.000,00 realisasi sebesar Rp 61.006.441.637,00 atau 90,83% yang terdiri dari 4 program dan 75 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.888.191.000	9.360.626.724		94,66
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	28.978.810	100	82,80
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	957.229.451	100	87,02
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	66.675.000	0	0	0,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	167.200.000	166.999.992	100	99,88
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Inseminasi Buatan	47.700.000	47.700.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan SDM Peternakan	50.280.000	50.280.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	47.700.000	47.700.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	47.700.000	47.700.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	47.700.000	47.700.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000	49.820.000	100	99,64
11	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.000.000	25.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Inseminasi Buatan	15.550.000	15.550.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan SDM Peternakan	12.035.000	12.035.000	100	100,00
14	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	10.501.000	10.237.920	100	97,49
15	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	13.061.000	13.061.000	100	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	17.525.000	17.225.000	100	98,29
17	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	10.675.000	10.377.500	100	97,21
18	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	95.000.000	93.631.400	100	98,56
19	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Inseminasi Buatan	16.320.000	15.900.000	100	97,43
20	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan SDM Peternakan	17.230.000	17.230.000	100	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	15.600.000	15.557.455	100	99,73



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
22	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	15.410.000	15.410.000	100	100,00
23	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	16.600.000	16.430.000	100	98,98
24	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	16.536.000	16.480.000	100	99,66
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.000.000	23.937.500	100	99,74
26	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Inseminasi Buatan	13.345.000	13.300.000	100	99,66
27	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan SDM Peternakan	12.632.000	12.632.000	100	100,00
28	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	9.200.000	8.214.430	100	89,29
29	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	14.533.000	14.533.000	100	100,00
30	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	14.464.000	14.246.000	100	98,49
31	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	10.501.000	10.376.500	100	98,81
32	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.200.000	44.130.200	100	99,84
33	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Inseminasi Buatan	12.150.000	12.050.000	100	99,18
34	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM Peternakan	25.000.000	24.999.500	100	100,00
35	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	12.790.000	12.552.320	100	98,14
36	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	14.756.000	14.756.000	100	100,00
37	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	16.038.000	15.848.000	100	98,82
38	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12.014.000	11.874.500	100	98,84
39	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.995.000	100	99,97
40	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	3.160.438.000	3.052.845.600	100	96,60



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
41	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	2.400.000.000	2.332.893.150	100	97,20
42	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	180.000.000	157.472.000	100	87,48
43	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	400.000.000	399.109.257	100	99,78
44	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.440.132.000	1.336.728.239	100	92,82
45	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	100.000.000	94.900.000	100	94,90
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.789.517.000	4.145.993.575		86,56
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	576.000.000	153.755.000	30,56	26,69
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100.000.000	93.984.000	100	93,98
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	125.000.000	108.203.850	100	86,56
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Inseminasi Buatan	45.000.000	44.428.000	100	98,73
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Peternakan	45.000.000	44.480.000	100	98,84
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Ruminansia	45.000.000	45.000.000	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	45.000.000	44.880.000	100	99,73
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	45.000.000	44.880.000	100	99,73
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	45.000.000	44.140.000	100	98,09
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000	481.181.650	100	96,24
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	125.000.000	94.511.500	100	75,61
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	50.000.000	49.865.100	100	99,73
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	46.000.000	45.183.500	100	98,23
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	25.000.000	23.125.000	100	92,50
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	25.000.000	24.849.000	100	99,40
16	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	3.781.000	3.778.000	100	99,92
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	17.364.000	16.598.500	100	95,59
18	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	2.926.372.000	2.783.150.475	100	95,11



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	210.000.000	190.200.000		90,57
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	210.000.000	190.200.000	100	90,57
4	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	52.277.698.000	47.309.621.338		90,50
1	Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran	7.305.500.000	6.756.395.503	99,83	92,48
2	Kegiatan Peningkatan Pembibitan Ternak Ruminansia	10.312.286.000	9.110.602.130	94,36	88,35
3	Kegiatan Peningkatan Pembibitan Ternak Non Ruminansia	2.786.764.000	2.694.786.800	100	96,70
4	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan	4.112.599.000	3.610.335.812	100	87,79
5	Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dan Pos Lalu-lintas Ternak (PLLT)	4.114.518.000	3.937.694.216	99,46	95,70
6	Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Data, dan Evaluasi Pembangunan Peternakan	640.000.000	610.840.150	100	95,44
7	Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha dan Promosi Agribisnis	3.700.000.000	3.325.014.021	100	89,87
8	Peningkatan Produksi Peternakan	8.228.208.000	6.883.069.455	90,32	83,65
9	Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	3.102.823.000	3.065.397.856	100	98,79
10	Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)	2.425.000.000	2.220.007.693	100	91,55
11	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.550.000.000	5.095.477.702	99,53	91,81

20. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 49.617.285.000,00 realisasi sebesar Rp 47.462.115.839,00 atau 95,66% yang terdiri dari 10 program dan 118 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.767.788.000	4.580.910.964		96,08
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas ESDM	37.500.000	37.500.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	4.125.000	4.125.000	100	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	4.500.000	4.500.000	100	100,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	5.250.000	5.250.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Solo	6.375.000	6.375.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM	734.000.000	633.435.681	100	86,30
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	84.000.000	68.432.092	100	81,47
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	84.000.000	67.970.678	100	80,92
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	75.450.000	62.632.545	100	83,01
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo	72.000.000	61.535.649	100	85,47
11	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	158.550.000	157.132.000	100	99,11
12	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas ESDM	108.750.000	108.698.000	100	99,95
13	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	12.000.000	12.000.000	100	100,00
14	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	12.000.000	12.000.000	100	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	12.000.000	12.000.000	100	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Solo	12.000.000	12.000.000	100	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas ESDM	225.000.000	225.000.000	100	100,00
18	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	7.500.000	7.500.000	100	100,00
19	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	7.500.000	7.500.000	100	100,00
20	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	7.500.000	7.500.000	100	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Solo	7.500.000	7.500.000	100	100,00
22	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas ESDM	37.500.000	37.497.000	100	99,99



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
23	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	7.500.000	7.500.000	100	100,00
24	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	7.500.000	7.500.000	100	100,00
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	7.500.000	7.500.000	100	100,00
26	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Solo	7.500.000	7.500.000	100	100,00
27	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.962.000	6.962.000	100	100,00
28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas ESDM	75.000.000	74.820.000	100	99,76
29	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	3.750.000	3.750.000	100	100,00
30	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	3.750.000	3.750.000	100	100,00
31	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	3.750.000	3.750.000	100	100,00
32	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Solo	3.750.000	3.750.000	100	100,00
33	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas ESDM	190.000.000	189.175.000	100	99,57
34	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	11.250.000	11.250.000	100	100,00
35	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	11.250.000	11.250.000	100	100,00
36	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	11.250.000	10.030.000	100	89,16
37	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Solo	11.250.000	11.250.000	100	100,00
38	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas ESDM	1.050.000.000	1.049.635.319	100	99,97
39	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	54.000.000	54.000.000	100	100,00
40	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	69.750.000	69.750.000	100	100,00
41	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	63.750.000	63.382.000	100	99,42
42	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Solo	67.500.000	67.500.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
43	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas ESDM	664.700.000	645.735.000	100	97,15
44	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	133.600.000	129.000.000	100	96,56
45	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	120.076.000	120.044.000	100	99,97
46	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	134.950.000	134.769.000	100	99,87
47	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Solo	112.500.000	111.625.000	100	99,22
48	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	220.000.000	217.650.000	100	98,93
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.222.336.000	7.158.184.075		99,11
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	11.250.000	11.250.000	100	100,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	11.250.000	11.250.000	100	100,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	11.250.000	11.250.000	100	100,00
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Solo	11.250.000	11.250.000	100	100,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas ESDM	429.044.000	419.346.000	100	97,74
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	75.000.000	74.100.000	100	98,80
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	75.000.000	75.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	67.800.000	67.632.000	100	99,75
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo	125.000.000	124.369.000	100	99,50
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM	429.088.000	427.448.200	100	99,62
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	37.500.000	36.735.850	100	97,96
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	52.500.000	50.240.500	100	95,70
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	37.500.000	35.949.825	100	95,87
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo	45.000.000	44.820.400	100	99,60
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas ESDM	26.250.000	26.250.000	100	100,00
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	15.000.000	15.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	11.250.000	11.250.000	100	100,00
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	3.500.000	3.500.000	100	100,00
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Solo	11.250.000	11.250.000	100	100,00
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas ESDM	131.250.000	131.060.000	100	99,86
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	18.750.000	18.750.000	100	100,00
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	18.750.000	18.750.000	100	100,00
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	18.750.000	18.750.000	100	100,00
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Solo	18.750.000	18.750.000	100	100,00
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Sekretariat Dinas ESDM	131.250.000	131.250.000	100	100,00
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	26.250.000	26.250.000	100	100,00
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	22.500.000	22.500.000	100	100,00
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Solo	37.500.000	37.500.000	100	100,00
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel	206.250.000	203.485.000	100	98,66
31	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ESDM	3.346.654.000	3.320.209.300	100	99,21
32	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara	132.500.000	127.371.000	100	96,13
33	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan	907.500.000	903.840.000	100	99,60
34	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	407.500.000	404.808.000	100	99,34
35	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Solo	132.500.000	129.845.000	100	98,00
36	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria	150.000.000	147.174.000	100	98,12
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	134.250.000	108.750.000		81,01
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	75.000.000	50.400.000	100	67,20



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	59.250.000	58.350.000	100	98,48
4	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	350.000.000	297.730.000		85,07
1	Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah	350.000.000	297.730.000	100	85,07
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	500.000.000	486.760.000		97,35
1	Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	500.000.000	486.760.000	100	97,35
6	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	2.500.000.000	2.137.813.400		85,51
1	Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan / Lahan Terkontaminasi Logam Berat	900.000.000	543.597.400	100	60,40
2	Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah	1.200.000.000	1.198.886.000	100	99,91
3	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah.	400.000.000	395.330.000	100	98,83
7	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	200.000.000	182.950.400		91,48
1	Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah	200.000.000	182.950.400	100	91,48
8	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	7.120.903.000	6.588.608.800		92,52
1	Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah	2.608.782.000	2.459.405.000	100	94,27
2	Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah	250.000.000	220.050.000	100	88,02
3	Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah	1.988.621.000	1.927.465.800	100	96,92
4	Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah	650.000.000	603.490.000	100	92,84
5	Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	573.500.000	430.040.000	100	74,99
6	Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah	1.050.000.000	948.158.000	100	90,30
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS	16.079.246.000	15.549.176.800		96,70
1	Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	2.208.220.000	2.008.043.000	100	90,93
2	Kegiatan Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di Jawa Tengah	500.000.000	494.752.800	100	98,95
3	Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	300.000.000	176.961.000	100	58,99



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
4	Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah	650.000.000	627.426.000	100	96,53
5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa Tengah	250.000.000	246.452.000	100	98,58
6	Kegiatan Pengembangan listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Solo	2.719.217.000	2.632.163.500	100	96,80
7	Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Kendeng Muria	2.090.221.000	2.025.185.500	100	96,89
8	Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Serayu Utara	2.840.780.000	2.823.685.000	100	99,40
9	Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Serayu Selatan	4.520.808.000	4.514.508.000	100	99,86
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH	10.742.762.000	10.371.231.400		96,54
1	Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan	650.000.000	598.650.000	100	92,10
2	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah	1.307.500.000	1.301.520.000	100	99,54
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Air Tanah	650.000.000	650.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering	3.623.132.000	3.613.512.000	100	99,73
5	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah	600.000.000	548.806.000	100	91,47
6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan	400.000.000	360.840.000	100	90,21
7	Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah	750.000.000	734.060.400	100	97,87
8	Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah	1.162.486.000	1.156.658.500	100	99,50
9	Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah	671.500.000	509.500.000	100	75,87
10	Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah	380.000.000	361.460.000	100	95,12
11	Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	548.144.000	536.224.500	100	97,83

21. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp45.059.894.000,00 realisasi sebesar Rp 39.173.039.324,00 atau 86,94% yang terdiri dari 10 program dan 104 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.695.000.000	11.962.460.336		94,23
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	14.000.000	13.987.392	100	99,91
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	3.000.000	2.999.390	100	99,98
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi IKM	3.000.000	2.997.375	100	99,91
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	3.000.000	2.999.820	100	99,99
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.682.100.000	1.298.546.945	100	77,20
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	157.200.000	140.276.477	100	89,23
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Teknologi IKM	282.000.000	279.595.116	100	99,15
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	355.000.000	335.875.490	100	94,61
9	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	190.000.000	123.058.000	100	64,77
10	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	20.000.000	20.000.000	100	100,00
11	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM	20.000.000	18.690.930	100	93,45
12	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	15.000.000	14.630.563	100	97,54
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	687.500.000	686.948.175	100	99,92
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	15.000.000	15.000.000	100	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan Teknologi IKM	45.500.000	45.500.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	107.000.000	106.540.000	100	99,57
17	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	150.000.000	149.160.750	100	99,44
18	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	12.000.000	11.975.000	100	99,79
19	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM	12.000.000	11.651.000	100	97,09
20	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	18.000.000	17.963.000	100	99,79
21	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	161.000.000	160.210.246	100	99,51
22	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	10.000.000	9.988.478	100	99,88
23	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Teknologi IKM	10.000.000	9.966.000	100	99,66
24	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	14.000.000	13.808.800	100	98,63
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	20.000.000	19.956.500	100	99,78
26	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	6.000.000	5.999.100	100	99,99
27	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM	6.000.000	6.000.000	100	100,00
28	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	12.341.000	12.300.000	100	99,67
29	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	63.000.000	59.487.000	100	94,42
30	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	15.000.000	15.000.000	100	100,00
31	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi IKM	15.000.000	14.890.000	100	99,27
32	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	15.000.000	15.000.000	100	100,00



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
33	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	25.000.000	23.405.000	100	93,62
34	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	3.000.000	3.000.000	100	100,00
35	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Teknologi IKM	3.000.000	2.874.000	100	95,80
36	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	3.000.000	3.000.000	100	100,00
37	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	290.000.000	184.321.000	100	63,56
38	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	15.000.000	14.820.000	100	98,80
39	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Teknologi IKM	15.000.000	15.000.000	100	100,00
40	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	10.000.000	9.700.000	100	97,00
41	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	907.000.000	863.569.416	100	95,21
42	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	60.000.000	59.671.320	100	99,45
43	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM	40.000.000	39.602.500	100	99,01
44	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	38.535.000	37.594.053	100	97,56
45	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.974.000.000	3.925.304.500	100	98,77
46	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	337.440.000	335.040.000	100	99,29
47	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi IKM	1.430.616.000	1.400.089.000	100	97,87
48	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	1.404.768.000	1.404.468.000	100	99,98



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.718.294.000	1.636.445.840		95,24
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	30.000.000	26.940.000	100	89,80
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	5.000.000	5.000.000	100	100,00
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	345.600.000	344.027.079	100	99,54
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	15.000.000	15.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM	50.000.000	49.710.000	100	99,42
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	15.000.000	15.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	229.700.000	225.757.461	100	98,28
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	20.000.000	19.945.040	100	99,73
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Teknologi IKM	20.000.000	19.826.000	100	99,13
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	28.000.000	27.999.858	100	100,00
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	100.000.000	99.898.500	100	99,90
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	10.000.000	9.960.000	100	99,60
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM	10.000.000	10.000.000	100	100,00
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	10.000.000	10.000.000	100	100,00
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.000.000	9.760.000	100	97,60



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	5.000.000	5.000.000	100	100,00
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan Teknologi IKM	7.500.000	7.500.000	100	100,00
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	5.000.000	5.000.000	100	100,00
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	340.500.000	277.725.012	82,77	81,56
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	37.094.000	37.073.540	100	99,94
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi IKM	15.000.000	15.000.000	100	100,00
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	15.000.000	15.000.000	100	100,00
24	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	15.000.000	14.908.350	100	99,39
25	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	280.000.000	272.960.000	100	97,49
26	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	20.000.000	19.850.000	100	99,25
27	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM	29.900.000	27.605.000	100	92,32
28	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM	20.000.000	20.000.000	100	100,00
3	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	262.500.000	253.395.803		96,53
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	30.000.000	25.900.000	100	86,33
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	232.500.000	227.495.803	100	97,85
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUTAN KELEMBAGAAN INDUSTRI DAN DAGANG	883.000.000	810.289.950		91,77



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan	250.000.000	215.821.700	100	86,33
2	Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang	110.000.000	109.130.000	100	99,21
3	Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah	123.000.000	94.407.900	100	76,75
4	Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)	400.000.000	390.930.350	100	97,73
5	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN	6.300.000.000	5.436.444.475		86,29
1	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan	6.300.000.000	5.436.444.475	100	86,29
6	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	2.760.400.000	2.521.052.147		91,33
1	Pengawasan barang beredar dan jasa	150.000.000	145.970.000	100	97,31
2	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	700.000.000	665.544.295	100	95,08
3	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	1.000.000.000	854.031.852	100	85,40
4	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	500.000.000	475.179.000	100	95,04
5	Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen	410.400.000	380.327.000	100	92,67
7	PROGRAM PENINGKATAN LOGISTIK DAERAH, AKSES PASAR DALAM NEGERI DAN PEMBERDAYAAN UDKM	2.865.700.000	2.622.047.636		91,50
1	Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.	134.500.000	109.120.500	100	81,13
2	Pengembangan jaringan distribusi daerah	200.000.000	180.570.000	100	90,29
3	Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional	100.000.000	94.776.934	100	94,78
4	Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang	200.000.000	190.369.750	100	95,18
5	Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang	45.000.000	44.500.000	100	98,89



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
6	Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri	186.200.000	173.005.000	100	92,91
7	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri	2.000.000.000	1.829.705.452	100	91,49
8	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN ANEKA	3.000.000.000	2.625.961.300		87,53
1	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka	3.000.000.000	2.625.961.300	100	87,53
9	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL	7.000.000.000	5.297.996.125		75,69
1	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil	3.000.000.000	2.620.221.725	100	87,34
2	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)	3.000.000.000	2.026.065.500	100	67,54
3	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)	1.000.000.000	651.708.900	100	65,17
10	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR, PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR	7.575.000.000	6.006.945.712		79,30
1	Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas	275.000.000	227.724.900	100	82,81
2	Peningkatan efisiensi impor non migas	100.000.000	93.656.650	100	93,66
3	Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri	1.600.000.000	1.081.231.383	100	67,58
4	Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah	100.000.000	54.328.000	100	54,33
5	Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)	5.500.000.000	4.550.004.779	100	82,73

22. URUSAN ADMINISTRASI UMUM

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Administrasi Umum sebesar Rp 244.565.717.000,00 realisasi sebesar Rp 204.010.724.857,00 atau 83,42% yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu

a). SEKRETARIAT DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp 99.933.708.000,00 realisasi sebesar Rp 92.488.524.223,00 atau 92,55% yang terdiri dari 37 program dan 142 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	33.684.163.000	31.670.957.681		94,02
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Umum	89.063.000	89.031.550	100	99,96
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Biro Umum	6.431.500.000	5.995.056.680	100	93,21
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Biro Umum	671.250.000	590.680.000	100	88,00
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Biro Umum	522.500.000	501.068.000	100	95,90
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Biro Umum	1.638.750.000	1.586.142.020	100	96,79
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	71.250.000	71.250.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Umum	712.500.000	695.175.325	100	97,57
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental	140.000.000	117.473.640	100	83,91
9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Organisasi dan Kepegawaian	64.660.000	64.365.900	100	99,55
10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Perekonomian	25.000.000	25.000.000	100	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Administrasi Pembangunan Daerah	30.000.000	30.000.000	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum	47.500.000	47.500.000	100	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	105.093.000	95.232.500	100	90,62
14	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Biro Umum	712.500.000	701.217.200	100	98,42
15	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Biro Umum	213.750.000	213.750.000	100	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Biro Umum	213.750.000	210.640.000	100	98,55
17	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	173.437.000	95.771.100	100	55,22
18	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Biro Umum	6.337.500.000	6.335.944.170	100	99,98
19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	366.937.000	360.396.200	100	98,22
20	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Umum	2.034.419.000	1.976.939.162	100	97,17
21	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Mental	305.400.000	282.337.234	100	92,45



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
22	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Organisasi dan Kepegawaian	216.360.000	211.945.651	100	97,96
23	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Perekonomian	150.000.000	148.248.900	100	98,83
24	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	439.750.000	390.884.055	100	88,89
25	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam & luar Daerah Biro Hukum	285.000.000	285.000.000	100	100,00
26	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	377.625.000	375.338.675	100	99,39
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Biro Umum	4.800.000.000	4.558.392.920	100	94,97
28	Kegiatan Peningkatan Olah Raga dan Seni Biro Umum	399.000.000	357.650.700	100	89,64
29	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	4.848.169.000	4.019.372.798	100	82,90
30	Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Biro Umum	1.261.500.000	1.239.153.301	100	98,23
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.387.683.000	11.421.232.012		92,20
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Biro Umum	1.159.125.000	1.086.058.877	100	93,70
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Biro Umum	283.750.000	274.686.278	100	96,81
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Biro Umum	2.327.908.000	2.210.596.070	100	94,96
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Biro Umum	3.094.000.000	2.873.134.487	100	92,86
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Biro Umum	1.335.000.000	1.252.543.300	100	93,82
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Biro Umum	75.000.000	65.820.000	100	87,76
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Biro Umum	842.500.000	623.887.000	100	74,05
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Biro Umum	90.000.000	84.690.000	100	94,10
9	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum	3.180.400.000	2.949.816.000	100	92,75
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	190.000.000	97.260.000		51,19
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Biro Umum	190.000.000	97.260.000	100	51,19



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	249.375.000	220.212.000		88,31
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Biro Umum	178.125.000	164.742.000	100	92,49
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Biro Umum	71.250.000	55.470.000	100	77,85
5	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	907.000.000	848.767.900		93,58
1	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	907.000.000	848.767.900	100	93,58
6	PROGRAM PEMBINAAN TRADISI, KESENIAN DAN NILAI BUDAYA	654.000.000	618.623.300		94,59
1	Kegiatan pengembangan kesenian dan nilai budaya	654.000.000	618.623.300	100	94,59
7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT	200.000.000	192.699.300		96,35
1	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	200.000.000	192.699.300	100	96,35
8	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN	686.350.000	588.768.712		85,78
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anti Narkoba	85.000.000	79.792.750	100	93,87
2	Koordinasi peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	161.500.000	156.326.366	100	96,80
3	Koordinasi peningkatan kesehatan pada kelompok lansia	123.500.000	114.446.000	100	92,67
4	Kegiatan Koordinasi P4GN	316.350.000	238.203.596	100	75,30
9	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	1.898.500.000	1.635.546.606		86,15
1	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air	1.898.500.000	1.635.546.606	100	86,15
10	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	8.480.000.000	7.500.167.309		88,45
1	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	8.480.000.000	7.500.167.309	100	88,45
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	209.000.000	189.448.700		90,65



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	209.000.000	189.448.700	100	90,65
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	209.000.000	166.001.980		79,43
1	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana	209.000.000	166.001.980	100	79,43
13	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	498.500.000	225.449.900		45,23
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan	498.500.000	225.449.900	51,97	45,23
14	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK	115.000.000	107.087.550		93,12
1	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	115.000.000	107.087.550	100	93,12
15	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	123.000.000	114.365.550		92,98
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	123.000.000	114.365.550	100	92,98
16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	190.000.000	163.551.150		86,08
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	190.000.000	163.551.150	100	86,08
17	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	371.000.000	321.023.100		86,53
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	190.000.000	154.377.000	100	81,25
2	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK	110.000.000	97.436.100	100	88,58



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
3	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	71.000.000	69.210.000	100	97,48
18	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	285.000.000	259.194.300		90,95
1	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	285.000.000	259.194.300	100	90,95
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	665.000.000	598.438.900		89,99
1	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	665.000.000	598.438.900	100	89,99
20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	346.000.000	340.311.000		98,36
1	Kegiatan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	346.000.000	340.311.000	100	98,36
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	631.800.000	618.480.040		97,89
1	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM	189.800.000	188.396.700	100	99,26
2	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa	142.000.000	141.860.400	100	99,90
3	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	300.000.000	288.222.940	100	96,07
22	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	150.000.000	132.088.392		88,06
1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan perikanan tangkap sumber daya kelautan.	150.000.000	132.088.392	100	88,06
23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	150.000.000	129.602.065		86,40
1	Kegiatan koordinasi pembinaan peningkatan produksi perikanan	150.000.000	129.602.065	100	86,40
24	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	190.000.000	188.966.640		99,46
1	Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi dan Kab/Kota.	190.000.000	188.966.640	100	99,46
25	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	1.797.500.000	1.693.510.256		94,21
1	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi	516.500.000	499.606.380	100	96,73
2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian	250.000.000	247.215.676	100	98,89
3	Kegiatan Penyelenggaraan SAE	1.031.000.000	946.688.200	100	91,82



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
26	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PENYULUHAN PERTANIAN	800.000.000	783.515.800		97,94
1	Kegiatan koordinasi pembinaan kelembagaan pertanian	800.000.000	783.515.800	100	97,94
27	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	148.500.000	144.511.300		97,31
1	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	148.500.000	144.511.300	100	97,31
28	PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS	165.000.000	158.155.050		95,85
1	Kegiatan Koordinasi Bidang Energi	165.000.000	158.155.050	100	95,85
29	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH	165.000.000	156.601.000		94,91
1	Kegiatan Koordinasi pengelolaan pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi	165.000.000	156.601.000	100	94,91
30	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	190.000.000	173.671.400		91,41
1	koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	190.000.000	173.671.400	100	91,41
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	261.250.000	253.457.330		97,02
1	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan	261.250.000	253.457.330	100	97,02
32	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUTAN KELEMBAGAAN INDUSTRI DAN DAGANG	285.000.000	281.405.000		98,74
1	Kegiatan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	285.000.000	281.405.000	100	98,74
33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	860.000.000	718.997.161		83,60
1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan	500.000.000	403.625.316	100	80,73
2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Jasa Produksi	360.000.000	315.371.845	100	87,60
34	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.346.250.000	4.321.586.700		99,43
1	Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah	1.448.750.000	1.444.705.500	100	99,72
2	Kegiatan Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	783.750.000	769.745.800	100	98,21
3	Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	332.500.000	331.181.500	100	99,60



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
4	Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Advokasi Hukum	878.750.000	875.500.000	100	99,63
5	Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Pemenuhan HAM	570.000.000	569.828.400	100	99,97
6	Kegiatan Sosialisasi Hukum	332.500.000	330.625.500	100	99,44
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	20.707.837.000	19.481.592.887		94,08
1	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	750.000.000	730.982.603	100	97,46
2	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	95.000.000	92.781.600	100	97,66
3	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	494.000.000	491.283.100	100	99,45
4	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	142.500.000	142.138.210	100	99,75
5	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	190.000.000	162.807.931	100	85,69
6	Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	95.000.000	92.444.632	100	97,31
7	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	658.000.000	614.039.166	100	93,32
8	Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan	565.000.000	528.069.500	100	93,46
9	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah	720.000.000	687.804.750	100	95,53
10	Kegiatan Pengembangan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	482.197.000	481.614.950	100	99,88
11	Kegiatan kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	206.647.000	199.769.000	100	96,67
12	Kegiatan Pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah	516.640.000	503.379.800	100	97,43
13	Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota	304.950.000	302.195.200	100	99,10
14	Kegiatan Pendampingan penerapan SMM dan Sertifikasi ISO 9001:2008	285.000.000	283.260.400	100	99,39
15	Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketatalaksanaan	178.125.000	175.002.900	100	98,25
16	Kegiatan Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	378.860.000	368.316.000	100	97,22
17	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	166.250.000	115.557.922	100	69,51
18	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di Provinsi Jawa tengah	220.000.000	211.680.250	100	96,22
19	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	95.000.000	84.895.795	100	89,36
20	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	125.000.000	92.785.000	100	74,23
21	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	427.500.000	389.650.962	100	91,15



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
22	Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se-Jawa Tengah	66.000.000	54.029.600	100	81,86
23	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	266.000.000	206.174.267	100	77,51
24	Konsolidasi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	247.950.000	238.920.783	100	96,36
25	Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah	361.710.000	339.196.100	100	93,78
26	Kegiatan Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Jateng	316.350.000	315.460.950	100	99,72
27	Kegiatan penyusunan pedoman ketatalaksanaan	168.150.000	166.841.450	100	99,22
28	Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah	172.212.000	170.180.100	100	98,82
29	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Analis Jabatan	185.930.000	180.913.459	100	97,30
30	Kegiatan Penyusunan Pola Hubungan Kerja	56.514.000	52.966.700	100	93,72
31	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Jawa Tengah	4.248.000.000	3.953.979.329	100	93,08
32	Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja	344.375.000	308.074.700	100	89,46
33	Kegiatan Koordinasi Pengembangan SAKIP Kabupaten/Kota	293.788.000	248.504.000	100	84,59
34	Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi	245.195.000	192.402.700	100	78,47
35	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	380.000.000	315.763.271	100	83,10
36	Koordinasi Pelaksanaan Peremenpan No. 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	137.750.000	103.109.100	100	74,85
37	Koordinasi percepatan pencapaian SPM	500.000.000	494.493.000	100	98,90
38	Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	275.000.000	206.621.750	100	75,14
39	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	1.462.000.000	1.427.987.200	100	97,67
40	Pengelolaan SIMPEG Setda Prov. Jateng	174.334.000	172.312.950	100	98,84
42	Peningkatan Disiplin PNS Setda Prov. Jateng	130.910.000	127.234.422	100	97,19
43	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	380.000.000	316.214.912	100	83,21
44	Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.900.000.000	1.884.968.692	100	99,21
45	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1.300.000.000	1.254.783.781	100	96,52
36	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	4.213.900.000	3.791.636.561		89,98
1	Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.	759.050.000	746.889.300	100	98,40



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
2	Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD	750.000.000	649.509.611	100	86,60
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing	1.600.000.000	1.410.078.700	100	88,13
4	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota	304.950.000	293.335.450	100	96,19
5	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah	500.000.000	458.596.900	100	91,72
6	Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2008-2013	299.900.000	233.226.600	100	77,77
37	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH	2.523.100.000	2.181.639.691		86,47
1	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri	501.600.000	501.471.479	100	99,97
2	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri	553.750.000	552.336.227	100	99,74
3	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri	1.025.050.000	726.913.450	100	70,91
4	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri	442.700.000	400.918.535	100	90,56

b). SEKRETARIAT DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 144.632.009.000,00 realisasi sebesar Rp 111.522.200.634,00 atau 77,11% yang terdiri dari 5 program dan 34 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	37.264.458.000	31.843.684.673		85,45
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	21.234.190	100	84,94
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.420.628.000	1.754.379.453	100	72,48
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	400.000.000	396.560.500	100	99,14
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	820.500.000	820.374.722	100	99,98
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.556.954.000	1.412.942.216	100	90,75
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	960.000.000	839.712.150	100	87,47
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	1.029.772.000	920.018.040	100	89,34



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	127.108.000	122.211.800	100	96,15
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	376.117.000	330.074.400	100	87,76
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	377.690.000	366.233.000	100	96,97
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	1.851.546.000	1.709.316.500	100	92,32
12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	23.918.759.000	20.166.697.952	100	84,31
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.879.042.000	2.765.745.250	100	96,06
14	Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan	521.342.000	218.184.500	100	41,85
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17.630.599.000	16.526.740.299		93,74
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3.451.334.000	3.159.703.305	100	91,55
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.137.168.000	3.809.402.800	100	92,08
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.043.468.000	3.841.080.244	100	94,99
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	845.000.000	751.098.950	100	88,89
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	35.980.000	22.110.000	100	61,45
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1.185.528.000	1.104.234.500	100	93,14
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	97.308.000	97.302.000	100	99,99
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	19.992.000	19.992.000	100	100,00
9	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3.814.821.000	3.721.816.500	100	97,56
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	953.841.000	893.500.000		93,67
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	953.841.000	893.500.000	100	93,67
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	4.312.740.000	2.935.838.750		68,07
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	4.312.740.000	2.935.838.750	100	68,07
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	84.470.371.000	59.322.436.912		70,23
1	Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah	20.373.610.000	10.350.186.969	82	50,80
2	Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Peraturan Perundang-undangan	3.175.621.000	1.306.921.704	90	41,15
3	Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah	31.436.520.000	21.617.227.409	100	68,76
4	Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah	16.396.000.000	15.263.871.945	100	93,10



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
5	Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Media Massa	2.710.979.000	2.123.173.000	100	78,32
6	Kegiatan Penerbitan Majalah Mimbar	553.010.000	542.650.000	100	98,13
7	Kegiatan Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah	591.737.000	398.023.740	100	67,26
8	Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan	8.391.042.000	7.410.472.145	100	88,31
9	Kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik	841.852.000	309.910.000	87	36,81

17. URUSAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp 22.645.443.000,00 realisasi sebesar Rp19.646.143.202,00 atau 86,76% yang terdiri dari 5 program dan 27 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.653.888.000	4.473.406.847		96,12
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.630.000	23.515.540	100	95,48
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.000.000	696.348.650	100	94,61
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000	107.400.500	100	76,71
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	186.615.000	186.134.951	100	99,74
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	336.000.000	332.035.500	100	98,82
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	259.568.000	259.568.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.750.000	18.582.000	100	99,10
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.404.000	5.111.000	100	94,58
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.085.000	10.952.000	100	64,10
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	381.000.000	365.400.711	100	95,91
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	2.000.000.000	1.961.418.227	100	98,07
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	548.836.000	506.939.768	100	92,37
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.629.846.000	2.556.581.354		97,21



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	798.730.000	788.905.689	100	98,77
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	543.427.000	537.652.865	100	98,94
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	99.233.000	98.100.000	100	98,86
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	44.332.000	44.070.000	100	99,41
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	224.874.000	221.327.800	100	98,42
6	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	14.250.000	14.170.000	100	99,44
7	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	905.000.000	852.355.000	100	94,18
3	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	268.750.000	268.658.000		99,97
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	268.750.000	268.658.000	100	99,97
4	PROGRAM Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	14.521.304.000	11.788.912.859		81,18
1	Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	9.132.142.000	7.574.960.695	100	82,95
2	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV	1.088.844.000	828.601.984	100	76,10
3	Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1.497.922.000	1.043.351.536	100	69,65
4	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	910.139.000	812.534.900	100	89,28
5	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	1.046.101.000	936.949.865	100	89,57
6	Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	846.156.000	592.513.879	100	70,02
5	PROGRAM Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	571.655.000	558.584.142		97,71
1	pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	571.655.000	558.584.142	100	97,71

**24. URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**



Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp 33.058.955.000,00 realisasi sebesar Rp32.129.329.572,00 atau 97,19% yang terdiri dari 10 program dan 39 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.643.245.000	5.410.475.294		95,88
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.900.000	22.228.560	100	93,01
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.537.936.000	1.370.849.771	100	89,14
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	131.000.000	124.321.000	100	94,90
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	194.874.000	194.874.000	100	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	280.445.000	279.793.350	100	99,77
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.500.000	32.500.000	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.779.000	61.533.000	100	99,60
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	155.000.000	154.699.350	100	99,81
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.147.721.000	1.147.402.322	100	99,97
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.741.040.000	1.687.857.941	100	96,95
12	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	307.050.000	304.416.000	100	99,14
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.037.914.000	2.929.297.149		96,42
1	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	377.500.000	375.835.200	100	99,56
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	868.420.000	835.773.434	100	96,24
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	455.000.000	438.427.015	100	96,36
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	277.500.000	250.041.000	100	90,10
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	31.144.000	30.316.500	100	97,34
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	322.727.000	296.203.500	100	91,78
7	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	6.000.000	6.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	35.782.000	35.700.000	100	99,77
9	Kegiatan Rehab Gedung Kantor	663.841.000	661.000.500	100	99,57



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
3	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000	86.550.000		96,17
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	90.000.000	86.550.000	100	96,17
4	PROGRAM Pengembangan Wilayah Perbatasan	100.000.000	100.000.000		100,00
1	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan	100.000.000	100.000.000	100	100,00
5	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	292.577.863		97,53
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana	300.000.000	292.577.863	100	97,53
6	PROGRAM Perencanaan Pembangunan Daerah	6.780.555.000	6.583.984.408		97,10
1	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	3.790.451.000	3.692.598.047	100	97,42
2	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.990.104.000	2.891.386.361	100	96,70
7	PROGRAM Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.866.000.000	1.865.424.668		99,97
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	1.866.000.000	1.865.424.668	100	99,97
8	PROGRAM Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	3.255.500.000	3.201.474.956		98,34
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra	1.772.700.000	1.761.029.201	100	99,34
2	Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan	1.482.800.000	1.440.445.755	100	97,14
9	PROGRAM Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam	3.265.100.000	2.993.231.360		91,67
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.328.042.000	1.279.431.892	100	96,34
2	Kegiatan WISMP-2	400.000.000	397.750.000	100	99,44
3	Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang	1.287.058.000	1.066.203.318	92,19	82,84
4	Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL	250.000.000	249.846.150	100	99,94
10	PROGRAM Pengembangan IPTEK Dan Inovasi Daerah	8.720.641.000	8.666.313.874		99,38



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	1.750.000.000	1.740.392.764	100	99,45
2	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1.650.000.000	1.641.490.675	100	99,48
3	Kegiatan Pembinaan Kemampuan. Keterampilan Kerja dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Penghasil Tembakau (DBHCHT)	1.992.886.000	1.980.128.965	100	99,36
4	Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	1.477.755.000	1.462.519.345	100	98,97
5	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbagai Bidang dan Sektor	850.000.000	842.071.800	100	99,07
6	Kegiatan kajian strategis isu-isu daerah	1.000.000.000	999.710.325	100	99,97

15. URUSAN KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan KEUANGAN sebesar Rp 172.474.121.000,00 realisasi sebesar Rp 154.597.526.673,00 atau 89,64% yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yaitu

a). BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp 139.265.518.000,00 realisasi sebesar Rp 126.166.757.934,00 atau 90,59% yang terdiri dari 6 program dan 790 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.820.572.000	66.601.567.304		89,02
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PPAD	40.000.000	14.250.530	100	35,63
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Semarang I	65.600.000	17.955.000	100	27,37
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Semarang II	31.900.000	14.347.000	100	44,97
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Semarang III	52.200.000	28.286.000	100	54,19
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Salatiga	21.400.000	12.575.000	100	58,76
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Semarang	44.400.000	9.329.350	100	21,01
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Kendal	39.100.000	28.171.600	100	72,05



8	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Demak	25.000.000	24.999.000	100	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Pati	45.000.000	38.836.000	100	86,30
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Kudus	51.500.000	51.500.000	100	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Jepara	34.520.000	28.625.000	100	82,92
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Rembang	24.800.000	24.798.550	100	99,99
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Blora	38.200.000	15.052.620	100	39,40
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Grobogan	32.900.000	32.877.580	100	99,93
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Pekalongan	21.100.000	21.061.500	100	99,82
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Pekalongan	44.500.000	37.155.000	100	83,49
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Batang	30.000.000	12.513.000	100	41,71
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Pemalang	26.800.000	26.800.000	100	100,00
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Tegal	22.600.000	8.745.555	100	38,70
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Tegal	22.010.000	22.010.000	100	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Brebes	21.200.000	21.149.000	100	99,76
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Banyumas	20.000.000	18.822.810	100	94,11
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Cilacap	58.300.000	56.434.900	100	96,80
24	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Purbalingga	21.550.000	18.541.990	100	86,04
25	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Banjarnegara	33.200.000	29.768.000	100	89,66
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Magelang	23.500.000	5.882.500	100	25,03
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Magelang	25.000.000	8.360.000	100	33,44
28	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Purworejo	19.300.000	19.299.800	100	100,00
29	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Kebumen	12.000.000	11.997.690	100	99,98
30	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Temanggung	25.000.000	18.857.500	100	75,43
31	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Wonosobo	20.000.000	19.999.000	100	100,00
32	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kota Surakarta	30.000.000	29.679.700	100	98,93
33	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Sukoharjo	23.000.000	21.997.250	100	95,64
34	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Klaten	53.800.000	37.452.710	100	69,61
35	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Boyolali	29.600.000	25.353.000	100	85,65
36	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Sragen	24.300.000	23.342.500	100	96,06



37	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Karanganyar	52.400.000	39.476.000	100	75,34
38	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UP3AD Kabupaten Wonogiri	33.450.000	25.572.500	100	76,45
39	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas PPAD	3.270.502.000	2.232.750.308	100	68,27
40	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Semarang I	350.000.000	334.147.119	100	95,47
41	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Semarang II	313.597.000	295.051.326	100	94,09
42	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Semarang III	302.950.000	297.707.625	100	98,27
43	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Salatiga	135.300.000	104.344.850	100	77,12
44	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Semarang	378.600.000	335.913.023	100	88,73
45	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Kendal	285.500.000	232.043.493	100	81,28
46	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Demak	228.000.000	196.442.572	100	86,16
47	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Pati	250.500.000	204.131.497	100	81,49
48	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Kudus	185.459.000	147.429.848	100	79,49
49	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Jepara	225.080.000	202.068.313	100	89,78
50	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Rembang	180.571.000	156.142.344	100	86,47
51	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Blora	169.300.000	160.463.669	100	94,78
52	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Grobogan	254.500.000	213.899.392	100	84,05
53	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Pekalongan	205.285.000	145.419.778	100	70,84
54	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Pekalongan	176.000.000	141.572.243	100	80,44
55	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Batang	209.200.000	205.519.827	100	98,24
56	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Pemalang	174.400.000	140.951.561	100	80,82



57	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Tegal	268.000.000	239.331.898	100	89,30
58	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Tegal	200.000.000	172.551.901	100	86,28
59	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Brebes	476.000.000	320.464.464	100	67,32
60	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Banyumas	254.000.000	208.314.721	100	82,01
61	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Cilacap	190.000.000	165.039.974	100	86,86
62	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Purbalingga	289.631.000	247.420.250	100	85,43
63	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Banjarnegara	175.000.000	101.190.464	100	57,82
64	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Magelang	156.600.000	125.025.809	100	79,84
65	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Magelang	217.300.000	159.577.521	100	73,44
66	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Purworejo	216.200.000	165.134.016	100	76,38
67	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Kebumen	205.000.000	197.534.292	100	96,36
68	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Temanggung	137.700.000	97.714.544	100	70,96
69	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Wonosobo	119.000.000	102.594.557	100	86,21
70	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kota Surakarta	284.000.000	242.563.713	100	85,41
71	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Sukoharjo	274.000.000	150.414.507	100	54,90
72	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Klaten	292.880.000	278.773.966	100	95,18
73	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Boyolali	225.000.000	143.328.709	100	63,70
74	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Sragen	196.500.000	153.747.789	100	78,24
75	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Karanganyar	189.000.000	166.806.047	100	88,26
76	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UP3AD Kabupaten Wonogiri	363.000.000	280.371.420	100	77,24



77	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas PPAD	340.000.000	264.820.828	100	77,89
78	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kota Semarang I	153.000.000	136.500.000	100	89,22
79	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kota Semarang III	36.000.000	32.670.000	100	90,75
80	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Demak	3.000.000	3.000.000	100	100,00
81	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Pati	600.000	118.310	100	19,72
82	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Rembang	1.000.000	1.000.000	100	100,00
83	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Blora	2.600.000	2.600.000	100	100,00
84	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Grobogan	10.750.000	10.193.344	100	94,82
85	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kota Pekalongan	2.188.000	2.000.000	100	91,41
86	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Batang	2.832.000	1.100.000	100	38,84
87	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Pemalang	2.900.000	2.900.000	100	100,00
88	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kota Tegal	2.600.000	2.600.000	100	100,00
89	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Tegal	2.000.000	2.000.000	100	100,00
90	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Brebes	3.000.000	3.000.000	100	100,00
91	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Cilacap	3.000.000	2.500.000	100	83,33
92	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Purbalingga	2.440.000	2.120.000	100	86,89
93	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kota Magelang	5.000.000	5.000.000	100	100,00
94	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Magelang	2.000.000	2.000.000	100	100,00
95	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Kebumen	2.640.000	2.595.000	100	98,30
96	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Sukoharjo	120.000.000	68.077.872	100	56,73



97	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Boyolali	3.000.000	3.000.000	100	100,00
98	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Karanganyar	900.000	576.980	100	64,11
99	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran UP3AD Kabupaten Wonogiri	3.000.000	2.997.000	100	99,90
100	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas PPAD	701.750.000	581.595.698	100	82,88
101	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas PPAD	284.000.000	220.352.200	100	77,59
102	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Semarang I	40.000.000	39.880.480	100	99,70
103	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Semarang II	46.900.000	44.742.500	100	95,40
104	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Semarang III	40.000.000	39.607.000	100	99,02
105	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Salatiga	26.000.000	23.944.000	100	92,09
106	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Semarang	30.000.000	30.000.000	100	100,00
107	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Kendal	24.000.000	24.000.000	100	100,00
108	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Demak	28.377.000	28.371.996	100	99,98
109	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Pati	18.000.000	18.000.000	100	100,00
110	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Kudus	24.000.000	23.500.000	100	97,92
111	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Jepara	27.000.000	27.000.000	100	100,00
112	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Rembang	14.820.000	14.777.000	100	99,71
113	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Blora	24.000.000	23.998.900	100	100,00
114	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Grobogan	24.000.000	24.000.000	100	100,00
115	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Pekalongan	30.000.000	30.000.000	100	100,00
116	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Pekalongan	30.000.000	29.987.000	100	99,96



117	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Batang	47.000.000	46.982.034	100	99,96
118	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Pemalang	46.000.000	45.577.500	100	99,08
119	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Tegal	56.100.000	55.939.024	100	99,71
120	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Tegal	26.000.000	25.990.050	100	99,96
121	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Brebes	24.000.000	24.000.000	100	100,00
122	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Banyumas	24.000.000	24.000.000	100	100,00
123	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Cilacap	30.000.000	29.965.000	100	99,88
124	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Purbalingga	24.000.000	23.990.800	100	99,96
125	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Banjarnegara	30.000.000	29.868.182	100	99,56
126	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Magelang	24.000.000	24.000.000	100	100,00
127	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Magelang	24.000.000	24.000.000	100	100,00
128	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Purworejo	25.800.000	23.850.000	100	92,44
129	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Kebumen	24.000.000	23.969.000	100	99,87
130	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Temanggung	24.000.000	24.000.000	100	100,00
131	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Wonosobo	31.000.000	30.988.250	100	99,96
132	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kota Surakarta	23.199.000	23.080.154	100	99,49
133	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Sukoharjo	24.000.000	23.982.132	100	99,93
134	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Klaten	24.000.000	23.999.988	100	100,00
135	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Boyolali	32.350.000	31.749.112	100	98,14
136	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Sragen	37.000.000	36.991.988	100	99,98



137	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Karanganyar	26.400.000	23.499.118	100	89,01
138	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Wonogiri	24.000.000	23.968.600	100	99,87
139	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas PPAD	2.523.250.000	2.041.145.675	100	80,89
140	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Semarang I	173.784.000	160.460.700	100	92,33
141	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Semarang II	140.000.000	136.660.000	100	97,61
142	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Semarang III	105.884.000	103.971.000	100	98,19
143	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Salatiga	86.000.000	85.817.500	100	99,79
144	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Semarang	90.220.000	89.088.300	100	98,75
145	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Kendal	81.000.000	80.805.000	100	99,76
146	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Demak	119.800.000	119.786.000	100	99,99
147	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Pati	119.050.000	115.959.500	100	97,40
148	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Kudus	90.000.000	89.931.760	100	99,92
149	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Jepara	91.518.000	90.716.000	100	99,12
150	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Rembang	90.000.000	89.967.000	100	99,96
151	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Blora	90.000.000	89.999.300	100	100,00
152	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Grobogan	108.500.000	102.771.000	100	94,72
153	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Pekalongan	80.000.000	79.224.000	100	99,03
154	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Pekalongan	100.000.000	98.301.000	100	98,30
155	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Batang	120.000.000	119.432.350	100	99,53
156	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Pemalang	80.000.000	79.993.000	100	99,99
157	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Tegal	90.000.000	90.000.000	100	100,00
158	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Tegal	80.000.000	79.971.100	100	99,96
159	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Brebes	90.000.000	89.997.700	100	100,00
160	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Banyumas	90.000.000	89.983.800	100	99,98
161	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Cilacap	90.000.000	89.958.500	100	99,95
162	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga	100.000.000	99.704.500	100	99,70
163	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Banjarnegara	90.000.000	89.933.900	100	99,93
164	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Magelang	90.000.000	89.983.000	100	99,98



165	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Magelang	120.000.000	119.169.600	100	99,31
166	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Purworejo	114.000.000	114.000.000	100	100,00
167	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Kebumen	90.000.000	90.000.000	100	100,00
168	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Temanggung	90.000.000	89.697.000	100	99,66
169	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Wonosobo	100.000.000	99.884.500	100	99,88
170	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kota Surakarta	108.660.000	104.157.000	100	95,86
171	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Sukoharjo	90.000.000	90.000.000	100	100,00
172	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Klaten	105.300.000	105.300.000	100	100,00
173	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Boyolali	90.000.000	89.995.450	100	99,99
174	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Sragen	105.600.000	105.594.000	100	99,99
175	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Karanganyar	90.000.000	89.328.636	100	99,25
176	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri	110.000.000	109.174.000	100	99,25
177	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas PPAD	11.863.750.000	11.080.283.510	100	93,40
178	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Semarang I	35.000.000	33.040.525	100	94,40
179	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Semarang II	40.000.000	39.834.530	100	99,59
180	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Semarang III	55.000.000	52.878.400	100	96,14
181	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Salatiga	17.000.000	16.994.870	100	99,97
182	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Semarang	23.156.000	22.486.500	100	97,11
183	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Kendal	32.600.000	32.599.860	100	100,00
184	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Demak	70.000.000	69.955.590	100	99,94
185	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Pati	31.000.000	27.970.550	100	90,23
186	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Kudus	16.725.000	16.721.000	100	99,98
187	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Jepara	29.000.000	26.647.770	100	91,89
188	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Rembang	15.000.000	14.928.900	100	99,53
189	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Blora	22.000.000	21.948.500	100	99,77
190	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Grobogan	18.500.000	18.486.000	100	99,92
191	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Pekalongan	22.500.000	22.414.000	100	99,62
192	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Pekalongan	25.000.000	22.874.850	100	91,50



193	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Batang	30.000.000	29.904.050	100	99,68
194	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Pemalang	15.000.000	14.999.450	100	100,00
195	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Tegal	15.000.000	14.999.550	100	100,00
196	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Tegal	13.000.000	12.966.850	100	99,75
197	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Brebes	55.000.000	54.999.999	100	100,00
198	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Banyumas	22.500.000	22.495.200	100	99,98
199	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Cilacap	28.000.000	27.799.400	100	99,28
200	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Purbalingga	25.000.000	24.686.650	100	98,75
201	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Banjarnegara	15.000.000	14.946.950	100	99,65
202	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Magelang	17.000.000	16.831.400	100	99,01
203	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Magelang	15.000.000	14.774.900	100	98,50
204	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Purworejo	26.000.000	25.999.000	100	100,00
205	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Kebumen	22.450.000	22.449.000	100	100,00
206	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Temanggung	25.000.000	24.894.900	100	99,58
207	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Wonosobo	43.339.000	42.288.300	100	97,58
208	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kota Surakarta	33.600.000	33.285.525	100	99,06
209	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Sukoharjo	20.000.000	18.125.000	100	90,63
210	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Klaten	54.500.000	54.487.950	100	99,98
211	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Boyolali	28.000.000	27.647.100	100	98,74
212	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Sragen	40.000.000	39.978.800	100	99,95
213	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Karanganyar	34.950.000	34.811.350	100	99,60
214	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UP3AD Kabupaten Wonogiri	35.000.000	34.996.400	100	99,99
215	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas PPAD	408.600.000	406.508.425	100	99,49



216	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Semarang I	10.000.000	3.236.500	100	32,37
217	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Semarang II	9.000.000	8.828.500	100	98,09
218	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Semarang III	10.000.000	9.938.000	100	99,38
219	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Salatiga	8.000.000	7.979.500	100	99,74
220	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Semarang	10.000.000	9.849.500	100	98,50
221	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Kendal	10.000.000	9.927.500	100	99,28
222	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Demak	10.000.000	9.965.000	100	99,65
223	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Pati	6.000.000	5.975.750	100	99,60
224	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Kudus	10.000.000	9.999.000	100	99,99
225	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Jepara	9.698.000	8.701.500	100	89,72
226	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Rembang	10.000.000	9.997.500	100	99,98
227	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Blora	10.000.000	9.998.700	100	99,99
228	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Grobogan	10.000.000	9.998.990	100	99,99
229	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Pekalongan	10.000.000	10.000.000	100	100,00
230	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Pekalongan	10.000.000	9.983.000	100	99,83
231	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Batang	10.000.000	9.979.500	100	99,80
232	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Pemalang	10.000.000	9.951.000	100	99,51
233	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Tegal	20.000.000	19.990.500	100	99,95
234	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Tegal	10.000.000	9.985.000	100	99,85
235	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Brebes	10.000.000	10.000.000	100	100,00



236	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Banyumas	10.000.000	9.999.500	100	100,00
237	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Cilacap	10.000.000	9.990.000	100	99,90
238	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga	12.400.000	12.395.000	100	99,96
239	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	9.953.500	100	99,54
240	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Magelang	10.000.000	9.735.000	100	97,35
241	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Magelang	10.000.000	9.996.000	100	99,96
242	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Purworejo	12.000.000	11.992.200	100	99,94
243	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Kebumen	10.000.000	10.000.000	100	100,00
244	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Temanggung	10.000.000	9.999.250	100	99,99
245	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Wonosobo	10.000.000	10.000.000	100	100,00
246	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kota Surakarta	12.000.000	11.925.000	100	99,38
247	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Sukoharjo	10.000.000	9.999.000	100	99,99
248	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Klaten	10.000.000	9.993.000	100	99,93
249	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Boyolali	14.000.000	13.821.800	100	98,73
250	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Sragen	12.550.000	12.541.700	100	99,93
251	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Karanganyar	10.000.000	9.774.250	100	97,74
252	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri	20.750.000	20.746.500	100	99,98
253	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas PPAD	19.599.000	16.556.900	100	84,48
254	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Semarang I	9.971.000	9.946.000	100	99,75
255	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Semarang II	6.975.000	6.418.010	100	92,01
256	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Semarang III	3.000.000	2.952.500	100	98,42



257	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Salatiga	3.000.000	2.998.500	100	99,95
258	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Semarang	3.000.000	2.999.000	100	99,97
259	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Kendal	3.000.000	2.946.000	100	98,20
260	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Demak	4.000.000	3.909.350	100	97,73
261	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Pati	5.600.000	5.327.350	100	95,13
262	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Kudus	3.000.000	3.000.000	100	100,00
263	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Jepara	1.200.000	1.142.000	100	95,17
264	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Rembang	3.000.000	2.983.900	100	99,46
265	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Blora	3.000.000	3.000.000	100	100,00
266	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Grobogan	3.000.000	2.129.300	100	70,98
267	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Pekalongan	3.000.000	2.993.000	100	99,77
268	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Pekalongan	3.000.000	3.000.000	100	100,00
269	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Batang	3.000.000	2.780.000	100	92,67
270	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Pemalang	3.000.000	2.990.000	100	99,67
271	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Tegal	3.000.000	2.995.606	100	99,85
272	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Tegal	3.000.000	2.999.000	100	99,97
273	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Brebes	3.000.000	3.000.000	100	100,00
274	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Banyumas	3.000.000	2.984.100	100	99,47
275	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Cilacap	3.000.000	2.135.600	100	71,19
276	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Purbalingga	3.000.000	2.991.100	100	99,70
277	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Banjarnegara	3.000.000	2.987.800	100	99,59
278	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Magelang	4.500.000	4.496.700	100	99,93
279	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Magelang	3.000.000	2.972.500	100	99,08
280	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Purworejo	7.500.000	7.500.000	100	100,00
281	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Kebumen	3.000.000	3.000.000	100	100,00
282	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Temanggung	3.000.000	2.999.500	100	99,98
283	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Wonosobo	3.000.000	2.996.000	100	99,87
284	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kota Surakarta	2.000.000	1.997.500	100	99,88
285	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Sukoharjo	3.000.000	2.820.590	100	94,02
286	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Klaten	3.000.000	2.975.400	100	99,18



287	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Boyolali	3.000.000	3.000.000	100	100,00
288	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Sragen	3.000.000	2.999.300	100	99,98
289	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Karanganyar	3.000.000	2.917.900	100	97,26
290	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Wonogiri	3.000.000	2.998.800	100	99,96
291	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas PPAD	106.125.000	101.935.500	100	96,05
292	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Semarang I	10.000.000	9.270.000	100	92,70
293	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Semarang II	8.400.000	8.400.000	100	100,00
294	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Semarang III	7.500.000	7.500.000	100	100,00
295	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Salatiga	6.534.000	6.068.000	100	92,87
296	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Semarang	16.500.000	14.600.800	100	88,49
297	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Kendal	6.336.000	6.326.000	100	99,84
298	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Demak	6.050.000	6.050.000	100	100,00
299	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Pati	6.000.000	6.000.000	100	100,00
300	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Kudus	7.800.000	7.800.000	100	100,00
301	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Jepara	6.534.000	6.530.000	100	99,94
302	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Rembang	6.600.000	6.599.500	100	99,99
303	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Blora	9.108.000	9.080.000	100	99,69
304	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Grobogan	7.942.000	7.894.000	100	99,40
305	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Pekalongan	7.514.000	7.222.000	100	96,11
306	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Pekalongan	7.986.000	7.951.500	100	99,57
307	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Batang	10.187.000	8.545.000	100	83,88



308	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Pemalang	8.228.000	8.150.000	100	99,05
309	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Tegal	9.900.000	9.895.000	100	99,95
310	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Tegal	9.075.000	9.072.000	100	99,97
311	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Brebes	9.000.000	9.000.000	100	100,00
312	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Banyumas	6.000.000	6.000.000	100	100,00
313	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Cilacap	9.000.000	8.975.000	100	99,72
314	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Purbalingga	6.600.000	6.564.000	100	99,45
315	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Banjarnegara	9.000.000	8.970.000	100	99,67
316	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Magelang	6.415.000	6.360.300	100	99,15
317	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Magelang	7.260.000	7.260.000	100	100,00
318	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Purworejo	6.534.000	6.505.000	100	99,56
319	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Kebumen	8.712.000	8.712.000	100	100,00
320	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Temanggung	7.260.000	7.251.000	100	99,88
321	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Wonosobo	16.996.000	16.995.000	100	99,99
322	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kota Surakarta	6.000.000	5.720.000	100	95,33
323	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Sukoharjo	7.150.000	7.145.000	100	99,93
324	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Klaten	11.500.000	11.492.000	100	99,93
325	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Boyolali	6.050.000	5.940.000	100	98,18
326	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Sragen	8.250.000	8.250.000	100	100,00
327	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Karanganyar	6.831.000	6.700.000	100	98,08



328	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UP3AD Kabupaten Wonogiri	9.000.000	8.893.000	100	98,81
329	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas PPAD	950.000.000	862.480.000	100	90,79
330	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Semarang I	75.375.000	53.027.500	100	70,35
331	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Semarang II	48.500.000	48.383.700	100	99,76
332	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Semarang III	47.500.000	43.350.000	100	91,26
333	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Salatiga	44.000.000	38.274.690	100	86,99
334	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Semarang	85.700.000	84.461.400	100	98,55
335	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Kendal	97.000.000	95.902.500	100	98,87
336	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Demak	85.000.000	84.724.100	100	99,68
337	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Pati	87.000.000	71.979.826	100	82,74
338	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Kudus	73.500.000	60.725.650	100	82,62
339	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Jepara	72.144.000	66.094.500	100	91,61
340	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Rembang	65.000.000	62.460.000	100	96,09
341	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Blora	58.000.000	56.009.000	100	96,57
342	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Grobogan	50.000.000	49.990.075	100	99,98
343	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Pekalongan	64.000.000	62.732.000	100	98,02
344	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Pekalongan	77.000.000	76.166.500	100	98,92
345	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Batang	72.500.000	47.172.500	100	65,07
346	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Pemalang	47.900.000	32.119.000	100	67,05
347	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Tegal	44.000.000	37.115.100	100	84,35
348	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Tegal	74.675.000	72.040.000	100	96,47
349	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Brebes	94.500.000	94.500.000	100	100,00
350	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Banyumas	100.000.000	62.115.000	100	62,12
351	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Cilacap	86.000.000	49.125.100	100	57,12
352	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Purbalingga	80.000.000	66.184.400	100	82,73
353	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Banjarnegara	80.000.000	79.290.000	100	99,11
354	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Magelang	47.400.000	38.985.000	100	82,25
355	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Magelang	44.000.000	34.467.000	100	78,33
356	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Purworejo	53.000.000	52.999.000	100	100,00



357	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Kebumen	55.000.000	55.000.000	100	100,00
358	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Temanggung	60.000.000	59.406.500	100	99,01
359	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Wonosobo	45.886.000	45.885.000	100	100,00
360	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kota Surakarta	62.500.000	62.455.700	100	99,93
361	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Sukoharjo	92.500.000	61.237.750	100	66,20
362	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Klaten	84.000.000	83.942.000	100	99,93
363	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Boyolali	96.500.000	27.032.000	100	28,01
364	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Sragen	64.000.000	59.790.000	100	93,42
365	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Karanganyar	69.500.000	49.477.000	100	71,19
366	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UP3AD Kabupaten Wonogiri	79.000.000	73.980.000	100	93,65
367	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas PPD	1.667.422.000	1.643.870.251	100	98,59
368	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Semarang I	173.120.000	142.105.499	100	82,08
369	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Semarang II	167.000.000	149.836.125	100	89,72
370	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Semarang III	111.800.000	108.993.047	100	97,49
371	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Salatiga	122.780.000	120.026.499	100	97,76
372	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Semarang	175.800.000	161.000.000	100	91,58
373	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Kendal	180.400.000	180.063.499	100	99,81
374	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Demak	210.440.000	209.952.383	100	99,77
375	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Pati	206.000.000	203.197.000	100	98,64
376	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Kudus	167.200.000	162.380.000	100	97,12
377	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Jepara	172.622.000	167.364.240	100	96,95
378	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Rembang	164.400.000	164.160.786	100	99,85
379	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Blora	222.600.000	200.608.900	100	90,12



380	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Grobogan	313.200.000	275.128.950	100	87,84
381	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Pekalongan	132.400.000	131.985.325	100	99,69
382	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Pekalongan	149.910.000	131.065.308	100	87,43
383	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Batang	183.000.000	174.106.000	100	95,14
384	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Pemalang	183.200.000	148.823.000	100	81,24
385	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Tegal	139.400.000	133.946.472	100	96,09
386	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Tegal	145.900.000	145.807.767	100	99,94
387	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Brebes	200.000.000	192.230.179	100	96,12
388	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Banyumas	300.900.000	300.827.600	100	99,98
389	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Cilacap	241.700.000	209.201.000	100	86,55
390	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Purbalingga	188.250.000	188.112.061	100	99,93
391	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Banjarnegara	161.600.000	161.462.600	100	99,91
392	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Magelang	142.400.000	134.672.000	100	94,57
393	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Magelang	159.000.000	155.478.279	100	97,79
394	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Purworejo	168.300.000	168.183.343	100	99,93
395	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Kebumen	156.000.000	155.982.850	100	99,99
396	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Temanggung	156.000.000	133.756.700	100	85,74
397	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Wonosobo	154.800.000	136.645.300	100	88,27
398	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kota Surakarta	214.190.000	213.967.000	100	99,90
399	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Sukoharjo	221.600.000	138.897.610	100	62,68



400	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Klaten	252.700.000	252.528.000	100	99,93
401	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Boyolali	217.400.000	180.430.500	100	82,99
402	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Sragen	218.700.000	216.934.500	100	99,19
403	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Karanganyar	214.600.000	151.771.230	100	70,72
404	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UP3AD Kabupaten Wonogiri	211.700.000	208.915.032	100	98,68
405	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas PPAD	8.239.194.000	6.611.159.000	100	80,24
406	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Semarang I	586.650.000	539.621.400	100	91,98
407	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Semarang II	440.175.000	408.922.200	100	92,90
408	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Semarang III	458.900.000	440.856.232	100	96,07
409	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Salatiga	269.100.000	265.448.000	100	98,64
410	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Semarang	598.725.000	583.146.000	100	97,40
411	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Kendal	451.500.000	449.897.600	100	99,65
412	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Demak	410.850.000	401.013.900	100	97,61
413	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Pati	395.700.000	375.897.200	100	95,00
414	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Kudus	374.675.000	360.672.600	100	96,26
415	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Jepara	424.350.000	410.547.600	100	96,75
416	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Rembang	394.100.000	370.473.000	100	94,00
417	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Blora	603.200.000	590.712.600	100	97,93
418	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Grobogan	477.400.000	447.213.900	100	93,68
419	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Pekalongan	329.100.000	320.747.600	100	97,46
420	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Pekalongan	457.800.000	444.580.200	100	97,11
421	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Batang	504.525.000	459.646.110	100	91,10
422	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Pemalang	424.050.000	406.203.262	100	95,79
423	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Tegal	342.900.000	334.997.200	100	97,70
424	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Tegal	403.825.000	388.188.710	100	96,13



425	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Brebes	853.875.000	819.973.600	100	96,03
426	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Banyumas	933.751.000	651.044.800	100	69,72
427	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Cilacap	666.200.000	634.845.600	100	95,29
428	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Purbalingga	403.350.000	395.972.600	100	98,17
429	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Banjarnegara	490.901.000	488.597.200	100	99,53
430	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Magelang	323.225.000	319.164.200	100	98,74
431	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Magelang	373.875.000	341.197.200	100	91,26
432	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Purworejo	596.250.000	586.949.324	100	98,44
433	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Kebumen	626.100.000	552.963.500	100	88,32
434	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Temanggung	386.850.000	382.872.200	100	98,97
435	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Wonosobo	361.200.000	351.497.600	100	97,31
436	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kota Surakarta	431.525.000	419.272.200	100	97,16
437	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Sukoharjo	511.800.000	455.901.494	100	89,08
438	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Klaten	697.450.000	682.744.800	100	97,89
439	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Boyolali	447.075.000	430.822.200	100	96,36
440	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Sragen	434.950.000	409.913.500	100	94,24
441	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Karanganyar	419.525.000	356.547.600	100	84,99
442	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UP3AD Kabupaten Wonogiri	646.750.000	643.144.800	100	99,44
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	46.275.237.000	43.386.374.353		93,76
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.200.000.000	3.856.173.500	100	91,81
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas PPAD	355.000.000	339.268.800	100	95,57
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kota Salatiga	19.422.000	19.361.000	100	99,69
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Kendal	10.000.000	9.504.000	100	95,04
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Pati	20.000.000	19.942.000	100	99,71
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Kudus	10.000.000	9.746.000	100	97,46



7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Jepara	10.000.000	10.000.000	100	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Rembang	10.000.000	9.870.000	100	98,70
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Blora	10.000.000	9.950.000	100	99,50
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Grobogan	10.000.000	10.000.000	100	100,00
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kota Pekalongan	25.000.000	24.500.000	100	98,00
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Pemalang	10.000.000	9.750.000	100	97,50
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kota Tegal	10.000.000	9.917.000	100	99,17
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Brebes	10.000.000	10.000.000	100	100,00
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Banyumas	10.000.000	9.700.000	100	97,00
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Cilacap	10.000.000	9.953.000	100	99,53
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	9.900.000	100	99,00
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kota Magelang	35.000.000	34.201.200	100	97,72
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Magelang	10.000.000	9.960.000	100	99,60
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Purworejo	10.000.000	10.000.000	100	100,00
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Kebumen	10.000.000	10.000.000	100	100,00
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Temanggung	30.000.000	29.282.000	100	97,61
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Wonosobo	25.000.000	24.642.200	100	98,57
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kota Surakarta	10.000.000	9.832.000	100	98,32
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Klaten	10.000.000	9.946.100	100	99,46
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Boyolali	340.000.000	336.005.000	100	98,83
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Sragen	25.000.000	24.981.300	100	99,93
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Karanganyar	10.000.000	9.770.068	100	97,70
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas UP3AD Kabupaten Wonogiri	10.000.000	9.906.000	100	99,06
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas PPAD	3.350.000.000	3.053.264.514	100	91,14



31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang I	430.250.000	428.738.455	100	99,65
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang II	282.000.000	279.103.000	100	98,97
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang III	329.295.000	325.638.600	100	98,89
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Salatiga	215.000.000	212.591.360	100	98,88
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Semarang	327.250.000	321.602.850	100	98,27
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kendal	299.841.000	296.848.000	100	99,00
37	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Demak	616.000.000	607.014.400	100	98,54
38	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pati	344.005.000	342.674.831	100	99,61
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kudus	354.284.000	350.869.800	100	99,04
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Jepara	476.505.000	462.638.100	100	97,09
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Rembang	446.450.000	437.319.900	100	97,95
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Blora	357.000.000	351.369.000	100	98,42
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Grobogan	390.000.000	387.416.419	100	99,34
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Pekalongan	441.000.000	437.611.000	100	99,23
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pekalongan	235.714.000	234.342.000	100	99,42
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Batang	744.800.000	727.581.600	100	97,69
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pemalang	370.208.000	366.182.000	100	98,91
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Tegal	505.000.000	497.264.500	100	98,47
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Tegal	270.000.000	266.233.000	100	98,60
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Brebes	340.000.000	339.579.890	100	99,88
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Banyumas	385.000.000	382.183.800	100	99,27
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Cilacap	383.000.000	366.186.600	100	95,61
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga	240.000.000	236.638.400	100	98,60
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten	325.000.000	319.364.000	100	98,27



	Banjarnegara				
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Magelang	315.000.000	310.887.500	100	98,69
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Magelang	253.000.000	252.314.325	100	99,73
57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Purworejo	363.000.000	360.552.000	100	99,33
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kebumen	395.000.000	394.288.900	100	99,82
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Temanggung	226.000.000	224.899.800	100	99,51
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Wonosobo	300.000.000	297.275.100	100	99,09
61	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kota Surakarta	512.800.000	511.415.200	100	99,73
62	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Sukoharjo	253.000.000	251.306.200	100	99,33
63	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Klaten	510.000.000	504.922.200	100	99,00
64	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Boyolali	327.000.000	324.455.780	100	99,22
65	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Sragen	340.000.000	339.382.100	100	99,82
66	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Karanganyar	254.719.000	240.269.068	100	94,33
67	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri	388.900.000	386.991.600	100	99,51
68	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas PPAD	2.029.300.000	1.377.618.969	100	67,89
69	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Semarang I	111.408.000	92.539.920	100	83,06
70	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Semarang II	117.090.000	113.822.963	100	97,21
71	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Semarang III	96.066.000	96.051.250	100	99,98
72	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Salatiga	70.990.000	61.199.347	100	86,21
73	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Semarang	275.156.000	171.191.745	100	62,22
74	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Kendal	85.000.000	83.740.400	100	98,52



75	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Demak	97.000.000	96.692.325	100	99,68
76	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Pati	133.800.000	124.765.912	100	93,25
77	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Kudus	87.000.000	74.477.312	100	85,61
78	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Jepara	99.000.000	89.935.130	100	90,84
79	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Rembang	95.000.000	82.307.100	100	86,64
80	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Blora	119.700.000	118.356.250	100	98,88
81	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Grobogan	100.000.000	79.472.202	100	79,47
82	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Pekalongan	80.000.000	74.746.874	100	93,43
83	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Pekalongan	80.000.000	69.594.837	100	86,99
84	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Batang	90.000.000	77.792.886	100	86,44
85	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Pemalang	161.100.000	155.027.727	100	96,23
86	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Tegal	66.500.000	66.303.701	100	99,70
87	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Tegal	99.670.000	91.286.341	100	91,59
88	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Brebes	95.000.000	93.612.318	100	98,54
89	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Banyumas	127.500.000	118.720.700	100	93,11
90	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Cilacap	108.000.000	105.538.714	100	97,72
91	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Purbalingga	95.000.000	88.966.150	100	93,65
92	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Banjarnegara	97.500.000	93.726.606	100	96,13
93	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Magelang	85.000.000	63.480.278	100	74,68
94	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Magelang	116.000.000	114.205.650	100	98,45



95	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Purworejo	92.900.000	85.004.314	100	91,50
96	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Kebumen	95.000.000	94.552.605	100	99,53
97	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Temanggung	94.000.000	82.663.962	100	87,94
98	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Wonosobo	100.000.000	99.115.558	100	99,12
99	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kota Surakarta	157.000.000	128.942.068	100	82,13
100	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Sukoharjo	95.000.000	92.997.140	100	97,89
101	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Klaten	95.000.000	93.764.299	100	98,70
102	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Boyolali	110.000.000	109.479.420	100	99,53
103	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Sragen	95.000.000	94.452.500	100	99,42
104	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Karanganyar	105.000.000	65.898.922	100	62,76
105	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UP3AD Kabupaten Wonogiri	116.200.000	91.267.682	100	78,54
106	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas PPAD	300.000.000	289.472.600	100	96,49
107	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang I	5.000.000	5.000.000	100	100,00
108	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang II	10.000.000	9.960.000	100	99,60
109	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang III	7.000.000	6.875.000	100	98,21
110	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Salatiga	7.000.000	5.145.000	100	73,50
111	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Semarang	7.000.000	6.864.000	100	98,06
112	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kendal	7.000.000	7.000.000	100	100,00
113	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Demak	7.000.000	7.000.000	100	100,00
114	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pati	6.000.000	5.950.000	100	99,17



115	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kudus	7.000.000	6.852.500	100	97,89
116	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Jepara	7.000.000	7.000.000	100	100,00
117	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Rembang	4.950.000	4.950.000	100	100,00
118	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Blora	7.000.000	6.900.000	100	98,57
119	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Grobogan	7.000.000	6.950.000	100	99,29
120	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Pekalongan	7.000.000	7.000.000	100	100,00
121	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pekalongan	7.000.000	6.985.000	100	99,79
122	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Batang	7.000.000	7.000.000	100	100,00
123	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pemasang	7.000.000	7.000.000	100	100,00
124	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Tegal	10.000.000	10.000.000	100	100,00
125	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Tegal	7.000.000	7.000.000	100	100,00
126	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Brebes	7.000.000	7.000.000	100	100,00
127	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Banyumas	7.000.000	7.000.000	100	100,00
128	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Cilacap	7.000.000	7.000.000	100	100,00
129	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga	7.000.000	6.930.000	100	99,00
130	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Banjarnegara	7.000.000	7.000.000	100	100,00
131	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Magelang	5.500.000	5.330.000	100	96,91
132	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Magelang	7.000.000	6.995.000	100	99,93
133	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Purworejo	7.000.000	6.919.000	100	98,84
134	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kebumen	7.000.000	7.000.000	100	100,00



135	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Temanggung	7.000.000	6.970.000	100	99,57
136	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Wonosobo	7.000.000	7.000.000	100	100,00
137	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kota Surakarta	15.000.000	10.997.510	100	73,32
138	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Sukoharjo	7.000.000	6.619.500	100	94,56
139	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Klaten	7.000.000	7.000.000	100	100,00
140	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Boyolali	7.000.000	6.859.845	100	98,00
141	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Sragen	7.000.000	6.970.000	100	99,57
142	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Karanganyar	7.000.000	6.979.500	100	99,71
143	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri	14.500.000	14.460.000	100	99,72
144	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas PPAD	985.000.000	903.110.500	100	91,69
145	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang I	131.000.000	130.566.600	100	99,67
146	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang II	207.000.000	205.571.391	100	99,31
147	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Semarang III	137.000.000	126.815.000	100	92,57
148	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Salatiga	37.000.000	36.469.350	100	98,57
149	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Semarang	99.600.000	99.431.327	100	99,83
150	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kendal	34.000.000	33.722.000	100	99,18
151	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Demak	41.000.000	40.881.491	100	99,71
152	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pati	32.500.000	32.286.127	100	99,34
153	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kudus	20.888.000	20.884.500	100	99,98
154	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Jepara	27.600.000	27.220.913	100	98,63



155	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Rembang	37.875.000	37.869.400	100	99,99
156	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Blora	65.000.000	64.990.000	100	99,98
157	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Grobogan	50.000.000	49.995.400	100	99,99
158	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Pekalongan	50.000.000	46.525.000	100	93,05
159	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pekalongan	40.000.000	39.984.628	100	99,96
160	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Batang	50.000.000	49.060.500	100	98,12
161	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Pemalang	42.000.000	41.850.000	100	99,64
162	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Tegal	60.000.000	59.993.061	100	99,99
163	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Tegal	30.000.000	29.990.500	100	99,97
164	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Brebes	50.000.000	49.335.000	100	98,67
165	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Banyumas	43.100.000	42.922.500	100	99,59
166	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Cilacap	60.000.000	57.686.864	100	96,14
167	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga	45.000.000	44.978.500	100	99,95
168	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Banjarnegara	48.000.000	47.722.000	100	99,42
169	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Magelang	32.500.000	32.235.500	100	99,19
170	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Magelang	35.000.000	34.703.934	100	99,15
171	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Purworejo	40.000.000	39.999.975	100	100,00
172	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Kebumen	30.000.000	30.000.000	100	100,00
173	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Temanggung	30.000.000	29.798.400	100	99,33
174	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Wonosobo	40.000.000	39.320.000	100	98,30



175	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kota Surakarta	100.000.000	70.052.683	100	70,05
176	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Sukoharjo	30.000.000	30.000.000	100	100,00
177	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Klaten	56.000.000	55.262.000	100	98,68
178	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Boyolali	30.000.000	29.840.800	100	99,47
179	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Sragen	55.000.000	54.999.750	100	100,00
180	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Karanganyar	28.750.000	28.428.300	100	98,88
181	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri	75.000.000	74.375.250	100	99,17
182	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas PPAD	150.000.000	149.727.500	100	99,82
183	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Semarang I	15.000.000	15.000.000	100	100,00
184	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Semarang II	3.000.000	2.975.000	100	99,17
185	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Semarang III	30.000.000	29.995.000	100	99,98
186	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Salatiga	5.000.000	4.902.500	100	98,05
187	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Semarang	5.000.000	4.862.000	100	97,24
188	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Kendal	10.000.000	10.000.000	100	100,00
189	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Demak	10.000.000	9.878.000	100	98,78
190	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Pati	20.000.000	19.525.000	100	97,63
191	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Kudus	10.000.000	9.834.000	100	98,34
192	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Jepara	4.970.000	4.810.000	100	96,78
193	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Rembang	10.000.000	9.986.000	100	99,86
194	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Blora	12.000.000	11.900.000	100	99,17
195	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Grobogan	10.000.000	9.998.808	100	99,99
196	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Pekalongan	10.000.000	9.988.000	100	99,88
197	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Pekalongan	25.000.000	24.717.000	100	98,87
198	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Batang	10.000.000	9.976.000	100	99,76
199	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Pemasang	10.000.000	9.922.000	100	99,22



200	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Tegal	10.000.000	9.996.000	100	99,96
201	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Tegal	10.000.000	9.796.600	100	97,97
202	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Brebes	12.000.000	11.900.000	100	99,17
203	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Banyumas	12.000.000	11.983.000	100	99,86
204	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Cilacap	12.000.000	11.845.000	100	98,71
205	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Purbalingga	10.000.000	9.721.500	100	97,22
206	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Banjarnegara	33.000.000	32.900.000	100	99,70
207	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Magelang	10.000.000	9.718.500	100	97,19
208	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Magelang	10.000.000	9.990.000	100	99,90
209	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Purworejo	12.000.000	11.961.000	100	99,68
210	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Kebumen	10.000.000	10.000.000	100	100,00
211	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Temanggung	18.000.000	17.589.000	100	97,72
212	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Wonosobo	17.722.000	17.369.000	100	98,01
213	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kota Surakarta	35.000.000	34.960.200	100	99,89
214	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Sukoharjo	10.000.000	9.983.000	100	99,83
215	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Klaten	30.000.000	30.000.000	100	100,00
216	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Boyolali	15.000.000	14.950.000	100	99,67
217	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Sragen	10.000.000	9.955.000	100	99,55
218	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Karanganyar	10.000.000	9.737.420	100	97,37
219	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UP3AD Kabupaten Wonogiri	15.000.000	15.000.000	100	100,00
220	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas PPAD	814.400.000	677.489.350	100	83,19
221	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Semarang I	80.700.000	80.545.000	100	99,81
222	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Semarang II	81.510.000	78.141.000	100	95,87
223	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Semarang III	85.900.000	85.660.000	100	99,72
224	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Salatiga	55.000.000	53.425.000	100	97,14



225	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Semarang	48.100.000	39.450.000	100	82,02
226	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Kendal	52.700.000	52.698.500	100	100,00
227	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Demak	68.845.000	68.700.000	100	99,79
228	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Pati	52.600.000	50.450.700	100	95,91
229	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Kudus	63.900.000	63.793.636	100	99,83
230	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Jepara	58.400.000	56.185.000	100	96,21
231	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Rembang	44.900.000	44.430.240	100	98,95
232	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Blora	77.440.000	77.265.000	100	99,77
233	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Grobogan	72.234.000	72.225.000	100	99,99
234	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Pekalongan	84.426.000	73.500.000	100	87,06
235	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Pekalongan	128.135.000	102.290.000	100	79,83
236	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Batang	115.600.000	115.521.700	100	99,93
237	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Pemalang	88.000.000	61.236.240	100	69,59
238	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Tegal	50.000.000	49.987.500	100	99,98
239	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Tegal	68.900.000	68.899.000	100	100,00
240	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Brebes	98.501.000	98.246.000	100	99,74
241	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Banyumas	108.000.000	106.935.000	100	99,01
242	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Cilacap	100.000.000	99.086.000	100	99,09
243	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Purbalingga	80.000.000	79.345.000	100	99,18
244	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Banjarnegara	85.000.000	84.755.000	100	99,71



245	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Magelang	65.251.000	64.760.000	100	99,25
246	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Magelang	94.051.000	93.566.500	100	99,48
247	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Purworejo	81.951.000	66.046.600	100	80,59
248	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Kebumen	68.001.000	68.001.000	100	100,00
249	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Temanggung	75.901.000	75.510.000	100	99,48
250	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Wonosobo	66.442.000	66.200.000	100	99,64
251	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kota Surakarta	72.801.000	72.574.000	100	99,69
252	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Sukoharjo	88.001.000	70.325.000	100	79,91
253	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Klaten	60.000.000	59.941.000	100	99,90
254	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Boyolali	57.501.000	57.240.000	100	99,55
255	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Sragen	100.101.000	100.090.000	100	99,99
256	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Karanganyar	53.061.000	52.915.000	100	99,72
257	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UP3AD Kabupaten Wonogiri	59.740.000	59.650.000	100	99,85
258	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas PPAD	17.501.000	6.942.500	100	39,67
259	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas PPAD	52.501.000	40.851.500	100	77,81
260	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Sekretariat Dinas PPAD	115.000.000	103.610.450	100	90,10
261	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Semarang I	24.000.000	23.999.100	100	100,00
262	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Semarang II	7.200.000	7.200.000	100	100,00
263	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Semarang III	20.000.000	19.940.000	100	99,70



264	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Salatiga	6.000.000	5.990.000	100	99,83
265	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Semarang	15.000.000	14.999.000	100	99,99
266	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Kendal	15.000.000	15.000.000	100	100,00
267	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Demak	23.000.000	22.980.000	100	99,91
268	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Pati	15.000.000	15.000.000	100	100,00
269	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Kudus	6.000.000	5.991.000	100	99,85
270	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Jepara	10.000.000	10.000.000	100	100,00
271	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Rembang	6.000.000	5.990.000	100	99,83
272	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Blora	6.000.000	6.000.000	100	100,00
273	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Grobogan	10.102.000	10.101.127	100	99,99
274	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Pekalongan	16.000.000	16.000.000	100	100,00
275	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Pekalongan	6.000.000	5.986.000	100	99,77
276	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Batang	11.000.000	10.984.000	100	99,85
277	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Pemasang	6.000.000	6.000.000	100	100,00
278	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	6.000.000	6.000.000	100	100,00



	UP3AD Kota Tegal				
279	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Tegal	6.000.000	5.981.000	100	99,68
280	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Brebes	6.000.000	6.000.000	100	100,00
281	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Banyumas	9.000.000	9.000.000	100	100,00
282	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Cilacap	7.000.000	7.000.000	100	100,00
283	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Purbalingga	6.000.000	5.960.000	100	99,33
284	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Banjarnegara	6.000.000	6.000.000	100	100,00
285	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Magelang	6.000.000	5.986.000	100	99,77
286	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Magelang	6.000.000	5.970.000	100	99,50
287	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Purworejo	8.100.000	8.100.000	100	100,00
288	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Kebumen	6.000.000	6.000.000	100	100,00
289	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Temanggung	6.000.000	6.000.000	100	100,00
290	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Wonosobo	16.000.000	15.871.900	100	99,20
291	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kota Surakarta	15.000.000	14.990.000	100	99,93
292	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Sukoharjo	6.000.000	6.000.000	100	100,00



293	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Klaten	17.000.000	16.984.900	100	99,91
294	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Boyolali	6.000.000	5.952.490	100	99,21
295	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Sragen	11.000.000	10.994.100	100	99,95
296	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Karanganyar	6.000.000	5.995.000	100	99,92
297	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan UP3AD Kabupaten Wonogiri	12.125.000	12.125.000	100	100,00
298	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas PPAD	6.790.677.000	6.418.930.123	100	94,53
299	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Semarang I	34.000.000	24.963.400	100	73,42
300	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Semarang II	25.000.000	24.750.000	100	99,00
301	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Semarang III	25.000.000	24.790.000	100	99,16
302	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Salatiga	25.000.000	24.915.000	100	99,66
303	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Semarang	137.750.000	129.475.825	100	93,99
304	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Kendal	25.000.000	22.891.998	100	91,57
305	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Demak	76.300.000	75.936.000	100	99,52
306	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Pati	25.000.000	23.100.000	100	92,40
307	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Kudus	52.000.000	51.690.000	100	99,40
308	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Jepara	50.000.000	43.909.810	100	87,82
309	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Rembang	25.000.000	24.930.000	100	99,72
310	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Blora	65.300.000	52.625.000	100	80,59
311	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Grobogan	96.500.000	88.000.000	100	91,19



312	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Pekalongan	25.000.000	20.544.000	100	82,18
313	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Pekalongan	25.000.000	21.000.000	100	84,00
314	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Batang	25.000.000	24.876.000	100	99,50
315	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Pemalang	25.000.000	24.500.000	100	98,00
316	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Tegal	25.000.000	24.200.000	100	96,80
317	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Tegal	25.000.000	23.500.000	100	94,00
318	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Brebes	25.000.000	25.000.000	100	100,00
319	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Banyumas	25.000.000	24.640.000	100	98,56
320	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Cilacap	25.000.000	24.400.000	100	97,60
321	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga	25.000.000	24.525.000	100	98,10
322	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Banjarnegara	25.000.000	24.800.000	100	99,20
323	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Magelang	22.500.000	22.410.000	100	99,60
324	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Magelang	25.000.000	24.350.000	100	97,40
325	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Purworejo	52.000.000	51.557.500	100	99,15
326	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Kebumen	25.000.000	24.715.000	100	98,86
327	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Temanggung	82.910.000	81.174.000	100	97,91
328	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Wonosobo	25.000.000	23.200.000	100	92,80
329	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kota Surakarta	25.000.000	24.690.000	100	98,76
330	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Sukoharjo	25.000.000	24.825.000	100	99,30
331	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Klaten	25.000.000	24.795.000	100	99,18
332	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Boyolali	25.000.000	23.887.500	100	95,55



333	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Sragen	40.000.000	39.475.000	100	98,69
334	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Karanganyar	25.000.000	24.750.000	100	99,00
335	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri	25.000.000	24.670.000	100	98,68
336	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Sekretariat Dinas PPAD	1.600.000.000	1.500.674.500	100	93,79
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	600.000.000	468.348.550		78,06
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas PPAD	600.000.000	468.348.550	100	78,06
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	450.000.000	409.131.000		90,92
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas PPAD	100.000.000	74.700.000	100	74,70
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas PPAD	250.000.000	235.106.000	100	94,04
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	100.000.000	99.325.000	100	99,33
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.611.989.000	7.566.545.317		87,86
1	Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah/Intensifikasi, ekstensifikasi, Sertifikasi	2.850.000.000	2.358.525.391	100	82,76
2	Kegiatan Pengendalian Pemungutan Retribusi dan PLL	1.600.000.000	1.297.425.283	100	81,09
3	Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan	900.000.000	895.919.358	100	99,55
4	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Pelayanan Wajib Pajak	2.175.000.000	2.031.067.000	100	93,38
5	Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan dan Aset	540.659.000	462.205.150	100	85,49
6	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendapatan	546.330.000	521.403.135	100	95,44
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	8.507.720.000	7.734.791.410		90,91
1	Kegiatan Sinkronisasi Program	758.000.000	722.862.600	100	95,36
2	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pendapatan dan Jaringan Aset	7.749.720.000	7.011.928.810	95,48	90,48

b). BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 33.208.603.000,00 realisasi sebesar Rp 28.430.768.739,00 atau 85,61% yang terdiri dari 4 program dan 31 kegiatan, yaitu



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.124.731.000	4.193.405.002		81,83
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.600.000	12.841.890	100	62,34
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.260.400.000	743.755.783	100	59,01
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	44.000.000	41.530.500	100	94,39
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	103.000.000	102.363.780	100	99,38
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	345.550.000	340.895.100	100	98,65
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	200.000.000	188.388.040	100	94,19
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	73.509.150	100	86,48
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.500.000	90.147.900	100	69,61
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.500.000	38.280.000	100	99,43
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	265.000.000	139.031.627	100	52,46
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	680.000.000	673.317.711	100	99,02
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.860.681.000	1.704.309.521	100	91,60
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	92.500.000	45.034.000	100	48,69
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.150.426.000	4.571.406.591		88,76
1	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	1.176.930.000	894.826.500	100	76,03
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.214.200.000	2.094.610.442	100	94,60
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	408.020.000	336.220.925	100	82,40
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	131.000.000	109.582.757	100	83,65
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1.065.276.000	982.499.967	100	92,23
6	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	5.000.000	4.926.000	100	98,52
7	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	150.000.000	148.740.000	100	99,16
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.693.750.000	16.069.955.532		90,82
1	Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian/Evaluasi Keuangan Daerah	16.871.100.000	15.473.702.278	100	91,72



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
2	Kegiatan Monitoring/Asistensi Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Anggaran Bantuan	621.700.000	535.515.254	100	86,14
3	Kegiatan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	200.950.000	60.738.000	100	30,23
4	PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH	5.239.696.000	3.596.001.614		68,63
1	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	523.000.000	299.830.300	100	57,33
2	Kegiatan Up Dating Data Pengadaan dan Mutasi	150.000.000	130.681.200	100	87,12
3	Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	2.700.000.000	1.811.263.212	100	67,08
4	Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD Prov. Jateng	400.000.000	164.057.137	100	41,01
5	Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.066.696.000	922.756.850	100	86,51
6	Kegiatan Penyelesaian kasus/sengketa aset	100.000.000	38.892.315	100	38,89
7	Kegiatan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan BMD	150.000.000	145.830.700	100	97,22
8	Kegiatan Penyusunan DKBMD dan DKPBMD	150.000.000	82.689.900	100	55,13

26. URUSAN KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Kepegawaian yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp 23.435.444.000,00 realisasi sebesar Rp 19.120.675.399,00 atau 81,59% yang terdiri dari 4 program dan 48 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.530.840.000	4.156.969.094		91,75
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.080.000	25.080.000	100	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	773.520.000	596.365.984	100	77,10
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	130.755.000	129.180.000	100	98,80
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	86.212.000	85.350.000	100	99,00
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	856.900.000	778.074.725	100	90,80



6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	585.200.000	538.863.250	100	92,08
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.729.000	22.722.625	100	99,97
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.701.000	33.562.600	100	99,59
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.756.000	11.756.000	100	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	252.345.000	251.540.343	100	99,68
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	869.045.000	868.362.567	100	99,92
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	883.597.000	816.111.000	100	92,36
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.828.408.000	4.577.804.272		94,81
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	899.236.000	869.454.490	100	96,69
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	520.900.000	512.203.712	100	98,33
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	70.300.000	70.043.000	100	99,63
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	9.500.000	9.410.000	100	99,05
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	312.720.000	277.482.570	100	88,73
6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3.015.752.000	2.839.210.500	100	94,15
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	218.500.000	207.831.465		95,12
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	218.500.000	207.831.465	100	95,12
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	13.857.696.000	10.178.070.568		73,45
1	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	190.950.000	123.086.050	100	64,46
2	Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS	194.743.000	191.780.800	100	98,48
3	Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota	1.119.012.000	9.495.400	1,3	0,85
4	Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus	216.580.000	181.373.250	100	83,74
5	Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng	1.706.200.000	1.550.117.989	100	90,85
6	Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitas Kenaikan Pangkat PNS	868.813.000	671.252.323	100	77,26
7	Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS	422.702.000	395.002.665	100	93,45
8	Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN	717.250.000	397.040.177	72,12	55,36
9	Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya	394.650.000	321.245.200	100	81,40
10	Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat	189.680.000	106.839.527	100	56,33



11	Strutural Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional	96.824.000	76.014.050	100	78,51
12	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian	71.700.000	61.099.600	100	85,22
13	Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian	104.046.000	85.428.875	100	82,11
14	Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota	186.923.000	137.724.654	100	73,68
15	Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas	594.841.000	560.285.028	100	94,19
16	Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	325.620.000	309.127.700	100	94,94
17	Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS	17.600.000	17.600.000	100	100,00
18	Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian	307.267.000	280.692.051	100	91,35
19	Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian	451.752.000	382.618.667	95	84,70
20	Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng	292.000.000	275.989.225	100	94,52
21	Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng	217.395.000	191.251.981	100	87,97
22	Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng	225.843.000	200.322.163	100	88,70
23	Kegiatan Bintek Pembinaan PNS	411.150.000	372.018.886	100	90,48
24	Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	97.110.000	82.677.743	100	85,14
25	Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN)	156.524.000	142.228.329	100	90,87
26	Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng	2.850.808.000	1.943.528.186	100	68,17
27	Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum	103.086.000	88.586.350	100	85,93
28	Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas	621.094.000	509.951.985	100	82,11
29	Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota	705.533.000	513.691.714	92,87	72,81

27. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp 51.379.690.000,00 realisasi sebesar Rp 46.053.053.312,00 atau 89,63% yang terdiri dari 5 program dan 36 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN



1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.769.410.000	8.043.979.663		91,73
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	6.521.070	100	96,61
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.620.500.000	1.447.440.434	100	89,32
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	180.000.000	179.684.000	100	99,82
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.433.886.000	1.141.448.000	100	79,61
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	181.013.000	180.901.000	100	99,94
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	150.000.000	148.536.800	100	99,02
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	119.654.500	100	99,71
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	263.250.000	261.981.000	100	99,52
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.863.000	29.296.000	100	89,15
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000	198.046.500	100	99,02
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	397.500.000	396.981.767	100	99,87
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	4.183.648.000	3.933.488.592	100	94,02
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.959.463.000	5.811.842.659		97,52
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	32.000.000	30.655.000	100	95,80
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.005.498.000	2.987.720.000	100	99,41
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	335.837.000	332.182.518	100	98,91
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	450.000.000	445.212.625	100	98,94
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	225.000.000	224.409.050	100	99,74
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	224.750.000	223.543.926	100	99,46
7	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	18.750.000	14.154.000	100	75,49
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	302.962.000	274.955.000	100	90,76
9	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.364.666.000	1.279.010.540	100	93,72
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	435.000.000	433.688.404		99,70
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	435.000.000	433.688.404	100	99,70
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	33.299.307.000	29.279.296.648		87,93
1	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	8.958.765.000	8.368.953.240	100	93,42



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
2	Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsional	6.036.667.000	5.283.726.485	100	87,53
3	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	13.299.612.000	10.897.913.381	100	81,94
4	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah	221.610.000	213.982.300	100	96,56
5	Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./Kota se Jateng	129.155.000	124.256.269	100	96,21
6	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara	291.203.000	275.420.582	100	94,58
7	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	4.362.295.000	4.115.044.391	100	94,33
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	2.916.510.000	2.484.245.938		85,18
1	Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	146.148.000	115.318.600	100	78,91
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	900.000.000	798.294.100	100	88,70
3	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	786.673.000	708.957.800	100	90,12
4	Kegiatan Reformasi Kediklatan	332.167.000	276.561.221	100	83,26
5	Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	278.286.000	226.681.240	100	81,46
6	Kegiatan Media Informasi Diklat	274.773.000	217.803.977	100	79,27
7	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	198.463.000	140.629.000	100	70,86

24. URUSAN LAINNYA

BADAN PENGHUBUNG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp 14.095.720.000,00 realisasi sebesar Rp13.067.529.212,00 atau 92,71% yang terdiri dari 7 program dan 28 kegiatan, yaitu

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.499.150.000	5.864.384.339		90,23
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.500.000	34.162.900	100	80,38
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	715.000.000	607.316.044	100	84,94



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	160.000.000	159.994.360	100	100,00
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	150.000.000	147.105.206	100	98,07
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	116.000.000	116.000.000	100	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	110.000.000	109.999.489	100	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.142.000	71.142.000	100	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	218.300.000	216.264.100	100	99,07
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	17.326.000	100	96,26
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	850.000.000	829.433.937	100	97,58
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.400.000.000	1.399.980.275	100	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.648.208.000	2.155.660.028	97,17	81,40
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.806.450.000	3.614.025.630		94,94
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.172.000.000	1.142.526.200	100	97,49
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.222.000.000	1.095.604.530	100	89,66
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	187.000.000	186.800.000	100	99,89
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	48.500.000	47.671.000	100	98,29
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	352.500.000	343.309.900	100	97,39
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	7.700.000	7.700.000	100	100,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	150.000.000	144.724.000	100	96,48
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	566.750.000	548.570.000	100	96,79
9	Kegiatan Rehab Gedung Kantor	100.000.000	97.120.000	100	97,12
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	132.000.000	132.000.000		100,00
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	132.000.000	132.000.000	100	100,00
4	PROGRAM PEMBINAAN TRADISI, Kesenian dan NILAI BUDAYA	1.050.000.000	1.040.760.093		99,12
1	Kegiatan Pembinaan Kesenian	1.050.000.000	1.040.760.093	100	99,12
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN	1.708.120.000	1.587.875.800		92,96



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6=(4:3)x100
	SOSIAL				
1	Kegiatan Mudik Lebaran Masyarakat Perantau asal Jawa Tengah di Jakarta	1.675.000.000	1.557.405.800	100	92,98
2	Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta	33.120.000	30.470.000	100	92,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	750.000.000	718.418.350		95,79
1	Kegiatan Pameran Produk Unggulan dan Potensi Daerah Jawa Tengah di Jakarta	450.000.000	439.196.050	100	97,60
2	Kegiatan Lomba Makanan Khas Jawa Tengah	300.000.000	279.222.300	100	93,07
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000	110.065.000		73,38
1	Kegiatan E-Government	150.000.000	110.065.000	100	73,38



BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perubahan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- b. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- d. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- e. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- f. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

1.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.1 Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



- b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.2 Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

1.3. Kebijakan Akuntansi Beban

1.3.1 Beban Operasi

- a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

- b. Beban Barang dan Jasa

- 1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

- 2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas



Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.



8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

1.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

1.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
- c. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
- d. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.



- e. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
- f. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
- g. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

1.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
- c. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
- 2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.



3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
 - a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
 - b. Kas Pengelola Daerah yang Dikelola SKPD

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
- c. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
- d. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat



ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.

- e. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- f. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
- g. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
- h. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
- i. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
- j. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain



yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

k. Kriteria pengakuan piutang pajak :

1. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

l. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.

m. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

n. Penghentian pengakuan piutang

o. Penyisihan piutang tidak tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

p. Penghentian pengakuan piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

q. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.



- r. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

1.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

- a. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
- b. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.
- c. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
- d. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
- e. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
- f. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

1.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi Jangka Pendek :
 - 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 - 2. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
 - 3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).



4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
 5. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
 6. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 7. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 8. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Panjang :
1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
 2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
 3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
 4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
- c. Metode penilaian investasi pemerintah :
1. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 2. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

1.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Barang persediaan terdiri dari :



1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kemasyarakat;
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
 - d. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
 - e. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
 - f. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun dan khusus untuk pencatatan persediaan secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

1.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

- a. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.
- b. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



- c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :
 - 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- e. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- f. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
- g. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- h. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
- i. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- j. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
- k. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
- l. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- m. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).



- n. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- o. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- p. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- q. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
- r. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).
- s. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
- t. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
- u. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- v. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
- w. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- x. Penyusutan aset



Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2			Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat	10	<25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung	8	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	4
1	3	2	03		Alat-alat Bantu	8	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	4
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor	8	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	4
1	3	2	05		Alat Angkutan Tak Bermotor	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor	8	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	4
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak	4	< 25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
					Bermotor			
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara	20	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	3
							50% ≤ sd < 75%	6
							≥ 75%	9
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	5
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	11		Alat Ukur	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	2	12		Alat Pengolahan	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	14		Alat Kantor	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	16		Komputer	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	18		Alat Studio	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	2
1	3	2	19		Alat Komunikasi	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	20		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	2	21		Alat Kedokteran	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	22		Alat Kesehatan	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	2
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	5
							≥75%	8
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	28		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	3
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	3
							50% ≤ sd < 75%	5
							≥ 75%	7
1	3	2	31		Senjata Api dan Alat Keamanan	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	4
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	0
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	1
1	3	2	34		Senjata Sinar	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	0
							50% ≤ sd < 75%	0
							≥ 75%	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan			
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
					Permanen	50	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
					Permanen	50	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	3	03		Menara dan Monumen			
					Permanen	50	<25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
					Semi Permanen	25	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	7
					Darurat	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	5
1	3	3	4		Rambu-Rambu	20	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	4
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	4	01		Jalan	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	5
1	3	4	02		Jembatan	50	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	25	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	15
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
							25%≤ sd <50%	2
							50%≤ sd <75%	7
							≥75%	10
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5
							50%≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
							25%≤ sd <50%	5



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	4	18		Instalasi Gas	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	3
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	7
							≥ 75%	10
1	3	4	21		Jaringan Listrik dan Komputer	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	4	22		Jaringan Telepon	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							$50\% \leq sd < 75\%$	5
							$\geq 75\%$	10
1	3	4	23		Jaringan Gas	30	$< 25\%$	0
							$25\% \leq sd < 50\%$	2
							$50\% \leq sd < 75\%$	7
							$\geq 75\%$	10

- y. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- z. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
- aa. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

1.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
- c. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
- d. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.



1.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
- b. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah *Goodwill*, hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
- c. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- d. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari:
 1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat,
 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- f. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud tersebut.
- g. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
- h. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
- i. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).



- Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
- j. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.
- k. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
- l. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- m. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- n. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

1.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancer utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
- c. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- d. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- e. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia.
- f. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila



kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

- g. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

b) Utang bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nilai Pungutan/Potongang berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

f) Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

g) Utang transfer

Utang transfer DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar bagian pendapatan entitaspenerima yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan. Sedangkan utang selain DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan jumlah yang telah disalurkan.



2. Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri
 - a) Utang lembaga perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
 - b) Utang non perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari.
- h. Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

1.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

- a. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
- b. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
 - Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
 - Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
- c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
- d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
- e. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
- f. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

1.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi

- a. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
- b. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang



a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

1) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

b) Belanja dan Beban

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.



- c) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- d) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
- f) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017. Anggaran dan realisasi APBD TA 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pendapatan	23,613,056,128,000.00	23,703,174,631,507.00	100.38	19,632,577,136,889.70
2	Belanja dan transfer	23,955,179,003,000.00	22,884,713,018,754.00	95.53	19,354,374,825,983.00
3	Surplus/(Defisit)	(342,122,875,000.00)	818,461,612,753.00		278,202,310,906.68
4	Pembiayaan				
	- Penerimaan	646,122,875,000.00	646,575,639,755.00	100.07	417,920,564,252.00
	- Pengeluaran	304,000,000,000.00	304,000,000,000.00	100.00	50,000,000,000.00
	Pembiayaan netto	342,122,875,000.00	342,575,639,755.00		367,920,564,252.00
5	SiLPA	-	1,161,037,252,508.00		646,122,875,158.68

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1 Pendapatan Daerah

Rp23.703.174.631.507,00

Total realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.703.174.631.507,00 atau 100,38% dari target Rp23.613.056.128.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.632.577.136.889,70 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli daerah	12,126,880,430,000.00	12,547,513,389,400.00	103.47	11,541,029,720,309.70
2	Pendapatan Transfer	11,449,876,198,000.00	11,117,984,434,093.00	97.10	8,056,244,781,983.00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	36,299,500,000.00	37,676,808,014.00	103.79	35,302,634,597.00
Jumlah		23,613,056,128,000.00	23,703,174,631,507.00	100.38	19,632,577,136,889.70



5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp12.547.513.389.400,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp12.547.513.389.400,00 atau 103,47 % dari target Rp12.126.880.430.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp11.541.029.720.309,70 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Pendapatan Pajak Daerah	10,216,892,000,000.00	10,572,698,332,610.00	103.48	9,672,518,189,424.00
2 Pendapatan Retribusi Daerah	101,608,925,000.00	107,372,397,279.00	105.67	106,225,058,566.00
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	371,233,579,000.00	371,072,481,501.00	99.96	340,397,111,367.00
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,437,145,926,000.00	1,496,370,178,010.00	104.12	1,421,889,360,952.68
Jumlah	12,126,880,430,000.00	12,547,513,389,400.00	103.47	11,541,029,720,309.70

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Rp10.572.698.332.610,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.572.698.332.610,00 atau 103,48 % dari target Rp10.216.892.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.672.518.189.424,00. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor	3.700.000.000.000,00	3.846.112.941.500,00	103,95	3.417.260.595.050,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.970.000.000.000,00	3.031.219.174.000,00	102,06	2.877.756.190.725,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.586.392.000.000,00	1.653.549.702.810,00	104,23	1.538.890.231.827,00
Pajak Air Permukaan	10.500.000.000,00	11.422.772.199,00	108,79	9.251.016.832,00
Pajak Rokok	1.950.000.000.000,00	2.030.393.742.101,00	104,12	1.829.360.154.990,00
Jumlah	10.216.892.000.000,00	10.572.698.332.610,00	103,48	9.672.518.189.424,00

Capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah melebihi target dikarenakan antara lain:

1. Peningkatan inovasi layanan kepada masyarakat, dengan menambah titik layanan SAMSAT (samsat mall, samsat keliling dan samsat paten) dan mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan pembayaran e Samsat (SAKPOLE).
2. Optimalisasi kegiatan penagihan langsung kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Tengah pada tahun 2017, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.



5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Rp107.372.397.279,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp107.372.397.279,00 atau 105,67 % dari target Rp101.608.925.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp106.225.058.566,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	25.956.472.000.00	28.176.575.450.00	108.55	30.196.261.440.00
Retribusi Jasa Usaha	72.693.803.000.00	72.440.667.629.00	99.65	73.142.822.786.00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.958.650.000.00	6.755.154.200.00	228.32	2.885.974.340.00
Jumlah	101.608.925.000.00	107.372.397.279.00	105.67	106.225.058.566.00

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Rp28.176.575.450,00

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp28.176.575.450,00 atau 108,55 % dari target Rp 25.956.472.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp30.196.261.440,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.845.172.000,00	26.840.492.950,00	108,03	21.877.888.140,00
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	-	-		687.600,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	141.000.000,00	667.475.000,00	473,39	364.650.000,00
Retribusi Tera/Tera Ulang	-	-		6.449.705.700,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	970.300.000,00	668.607.500,00	68,91	1.503.330.000,00
Jumlah	25.956.472.000,00	28.176.575.450,00	108,55	30.196.261.440,00

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan

Rp 26.840.492.950,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp26.840.492.950,00 atau 108,03% dari target Rp24.845.172.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp21.877.888.140,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan.

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Kesehatan	24.845.172.000,00	26.840.492.950,00	108,03	21.877.888.140,00



Jumlah	24.845.172.000,00	26.840.492.950,00	108,03	21.877.888.140,00

5.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan **Rp0,00**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan dan Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp687.600,00.

(Dalam Rupiah)			
	2017		Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi	
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	687.600,00
Jumlah	-	-	687.600,00

5.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta **Rp667.475.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 667.475.000,00 atau 473,39 % dari target Rp141.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 364.650.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

(Dalam Rupiah)			
	2017		Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi	
Dinas Kehutanan	2.000.000,00	2.025.000,00	2.000.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	139.000.000,00	665.450.000,00	362.650.000,00
Jumlah	141.000.000,00	667.475.000,00	364.650.000,00

Capaian realisasi Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 665.450.000,00 atau 478,74 % dari target Rp139.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.1.1.2.1.4 Pendapatan Retribusi Tera/Tera Ulang **Rp0,00**

Retribusi Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan karena telah menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagai implentasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp6.449.705.700,00.

(Dalam Rupiah)			
	2017		Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	6.449.705.700,00
Jumlah	-	-	6.449.705.700,00



5.1.1.1.2.1.5 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan

Rp668.607.500,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp668.607.500,00 atau 68,91 % dari target Rp970.300.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.503.330.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Kesehatan	-	-		576.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	622.700.000,00	507.940.000,00	81,57	496.150.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	22.600.000,00	50.000.000,00	221,24	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	325.000.000,00	110.667.500,00	34,05	431.180.000,00
Jumlah	970.300.000,00	668.607.500,00	68,91	1.503.330.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan melebihi target pada Dinas Koperasi dan UKM (221,24%) dikarenakan banyaknya minat dari peserta pendidikan dan pelatihan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan tidak mencapai target antara lain :

1. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (81,57%) dikarenakan Pelatihan industri di BLKI Cilacap belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan yang juga menunjang pencapaian retribusi Pelayanan Pendidikan dimaksud.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (34,05%) disebabkan:

Realisasi PAD retribusi pelayanan pendidikan di BPPTAK mencapai Rp110.667.500,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah sekitar 34,05% dari target PAD, adapun alasan tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perusahaan Garment dalam merekrut tenaga kerja cenderung melalui Lembaga Pelatihan Kursus/Ketrampilan (LPK) dibanding melalui BPPTAK dikarenakan bebas biaya. LPK tersebut mendapat pendanaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian dalam upaya merekrut sekaligus melatih calon tenaga kerja yang mau bekerja di perusahaan garment
- b) Adanya bantuan Pendanaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian ke Training Center Perusahaan untuk membiayai pelatihan calon tenaga kerja.
- c) Terdapat peserta/tenaga kerja yang sudah dilatih di BPPTAK mengundurkan diri sehingga perusahaan enggan untuk membayar retribusi biaya pelatihan.



5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Rp72.440.667.629,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp72.440.667.629,00 atau 99,65% dari target Rp72.693.803.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp73.142.822.786,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	47.943.478.000.00	50.592.481.364.00	105.53	48.444.106.641.00
Retribusi Terminal	2.677.568.000.00	1.056.093.750.00	39.44	-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	3.030.500.000.00	3.042.002.500.00	100.38	5.733.215.000.00
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.400.000.00	1.400.000.00	100.00	2.500.000.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.440.857.000.00	17.179.118.015.00	93.16	18.425.641.745.00
Retribusi Tempat Pelelangan	600.000.000.00	569.572.000.00	94.93	537.359.400.00
Jumlah	72.693.803.000.00	72.440.667.629.00	99.65	73.142.822.786.00

5.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp50.592.481.364,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.592.481.364,00 atau 105,53% dari target Rp47.943.478.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 48.444.106.641,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.381.220.000.00	1.857.286.000.00	78.00	398.435.000.00
Dinas Kesehatan	636.950.000.00	673.480.000.00	105.74	692.880.000.00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	7.142.636.000.00	7.194.267.663.00	100.72	7.361.181.925.00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	4.417.700.000.00	4.090.328.708.00	92.59	3.820.579.155.00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	489.711.000.00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	25.200.000.00	25.200.000.00	100.00	19.630.000.00
Dinas Perhubungan	721.745.000.00	737.771.000.00	102.22	439.491.000.00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.063.700.000.00	4.540.182.710.00	111.73	1.886.817.000.00
Dinas Sosial	232.600.000.00	247.215.000.00	106.28	181.725.000.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.418.400.000.00	4.359.088.001.00	127.52	3.537.209.908.00
Dinas Koperasi dan UKM	707.400.000.00	682.015.000.00	96.41	618.690.000.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	1.899.450.699.00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	662.779.000.00	843.633.355.00	127.29	1.046.289.500.00
Satpol PP	323.268.000.00	396.458.600.00	122.64	336.287.600.00
Sekretariat Daerah	2.251.600.000.00	2.133.480.000.00	94.75	1.818.500.000.00



	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Sekretariat DPRD	492.000.000.00	493.900.000.00	100.39	489.000.000.00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.175.575.000.00	4.358.887.541.00	104.39	4.847.859.785.00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.504.150.000.00	5.136.253.725.00	93.32	-
Badan Penghubung	284.400.000.00	284.400.000.00	100.00	236.400.000.00
Badan Pengembangan SDM	2.429.575.000.00	2.655.919.240.00	109.32	2.557.529.000.00
Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	34.815.000.00
Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	277.100.000.00
Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	284.400.000.00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	80.000.000.00	89.753.940.00	112.19	79.638.592.00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	815.355.000.00	838.359.556.00	102.82	6.275.092.411.00
Dinas Perkebunan	-	-	-	192.598.437.00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	989.127.000.00	1.202.983.790.00	121.62	1.275.911.950.00
Dinas Kehutanan	-	-	-	3.055.048.150.00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.103.577.000.00	1.269.178.135.00	115.01	653.500.000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.702.000.000.00	3.220.578.380.00	119.19	2.118.274.929.00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	602.521.000.00	836.245.700.00	138.79	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.780.000.000.00	2.425.615.320.00	136.27	1.520.060.600.00
Jumlah	47.943.478.000.00	50.592.481.364.00	105.53	48.444.106.641.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (78,00%) dikarenakan kekurangcermatan dalam penganggaran pendapatan retribusi kekayaan daerah sebagai akibat masa peralihan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang disebabkan kurangnya validitas data Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset.
2. Dinas PSDA dan Penataan Ruang tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (92,59%) dikarenakan banyak aset kewenangan Pusat yang dulu dikelola dinas ditarik kembali oleh Pusat, usia alat berat yang sudah tua dan sebagian ada yang rusak.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (93,32%) dikarenakan fasilitas Asrama Haji Donohudan yang disediakan kurang representatif sehingga kalah bersaing dengan kompetitor baru yang lebih memberikan pelayanan dengan fasilitas yang lebih modern.

5.1.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal

Rp1.056.093.750,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.056.093.750,00 atau 39,44% dari target Rp2.677.568.000, dengan rincian sebagai berikut :



(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Perhubungan	2.677.568.000,00	1.056.093.750,00	39,44	-
Jumlah	2.677.568.000,00	1.056.093.750,00	39,44	-

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.056.093.750,00 atau 39,44% dikarenakan belum ada Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan retribusi pelayanan masuk terminal bagi angkutan. Realisasi retribusi terminal sebesar 39,44% merupakan retribusi sewa lahan yang dipungut mulai Februari 2017.

5.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa

Rp3.042.002.500,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.042.002.500,00 atau 100,38% dari target Rp3.030.500.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.733.215.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	347.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	163.500.000,00	143.000.000,00	87,46	136.900.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	890.000.000,00
Sekretariat Daerah	173.400.000,00	102.700.000,00	59,23	121.500.000,00
Sekretariat DPRD	1.008.000.000,00	955.025.000,00	94,74	835.050.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	2.795.365.000,00
Badan Penghubung	665.600.000,00	724.200.000,00	108,80	607.400.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	1.020.000.000,00	1.117.077.500,00	109,52	-
Jumlah	3.030.500.000,00	3.042.002.500,00	100,38	5.733.215.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya mencapai 87,46 % dikarenakan disekitar Hotel BIP Tawangmangu saat ini banyak terdapat hotel-hotel dengan fasilitas yang lebih representatif . Sarana prasarana Hotel BIP Tawangmangu kurang memadai, dengan kondisi hanya terdapat 22 kamar sehingga tidak mampu menampung pengunjung dengan jumlah yang besar.
2. Sekretariat Daerah hanya mencapai target 59,23% disebabkan fasilitas yang disediakan kurang



representatif dan sumber daya manusia yang masih minim sehingga kalah bersaing dengan kompetitor baru yang lebih memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih modern.

5.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga **Rp.1.400.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.400.000,00, atau 100,00 % dari target Rp1.400.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.500.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	2.500.000,00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
Jumlah	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	2.500.000,00

5.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah **Rp17.179.118.015,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17.179.118.015,00 atau 93,16 % dari target Rp 18.440.857.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 18.425.641.745,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.259.645.000,00	10.746.161.865,00	87,65	9.616.614.050,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	2.477.832.600,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.293.212.000,00	4.511.234.350,00	105,08	4.351.438.600,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.888.000.000,00	1.921.721.800,00	101,79	1.979.756.495,00
Jumlah	18.440.857.000,00	17.179.118.015,00	93,16	18.425.641.745,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan tidak mencapai target atau (87,65%) disebabkan antara lain :

1. Penjualan hasil kebun untuk tahun 2017 tidak tercapai dikarenakan musim yang tidak menentu sehingga banyak tanaman perkebunan yang gagal panen seperti tanaman padi mengalami puso dan tanaman jeruk yang gagal panen.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan penerima hibah harus berbadan hukum maka banyak kabupaten/kota yang membatalkan pesannya.



5.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan

Rp569.572.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp569.572.000,00 atau 94,93% dari target Rp600.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp537.359.400,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	600.000.000,00	569.572.000,00	94,93	537.359.400,00
Jumlah	600.000.000,00	569.572.000,00	94,93	537.359.400,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp569.572.000,00 atau 94,93% dari target dikarenakan antara lain :

1. Mutu kayu buruk, sehingga kurang menarik minat bagi peserta lelang;
2. Adanya penjualan lewat online, yang tidak bisa dikenai retribusi;
3. Perhutani melakukan penjualan melalui kontrak karya dan retail, sehingga tidak bisa dipungut Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (RTPHH).

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

Rp6.755.154.200,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.755.154.200,00 atau 228,32% dari target Rp2.958.650.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.885.974.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00
Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.100.000.000,00	5.055.191.800,00	459,56	985.925.440,00
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	680.400.000,00	772.476.400,00	113,53	658.279.900,00
Jumlah	2.958.650.000,00	6.755.154.200,00	228,32	2.885.974.340,00

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek

Rp 927.486.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp927.486.000,00 atau 78,72% dari target Rp1.178.250.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.241.769.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(Dalam Rupiah)

2017		%	Realisasi 2016
Anggaran	Realisasi		



Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00
Jumlah	1.178.250.000,00	927.486.000,00	78,72	1.241.769.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp927.486.000,00 atau 78,72% dikarenakan antara lain:

1. Surat Keputusan Ijin Trayek bersifat fluktuatif, masa ijin 5 tahun sekali;
2. Taksi Pariwisata belum bisa dipungut karena terganjal peraturan/ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Jumlah kendaraan menyusut 40% karena usia kendaraan yang dapat mengajukan ijin tidak boleh dari usia 25 tahun. Pengusaha belum bisa peremajaan kendaraan.

5.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan **Rp5.055.191.800,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.055.191.800,00 atau 459,56% dari target Rp1.100.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp985.925.440,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

(Dalam Rupiah)			
	2017		Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi	
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.100.000.000,00	5.055.191.800,00	459,56
Jumlah	1.100.000.000,00	5.055.191.800,00	459,56

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.055.191.800,00 atau 459,56% dikarenakan :

1. Pada awal Tahun 2017 dan Awal Juli 2017 Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi berupa perpanjangan pelarangan alat cantrang, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemilik kapal untuk perpanjangan ijin kapal;
2. Adanya dua kali kebijakan dalam Tahun 2017, sehingga realisasi penerimaan perijinan dapat melampaui targetnya.

5.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi IMTA **Rp772.476.400,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp772.476.400,00 atau 113,53% dari target Rp680.400.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 658.279.900,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.



(Dalam Rupiah)			
	2017		Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	680.400.000,00	772.476.400,00	113,53
JuPmlah	680.400.000,00	772.476.400,00	113,53

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp772.476.400,00 atau 113,53% dari target dikarenakan IMTA yang dikenakan pada Tenaga Asing yang bekerja pada perusahaan di Provinsi Jawa Tengah, baik itu lintas Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, jumlahnya fluktuatif dari waktu ke waktu, sehingga pada posisi Tahun 2017 ijin yang dikeluarkan lebih banyak dari target yang ditetapkan.

5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan **Rp 371.072.481.501,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp371.072.481.501,00 atau 99,96 % dari target Rp371.233.579.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 340.397.111.367,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)			
	2017		Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi	
Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.224.814.000,00	6.224.814.706,00	100,00
Bagian Laba PT. Bank Jateng	265.246.819.000,00	265.246.817.254,00	100,00
Bagian Laba BPR-BKK	57.192.540.000,00	57.031.441.365,00	99,72
Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)	3.058.026.000,00	3.058.025.665,00	100,00
Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	4.295.992.000,00	4.295.992.206,00	100,00
Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	6.974.113.000,00	6.974.113.531,00	100,00
Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	20.886.361.000,00	20.886.360.443,00	100,00
Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	5.750.790.000,00	5.750.789.290,00	100,00
Deviden PT. Jamkrida	1.604.124.000,00	1.604.127.041,00	100,00
Jumlah	371.233.579.000,00	371.072.481.501,00	99,96

5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah **Rp1.496.370.178.010,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.496.370.178.010,00 atau 104,12% dari target Rp1.437.145.926.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.421.889.360.952,68 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	893,864,000.00	721,589,037.00	80.73	1,053,743,683.00
2 Penerimaan Jasa Giro	55,652,290,000.00	71,422,612,976.00	128.34	40,613,871,012.00
3 Penerimaan Bunga	106,010,000,000.00	148,368,770,222.00	139.96	88,696,086,150.00
4 Tuntutan Ganti Rugi	-	6,500,000.00		9,000,000.00
5 Pendapatan Denda Keterlambatan	-	1,647,983,674.00		1,734,310,512.00
6 Pendapatan Denda Pajak	80,000,000,000.00	76,503,535,952.00	95.63	83,840,129,658.00
7 Pendapatan Denda Retribusi	-	40,253,695.00		11,184,340.00
8 Pendapatan dari Pengembalian	-	8,671,337,519.00		4,721,668,286.00
9 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	983,664,000.00	182,077,031.00	18.51	781,655,946.00
10 Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	19,221,108,000.00	19,258,228,260.00	100.19	20,363,495,000.00
11 Penerimaan dari BLUD	1,174,300,000,000.00	1,142,554,853,397.00	97.30	1,161,308,599,322.68
12 Penerimaan Lain-Lain	85,000,000.00	26,992,436,247.00	31755.81	18,755,617,043.00
Jumlah	1,437,145,926,000.00	1,496,370,178,010.00	104.12	1,421,889,360,952.68

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp 721.589.037,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp721.589.037,00 atau 80,73% dari target Rp893.864.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.053.743.683,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai		531.500.000,00	378.309.872,00	71,18	-
Jumlah		531.500.000,00	378.309.872,00	71,18	-

Badan Pengelola Pendapatan Daerah		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai		-	-	-	121.690.500,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		-	-	-	139.740.907,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		-	-	-	457.273.776,00
Penjualan Bahan Bekas Bangunan		-	-	-	243.084.000,00
Jumlah		-	-	-	961.789.183,00

Dinas Bina Marga dan Ciptakarya		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
Penjualan Drum Bekas		20.304.000,00	57.204.500,00	281,74	54.554.500,00



Penjualan Hasil Penebangan Pohon	27.060.000,00	273.374.665,00	1010,25	-
Jumlah	47.364.000,00	330.579.165,00	697,95	54.554.500,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penjualan Hasil Peternakan	15.000.000,00	12.700.000,00	84,67	11.900.000,00
Jumlah	15.000.000,00	12.700.000,00	84,67	11.900.000,00

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penjualan Hasil Peternakan	300.000.000,00	-	0,00	-
Jumlah	300.000.000,00	-	0,00	-

Dinas Ketahanan Pangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penjualan Hasil Pertanian	-	-	-	25.500.000,00
Jumlah	-	-	-	25.500.000,00

5.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro

Rp 71.422.612.976,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp71.422.612.976,00 atau 128,34% dari target Rp 55.652.290.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp40.613.871.012,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD.

5.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Rp

148.368.770.222,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp148.368.770.222,00 atau 139,96% dari target Rp106.010.000.000,00 terdiri dari Bunga Deposito BUD sebesar Rp148.358.292.756,00 dan Bunga Jasa Dana Bergulir sebesar Rp 10.477.466,00 yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 88.696.086.150,00. Rincian sebagai berikut:

Bunga Deposito

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Bank Jateng	106.000.000.000,00	141.135.616.371,00	-	85.087.328.698,00



Bank BTN	-	3.949.999.980,00	-	1.140.267.117,00
Bank Mandiri	-	997.117.196,00	-	739.589.029,00
Bank BNI	-	-	-	367.773.972,00
Bank BRI	-	1.702.130.329,00	-	1.347.863.009,00
Bank Bukopin	-	184.683.627,00	-	-
Bank Muamalat	-	388.745.253,00	-	-
		106.000.000.000,00	148.358.292.756,00	139,96
				88.682.821.825,00

Penerimaan Jasa Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan jasa perguliran bantuan peralatan kpd IKM - Disperindag	10.000.000,00	10.477.466,00	104,77	13.264.325,00
Jumlah	10.000.000,00	10.477.466,00	104,77	13.264.325,00

5.1.1.1.4.4 Tuntutan Ganti Rugi

Rp6.500.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 6.500.000,00 merupakan pembayaran ganti rugi kehilangan kendaraan dinas roda empat Toyota New Avanza 1.3G MT Tahun 2014 Nomor Polisi H-9524-LZ sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembebanan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah Nomor 022.1/0011905 dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 16 Oktober 2017, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.9.000.000,00.

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Keterlambatan

Rp1.647.983.674,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.647.983.674,00 berupa denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.734.310.512,00.

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak

Rp76.503.535.952,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp76.503.535.952,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp72.022.378.352,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp4.448.451.950,00, Pajak Air Permukaan Rp24.680.143,00, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Rp 8.025.507,00 Pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.



(Dalam Rupiah)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Denda Pajak Kendaraan Bermotor	80.000.000.000,00	72.022.378.352,00	90,03	80.587.185.061,00
Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	4.448.451.950,00	-	3.252.477.425,00
Denda Pajak Air Permukaan	-	24.680.143,00	-	89.847,00
Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan	-	8.025.507,00	-	377.325,00
Jumlah	80.000.000.000,00	76.503.535.952,00	95,63	83.840.129.658,00

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi

Rp 40.253.695,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp40.253.695,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp11.184.340,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Satpol PP	-	-	-	468.160,00
Dinas Perhubungan	-	39.120.175,00	-	-
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	1.133.520,00	-	10.716.180,00
Jumlah	-	40.253.695,00	-	11.184.340,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Rp 8.671.337.519,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.671.337.519,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 Rp4.721.668.286,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

SKPKD	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	244.917.836,00	-	687.509.164,00
Pengembalian Belanja Tahun Lalu	-	6.676.711.507,00	-	3.037.574.052,00
Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas	-	1.749.708.176,00	-	996.585.070,00
Jumlah	-	8.671.337.519,00	-	4.721.668.286,00

5.1.1.1.4.9 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum

Rp182.077.031,00

Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp182.077.031,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 Rp781.655.946,00 dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Perhubungan	983.664.000,00	182.077.031,00	18,51	781.655.946,00
Jumlah	983.664.000,00	182.077.031,00	18,51	781.655.946,00

5.1.1.1.4.10 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **Rp19.258.228.260,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.258.228.260,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp20.363.495.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Badan Pengembangan SDM	18.333.608.000,00	18.337.828.260,00	100,02	19.628.195.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	887.500.000,00	920.400.000,00	103,71	735.300.000,00
Jumlah	19.221.108.000,00	19.258.228.260,00	100,19	20.363.495.000,00

5.1.1.1.4.11 Penerimaan Lain-Lain **Rp26.992.436.247,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp26.992.436.247,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp18.755.617.043,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Penerimaan Lain-Lain SKPD	-	26.954.790.347,00		14.990.456.220,00
2 Sanksi Denda Kelebihan Muatan	-	-		3.709.190.000,00
3 Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan	85.000.000,00	37.645.900,00	44,29	55.970.823,00
Jumlah	85.000.000,00	26.992.436.247,00	31.755,81	18.755.617.043,00

5.1.1.1.4.12 Pendapatan BLUD **Rp1.142.554.853.397,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.142.554.853.397,00 atau 97,30% dari target Rp1.174.300.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.161.308.599.322,68 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
RSUD Dr. Moewardi Surakarta	600.000.000.000,00	540.854.692.386,00	90,14	592.010.513.109,00



RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	295.000.000.000,00	321.889.626.780,00	109,12	308.430.973.771,68
RSUD Tugurejo Semarang	145.000.000.000,00	132.866.179.783,00	91,63	143.280.005.834,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	27.800.000.000,00	32.095.444.183,00	115,45	27.564.929.570,00
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	32.500.000.000,00	41.740.352.390,00	128,43	30.069.309.881,00
RSJD Surakarta	36.000.000.000,00	31.999.726.777,00	88,89	26.540.254.120,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	38.000.000.000,00	41.108.831.098,00	108,18	33.412.613.037,00
Jumlah	1.174.300.000.000,00	1.142.554.853.397,00	97,30	1.161.308.599.322,68

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Rp11.117.984.434.093,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.117.984.434.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	11.399.678.255.000,00	11.067.786.491.093,00	97,09	8.017.297.595.983,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	50.197.943.000,00	50.197.943.000,00	100,00	38.947.186.000,00
Jumlah	11.449.876.198.000,00	11.117.984.434.093,00	97,10	8.056.244.781.983,00

5.1.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Rp11.067.786.491.093,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.067.786.491.093,00 atau 97,09 dari target Rp 11.399.678.255.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 8.017.297.595.983,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dana bagi hasil pajak	995.216.401.000,00	834.422.861.130,00	83,84	879.355.173.005,00
Dana bagi hasil bukan pajak	12.044.492.000,00	13.887.050.263,00	115,30	14.318.048.913,00
Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00	100,00	1.859.907.223.000,00
Dana Alokasi Khusus	6.739.830.931.000,00	6.566.890.148.700,00	97,43	5.263.717.151.065,00
Jumlah	11.399.678.255.000,00	11.067.786.491.093,00	97,09	8.017.297.595.983,00



5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Rp834.422.861.130,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp834.422.861.130,00 atau 83,84% dari target Rp995.216.401.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp879.355.173.005,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000.000,00	65.474.849.091,00	65,47	104.219.824.520,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	688.042.183.000,00	564.809.952.859,00	82,09	579.926.953.794,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	207.174.218.000,00	204.138.059.180,00	98,53	195.208.394.691,00
Jumlah	995.216.401.000,00	834.422.861.130,00	83,84	879.355.173.005,00

5.1.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Rp13.887.050.263,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.887.050.263,00 atau 115,30% dari target Rp12.044.492.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp14.318.048.913,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.622.812.000,00	3.900.637.875,00	107,67	1.502.824.314,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	69.408.000,00	57.819.224,00	83,30	117.593.150,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	52.612.000,00	33.287.692,00	63,27	3.162.750,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	930.947.000,00	514.742.868,00	55,29	615.184.300,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7.025.269.000,00	8.171.221.124,00	116,31	11.743.682.317,00
Bagi Hasil dari Panas Bumi	343.444.000,00	1.209.341.480,00	352,12	335.602.082,00
Jumlah	12.044.492.000,00	13.887.050.263,00	115,30	14.318.048.913,00

5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Rp 3.652.586.431.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 atau 100% dari target Rp3.652.586.431.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.859.907.223.000,00

5.1.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Rp 6.566.890.148.700,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 6.566.890.148.700,00 atau 97,43% dari target Rp6.739.830.931,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.263.717.151.065,00.

5.1.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Rp50.197.943.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 50.197.943.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp38.947.186.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



5.1.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dana Insentif Daerah	50.197.943.000,00	50.197.943.000,00	100,00	38.947.186.000,00
Jumlah	50.197.943.000,00	50.197.943.000,00	100,00	38.947.186.000,00

5.1.1.1.2.2.2 Dana Penyesuaian

Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00.

5.1.1.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Rp37.676.808.014,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp37.676.808.014,00 atau 103,79% dari target Rp36.299.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp35.302.634.597,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Pendapatan Hibah	36.299.500.000,00	36.938.923.844,00	101,76	34.228.172.341,00
2 Dana bagi hasil retribusi dari kab/kota	-	737.884.170,00	-	1.074.462.256,00
Jumlah	36.299.500.000,00	37.676.808.014,00	103,79	35.302.634.597,00

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Hibah

Rp36.938.923.844,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 36.938.923.844,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 34.228.172.341,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Hibah dari pemerintah	15.342.500.000,00	15.982.123.844,00	104,17	7.158.233.937,00
Penerimaan dari pihak ketiga kayu	-	-	-	7.109.138.404,00
Penerimaan dari pihak ketiga jasa rahrja	20.957.000.000,00	20.956.800.000,00	100,00	19.960.800.000,00
Jumlah	36.299.500.000,00	36.938.923.844,00	101,76	34.228.172.341,00

5.1.1.1.2.3.2 Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lain

Rp 737.884.170,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp737.884.170,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.074.462.256,00.



5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp22.884.713.018.754,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)				
		2017		Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	15.338.900.483.000,00	14.664.990.098.901,00	95,61
2	Belanja Modal	1.594.522.221.000,00	1.454.598.084.464,00	91,22
3	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000,00	1.130.950.000,00	6,46
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	7.004.256.299.000,00	6.763.993.885.389,00	96,57
Jumlah		23.955.179.003.000,00	22.884.713.018.754,00	95,53

5.1.2.1 Belanja Operasi

Rp14.664.990.098.901,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp14.664.990.098.901,00 atau 95,61 % dari anggaran Rp15.338.900.483.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.344.688.141.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)				
		2017		Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	6.212.586.843.000,00	6.092.077.750.517,00	98,06
2	Belanja Barang & Jasa	3.784.187.865.000,00	3.381.260.846.633,00	89,35
3	Belanja Hibah	5.099.260.775.000,00	4.953.383.281.751,00	97,14
4	Belanja Bantuan Sosial	242.865.000.000,00	238.268.220.000,00	98,11
Jumlah		15.338.900.483.000,00	14.664.990.098.901,00	95,61

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp6.092.077.750.517,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.092.077.750.517,00 atau 98,06% dari anggaran Rp 6.212.586.843.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.567.876.390.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)				
		2017		Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3.822.521.890.000,00	3.764.302.855.912,00	98,48
Dinas Kesehatan		106.234.698.000,00	103.591.619.013,00	97,51
RSUD Moewardi Surakarta		169.674.153.000,00	166.890.341.351,00	98,36



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	120.817.139.000,00	118.058.613.349,00	97,72	116.437.158.518,00
RSUD Tugurejo Semarang	88.823.232.000,00	86.997.613.718,00	97,94	85.367.278.948,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	30.039.349.000,00	29.307.396.705,00	97,56	27.632.584.445,00
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	56.190.111.000,00	54.995.777.329,00	97,87	54.613.836.271,00
RSJD Surakarta	63.566.598.000,00	62.316.563.241,00	98,03	63.645.338.097,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	38.097.108.000,00	37.270.657.495,00	97,83	36.979.725.283,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	116.770.297.000,00	115.041.350.380,00	98,52	116.178.773.890,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	98.570.610.000,00	97.044.015.230,00	98,45	91.317.278.528,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.813.930.000,00	16.404.273.903,00	97,56	28.308.392.719,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.609.620.000,00	15.224.939.167,00	97,54	13.972.688.242,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.097.376.000,00	16.433.017.881,00	96,11	20.253.668.232,00
Dinas Sosial	129.643.633.000,00	127.763.720.348,00	98,55	137.527.895.356,00
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.914.607.000,00	9.255.074.770,00	93,35	10.400.015.546,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.046.971.000,00	74.862.473.724,00	97,16	64.025.150.579,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	15.535.682.000,00	15.479.218.682,00	99,64	14.285.261.799,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.853.750.000,00	125.835.727.760,00	97,66	15.012.381.930,00
Dinas Ketahanan Pangan	14.851.209.000,00	14.800.041.411,00	99,66	15.577.722.454,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	20.741.537.000,00	19.172.153.745,00	92,43	15.291.280.820,00
Dinas Perhubungan	54.821.719.000,00	53.584.358.273,00	97,74	90.023.631.337,00
Dinas Kominfo	24.463.466.000,00	23.521.396.963,00	96,15	-
Dinas Koperasi dan UKM	21.754.488.000,00	21.462.070.796,00	98,66	24.412.458.240,00
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	14.933.959.000,00	14.516.274.287,00	97,20	13.004.261.171,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	48.476.719.000,00	46.450.409.194,00	95,82	20.143.396.551,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	26.254.485.000,00	25.658.492.647,00	97,73	26.222.773.707,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	55.366.206.000,00	53.745.308.910,00	97,07	52.463.847.488,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	161.448.283.000,00	155.673.470.553,00	96,42	128.471.124.167,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38.477.251.000,00	37.650.346.307,00	97,85	41.045.877.587,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.135.634.000,00	26.598.966.750,00	98,02	21.073.150.758,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.043.777.000,00	48.378.896.853,00	98,64	71.243.175.724,00
KDH dan Wakil KDH	14.736.633.000,00	14.709.657.315,00	99,82	15.668.743.979,00
DPRD	60.867.543.000,00	55.475.495.474,00	91,14	42.607.794.144,00
Sekretariat Daerah	102.667.104.000,00	100.407.404.174,00	97,80	146.289.179.053,00
Sekretariat DPRD	24.672.393.000,00	24.374.391.762,00	98,79	23.454.836.128,00
Inspektorat	19.404.091.000,00	18.060.477.759,00	93,08	19.434.244.539,00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	31.395.005.000,00	31.086.598.101,00	99,02	21.439.586.851,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	176.567.939.000,00	169.272.158.796,00	95,87	179.705.468.799,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.478.952.000,00	34.571.971.050,00	97,44	-
Badan Kepegawaian Daerah	25.117.325.000,00	24.406.721.860,00	97,17	24.060.516.881,00
Badan Pengembangan SDM	31.643.753.000,00	31.239.589.230,00	98,72	31.137.446.082,00
Badan Penghubung	10.446.618.000,00	10.185.848.349,00	97,50	11.365.190.897,00
Badan Penelitian dan	-	-	-	12.589.101.158,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pengembangan				
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	35.272.566.096,00
Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	6.282.155.426,00
Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	11.828.292.139,00
Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	7.948.058.488,00
Sekretariat KPID	-	-	-	4.140.146.181,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	32.189.151.555,00
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	19.869.685.940,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	25.146.505.959,00
Jumlah	6.212.586.843.000,00	6.092.077.750.517,00	98,06	2.567.876.390.675,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp3.381.260.846.633,00

Realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.381.260.846.633,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.493.431.626.164,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.082.496.782.000,00	949.236.990.275,00	87,69	82.697.533.830,00
2 Dinas Kesehatan	156.511.485.000,00	137.160.589.098,00	87,64	109.422.917.548,00
3 RSUD Moewardi Surakarta	552.661.840.000,00	502.663.817.746,00	90,95	547.294.410.213,00
4 RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	304.657.982.000,00	259.599.051.625,00	85,21	234.996.659.935,00
5 RSUD Tugurejo Semarang	136.110.394.000,00	119.883.750.289,00	88,08	140.140.863.108,00
6 RSUD Kelet/Donorojo Jepara	35.054.823.000,00	34.981.155.191,00	99,79	32.630.495.198,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	31.786.937.000,00	31.090.021.251,00	97,81	27.223.742.667,00
8 RSJD Surakarta	43.508.237.000,00	37.415.482.188,00	86,00	34.478.780.502,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.538.192.000,00	28.494.675.842,00	99,85	29.244.026.134,00
10 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	142.519.590.000,00	137.632.580.449,00	96,57	164.823.152.850,00
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	75.611.366.000,00	72.201.675.369,00	95,49	55.070.915.876,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.233.278.000,00	14.358.835.803,00	94,26	32.146.084.102,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	9.903.729.000,00	9.697.653.444,00	97,92	8.678.022.119,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.055.183.000,00	18.151.280.029,00	95,26	23.493.909.417,00
15 Dinas Sosial	64.526.695.000,00	63.710.530.463,00	98,74	72.006.642.141,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.990.100.000,00	9.197.437.022,00	92,07	12.626.453.287,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.892.156.000,00	26.187.687.300,00	90,64	32.990.544.211,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.134.085.000,00	7.862.147.440,00	96,66	8.196.713.375,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.181.209.000,00	29.012.651.374,00	96,13	18.055.690.384,00
20 Dinas Ketahanan Pangan	13.807.494.000,00	13.586.319.893,00	98,40	12.254.211.575,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	17.315.979.000,00	16.594.347.409,00	95,83	12.436.983.069,00
22	Dinas Perhubungan	27.342.310.000,00	25.329.077.045,00	92,64	37.247.229.574,00
23	Dinas Kominfo	23.258.356.000,00	21.736.756.362,00	93,46	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	29.313.188.000,00	27.563.964.128,00	94,03	35.373.511.893,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	7.669.409.000,00	7.303.720.134,00	95,23	8.358.106.088,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	119.370.357.000,00	107.887.679.868,00	90,38	27.695.080.035,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	10.971.945.000,00	10.754.158.381,00	98,02	9.476.688.608,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.878.911.000,00	31.614.947.094,00	93,32	27.088.869.692,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	147.690.672.000,00	129.658.528.251,00	87,79	36.917.971.227,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	42.882.801.000,00	39.189.509.892,00	91,39	29.160.643.783,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36.107.158.000,00	34.544.651.539,00	95,67	28.333.987.363,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.093.799.000,00	26.966.910.974,00	84,03	42.933.324.291,00
33	SKPKD	-	-	-	-
34	KDH dan Wakil KDH	-	-	-	-
35	DPRD	-	-	-	-
36	Sekretariat Daerah	87.745.733.000,00	80.938.910.623,00	92,24	100.133.463.281,00
37	Sekretariat DPRD	136.668.023.000,00	103.786.667.884,00	75,94	86.728.411.763,00
38	Inspektorat	21.510.395.000,00	18.577.710.602,00	86,37	17.865.898.268,00
39	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	27.825.688.000,00	27.021.855.872,00	97,11	15.391.023.143,00
40	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.240.756.000,00	88.433.324.609,00	90,02	95.380.250.474,00
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.896.048.000,00	15.733.429.992,00	79,08	-
42	Badan Kepegawaian Daerah	17.961.542.000,00	14.061.166.899,00	78,28	13.385.936.196,00
43	Badan Pengembangan SDM	44.766.193.000,00	39.929.682.772,00	89,20	37.446.645.868,00
44	Badan Penghubung	12.497.045.000,00	11.509.514.212,00	92,10	10.396.352.845,00
45	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	15.835.456.212,00
46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	30.011.216.315,00
47	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	4.132.234.760,00
48	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	5.117.982.015,00
49	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	4.918.786.591,00
50	Sekretariat KPID	-	-	-	4.047.207.004,00
51	Dinas Perkebunan	-	-	-	45.340.704.100,00
52	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	14.213.974.028,00
53	Dinas Kehutanan	-	-	-	19.591.919.206,00
Jumlah		3.784.187.865.000,00	3.381.260.846.633,00	89,35	2.493.431.626.164,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 hanya terserap sebesar 89,35%, disebabkan adanya efisiensi dan realisasi berdasarkan kebutuhan riil. Belanja Barang dan Jasa tersebut termasuk



didalamnya Belanja Barang dan Jasa BOS yang bersumber dari APBD maupun APBN sebesar Rp843.069.935.758,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	Pegawai	Barang	Modal	Jumlah
SMA	18,280,855,718.00	358,385,988,106.00	95,035,186,868.00	471,702,030,692.00
SMK	6,518,558,703.00	289,953,477,787.00	67,463,589,592.00	363,935,626,082.00
SLB	1,008,130,058.00	5,192,730,543.00	1,231,418,383.00	7,432,278,984.00
	25,807,544,479.00	653,532,196,436.00	163,730,194,843.00	843,069,935,758.00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Rp4.953.383.281.751,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.953.383.281.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah	520.773.998.000,00	520.773.998.000,00	100,00	25.550.000.000,00
2 Belanja Hibah Kepada kelompok/Anggota Masyarakat	79.089.417.000,00	67.014.800.000,00	84,73	110.151.800.000,00
3 Belanja Hibah Dana BOS	4.499.397.360.000,00	4.365.594.483.751,00	97,03	5.111.146.824.464,00
Jumlah	5.099.260.775.000,00	4.953.383.281.751,00	97,14	5.246.848.624.464,00

5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada PemerintahRp

520.773.998.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp520.773.998.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Badan Pengawas Pemilihan Umum	67.687.308.000	67.687.308.000	100,00	-
Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	7.500.000.000,00
Kepolisian Daerah (Polda) Jateng	16.500.000.000	16.500.000.000	100,00	16.500.000.000,00
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	433.575.404.000	433.575.404.000	100,00	-
Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo	250.000.000	250.000.000	100,00	250.000.000,00
Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang	200.000.000	200.000.000	100,00	200.000.000,00
Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000,00
Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000,00
Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) I Pangkalan TNI AU Wirasaba	200.000.000	200.000.000	100,00	100.000.000,00
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	661.286.000,00	661.286.000,00	100,00	-
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang KEMENTERIAN HUM dan HAM	-	-	-	800.000.000,00



	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Jumlah	520.773.998.000,00	520.773.998.000,00	100,00	25.550.000.000,00

5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi **Rp67.014.800.000,00**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp67.014.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Hibah Bidang Perekonomian	1.238.400.000,00	307.500.000,00	24,83	0,00
Hibah Bidang Pendidikan	38.467.207.000,00	29.141.685.000,00	75,76	21.960.000.000,00
Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	4.607.115.000,00	4.587.115.000,00	99,57	81.368.000.000,00
Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan	2.091.000.000,00	1.906.000.000,00	91,15	730.000.000,00
Hibah Bidang Keagamaan	5.403.195.000,00	4.790.000.000,00	88,65	4.493.800.000,00
Hibah Bidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	27.282.500.000,00	26.282.500.000,00	96,33	1.600.000.000,00
Jumlah	79.089.417.000,00	67.014.800.000,00	84,73	110.151.800.000,00

Belanja hibah bidang perekonomian sebesar 24,83%, pendidikan sebesar 75,76% dan keagamaan hanya terserap 88,65% disebabkan karena masih kurangnya kelengkapan proposal serta persyaratan dari calon penerima hibah serta adanya calon penerima yang tidak mengajukan berkas pencairan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Dana BOS **Rp4.365.594.483.751,00**

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.365.594.483.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
1 Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Semarang	116.142.000.000,00	111.378.429.500,00	95,90	135.005.659.890,00
2 Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kendal	130.379.800.000,00	126.952.160.000,00	97,37	148.495.069.595,00
3 Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Demak	125.258.000.000,00	121.467.117.651,00	96,97	139.996.500.000,00
4 Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Grobogan	180.093.200.000,00	175.901.120.000,00	97,67	197.199.400.000,00
5 Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Pati	137.848.600.000,00	133.996.950.000,00	97,21	154.177.300.000,00
6 Belanja Hibah Dana BOS kepada				107.302.173.623,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
	Kabupaten Kudus	95.398.000.000,00	92.028.476.290,00	96,47	
7	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara	123.939.200.000,00	120.519.458.000,00	97,24	142.925.201.709,00
8	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang	71.560.200.000,00	67.926.102.815,00	94,92	82.881.100.000,00
9	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora	118.423.400.000,00	114.007.240.900,00	96,27	129.972.850.000,00
10	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan	113.658.800.000,00	109.365.600.000,00	96,22	125.129.900.000,00
11	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang	87.610.400.000,00	85.467.160.000,00	97,55	98.001.195.274,00
12	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang	203.272.600.000,00	198.945.666.847,00	97,87	226.463.351.000,00
13	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal	192.866.000.000,00	188.536.427.948,00	97,76	215.632.350.000,00
14	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes	233.057.800.000,00	229.159.100.000,00	98,33	257.167.600.000,00
15	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas	232.655.200.000,00	228.941.500.000,00	98,40	260.425.300.000,00
16	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap	251.459.800.000,00	246.333.640.000,00	97,96	278.925.550.000,00
17	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga	112.125.000.000,00	107.757.827.000,00	96,11	132.175.950.000,00
18	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara	112.471.200.000,00	108.351.647.802,00	96,34	125.692.850.000,00
19	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang	143.554.000.000,00	140.432.820.000,00	97,83	152.383.450.000,00
20	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung	86.354.400.000,00	83.640.960.000,00	96,86	97.704.849.973,00
21	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo	104.598.000.000,00	100.349.038.137,00	95,94	116.073.240.000,00
22	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo	106.788.400.000,00	102.418.946.245,00	95,91	120.744.100.000,00
23	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen	182.734.000.000,00	177.687.140.000,00	97,24	206.161.200.000,00
24	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten	154.831.000.000,00	150.391.491.376,00	97,13	184.302.150.000,00
25	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali	110.105.800.000,00	107.947.959.940,00	98,04	135.838.850.000,00
26	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen	125.570.200.000,00	120.970.526.822,00	96,34	147.505.100.000,00
27	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo	106.459.800.000,00	102.149.535.497,00	95,95	124.309.446.440,00
28	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar	112.264.400.000,00	108.511.945.647,00	96,66	128.192.200.000,00
29	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri	125.747.800.000,00	120.859.960.000,00	96,11	142.145.650.000,00
30	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang	232.022.760.000,00	225.740.333.919,00	97,29	273.185.600.000,00
31	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan	40.372.600.000,00	37.414.760.000,00	92,67	46.491.271.960,00
32	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta	116.688.800.000,00	111.933.281.415,00	95,92	139.214.650.000,00
33	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga	34.516.000.000,00	33.032.360.000,00	95,70	42.946.465.000,00
34	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal	46.986.200.000,00	45.429.280.000,00	96,69	55.302.750.000,00
35	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang	31.584.000.000,00	29.648.520.000,00	93,87	41.076.550.000,00
Jumlah		4.499.397.360.000,00	4.365.594.483.751,00	97,03	5.111.146.824.464,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Rp 238.268.220.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp238.268.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Pendidikan	10.000.000.000,00	9.481.000.000,00	94,81	511.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni	199.370.000.000,00	195.848.720.000,00	98,23	36.020.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Perlindungan Sosial	33.495.000.000,00	32.938.500.000,00	98,34	-
Jumlah	242.865.000.000,00	238.268.220.000,00	98,11	36.531.500.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp1.454.598.084.464,00

Realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.454.598.084.464,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	29.104.314.000,00	21.650.743.424,00	74,39	9.126.628.025,00
Belanja Peralatan dan Mesin	382.736.460.000,00	321.441.003.601,00	83,98	321.146.639.091,00
Belanja Gedung dan Bangunan	349.823.721.000,00	308.934.759.265,00	88,31	245.973.084.291,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	829.035.255.000,00	799.019.206.624,00	96,38	2.235.056.391.658,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.044.961.000,00	2.794.491.050,00	91,77	3.821.647.385,00
Belanja Aset Tidak Berwujud	777.510.000,00	757.880.500,00	97,48	553.790.000,00
Jumlah	1.594.522.221.000,00	1.454.598.084.464,00	91,22	2.815.678.180.450,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Rp 21.650.743.424,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp21.650.743.424,00 atau 74,39% dari anggaran Rp29.104.314.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.126.628.025,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.185.000.000,00	3.141.800.000,00	98,64	-
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	16.597.117.000,00	9.858.994.776,00	59,40	9.062.778.025,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	7.297.197.000,00	6.756.238.648,00	92,59	-
Dinas Sosial	150.000.000,00	126.000.000,00	84,00	63.850.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.875.000.000,00	1.767.710.000,00	94,28	-
Jumlah	29.104.314.000,00	21.650.743.424,00	74,39	9.126.628.025,00



Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Bina Marga dan Ciptakarya hanya terserap 59,40 % karena proses musyawarah dengan masyarakat masih belum ada kesepakatan sehingga menyebabkan tertundanya proses pembebasan tanahnya.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 321.441.003.601,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp321.441.003.601,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	8.370.321.000,00	7.191.933.960,00	85,92	16.289.484.466,00
Belanja Alat-alat Angkut	11.769.720.000,00	10.427.816.145,00	88,60	35.609.785.240,00
Belanja Alat-alat Bengkel	5.572.127.000,00	5.371.178.368,00	96,39	2.365.619.500,00
Belanja Alat-alat Pertanian	3.550.709.000,00	3.349.404.700,00	94,33	2.134.637.300,00
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	75.104.917.000,00	68.207.175.462,00	90,82	63.347.988.592,00
Belanja Alat-alat Studio	5.433.431.000,00	5.020.253.815,00	92,40	4.821.686.662,00
Belanja Alat-alat Kedokteran	215.273.215.000,00	203.046.191.751,00	94,32	185.495.487.432,00
Belanja Alat-alat Laboratorium	57.643.220.000,00	18.812.149.400,00	32,64	10.390.915.899,00
Belanja Alat-alat Keamanan	18.800.000,00	14.900.000,00	79,26	691.034.000,00
Jumlah	382.736.460.000,00	321.441.003.601,00	83,98	321.146.639.091,00

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat-Alat Berat

Rp 7.191.933.960,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.191.933.960,00 atau 85,92% dari anggaran Rp8.370.321.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp16.289.484.466,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	166.579.000,00	158.430.000,00	95,11	-
Dinas Kesehatan	140.000.000,00	139.250.000,00	99,46	-
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	310.000.000,00	192.421.650,00	62,07	-
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	60.000.000,00	52.950.000,00	88,25	2.970.000,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	5.137.253.000,00	4.179.213.000,00	81,35	14.222.335.466,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	313.975.000,00	289.877.000,00	92,32	1.999.179.000,00
Dinas Sosial	140.000.000,00	138.250.000,00	98,75	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.800.000,00	23.650.000,00	99,37	-
Dinas Perhubungan	75.600.000,00	74.958.000,00	99,15	-
Dinas Kominfo	50.000.000,00	39.483.400,00	78,97	-
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	9.550.000,00	9.025.000,00	94,50	-
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	-	-	15.000.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	340.000.000,00	333.872.000,00	98,20	-
Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	50.000.000,00



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.000.000,00	23.125.000,00	92,50	-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	579.500.000,00	578.050.000,00	99,75	-
Sekretariat Daerah	886.564.000,00	856.002.500,00	96,55	-
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	112.500.000,00	103.376.410,00	91,89	-
Jumlah	8.370.321.000,00	7.191.933.960,00	85,92	16.289.484.466,00

Realisasi belanja modal pada RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto hanya terserap sebesar 62,07% , RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten hanya terserap 88,25%, serta Dinas Bina Marga dan Ciptakarya hanya terserap 81,35% yang merupakan sisa lelang melalui proses ULP, dan realisasi keuangan berdasarkan nilai kontrak.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan

Rp10.427.816.145,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.427.816.145,00 atau 88,60% dari anggaran Rp 11.769.720.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp35.609.785.240,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	(Dalam Rupiah)
				Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Kesehatan	-	-	-	1.106.278.600,00
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	1.062.500.000,00
RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	355.355.000,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	520.000.000,00	500.000.000,00	96,15	206.980.000,00
RSJD Surakarta	16.500.000,00	16.000.000,00	96,97	-
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	350.530.000,00	350.530.000,00	100,00	663.198.390,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	1.400.000.000,00	1.232.356.045,00	88,03	486.765.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	498.000.000,00	496.320.000,00	99,66	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	75.595.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	468.479.250,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.499.340.000,00	3.161.410.600,00	90,34	4.852.219.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	500.000.000,00	478.866.000,00	95,77	25.655.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	576.000.000,00	153.755.000,00	26,69	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	452.408.750,00
Sekretariat Daerah	177.350.000,00	151.750.000,00	85,57	6.515.552.000,00
Sekretariat DPRD	-	-	-	12.187.519.250,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.200.000.000,00	3.856.173.500,00	91,81	7.151.280.000,00
Badan Pengembangan SDM	32.000.000,00	30.655.000,00	95,80	-
Jumlah	11.769.720.000,00	10.427.816.145,00	88,60	35.609.785.240,00

Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hanya terserap sebesar 26,69% dikarenakan pembelian kendaraan roda empat tidak dapat



dilaksanakan, disebabkan tidak ada penyedia yang bisa melaksanakan pengadaan mobil Operasional Puskesmas Keliling sebagaimana sesuai dengan kualifikasi dalam e-katalog.

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat-Alat Bengkel dan Ukur

Rp 5.371.178.368,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 5.371.178.368,00 atau 96,39% dari anggaran Rp5.572.127.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.365.619.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.081.269.000,00	3.041.516.500,00	98,71	-
Dinas Kesehatan	272.700.000,00	215.966.950,00	79,20	-
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	72.500.000,00	66.560.000,00	91,81	252.480.200,00
RSUD Tugurejo Semarang	70.000.000,00	46.673.418,00	66,68	23.605.000,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-	-	8.485.000,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.000.000,00	4.009.500,00	80,19	-
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	-	-	-	18.000.000,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	685.473.000,00	663.923.000,00	96,86	1.239.823.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.735.000,00	18.727.500,00	99,96	-
Dinas Perhubungan	-	-	-	199.415.700,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	1.083.950.000,00	1.080.450.000,00	99,68	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	136.500.600,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	6.500.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	210.000.000,00	162.120.000,00	77,20	264.880.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38.000.000,00	37.800.000,00	99,47	92.680.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	4.850.000,00
Inspektorat	-	-	-	71.400.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	27.300.000,00
Badan Pengembangan SDM	9.500.000,00	8.431.500,00	88,75	-
Dinas Perkebunan	-	-	-	19.700.000,00
Jumlah	5.572.127.000,00	5.371.178.368,00	96,39	2.365.619.500,00

Realisasi pada Dinas Kesehatan terserap 79,20% dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terserap 77,20% karena realisasi berdasarkan kebutuhan riil dengan capaian fisik 100% serta RSUD Tugurejo Semarang terserap 66,68% dikarenakan pendapatan BLUD tidak tercapai sehingga tidak bisa digunakan untuk merealisasikan belanja alat-alat bengkel dan ukur.

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat-Alat Pertanian

Rp3.349.404.700,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.349.404.700,00 atau 94,33% dari anggaran Rp3.550.709.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.134.637.300,00 dengan rincian sebagai berikut :



(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-	-	193.875.000,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-	-	49.725.500,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.000.000,00	990.000,00	99,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	11.335.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.680.000,00	19.000.000,00	68,64	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	118.600.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	598.264.000,00	543.827.000,00	90,90	32.003.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.653.600.000,00	1.566.390.500,00	94,73	835.149.800,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.161.965.000,00	1.115.554.800,00	96,01	893.949.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	101.200.000,00	98.700.000,00	97,53	-
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.000.000,00	4.942.400,00	70,61	-
Jumlah	3.550.709.000,00	3.349.404.700,00	94,33	2.134.637.300,00

Realisasi Belanja Modal Alat-Alat Pertanian Tahun Anggaran 2017 tidak terserap oleh :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya terserap 68,64% dikarenakan merealisasikan belanja dengan spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan spesifikasi alat yang telah direncanakan semula, dengan capaian fisik 100%.
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah hanya terserap 70,61% dikarenakan efisiensi.

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 68.207.175.462,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp68.207.175.462,00 atau 90,82% dari anggaran Rp75.104.917.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp63.347.988.592,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	4.954.578.000,00	4.792.905.900,00	96,74	883.932.500,00
Dinas Kesehatan	2.265.418.000,00	2.005.738.258,00	88,54	4.067.587.695,00
RSUD Moewardi Surakarta	13.275.653.000,00	11.003.551.830,00	82,89	9.089.091.030,00
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	8.796.535.000,00	7.982.861.717,00	90,75	4.099.015.712,00
RSUD Tugurejo Semarang	770.000.000,00	745.827.386,00	96,86	2.639.106.170,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	471.800.000,00	471.762.255,00	99,99	1.424.793.009,00
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.903.407.000,00	1.847.831.750,00	97,08	501.117.600,00
RSJD Surakarta	2.767.554.000,00	1.901.531.120,00	68,71	2.785.393.000,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.430.000.000,00	1.919.662.700,00	79,00	2.116.027.905,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	448.000.000,00	393.135.000,00	87,75	401.827.000,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	3.009.171.000,00	2.634.750.300,00	87,56	2.144.330.409,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	177.544.000,00	161.760.000,00	91,11	237.742.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Satuan Polisi Pamong Praja	259.200.000,00	258.200.000,00	99,61	841.889.750,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.000.000,00	97.790.000,00	98,78	704.270.000,00
Dinas Sosial	256.350.000,00	251.850.000,00	98,24	544.155.100,00
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	282.159.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	689.649.000,00	686.646.893,00	99,56	394.581.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00	122.608.500,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	438.782.000,00	426.309.110,00	97,16	299.050.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	292.000.000,00	286.017.000,00	97,95	421.245.835,00
Dinas Perhubungan	2.305.085.000,00	2.239.784.500,00	97,17	2.939.502.700,00
Dinas Kominfo	2.993.898.000,00	2.954.472.200,00	98,68	-
Dinas Koperasi dan UKM	192.700.000,00	187.014.000,00	97,05	965.018.760,00
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.321.650.000,00	1.246.580.780,00	94,32	696.303.293,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	443.727.000,00	432.545.350,00	97,48	849.425.800,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	341.490.000,00	336.153.500,00	98,44	411.577.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	505.500.000,00	498.519.000,00	98,62	1.357.335.900,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.498.546.000,00	1.467.335.500,00	97,92	2.043.893.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.269.708.000,00	1.233.301.580,00	97,13	527.526.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.448.261.000,00	1.437.273.000,00	99,24	608.944.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	364.900.000,00	353.245.000,00	96,81	435.761.607,00
Sekretariat Daerah	1.816.536.000,00	1.650.713.500,00	90,87	4.835.417.500,00
Sekretariat DPRD	3.239.996.000,00	3.176.830.500,00	98,05	884.894.000,00
Inspektorat	454.000.000,00	423.975.000,00	93,39	585.825.000,00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	436.275.000,00	433.810.200,00	99,44	564.672.519,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.527.287.000,00	7.154.248.883,00	95,04	5.177.615.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.326.930.000,00	1.043.566.500,00	78,65	-
Badan Kepegawaian Daerah	2.983.587.000,00	2.813.841.000,00	94,31	771.665.600,00
Badan Pengembangan SDM	818.850.000,00	762.314.250,00	93,10	1.463.603.000,00
Badan Penghubung	494.250.000,00	476.420.000,00	96,39	262.900.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	339.941.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	343.975.000,00
Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	64.680.000,00
Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	15.470.500,00
Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	269.592.273,00
Sekretariat KPID	-	-	-	25.470.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	596.957.972,00
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	45.350.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	2.264.745.953,00
Jumlah	75.104.917.000,00	68.207.175.462,00	90,82	63.347.988.592,00



5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Rp5.020.253.815,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.020.253.815,00 atau 92,40% dari anggaran Rp5.433.431.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 4.821.686.662,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	170.000.000,00	169.378.000,00	99,63	34.492.000,00
Dinas Kesehatan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	269.495.550,00
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	700.000.000,00	625.000.000,00	89,29	-
RSUD Tugurejo Semarang	10.000.000,00	7.598.250,00	75,98	53.196.340,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-	-	7.374.000,00
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	59.200.000,00	55.900.000,00	94,43	-
RSJD Surakarta	-	-	-	34.750.000,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	50.000.000,00	37.306.250,00	74,61	48.642.000,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	-	-	-	47.500.000,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	281.062.000,00	261.140.000,00	92,91	484.971.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	67.456.000,00	58.700.000,00	87,02	-
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	58.400.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	66.000.000,00
Dinas Sosial	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00	-
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.000.000,00	14.988.000,00	99,92	29.040.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	69.700.000,00	69.696.000,00	99,99	29.960.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77.924.000,00	68.401.000,00	87,78	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	146.750.000,00	144.319.000,00	98,34	-
Dinas Perhubungan	253.000.000,00	235.198.000,00	92,96	366.087.500,00
Dinas Kominfo	434.556.000,00	242.248.500,00	55,75	-
Dinas Koperasi dan UKM	12.500.000,00	12.270.000,00	98,16	24.700.000,00
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	28.800.000,00	28.311.125,00	98,30	-
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	101.595.000,00	100.260.000,00	98,69	45.474.000,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	72.350.000,00	70.460.000,00	97,39	16.000.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	39.000.000,00	38.800.000,00	99,49	155.075.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	148.000.000,00	141.200.000,00	95,41	-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.000.000,00	24.832.000,00	99,33	125.355.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	646.048.000,00	643.103.000,00	99,54	49.650.000,00
Sekretariat Daerah	289.150.000,00	280.850.000,00	97,13	419.197.000,00
Sekretariat DPRD	547.825.000,00	544.986.000,00	99,48	259.513.000,00
Inspektorat	386.000.000,00	379.800.000,00	98,39	59.900.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	201.150.000,00	198.798.900,00	98,83	347.790.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	29.665.000,00	22.905.000,00	77,21	151.190.000,00
Badan Pengembangan SDM	500.300.000,00	472.554.790,00	94,45	280.000.000,00
Badan Penghubung	52.500.000,00	52.350.000,00	99,71	17.500.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	42.764.472,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	381.275.000,00



	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	8.992.500,00
Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	21.000.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	384.255.300,00
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	4.350.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	497.797.000,00
Jumlah	5.433.431.000,00	5.020.253.815,00	92,40	4.821.686.662,00

Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi Tahun Anggaran 2017 tidak dapat terserap di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten 74,61% dan Badan Kepegawaian Daerah 77,21% disebabkan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil dengan capaian fisik 100% .

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran Rp203.046.191.751,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp203.046.191.751,00 atau 94,32% dari anggaran Rp215.273.215.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp185.495.487.432,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	35.296.000,00	35.000.000,00	99,16	-
Dinas Kesehatan	1.196.056.000,00	1.056.260.077,00	88,31	459.130.385,00
RSUD Moewardi Surakarta	61.143.536.000,00	60.645.342.372,00	99,19	75.582.547.399,00
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	107.919.193.000,00	97.131.132.062,00	90,00	54.273.974.900,00
RSUD Tugurejo Semarang	38.052.220.000,00	38.038.090.165,00	99,96	27.210.047.937,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	2.018.035.000,00	2.017.305.522,00	99,96	4.532.005.244,00
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.649.609.000,00	1.501.956.055,00	91,05	1.249.453.945,00
RSJD Surakarta	385.000.000,00	126.572.100,00	32,88	12.966.844.789,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.813.470.000,00	2.434.433.398,00	86,53	9.221.482.833,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	60.800.000,00	60.100.000,00	98,85	-
Jumlah	215.273.215.000,00	203.046.191.751,00	94,32	185.495.487.432,00

Realisasi belanja modal alat-alat kedokteran pada RSJD Surakarta terserap 32,88% dikarenakan tidak tercapainya pendapatan yang berpengaruh pada belanja modal yang dibiayai dari anggaran Pendapatan BLUD.



5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium

Rp18.812.149.400,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp18.812.149.400,00 atau 32,64% dari anggaran Rp 57.643.220.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 10.390.915.899,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	47.830.000.000,00	9.935.893.240,00	20,77	-
Dinas Kesehatan	1.320.826.000,00	1.188.456.300,00	89,98	-
RSJD Surakarta	1.340.000.000,00	1.334.108.300,00	99,56	-
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	20.000.000,00	17.180.000,00	85,90	538.934.390,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	373.242.000,00	282.975.000,00	75,82	298.425.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	756.415.000,00
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	104.000.000,00	103.445.000,00	99,47	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60.175.000,00	58.223.000,00	96,76	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	195.736.000,00	193.889.000,00	99,06	5.503.784.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	59.931.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	161.263.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.704.171.000,00	2.538.229.560,00	93,86	1.358.711.900,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	34.750.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.695.070.000,00	3.159.750.000,00	85,51	1.561.750.000,00
Inspektorat	-	-	-	70.800.000,00
Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	22.351.609,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	23.800.000,00
Jumlah	57.643.220.000,00	18.812.149.400,00	32,64	10.390.915.899,00

Realisasi Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2017 tidak terserap oleh :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan hanya terserap 20,77% dikarenakan regulasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menyatakan batas waktu pencairan kontrak tanggal 31 Agustus 2017 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya hanya terserap 75,82% dikarenakan efisiensi anggaran dan selektif dalam pengadaan alat laboratorium, serta masih dalam masa transisi penggabungan laboratorium bina marga dan cipta karya.



5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat-Alat Keamanan

Rp14.900.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp14.900.000,00 atau 79,26% dari anggaran Rp18.800.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp691.034.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Kesehatan	-	-	-	15.000.000,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	-	-	-	5.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	82.600.000,00
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	184.500.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.800.000,00	-	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	14.734.000,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	28.500.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33	192.000.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	23.800.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	82.500.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	62.400.000,00
Jumlah	18.800.000,00	14.900.000,00	79,26	691.034.000,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp308.934.759.265,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp308.934.759.265,00 atau 88,31% dari anggaran Rp349.823.721.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp245.973.084.291,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	107.229.662.000,00	100.347.681.900,00	93,58	3.205.278.981,00
Dinas Kesehatan	4.220.908.000,00	3.526.774.084,00	83,55	5.911.787.700,00
RSUD Moewardi Surakarta	40.982.143.000,00	35.831.838.510,00	87,43	99.521.338.701,00
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	1.500.000.000,00	-	0,00	3.405.858.000,00
RSUD Tugurejo Semarang	24.953.610.000,00	18.989.731.700,00	76,10	521.494.650,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	13.679.153.000,00	13.448.082.160,00	98,31	4.710.980.400,00
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	20.635.120.000,00	17.981.779.750,00	87,14	18.601.624.851,00
RSJD Surakarta	13.249.091.000,00	12.285.912.000,00	92,73	600.000.000,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.000.000.000,00	2.320.569.140,00	58,01	11.828.888.000,00
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	2.643.478.000,00	2.575.967.000,00	97,45	2.151.414.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	1.105.153.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	491.430.000,00	491.418.000,00	100,00	-
Dinas Sosial	-	-	-	2.961.424.389,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	3.418.994.200,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.190.510.000,00	1.158.315.350,00	97,30	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	572.182.000,00



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016*

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	-	-	-	332.367.000,00
Dinas Perhubungan	245.000.000,00	235.282.000,00	96,03	1.317.914.300,00
Dinas Kominfo	157.477.000,00	154.673.000,00	98,22	-
Dinas Koperasi dan UKM	240.800.000,00	235.926.000,00	97,98	108.688.000,00
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	78.700.000,00	77.545.000,00	98,53	1.328.194.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	94.705.968.000,00	81.304.697.316,00	85,85	46.342.147.540,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	199.980.000,00	198.990.000,00	99,50	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.421.470.000,00	2.325.402.550,00	96,03	3.249.275.600,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	412.000.000,00	408.633.000,00	99,18	1.018.628.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.313.695.000,00	8.974.315.505,00	87,01	10.316.147.975,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.345.845.000,00	2.319.947.300,00	98,90	2.461.900.519,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	346.839.000,00
Sekretariat DPRD	946.590.000,00	918.790.000,00	97,06	2.054.636.000,00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	590.841.000,00	589.244.500,00	99,73	-
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.600.000.000,00	1.500.674.500,00	93,79	6.218.121.085,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	690.250.000,00	635.449.000,00	92,06	-
Badan Penghubung	100.000.000,00	97.120.000,00	97,12	36.548.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	341.001.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	7.192.296.900,00
Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	206.965.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	2.778.820.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	1.806.175.500,00
Jumlah	349.823.721.000,00	308.934.759.265,00	88,31	245.973.084.291,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Monumen Tahun Anggaran 2017 tidak terserap oleh antara lain:

1. RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto tidak terserap 0,00% dikarenakan ijin pembongkaran gedung lama belum turun sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan;
2. RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten hanya terserap 58,00% adanya efisiensi penggunaan anggaran BLUD.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp799.019.206.624,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 Rp799.019.206.624,00 atau 96,38% dari anggaran Rp 829.035.255.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.235.056.391.658,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	653.010.897.000,00	640.661.327.541,00	98,11	2.068.764.139.949,00
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	154.253.129.000,00	137.609.060.769,00	89,21	149.510.209.969,00
Belanja Instalansi dan Jaringan	21.771.229.000,00	20.748.818.314,00	95,30	16.782.041.740,00



Jumlah	829.035.255.000,00	799.019.206.624,00	96,38	2.235.056.391.658,00

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp 640.661.327.541,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp640.661.327.541,00 atau 98,11% dari anggaran Rp 653.010.897.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.068.764.139.949,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	652.185.313.000,00	639.855.874.541,00	98,11	2.065.994.249.449,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	56.384.000,00	56.300.000,00	99,85	-
Dinas Pertanian dan Perkebunan	769.200.000,00	749.153.000,00	97,39	-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	1.557.232.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	296.743.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	915.915.500,00
Jumlah	653.010.897.000,00	640.661.327.541,00	98,11	2.068.764.139.949,00

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air Rp137.609.060.769,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp137.609.060.769,00 atau 89,21% dari anggaran Rp154.253.129.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp149.510.209.969,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Kesehatan	120.000.000,00	119.272.000,00	99,39	868.962.000,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	200.000.000,00	196.653.000,00	98,33	-
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	145.893.364.000,00	129.434.611.769,00	88,72	141.905.314.469,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	84.500.000,00	84.023.000,00	99,44	-
Dinas Perhubungan	-	-	-	111.292.500,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	10.275.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.223.850.000,00	2.116.453.000,00	95,17	1.269.951.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.169.099.000,00	3.105.123.600,00	97,98	1.770.299.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	261.000.000,00	259.213.400,00	99,32	26.800.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.301.316.000,00	2.293.711.000,00	99,67	1.855.588.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	932.008.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	759.720.000,00
Jumlah	154.253.129.000,00	137.609.060.769,00	89,21	149.510.209.969,00



5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan

Rp 20.748.818.314,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.748.818.314,00 atau 95,30% dari anggaran Rp21.771.229.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 16.782.041.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	190.000.000,00	160.165.000,00	84,30	10.000.000,00
RSUD Moewardi Surakarta	1.921.700.000,00	1.921.700.000,00	100,00	-
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	1.850.000.000,00	1.619.262.000,00	87,53	-
RSUD Tugurejo Semarang	7.167.000.000,00	7.004.079.750,00	97,73	-
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-	-	784.770.650,00
Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	18.899.000,00	17.774.664,00	94,05	-
Dinas PSDA dan Penataan Ruang	36.790.000,00	21.516.000,00	58,48	20.870.900,00
Dinas Perhubungan	5.385.108.000,00	5.195.247.500,00	96,47	3.870.791.690,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	107.080.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	640.800.000,00	636.193.400,00	99,28	893.971.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.560.932.000,00	4.172.880.000,00	91,49	9.829.585.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	1.011.400.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	253.572.000,00
Jumlah	21.771.229.000,00	20.748.818.314,00	95,30	16.782.041.740,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp 2.794.491.050,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.794.491.050,00 atau 91,77% dari anggaran Rp3.044.961.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.821.647.385,00 terdiri dari:

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	1.146.454.000,00	1.015.675.050,00	88,59	946.958.385,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	345.807.000,00	313.366.000,00	90,62	1.623.733.000,00
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	1.552.700.000,00	1.465.450.000,00	94,38	1.250.956.000,00
Jumlah	3.044.961.000,00	2.794.491.050,00	91,77	3.821.647.385,00

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Buku Perpustakaan

Rp 1.015.675.050,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.015.675.050,00 atau 88,59% dari anggaran Rp1.146.454.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp946.958.385,00 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017		%	(Dalam Rupiah)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2016
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	4.590.000,00	4.560.000,00	99,35	-
RSUD Moewardi Surakarta	20.000.000,00	19.984.600,00	99,92	-
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	19.964.835,00
RSUD Tugurejo Semarang	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	4.095.000,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-	-	284.324.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.224.000,00	19.202.000,00	99,89	40.620.000,00
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	450.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	2.300.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	776.000,00	776.000,00	100,00	2.511.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	1.998.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	2.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00	10.360.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70	10.000.000,00
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	23.700.000,00	23.009.000,00	97,08	4.094.000,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	932.250.000,00	838.709.000,00	89,97	389.035.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	728.500,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.584.000,00	5.520.000,00	98,85	4.375.500,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	10.626.700,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	13.741.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000,00	9.908.350,00	99,08	7.031.500,00
Sekretariat Daerah	35.250.000,00	26.347.600,00	74,74	43.413.250,00
Sekretariat DPRD	27.000.000,00	-	0,00	12.458.000,00
Inspektorat	-	-	-	1.963.000,00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	8.844.000,00	8.844.000,00	-	5.700.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	2.500.000,00	2.464.500,00	98,58	2.898.500,00
Badan Pengembangan SDM	36.016.000,00	35.710.000,00	99,15	35.376.800,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	19.284.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	2.960.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	1.965.000,00
Jumlah	1.146.454.000,00	1.015.675.050,00	88,59	946.958.385,00

Belanja Modal Buku Perpustakaan pada Sekretariat DPRD tidak terserap atau 0,00% dikarenakan belum ada kebutuhan sesuai dengan permintaan atau referensi buku.

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Budaya

Rp313.366.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp313.366.000,00 atau 90,62% dari anggaran Rp345.807.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.623.733.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-	-	110.766.000,00
Dinas Kesehatan	-	-	-	10.000.000,00
RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	300.000.000,00	268.066.000,00	89,36	-
RSJD Surakarta	-	-	-	13.700.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	-	-	940.500.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	200.484.000,00
Sekretariat Daerah	10.800.000,00	10.500.000,00	97,22	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	20.403.000,00
Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	15.007.000,00	15.000.000,00	99,95	-
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	158.700.000,00
Badan Pengembangan SDM	-	-	-	-
Badan Penghubung	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	60.000.000,00
Dinas Kehutanan	-	-	-	109.180.000,00
Jumlah	345.807.000,00	313.366.000,00	90,62	1.623.733.000,00

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan, Ternak dan Tanaman

Rp1.465.450.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.465.450.000,00 atau 94,38% dari anggaran Rp 1.552.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.250.956.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.552.700.000,00	1.465.450.000,00	94,38	1.200.175.000,00
Dinas Perkebunan	-	-	-	50.781.000,00
Jumlah	1.552.700.000,00	1.465.450.000,00	94,38	1.250.956.000,00

5.1.2.2.6 Belanja Aset Tak Berwujud

Rp 757.880.500,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp757.880.500,00 atau 97,48% dari anggaran Rp777.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Kesehatan	96.000.000,00	94.110.000,00	98,03	39.050.000,00
RSUD Kelet/Donorojo Jepara	100.000.000,00	97.550.000,00	97,55	-
RSJD Surakarta	-	-	-	172.500.000,00



	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Dinas Sosial	100.000.000,00	87.270.500,00	87,27	77.500.000,00
Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	141.510.000,00	140.950.000,00	99,60	-
Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75	-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	47.850.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	169.150.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	47.740.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	200.000.000,00	198.500.000,00	99,25	-
Jumlah	777.510.000,00	757.880.500,00	97,48	553.790.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Rp1.130.950.000,00

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tak Terduga	17.500.000.000,00	1.130.950.000,00	6,46	4.867.408.385,00
Jumlah	17.500.000.000,00	1.130.950.000,00	6,46	4.867.408.385,00

5.1.2.4 Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota

Rp6.763.993.885.389,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.763.993.885.389,00 atau 96,57% dari anggaran Rp7.004.256.299.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp6.189.141.095.845,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	4.893.724.400.000,00	4.812.323.251.641,00	98,34	4.088.437.191.480,00
Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	1.590.424.350.000,00	1.440.905.070.748,00	90,60	1.971.149.375.365,00
Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	510.694.294.000,00	501.416.075.000,00	98,18	120.205.041.000,00
Bantuan Keuangan ke Partai Politik	2.271.055.000,00	2.271.055.000,00	100,00	2.271.055.000,00
Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya	7.142.200.000,00	7.078.433.000,00	99,57	7.078.433.000,00
Jumlah	7.004.256.299.000,00	6.763.993.885.389,00	96,57	6.189.141.095.845,00



5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota

Rp 4.812.323.251.641,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.812.323.251.641,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 4.088.437.191.480,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Bagi Hasil PKB	1.194.966.668.661,00	993.303.586.122,00
Bagi Hasil BBNKB	979.684.690.003,00	814.540.784.951,00
Bagi Hasil PBBKB	1.212.677.813.900,00	995.742.289.747,00
Bagi Hasil PAP	5.984.070.946,00	4.298.422.169,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	1.418.907.273.571,00	1.280.552.108.491,00
Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat	102.734.560,00	-
Jumlah	4.812.323.251.641,00	4.088.437.191.480,00

5.1.2.4.1.1 Bagi Hasil PKB

Rp 1.194.966.668.661,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.194.966.668.661,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 993.303.586.122,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Semarang	36.520.491.618,00	28.506.167.149,00
Kabupaten Kendal	30.916.270.966,00	24.729.726.153,00
Kabupaten Demak	28.755.098.504,00	23.346.575.911,00
Kabupaten Grobogan	34.470.350.568,00	27.663.948.494,00
Kabupaten Pati	42.611.195.236,00	34.276.254.162,00
Kabupaten Kudus	33.719.435.600,00	28.917.508.161,00
Kabupaten Jepara	34.366.161.798,00	26.821.644.370,00
Kabupaten Rembang	20.161.487.173,00	16.757.310.259,00
Kabupaten Blora	23.320.828.075,00	19.436.542.901,00
Kabupaten Pekalongan	19.408.687.958,00	16.232.414.602,00
Kabupaten Batang	17.869.228.485,00	15.228.063.892,00
Kabupaten Pemalang	30.936.102.824,00	24.835.977.409,00
Kabupaten Tegal	28.936.372.882,00	23.990.220.022,00
Kabupaten Brebes	41.272.482.188,00	31.938.884.566,00
Kabupaten Banyumas	52.474.723.621,00	41.814.603.135,00
Kabupaten Cilacap	50.166.221.540,00	40.962.152.016,00
Kabupaten Purbalingga	24.558.927.792,00	21.269.869.575,00
Kabupaten Banjarnegara	21.269.223.265,00	18.572.315.222,00
Kabupaten Magelang	31.453.228.151,00	24.534.026.243,00
Kabupaten Temanggung	20.157.319.977,00	17.241.594.835,00
Kabupaten Wonosobo	21.020.394.494,00	17.917.436.519,00



	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Purworejo	21.170.427.021,00	18.094.630.331,00
Kabupaten Kebumen	30.269.837.549,00	24.661.229.514,00
Kabupaten Klaten	43.674.905.697,00	35.069.414.825,00
Kabupaten Boyolali	30.099.629.781,00	25.209.267.411,00
Kabupaten Sragen	35.419.887.800,00	29.318.219.611,00
Kabupaten Sukoharjo	32.877.042.969,00	26.773.622.498,00
Kabupaten Karanganyar	33.432.488.311,00	27.470.490.062,00
Kabupaten Wonogiri	29.397.685.959,00	23.687.051.543,00
Kota Semarang	180.056.598.027,00	156.311.497.647,00
Kota Pekalongan	15.647.122.299,00	15.299.350.679,00
Kota Surakarta	57.636.916.705,00	47.730.972.994,00
Kota Salatiga	12.492.100.508,00	13.160.598.046,00
Kota Tegal	13.510.120.748,00	12.950.396.475,00
Kota Magelang	14.917.672.572,00	12.573.608.890,00
Jumlah	1.194.966.668.661,00	993.303.586.122,00

5.1.2.4.1.2 Bagi Hasil BBNKB

Rp979.684.690.003,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp979.684.690.003,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp814.540.784.951,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Semarang	31.758.123.237,00	26.426.844.367,00
Kabupaten Kendal	28.975.384.336,00	22.452.773.524,00
Kabupaten Demak	32.724.495.416,00	26.642.602.117,00
Kabupaten Grobogan	29.934.941.787,00	23.224.193.004,00
Kabupaten Pati	35.392.328.029,00	28.705.136.949,00
Kabupaten Kudus	27.187.490.065,00	22.772.980.600,00
Kabupaten Jepara	31.598.385.584,00	25.345.800.966,00
Kabupaten Rembang	15.359.389.745,00	13.452.993.410,00
Kabupaten Blora	16.583.843.289,00	14.186.666.730,00
Kabupaten Pekalongan	19.626.529.830,00	16.356.460.986,00
Kabupaten Batang	17.769.193.261,00	14.525.750.158,00
Kabupaten Pemalang	30.322.150.347,00	24.181.929.729,00
Kabupaten Tegal	35.539.387.135,00	27.793.776.470,00
Kabupaten Brebes	37.235.418.333,00	30.055.679.795,00
Kabupaten Banyumas	41.275.713.669,00	34.791.419.905,00
Kabupaten Cilacap	41.365.750.629,00	34.409.541.247,00
Kabupaten Purbalingga	18.832.751.700,00	16.090.490.917,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Banjarnegara	17.632.851.554,00	15.407.854.640,00
Kabupaten Magelang	26.205.762.033,00	21.138.778.210,00
Kabupaten Temanggung	14.406.869.315,00	12.581.655.774,00
Kabupaten Wonosobo	15.656.051.170,00	13.554.924.109,00
Kabupaten Purworejo	15.331.130.777,00	13.570.855.187,00
Kabupaten Kebumen	22.703.017.961,00	19.324.143.331,00
Kabupaten Klaten	35.472.386.398,00	29.714.095.334,00
Kabupaten Boyolali	26.129.123.038,00	22.279.746.531,00
Kabupaten Sragen	26.771.861.827,00	22.952.459.562,00
Kabupaten Sukoharjo	30.475.672.945,00	26.112.495.585,00
Kabupaten Karanganyar	25.871.585.415,00	22.192.119.860,00
Kabupaten Wonogiri	20.329.269.914,00	17.062.662.225,00
Kota Semarang	141.516.052.194,00	114.990.167.765,00
Kota Pekalongan	9.626.260.685,00	8.566.992.452,00
Kota Surakarta	35.920.648.195,00	30.393.107.748,00
Kota Salatiga	8.072.746.142,00	8.035.064.348,00
Kota Tegal	10.341.988.932,00	9.260.184.802,00
Kota Magelang	5.740.135.116,00	5.988.436.614,00
Jumlah	979.684.690.003,00	814.540.784.951,00

5.1.2.4.1.3 Bagi Hasil PBBKB

Rp 1.212.677.813.900,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.212.677.813.900,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 995.742.289.747,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Semarang	42.400.962.203,00	35.423.586.035,00
Kabupaten Kendal	39.155.422.756,00	31.670.225.984,00
Kabupaten Demak	38.549.071.314,00	32.615.482.751,00
Kabupaten Grobogan	36.708.241.177,00	30.349.662.654,00
Kabupaten Pati	45.951.916.215,00	38.441.494.586,00
Kabupaten Kudus	37.028.147.877,00	29.191.900.974,00
Kabupaten Jepara	39.056.310.165,00	31.300.479.885,00
Kabupaten Rembang	26.830.199.341,00	23.512.111.635,00
Kabupaten Blora	23.449.235.946,00	18.702.189.301,00
Kabupaten Pekalongan	21.712.206.015,00	17.878.973.980,00
Kabupaten Batang	27.076.253.300,00	21.436.310.938,00
Kabupaten Pemalang	31.338.770.033,00	26.462.586.919,00
Kabupaten Tegal	45.507.297.546,00	37.743.434.408,00



	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Brebes	45.823.686.219,00	37.052.235.941,00
Kabupaten Banyumas	55.543.038.794,00	45.923.508.332,00
Kabupaten Cilacap	51.577.989.160,00	38.826.256.678,00
Kabupaten Purbalingga	23.458.342.178,00	18.850.633.617,00
Kabupaten Banjarnegara	21.208.329.236,00	17.902.384.869,00
Kabupaten Magelang	44.894.491.917,00	36.537.487.357,00
Kabupaten Temanggung	23.946.328.998,00	19.263.975.293,00
Kabupaten Wonosobo	19.465.264.446,00	16.104.653.292,00
Kabupaten Purworejo	22.452.455.619,00	18.067.028.068,00
Kabupaten Kebumen	28.732.404.986,00	23.982.017.570,00
Kabupaten Klaten	45.452.800.034,00	36.634.880.124,00
Kabupaten Boyolali	27.003.572.793,00	23.760.554.946,00
Kabupaten Sragen	40.221.252.426,00	32.631.688.288,00
Kabupaten Sukoharjo	44.047.549.017,00	35.888.978.017,00
Kabupaten Karanganyar	37.212.827.082,00	30.671.144.535,00
Kabupaten Wonogiri	29.700.946.985,00	22.829.078.542,00
Kota Semarang	121.166.041.085,00	100.727.744.843,00
Kota Pekalongan	14.186.526.149,00	12.172.889.579,00
Kota Surakarta	32.908.129.365,00	27.768.488.922,00
Kota Salatiga	12.321.665.059,00	10.681.592.744,00
Kota Tegal	11.148.392.920,00	10.319.212.800,00
Kota Magelang	5.441.745.544,00	4.417.415.340,00
Jumlah	1.212.677.813.900,00	995.742.289.747,00

5.1.2.4.1.4 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tanah

Rp5.984.070.946,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.984.070.946,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.298.422.169,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Semarang	618.499.413,00	477.313.000,00
Kabupaten Kendal	36.665.037,00	31.083.000,00
Kabupaten Demak	85.365.122,00	75.914.000,00
Kabupaten Grobogan	317.607.132,00	179.256.429,00
Kabupaten Pati	44.692.984,00	34.801.000,00
Kabupaten Kudus	19.804.993,00	13.380.000,00
Kabupaten Jepara	10.329.065,00	7.653.000,00
Kabupaten Rembang	31.258.258,00	14.372.000,00
Kabupaten Blora	40.817.968,00	32.740.000,00
Kabupaten Pekalongan	82.135.037,00	41.337.000,00



	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Batang	50.575.745,00	23.846.000,00
Kabupaten Pemalang	93.671.292,00	87.340.000,00
Kabupaten Tegal	83.187.511,00	32.380.000,00
Kabupaten Brebes	104.773.141,00	48.572.000,00
Kabupaten Banyumas	275.289.382,00	216.361.000,00
Kabupaten Cilacap	866.563.806,00	858.860.000,00
Kabupaten Purbalingga	36.067.160,00	29.622.000,00
Kabupaten Banjarnegara	1.513.542.450,00	988.096.000,00
Kabupaten Magelang	47.575.511,00	15.427.000,00
Kabupaten Temanggung	56.317.786,00	32.186.000,00
Kabupaten Wonosobo	236.429.304,00	103.246.000,00
Kabupaten Purworejo	21.571.685,00	17.665.000,00
Kabupaten Kebumen	330.904.932,00	248.129.598,00
Kabupaten Klaten	149.650.645,00	71.956.000,00
Kabupaten Boyolali	74.605.749,00	56.134.000,00
Kabupaten Sragen	23.712.342,00	18.995.000,00
Kabupaten Sukoharjo	84.182.202,00	78.628.000,00
Kabupaten Karanganyar	149.001.549,00	87.006.000,00
Kabupaten Wonogiri	223.269.567,00	148.595.000,00
Kota Semarang	194.354.851,00	160.325.000,00
Kota Pekalongan	2.807.628,00	2.222.000,00
Kota Surakarta	35.023.340,00	35.148.142,00
Kota Salatiga	24.681.201,00	22.176.000,00
Kota Tegal	3.520.545,00	2.841.000,00
Kota Magelang	15.616.613,00	4.816.000,00
Jumlah	5.984.070.946,00	4.298.422.169,00

5.1.2.4.1.5 Bagi Hasil Pajak Rokok

Rp 1.418.907.273.571,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.418.907.273.571,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.280.552.108.491,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Semarang	41.665.775.329,00	37.383.154.282,00
Kabupaten Kendal	39.939.289.072,00	35.968.248.970,00
Kabupaten Demak	45.112.856.401,00	40.559.057.049,00
Kabupaten Grobogan	51.991.700.805,00	46.913.269.155,00
Kabupaten Pati	48.499.844.794,00	43.748.195.974,00
Kabupaten Kudus	36.670.129.465,00	32.933.104.066,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Kabupaten Jepara	47.186.053.855,00	42.282.939.776,00
Kabupaten Rembang	30.421.374.483,00	27.396.672.685,00
Kabupaten Blora	37.283.133.713,00	33.661.306.743,00
Kabupaten Pekalongan	37.927.657.160,00	34.174.816.242,00
Kabupaten Batang	34.071.710.209,00	30.667.207.304,00
Kabupaten Pemalang	50.140.316.039,00	45.316.266.377,00
Kabupaten Tegal	54.155.626.421,00	48.950.086.774,00
Kabupaten Brebes	64.656.822.212,00	58.395.811.103,00
Kabupaten Banyumas	60.371.683.916,00	54.319.047.317,00
Kabupaten Cilacap	62.104.356.182,00	56.047.903.631,00
Kabupaten Purbalingga	38.646.118.170,00	34.753.490.429,00
Kabupaten Banjarnegara	38.747.745.495,00	34.934.571.782,00
Kabupaten Magelang	48.871.300.035,00	43.964.814.410,00
Kabupaten Temanggung	34.152.422.924,00	30.734.537.908,00
Kabupaten Wonosobo	35.074.138.586,00	31.653.448.235,00
Kabupaten Purworejo	33.108.459.898,00	29.908.895.708,00
Kabupaten Kebumen	47.085.604.815,00	42.555.925.532,00
Kabupaten Klaten	46.317.361.146,00	41.834.862.360,00
Kabupaten Boyolali	40.569.967.639,00	36.588.984.728,00
Kabupaten Sragen	38.076.121.428,00	34.389.455.939,00
Kabupaten Sukoharjo	37.639.565.784,00	33.890.412.627,00
Kabupaten Karanganyar	37.403.613.643,00	33.658.258.415,00
Kabupaten Wonogiri	40.137.830.575,00	36.267.038.552,00
Kota Semarang	62.292.293.093,00	55.711.678.447,00
Kota Pekalongan	20.465.847.239,00	18.829.722.369,00
Kota Surakarta	27.271.221.945,00	24.615.474.862,00
Kota Salatiga	16.538.080.090,00	15.821.210.224,00
Kota Tegal	18.570.753.855,00	17.527.337.781,00
Kota Magelang	15.740.497.155,00	14.194.900.735,00
Jumlah	1.418.907.273.571,00	1.280.552.108.491,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

Rp1.440.905.070.748,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.440.905.070.748,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.971.149.375.365,00 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Kabupaten Semarang	23.894.390.000,00	20.635.643.000,00	86,36	30.398.700.000,00
Kabupaten Kendal	30.477.190.000,00	28.827.068.000,00	94,59	38.946.954.000,00
Kabupaten Demak	66.033.690.000,00	61.781.832.000,00	93,56	69.409.448.000,00
Kabupaten Grobogan	71.637.190.000,00	67.144.153.000,00	93,73	63.712.000.000,00
Kabupaten Pati	79.923.650.000,00	78.755.048.130,00	98,54	99.447.900.000,00
Kabupaten Kudus	52.829.060.000,00	52.057.300.000,00	98,54	99.458.300.000,00
Kabupaten Jepara	58.434.390.000,00	55.756.967.000,00	95,42	96.953.350.000,00
Kabupaten Rembang	27.113.690.000,00	24.358.539.000,00	89,84	25.230.562.000,00
Kabupaten Blora	64.578.350.000,00	62.170.199.000,00	96,27	99.694.300.000,00
Kabupaten Pekalongan	55.867.190.000,00	48.077.792.550,00	86,06	32.646.100.000,00
Kabupaten Batang	20.184.040.000,00	18.134.930.048,00	89,85	22.161.900.000,00
Kabupaten Pemalang	37.123.330.000,00	29.984.584.048,00	80,77	49.691.542.000,00
Kabupaten Tegal	20.104.390.000,00	17.648.608.000,00	87,78	20.396.897.000,00
Kabupaten Brebes	75.542.190.000,00	70.660.128.000,00	93,54	80.726.918.115,00
Kabupaten Banyumas	43.387.190.000,00	38.132.853.284,00	87,89	46.127.900.000,00
Kabupaten Cilacap	60.324.390.000,00	53.564.548.000,00	88,79	66.802.098.000,00
Kabupaten Purbalingga	57.232.390.000,00	55.404.387.000,00	96,81	68.099.800.000,00
Kabupaten Banjarnegara	100.579.390.000,00	79.442.001.000,00	78,98	88.623.500.000,00
Kabupaten Magelang	32.884.390.000,00	15.643.871.000,00	47,57	30.503.500.000,00
Kabupaten Temanggung	42.394.390.000,00	42.081.248.000,00	99,26	49.604.500.000,00
Kabupaten Wonosobo	55.427.510.000,00	50.966.543.000,00	91,95	61.209.389.000,00
Kabupaten Purworejo	36.897.550.000,00	35.279.908.542,00	95,62	32.813.271.000,00
Kabupaten Kebumen	21.424.750.000,00	11.868.380.000,00	55,40	102.341.755.000,00
Kabupaten Klaten	52.529.310.000,00	46.337.071.481,00	88,21	73.560.480.000,00
Kabupaten Boyolali	35.034.390.000,00	35.034.390.000,00	100,00	52.044.809.000,00
Kabupaten Sragen	75.373.390.000,00	72.352.981.067,00	95,99	99.001.600.000,00
Kabupaten Sukoharjo	37.728.750.000,00	31.934.457.881,00	84,64	67.292.434.000,00
Kabupaten Karanganyar	28.329.230.000,00	24.463.332.821,00	86,35	95.383.800.000,00
Kabupaten Wonogiri	94.724.390.000,00	90.035.824.000,00	95,05	45.424.890.000,00
Kota Semarang	32.969.400.000,00	26.484.299.746,00	80,33	41.924.244.000,00
Kota Pekalongan	27.541.600.000,00	27.216.854.000,00	98,82	23.546.184.000,00
Kota Surakarta	20.294.400.000,00	19.862.900.000,00	97,87	36.651.955.250,00
Kota Salatiga	21.281.600.000,00	19.684.897.050,00	92,50	22.154.900.000,00
Kota Tegal	19.781.600.000,00	19.420.368.600,00	98,17	25.017.000.000,00
Kota Magelang	10.541.600.000,00	9.701.162.500,00	92,03	14.146.495.000,00
Jumlah	1.590.424.350.000,00	1.440.905.070.748,00	90,60	1.971.149.375.365,00



5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

Rp501.416.075.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp501.416.075.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp120.205.041.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Kabupaten Semarang	16.780.200.000,00	16.030.200.000,00	95,53	2.065.000.000,00
Kabupaten Kendal	17.745.000.000,00	17.735.000.000,00	99,94	2.785.000.000,00
Kabupaten Demak	10.860.000.000,00	10.505.000.000,00	96,73	1.595.000.000,00
Kabupaten Grobogan	14.962.500.000,00	14.962.500.000,00	100,00	6.210.000.000,00
Kabupaten Pati	46.860.420.000,00	46.555.420.000,00	99,35	13.152.000.000,00
Kabupaten Kudus	7.325.000.000,00	7.190.000.000,00	98,16	2.245.000.000,00
Kabupaten Jepara	13.870.000.000,00	13.870.000.000,00	100,00	4.940.000.000,00
Kabupaten Rembang	11.035.000.000,00	11.035.000.000,00	100,00	3.401.000.000,00
Kabupaten Blora	13.110.000.000,00	12.785.000.000,00	97,52	3.720.000.000,00
Kabupaten Pekalongan	11.612.291.000,00	11.532.291.000,00	99,31	1.475.000.000,00
Kabupaten Batang	19.555.000.000,00	19.075.000.000,00	97,55	3.167.000.000,00
Kabupaten Pemalang	11.975.000.000,00	11.975.000.000,00	100,00	1.495.000.000,00
Kabupaten Tegal	10.135.000.000,00	9.275.000.000,00	91,51	1.950.000.000,00
Kabupaten Brebes	24.777.000.000,00	24.527.000.000,00	98,99	16.342.816.000,00
Kabupaten Banyumas	20.850.080.000,00	20.815.080.000,00	99,83	4.050.000.000,00
Kabupaten Cilacap	17.924.000.000,00	17.824.000.000,00	99,44	1.952.000.000,00
Kabupaten Purbalingga	10.040.000.000,00	9.840.000.000,00	98,01	2.495.000.000,00
Kabupaten Banjarnegara	15.167.000.000,00	13.897.281.000,00	91,63	2.000.000.000,00
Kabupaten Magelang	22.266.091.000,00	21.776.091.000,00	97,80	2.335.000.000,00
Kabupaten Temanggung	14.233.350.000,00	12.138.350.000,00	85,28	2.340.000.000,00
Kabupaten Wonosobo	18.502.000.000,00	17.972.000.000,00	97,14	4.005.000.000,00
Kabupaten Purworejo	23.597.187.000,00	23.507.187.000,00	99,62	2.710.000.000,00
Kabupaten Kebumen	18.465.000.000,00	18.460.000.000,00	99,97	2.595.000.000,00
Kabupaten Klaten	44.280.000.000,00	43.980.000.000,00	99,32	20.740.000.000,00
Kabupaten Boyolali	14.412.675.000,00	14.412.675.000,00	100,00	3.305.225.000,00
Kabupaten Sragen	20.715.000.000,00	20.465.000.000,00	98,79	1.805.000.000,00
Kabupaten Sukoharjo	9.716.000.000,00	9.516.000.000,00	97,94	1.575.000.000,00
Kabupaten Karanganyar	10.548.000.000,00	10.548.000.000,00	100,00	2.100.000.000,00
Kabupaten Wonogiri	19.375.500.000,00	19.212.000.000,00	99,16	1.655.000.000,00
Jumlah	510.694.294.000,00	501.416.075.000,00	98,18	120.205.041.000,00

5.1.2.4.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Rp2.271.055.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.271.055.000,00 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.271.055.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	654.628.000,00	654.628.000,00	100,00	654.628.000,00
Partai Demokrat	316.312.000,00	316.312.000,00	100,00	179.007.000,00
Partai Golongan Karya	274.770.000,00	274.770.000,00	100,00	250.084.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	160.657.000,00	160.657.000,00	100,00	160.657.000,00
Partai Amanat Nasional	250.084.000,00	250.084.000,00	100,00	163.364.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	179.007.000,00	179.007.000,00	100,00	316.312.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	163.364.000,00	163.364.000,00	100,00	274.770.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	165.415.000,00	165.415.000,00	100,00	165.415.000,00
Partai Nasional Demokrat	106.818.000,00	106.818.000,00	100,00	106.818.000,00
Jumlah	2.271.055.000,00	2.271.055.000,00	100,00	2.271.055.000,00

5.1.2.4..5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda LainnyaRp 7.078.433.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.078.433.000,00 atau 99,11%, dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	7.142.200.000,00	7.078.433.000,00	100,90	7.078.433.000,00
Jumlah	7.142.200.000,00	7.078.433.000,00	99,11	7.078.433.000,00

5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT) Rp818.461.612.753,00

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara Total Pendapatan Daerah dikurangi Total Belanja dan Transfer dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila Total Pendapatan Daerah lebih besar daripada Total Belanja dan Transfer serta Defisit apabila sebaliknya. dengan perhitungan sebagai berikut :

		2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan	23.613.056.128.000,00	23.703.174.631.507,00	100,38	19.632.577.136.889,70
2	Belanja dan transfer	23.955.179.003.000,00	22.884.713.018.754,00	95,53	19.354.374.825.983,00
Jumlah		(342.122.875.000,00)	818.461.612.753,00	-	278.202.310.906,68

5.1.4 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,



terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. dengan perhitungan sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	646.122.875.000,00	646.575.639.755,00	100,07	417.920.564.252,00
Pengeluaran Pembiayaan	304.000.000.000,00	304.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
Jumlah	342.122.875.000,00	342.575.639.755,00	100,13	367.920.564.252,00

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Rp646.575.639.755,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp646.575.639.755,00 atau 100,07% dari anggaran Rp646.122.875.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp417.920.564.252,00 terdiri dari :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penggunaan SiLPA	646.122.875.000,00	646.122.875.159,00	100,00	416.830.292.562,00
Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	-	2.727.273,00		905.850.000,00
Penerimaan Pokok Dana Bergulir	-	450.037.323,00		184.421.690,00
Jumlah	646.122.875.000,00	646.575.639.755,00	100,07	417.920.564.252,00

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Rp

646.122.875.159,00

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 646.122.875.159,00 atau 100% dari anggaran Rp646.122.875.159,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp416.830.292.562,00.

5.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan Rp 2.727.273,00

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.727.273,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Kabupaten Cilacap	-	2.727.273,00	-	-



Kabupaten Karanganyar	-	-	-	905.850.000,00
Jumlah	-	2.727.273,00	-	905.850.000,00

5.1.4.1.3 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir **Rp450.037.323,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp450.037.323,00 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp184.421.690,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	80.950.000,00	-	67.909.455,00
Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	247.780.000,00	-	55.444.668,00
Penerimaan Dana Bergulir Sapi Kereman (Dinas Peternakan dan Keswan)	-	-	-	850.000,00
Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	110.007.323,00	-	60.217.567,00
Penerimaan Dana Bergulir Gerbang Mapan (Dinas Ketahanan Pangan)	-	11.300.000,00	-	-
Jumlah	-	450.037.323,00	-	184.421.690,00

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan **Rp304.000.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp304.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 terdiri dari:

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	154.000.000.000,00	154.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	-	-
Jumlah	304.000.000.000,00	304.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah **Rp154.000.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp154.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)			
	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
BPR-BKK	99.000.000.000,00	99.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
PDAB Tirta Utama	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
PT. Jamkrida	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
Jumlah	154.000.000.000,00	154.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00



5.1.4.2.2. Pembentukan Dana Cadangan

Rp150.000.000.000,00

Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp150.000.000.000,00 merupakan pembentukan dana cadangan untuk Pilkada.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.161.037.252.508,00 SiLPA tersebut dalam bentuk sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)		
		2017		Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi	
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	-	1.001.596.763.923,00	502.823.976.126,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	51.854.287,00	3.919.427,00
3	Kas di Bendahara BLUD	-	120.568.201.007,10	139.742.024.751,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan		385.508.164,90	3.552.954.854,68
5	Kas di Bendahara Sekolah	-	38.434.925.126,00	3.550.948.854,68
Jumlah		-	1.161.037.252.508,00	649.673.824.013,36

Jumlah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp1.161.037.252.508,00 termasuk di dalamnya :

- Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota yang belum dibagi hasilkan sebesar Rp247.251.463.095,29
- Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat Kartini Kabupaten Jepara yang belum dibagihasilkan sebesar Rp83.684.544,00
- Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp27.836.715.977,00 yang akan diperhitungkan dengan alokasi transfer Tahun Anggaran 2018 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Awal Tahun 2016 Rp 23.664.386.895,00

Tambah

Penerimaan Dana Transfer dari Pusat Rp5.162.448.826.512,00

Kurang

Realisasi pemby (SP2D) ke Sekolah Rp5.156.788.880.000,00

Pengembalian dana dari Sekolah (Rp 22.176.769.465,00)

Jumlah kurang Rp5.134.612.110.535,00

Sisa Dana BOS per 31 Desember 2017 **Rp 27.836.715.977,00**

- Saldo Dana Alokasi Khusus (Fisik) sebesar Rp20.281.635.750,00, yang akan diperhitungkan dengan alokasi transfer Tahun 2018 sesuai dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan perhitungan berikut :

Penerimaan Dana Transfer dari Pusat Rp 349.139.776.365,00

Realisasi Pembayaran (SP2D) Rp 328.858.140.615,00

Sisa Dana DAK (Fisik) Tahun 2017 **Rp 20.281.635.750,00**



- Saldo Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) berupa tambahan penghasilan guru sebesar Rp61.509.777.318,00, dengan perhitungan berikut :

Penerimaan Dana Transfer dari Pusat	Rp 1.072.453.404.118,00
Realisasi Pembayaran (SP2D)	<u>Rp 1.010.943.626.800,00</u>
Sisa Dana DAK (Non Fisik) Tahun 2017	<u>Rp 61.509.777.318,00</u>
- Saldo Sisa Kas di SMA, SMK dan SLB Negeri sebesar Rp38.434.925.126,00 yang digunakan langsung oleh sekolah sesuai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)



5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp646.122.875.158,68

Saldo anggaran lebih awal tahun 2017 sebesar Rp646.122.875.158,68 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016.

Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	502,823,976,126.00	172,754,747,212.00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,919,427.00	133,316,903.00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	3,552,954,854.68	-
4	Kas di BLUD	139,742,024,751.00	243,942,228,447.00
Jumlah		646,122,875,158.68	416,830,292,562.00

5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Rp1.161.037.252.508,00

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.161.037.252.508,00 terdiri dari:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Pendapatan Asli daerah	12.547.513.389.400,00	11.541.029.720.309,70
2	Pendapatan Transfer	11.117.984.434.093,00	8.056.244.781.983,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	37.676.808.014,00	35.302.634.597,00
Jumlah		23.703.174.631.507,00	19.632.577.136.889,70
1	Belanja Operasi	14.664.990.098.901,00	10.344.688.141.303,00



	2017	2016
2 Belanja Modal	1.454.598.084.464,00	2.815.678.180.450,00
3 Belanja Tidak Terduga	1.130.950.000,00	4.867.408.385,00
4 Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	6.763.993.885.389,00	6.189.141.095.845,00
Jumlah	22.884.713.018.754,00	19.354.374.825.983,00
1 Penerimaan Pembiayaan	646.575.639.755,00	417.920.564.252,00
2 Pengeluaran Pembiayaan	304.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Jumlah	342.575.639.755,00	367.920.564.252,00
SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	1.161.037.252.508,00	646.122.875.158,68

5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp1.161.037.252.508,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2017 sebesar Rp1.161.037.252.508,00 berasal dari:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Realisasi Pendapatan	23.703.174.631.507,00	19.632.577.136.889,70
2 Realisasi Belanja	22.884.713.018.754,00	19.354.374.825.983,00
3 Penerimaan Pembiayaan	646.575.639.755,00	417.920.564.252,00
4 Pengeluaran Pembiayaan	304.000.000.000,00	50.000.000.000,00
SiLPA Tahun 2017	1.161.037.252.508,00	646.122.875.158,68

Saldo ini terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
- Giro di bank Jateng	541.596.763.923,00	477.823.976.126,00
Setara Kas BUD		
- Bank Jateng	300.000.000.000,00	-
- Bank BTN	100.000.000.000,00	-
- Bank Mandiri	20.000.000.000,00	-
- Bank Bukopin	5.000.000.000,00	-
- Bank BNI	-	25.000.000.000,00
- Bank BRI	25.000.000.000,00	-
- Bank Muamalat	10.000.000.000,00	-
2 Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)		
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.531.774,00	
- Dinas Kesehatan		48.150,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		430.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		18,00
- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	36.072.936,00	



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
- Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000,00	24.456,00
- Dinas Pertanian dan Perkebunan		800.000,00
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.100.000,00	
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		2.616.153,00
- inspektorat	2.449.174,00	
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.667.403,00	-
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100,00
- Bakorwil III		-
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		50,00
- Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh		500,00
3 Kas di BLUD		
Rekening Giro Kas Bendahara BLUD		
- RSUD Dr Moewardi Surakarta	427.096.501,00	24.189.978.507,00
- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	12.509.515.521,80	32.357.981.999,00
- RSUD Tugurejo	4.916.679.840,00	10.175.481.451,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo	9.766.257.752,00	2.273.497.204,00
- RSUD Kelet Donorejo	5.002.249.678,30	2.121.641.105,00
- RSJD Surakarta	4.023.707.742,00	2.743.053.200,00
- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	3.922.693.972,00	880.391.285,00
Setara Kas BLUD		
- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	55.000.000.000,00	40.000.000.000,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo (Bank Mandiri)	500.000.000,00	500.000.000,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4 Kas di Bendahara Penerimaan		
- Dinas Pendidikan	-	1.716.000,00
- Dinas Kesehatan	20.451.459,00	290.000,00
- Dinas Perhubungan	17.920.000,00	-
- RSUD Dr Moewardi Surakarta	157.151.895,00	943.337.552,00
- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	-	2.368.954.899,68
- RSUD Tugurejo	54.158.500,00	165.045.550,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo	10.662.920,00	21.685.641,00
- RSUD Kelet Donorejo	62.127.194,90	34.548.814,00
- RSJD Surakarta	13.197.378,00	-
- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	8.666.947,00	17.376.398,00
- Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	13.295.000,00	-
- Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.000.000,00	-
- Dinas Kelautan dan Perikanan	1.846.871,00	-
- Dinas Perindustrian dan perdagangan	21.130.000,00	-
- Sekretariat DPRD	1.900.000,00	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
5	Kas di Bendahara Sekolah		
	- SMA	14.404.707.725,00	-
	- SMK	23.460.248.852,00	-
	- SLB	569.968.549,00	-
	Jumlah	1.161.037.252.508,00	646.122.875.158,68



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2017 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan uraian sebagai berikut :

5.3.1 Aset

Rp34.193.587.532.658,30

(Dalam Rupiah)

ASET	Jumlah	2017	2016
		34.193.587.532.658,30	30.749.242.076.897,50
		34.193.587.532.658,30	30.749.242.076.897,50

Total Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp34.193.587.532.658,30 naik sebesar Rp3.444.345.455.760,89 atau 11,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp30.749.242.076.898,30. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1.1 Aset Lancar

Rp3.131.058.914.994,58

Aset lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.131.058.914.994,58 naik sebesar Rp714.551.022.537,28 atau 29,57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.416.456.950.855,73 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

ASET LANCAR	Jumlah	2017	2016
		3.131.058.914.994,58	2.416.507.892.457,30
		3.131.058.914.994,58	2.416.507.892.457,30

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rp1.163.279.517.548,72

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.163.279.517.548,72 naik sebesar Rp516.634.286.483,04 atau 79,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp646.645.231.065,68 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Sekolah dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

1. Kas di Rekening Kas Umum Daerah	2017	2016
	1.001.596.763.923,00	502.823.976.126,00



	2017	2016
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	51.864.956,00	5.219.569,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	2.627.762.536,90	3.552.954.854,68
4. Kas BLUD	120.568.201.006,82	139.742.024.751,00
5. Kas Sekolah	38.434.925.126,00	521.055.765,00
Jumlah	1.163.279.517.548,72	646.645.231.065,68

5.3.1.1.1.1 Kas dan Setara Kas di Rekening Kas Umum Daerah Rp1.001.596.763.923,00

Kas dan Setara Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.001.596.763.923,00 naik sebesar Rp498.772.787.797,00 atau 99,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp502.823.976.126,00. Saldo Kas Umum Daerah merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah pada PT. Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1.034.01504.7serta Deposito Daerah pada Bank Jateng, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BRI, dan Bank Muamalat yang merupakan bagian dari Silpa, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
Kas di Rekening Kas Umum Daerah (BUD)			
		541.596.800.829,00	477.823.976.126,00
Jumlah		541.596.800.829,00	477.823.976.126,00
Setara Kas			
		2017	2016
1	Bank Jateng	300.000.000.000,00	-
2	Bank BTN	100.000.000.000,00	-
3	Bank Mandiri	20.000.000.000,00	-
4	Bank Bukopin	5.000.000.000,00	-
5	Bank BRI	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6	Bank Muamalat	10.000.000.000,00	-
Jumlah		460.000.000.000,00	25.000.000.000,00

Kas di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.001.596.763.923,00 didalamnya termasuk sisa dana dari Dana Alokasi Khusus (Fisik) Tahun 2017 sebesar Rp20.281.635.750,00 dan Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) berupa Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp61.509.777.318,00 yang diatur secara khusus penggunaannya.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp51.864.956,00

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
Kas di Bendahara Pengeluaran – SiLPA		51.854.287,00	3.919.427,00
Kas di Bendahara Pengeluaran –Jasa Giro Belum diSetor		-	1.291.662,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran - utang jangka pendek lainnya		10.669,00	8480,00



Jumlah

51.864.956,00

5.219.569,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp51.864.956,00 naik sebesar Rp46.645.387,00 atau 893,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.219.569,00 merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a) Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.531.774,00	-
2 Dinas Kesehatan	-	48.150,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	18,00
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	430.000,00
5 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	36.072.936,00	-
6 Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000,00	24.456,00
7 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	800.000,00
8 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.100.000,00	-
9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	2.616.153,00
10 Inspektorat	2.449.174,00	-
11 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.667.403,00	-
12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	100,00
13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	50,00
14 Badan Koordinasi Penyuluh	-	500,00
Jumlah	51.854.287,00	3.919.427,00

Saldo Kas ini merupakan sisa kas uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA. Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah :

(Dalam Rupiah)

	2017	No STS	Tanggal Penyetoran	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.424,00	CBT/2018-01-02/1222850	02/01/2018	-
	6.000,00	099/KEU/SEK/IV/2018	30/04/2018	
	3.350.350,00	112/BPSB2D/III/2018	02/01/2018	
2 Dinas Kesehatan	-			48.150,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-			18,00
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			430.000,00
5 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	36.072.936,00	001/STS/2.10.01.07/12/2017	02/01/2018	-
6 Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000,00	02/PPP TWG/II/2018	28/02/2018	24.456,00
7 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-			800.000,00
8 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.100.000,00	001/GU/BPGDM-Nak/Ungaran	15/02/2018	-
9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-			2.616.153,00
10 Inspektorat	2.449.174,00	008798/STS/08-01-2018	08/01/2018	-
11 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.667.403,00	0003/KEU/III/2018	19/03/2018	-
12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-			100,00



13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	50,00
14	Badan Koordinasi Penyuluh	-	500,00
Jumlah		51.854.287,00	3.919.427,00

b) Kas di Bendahara Pengeluaran- Jasa giro yang belum disetor

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	-	806.590,00
2 Dinas Sosial	-	219.020,00
3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	187.750,00
4 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	19.276,00
5 Dinas Kehutanan	-	59.026,00
Jumlah	-	1.291.662,00

c) Kas di Bendahara Pengeluaran– Kewajiban pada Pihak Lain (Non Silpa)

Saldo Kas ini merupakan sisa kas pada bendahara pengeluaran yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak lain, sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	8.000,00
2 Badan Kepegawaian Daerah	-	480,00
3 Sekretariat Daerah	2.087,00	-
4 Dinas Pertanian	8.582,00	-
Jumlah	10.669,00	8.480,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp2.627.762.536,90

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.627.762.536,90 turun sebesar Rp925.192.317,78 atau 26,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.552.954.854,68 terdiri dari saldo kas pada bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp79.543.330,00 dan saldo kas pada bendahara penerimaan BLUD yang belum disetor ke bendahara BLUD sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp305.964.834,90 serta uang muka titipan pasien yang bukan merupakan bagian dari Silpa sebesar Rp2.242.254.372,00 yang masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

a) Kas di Bendahara Penerimaan- SKPD

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Kesehatan	2.683.459,00	1.716.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
		17.466.000,00	
		302.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.295.000,00	-
3	Dinas Perhubungan	4.000,00	290.000,00
		17.916.000,00	
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.000.000,00	-
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.846.871,00	-
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.730.000,00	-
		4.400.000,00	
7	Sekretariat DPRD	1.900.000,00	-
	Jumlah	79.543.330,00	2.006.000,00

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah :

(Dalam Rupiah)

		2017	No STS	Tanggal Penyetoran	2016
1	Dinas Kesehatan	2.683.459,00	005/Balkesmas/I/2018	05/01/2018	1.716.000,00
		17.466.000,00	03/STS/1.20.1.02.01.2/1/2018	03/01/2018	
		302.000,00	009/STS/1.20.1.02.01/01/2018	02/01/2018	
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.295.000,00	001/STS/LAB.OK/2018	03/01/2018	-
3	Dinas Perhubungan	4.000,00	0026/STS/2.06.01/BMS/2018	29/01/2018	290.000,00
		17.916.000,00	0001/STS/II.06.01/PKD-KC/I/2018		
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.000.000,00	000001/STS/1.18.01/01/2018	02/01/2018	-
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.846.871,00	1/DKP/III/2018	23/03/2018	-
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.730.000,00	51/PIKK/5/2018	07/05/2018	-
		4.400.000,00	52/PIKK/5/2018	07/05/2018	
7	Sekretariat DPRD	1.600.000,00	974/02/01/2018	02/01/2018	
		300.000,00	974/03/01/2018	02/01/2018	-
Jumlah		79.543.330,00			2.006.000,00

b) Kas di Bendahara Penerimaan- BLUD

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	157.151.895,00	943.337.552,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	2.368.954.899,68
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	10.662.920,00	21.685.641,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	54.158.500,00	165.045.550,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	62.127.194,90	34.548.814,00
6	RSJD Surakarta	13.197.378,00	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.666.947,00	17.376.398,00
Jumlah		305.964.834,90	3.550.948.854,68

c) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD – Uang Muka Titipan Pasien

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.190.483.322,00	-
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	822.101.933,00	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

3	RSUD Tugurejo Semarang	200.211.050,00	-
4	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	19.458.067,00	-
5	RSJD Surakarta	10.000.000,00	-
Jumlah		2.242.254.372,00	-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD sebesar Rp2.242.254.372,00 merupakan uang muka titipan pasien yang bukan merupakan bagian dari SiLPA.

5.3.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD Rp120.568.201.006,82

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp120.568.201.006,82 turun sebesar Rp19.173.823.744,18 atau 13,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp139.742.024.751,00 merupakan bagian dari SiLPA yang tidak disetor ke rekening kas daerah dan untuk operasional RSUD/RSJD dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Kas BLUD

	2017	2016
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	427.096.501,00	24.189.978.507,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	12.509.515.521,82	32.357.981.999,00
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	9.766.257.752,00	2.273.497.204,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	4.916.679.840,00	10.175.481.451,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	5.002.249.678,00	2.121.641.105,00
6 RSJD Surakarta	4.023.707.742,00	2.743.053.200,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.922.693.972,00	880.391.285,00
Jumlah	40.568.201.006,82	74.742.024.751,00

Saldo ini merupakan kas BLUD yang berada di bank dan tunai, merupakan bagian dari SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Kas BLUD

	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-	427.096.501,00	427.096.501,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	236.507.860,00	12.273.007.661,83	12.509.515.521,83
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	39.607,00	9.766.218.145,00	9.766.257.752,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	5.464.650,00	-	4.911.215.190,00	4.916.679.840,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	5.002.249.678,00	5.002.249.678,00
6 RSJD Surakarta	-	9.437.998,00	4.014.269.744,00	4.023.707.742,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	30.303.474,00	3.892.390.498,00	3.922.693.972,00
Jumlah	5.464.650,00	276.288.939,00	40.286.447.417,83	40.568.201.006,83

Setara Kas BLUD

	2017	2016
1 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	76.500.000.000,00	61.500.000.000,00
2 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00



3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah	80.000.000.000,00	65.000.000.000,00

Saldo Setara Kas BLUD sebesar Rp80.000.000.000,00 berada di :

SKPD	Bank	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	BNi	453300666	01/07/2016	6,75%	15.000.000.000
	BNi	453297347	01/07/2016	6,75%	6.500.000.000
	Bank Jateng	A135334	25/10/2016	6,25%	15.000.000.000
	Bank Jateng	A135524	20/03/2017	6,25%	20.000.000.000
	Bank Jateng	A135525	20/03/2017	6,25%	20.000.000.000
2 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	Mandiri	AD835853	11/09/2015	4,25%	500.000.000
	BTN	A1561366	10/04/2015	7%	500.000.000
3 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank Jateng	158560	05/02/2015	9%	2.500.000.000
	Jumlah				80.000.000.000

5.3.1.1.1.5 Kas Di Bendahara Sekolah Rp38.434.925.126,00

Saldo Kas di Bendahara Sekolah per 31 Desember 2017 sebesar Rp38.434.925.126,00 merupakan kas yang berada di SMA, SMK, dan SLB Negeri di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	SEKOLAH	Jumlah
1	SMA	14.404.707.725,00
2	SMK	210.352.895.868,00
3	SLB	3.531.035.293,00
	JUMLAH	501.941.673.434,00

Saldo Kas di Bendahara Sekolah sebesar Rp38.434.925.126,00 didalamnya tidak termasuk sisa kas dana Peran Serta Masyarakat, dana pemberian langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dana lainnya yang ada direkening sekolah.

5.3.1.1.2 Piutang Rp1.744.590.456.608,65

Saldo Piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.744.590.456.608,65 naik sebesar Rp191.978.278.213,65 atau 12,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.552.612.178.395,01. Saldo piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat



direalisasikan, sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang untuk memperhitungkan potensi piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan diharapkan lebih mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam rupiah)	
		2017	2016
1	Piutang Pajak	2.077.339.542.094,11	1.999.884.396.055,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(542.270.038.419,72)	(542.332.209.683,49)
	Piutang Pajak Netto	1.535.069.503.674,39	1.457.552.186.371,51
		2017	2016
2	Piutang Retribusi	2.799.924.395,00	3.465.207.857,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(60.603.573,98)	(60.886.038,84)
	Piutang Retribusi Netto	2.739.320.821,03	3.404.321.818,17
		2017	2016
3	Piutang Lainnya	222.822.907.408,96	105.534.732.168,64
	Penyisihan Piutang Lainnya	(16.041.275.295,73)	(13.879.061.963,31)
	Piutang Lainnya Netto	206.781.632.113,23	91.655.670.205,33

Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya piutang atas sisa pengembalian uang muka penghentian dan pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua Permai (berdasarkan SPK Nomor 027.2/GDG-IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015) atas pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp1.962.929.100,00. Penghentian pekerjaan tersebut dilakukan karena hingga tanggal 23 Desember 2015 PT. Sinar Intan Papua Permai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan progres yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2015.

Atas permasalahan tersebut, RSUD Tugurejo sudah menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Tengah untuk mengupayakan pengembalian sisa jaminan uang muka ke Kas Daerah dengan tindakan sebagai berikut:

- Surat Tagihan kepada PT Asuransi Recapital sebanyak 7 (tujuh) kali
- Surat Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 5 (lima) kali
- Pertemuan mediasi di OJK Perwakilan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 dan 2 Februari 2017.



Gugatan atas putus kontrak yang diajukan oleh PT Sinar Intan Papua Permai (SIPP) telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65.PK/TUN/2017 tanggal 8 Juni 2017 dan Nomor 159.PK/TUN/2017 tanggal 2 November 2017. Implikasi dari penolakan gugatan atas putus kontrak ini mengharuskan PT Asuransi Recapital selaku penjamin uang muka pekerjaan untuk mengembalikan uang muka. Namun, sampai saat ini PT Asuransi Recapital belum mencairkan sisa jaminan uang muka dimaksud.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak

Rp2.077.339.542.094,11

Piutang pajak timbul akibat adanya Pendapatan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak terdiri dari PKB, PBBKB, BBNKB, APT dan Pajak Rokok yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.077.339.542.094,11 naik sebesar Rp77.455.143.039,11 atau 3,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.999.884.396.055,00 dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Pajak PKB	2.076.161.368.392,11	1.999.884.396.055,00
2	Pajak PBBKB	-	-
3	Pajak BBNKB	-	-
4	Pajak APT	1.178.173.702,00	-
5	Pajak Rokok	-	-
Jumlah		2.077.339.542.094,11	1.999.884.396.055,00

Mutasi Piutang PKB selama tahun 2017

		(Dalam Rupiah)
A. Saldo Awal Piutang Per 1 Januari 2017		1.999.884.396.055,00
1 Penetapan PKB Tahun 2017		
a	Berdasarkan potensi obyek 2017	3.682.978.169.225,00
b	Atas transaksi BBN I	368.572.116.075,00
c	Atas transaksi BBN II Luar Provinsi	137.013.764.900,00
d	Atas potensi obyek dengan masa pajak 2018 (dibayar 2017)	26.552.221.500,00
Total Penetapan PKB Tahun 2017		4.215.116.271.700,00
2 Pembayaran		
a	Atas penetapan tahun berjalan	3.079.993.905.275,00
b	Atas piutang tahun lalu	233.980.933.750,00
c	Atas potensi 2018 (dibayar di muka)	26.552.221.500,00
d	Atas transaksi BBN I	368.572.116.075,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

e	Atas transaksi BBN II Luar Provinsi	137.013.764.900,00
	Total Pembayaran di Tahun 2017	3.846.112.941.500,00
3	Potensi PKB yang tidak melakukan PU pada Tahun 2017	602.984.263.950,00
4	Koreksi	
a	Pengurangan atas potensi hilang hak tagih tahun 2017	244.616.897.917
	Total Koreksi	360.578.245.930,00
5	Penghapusan Piutang PKB	48.109.459.946,00
B. Saldo Tunggakan PKB per 31 Desember 2017		2.076.161.368.392,36 (Dalam Rupiah)

Periode Tahun	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
sd 2011	114.429.364.440,63		114.429.364.440,63	(0,00)
2012	171.101.935.093,26		171.101.935.093,00	0,26
2013	239.090.912.705,29		7.370.293.621,00	231.720.619.084,29
2014	344.298.123.192,68		19.139.835.475,00	325.158.287.717,68
2015	473.710.941.517,14		50.761.058.851,00	422.949.882.666,14
2016	657.253.119.106,00		163.904.804.132,00	493.348.314.974,00
2017	-	602.984.263.950,00		602.984.263.950,00
Jumlah	1.999.884.396.055,00	602.984.263.950,00	526.707.291.612,63	2.076.161.368.392,36

Mutasi Piutang PBBKB selama tahun 2017:

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1. BPPD	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Mutasi Piutang BBNKB selama tahun 2017:

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1. BPPD	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Mutasi Piutang APT selama tahun 2017 :

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1. BPPD	0,00	1.178.173.702,00	0,00	1.178.173.702,00
Jumlah	0,00	1.178.173.702,00	0,00	1.178.173.702,00



Mutasi Piutang Pajak Rokok selama tahun 2017 :

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1 BPPD	-	-	-	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.3.2 Penyisihan Piutang Pajak (Rp542.270.038.419,72)

Penyisihan piutang atas pajak per 31 Desember 2017 sebesar (Rp542.270.038.419,72) turun sebesar (Rp62.171.263,76) atau 0,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar (Rp542.332.209.683,48) dengan rincian sebagai berikut :

a) Piutang Tak Tertagih-PKB

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	602.984.263.950,00	(3.014.921.319,75)	657.253.119.106,00	(3.286.265.595,53)
- menunggak 1-2 tahun	493.348.314.974,00	(49.334.831.497,40)	473.710.941.517,14	(47.371.094.151,71)
- menunggak 2-5 tahun	979.828.789.468,11	(489.914.394.734,06)	754.490.970.991,23	(377.245.485.495,61)
- menunggak lebih dari 5 tahun		-	114.429.364.440,63	(114.429.364.440,63)
Jumlah	2.076.161.368.392,11	(542.264.147.551,21)	1.999.884.396.055,00	(542.332.209.683,48)

b) Piutang Tak Tertagih – BBNKB

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	-	-	-	-
- menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

c) Piutang Tak Tertagih PBBKB

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	-	-	-	-
- menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-



d) Piutang Tak Tertagih APT

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	1.178.173.702,00	(5.890.868,51)	-	-
- menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
Jumlah	1.178.173.702,00	(5.890.868,51)	-	-

e) Piutang Tak Tertagih Pajak Rokok

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	-	-	-	-
- menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.3.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Rp2.799.924.395,00

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Askesdan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.799.924.395,00 turun sebesar Rp665.283.462,00 atau 19,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.465.207.857,00 dengan rincian saldo sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)	2.629.419.795,00	3.181.615.757,00
2 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	-
3 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	170.504.600,00	283.592.100,00
Jumlah	2.799.924.395,00	3.465.207.857,00

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Asuransi Kesehatan

Saldo sebesar Rp2.629.419.795,00 merupakan hak atas klaim jaminan kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima oleh Balai Kesehatan sedangkan Piutang Askes rumah sakit direklasifikasi ke Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)



	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1 Dinas Kesehatan	3.181.615.757,00	2.629.419.795,00	3.181.615.757,00	2.629.419.795,00
Jumlah	3.181.615.757,00	2.629.419.795,00	3.181.615.757,00	2.629.419.795,00

**b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Jasa Usaha
Rp75.154.600,00**

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp75.154.600,00 merupakan pendapatan retribusi sewa ruang Asrama Haji Donohudan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan dan retribusi sewa kios pada Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	32.041.600,00	-	32.041.600,00	-
2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	32.041.600,00	-	32.041.600,00
3 Dinas Perhubungan	-	43.113.000,00	-	43.113.000,00
Jumlah	32.041.600,00	75.154.600,00	32.041.600,00	75.154.600,00

**c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rp0,00**

Saldo sebesar Rp0,00 merupakan saldo akhir Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dilunasi pada periode tahun anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	163.550.500,00		163.550.500,00	-
Jumlah	163.550.500,00	0,00	163.550.500,00	0,00

**d) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa UMKM Center
Rp88.000.000,00**

Saldo sebesar Rp88.000.000,00 merupakan pendapatan sewa ruangan UMKM Center pada Dinas Koperasi dan UMKM yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1 Dinas Koperasi dan UMKM	88.000.000,00	-	-	88.000.000,00
Jumlah	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00

**e) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Ruangan
Rp7.350.000,00**

Saldo sebesar Rp7.350.000,00 merupakan pendapatan sewa ruangan kantor pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan, dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2016	Mutasi		2017
		Penambahan	Pengurangan	
1 Satpol PP	-	7.350.000,00	-	7.350.000,00
Jumlah	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00

5.3.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi (Rp60.603.573,98)

Penyisihan piutang atas retribusi per 31 Desember 2017 sebesar (Rp60.603.573,98) mengalami penurunan sebesar (Rp282.464,86) atau 0,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar (Rp60.886.039,29) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Piutang Retribusi-Askes	(13.147.098,98)	(15.908.078,79)
2 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah	(3.419.725,00)	(160.208,00)
3 Piutang Hiperkes	-	(817.752,05)
4 Piutang Retribusi Sewa UMKM Center	(44.000.000,00)	(44.000.000,00)
5 Piutang Sewa Ruangan Satpol PP	(36.750,00)	-
	(60.603.573,98)	(60.886.038,84)

a) Piutang Retribusi Askes

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Dinas Kesehatan				
- lancar	2.629.419.795,00	(13.147.098,98)	3.181.615.757,00	(15.908.078,79)
Jumlah	2.629.419.795,00	(13.147.098,98)	3.181.615.757,00	(15.908.078,79)



b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Jasa Usaha

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
- lancar	-	-	163.550.500,00	(817.752,50)
Jumlah	-	-	163.550.500,00	(817.752,50)

c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-		
- Lancar			32.041.600,00	(160.208,00)
- menunggak 1-2 tahun	32.041.600,00	(3.204.160,00)	-	-
2 Dinas Perhubungan				
- Lancar	43.113.000,00	(2.155.565,00)		
Jumlah	32.041.600,00	(5.359.725,00)	32.041.600,00	(160.208,00)

d) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa UMKM Center

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Dinas Koperasi dan UMKM				
- menunggak 1-2 tahun	-	-	-	-
- menunggak 2-5 tahun	88.000.000,00	(44.000.000,00)	88.000.000,00	(44.000.000,00)
Jumlah	88.000.000,00	(44.000.000,00)	88.000.000,00	(44.000.000,00)

e) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Ruangan

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Satuan Polisi Pamong Praja				
- Lancar	7.350.000,00	(36.750,00)		
Jumlah	7.350.000,00	(36.750,00)	0,00	0,00

5.3.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Rp222.822.907.408,96



Piutang lainnya timbul akibat adanya Pendapatan lainnya yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Lainnya terdiri dari Piutang Pasien dan Askes rumah sakit, piutang denda retribusi terminal, dana talangan, pemanfaatan GOR Jatidiri, hasil penjualan aset, sewa, Tuntutan Ganti Rugi, TPI, Bunga Deposito, piutang lain-lain pada Rumah Sakit dan Piutang Ketep Pass yang dikelola SKPD. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp222.822.907.408,96 naik sebesar Rp117.228.175.240,33 atau 111.14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp105.534.732.168,64 terdiri dari:

a) Piutang Pasien

Saldo sebesar Rp16.672.814.328,38 merupakan hak dari retribusi pasien yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima oleh rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2016	Koreksi	Mutasi		2017
			Penambahan	Pengurangan	
1 RSUD Moewardi Surakarta	5,772,929,571.00		3,181,218,933.00	1,541,493,010.00	7,412,655,494.00
2 RSUD Margono Sekarjo	5,452,386,981.91	(150,300.00)	3,539,967,496.00	3,346,600,766.00	5,645,603,411.91
3 RSUD Amino Gondohutomo	698,274,494.00		73,628,266.00	3,558,206.00	768,344,554.00
4 RSUD Tugurejo	1,549,372,536.00		329,726,700.00	50,228,290.40	1,828,870,945.60
5 RSJD Soedjarwadi	183,189,666.00		9,986,722.00	3,228,500.00	189,947,888.00
6 RSUD Kelet/Donorejo	84,460,891.00		272,131.99	111,352.12	84,621,670.87
7 RSJD Surakarta	717,195,984.00	2,650,000.00	30,934,819.00	8,010,439.00	742,770,364.00
Jumlah	14,457,810,123.91	2,499,700.00	7,165,735,067.99	4,953,230,563.52	16,672,814,328.38

b) Piutang Askes- Rumah Sakit

Saldo sebesar Rp197.716.268.277,50 merupakan hak atas klaim jaminan kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima oleh Balai Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2016	Koreksi	Mutasi		2017
			Penambahan	Pengurangan	
1 RSUD Moewardi Surakarta	22,802,574,041.00		306,271,070,001.00	254,154,649,869.00	74,918,994,173.00
2 RSUD Margono Sekarjo	22,373,860,341.25	(151,588.00)	267,631,549,113.00	260,398,674,021.75	29,606,583,844.50
3 RSUD Amino Gondohutomo	2,980,749,202.00	2,753,766,022.00	28,995,576,202.00	33,875,419,548.00	854,671,878.00
4 RSUD Tugurejo	23,865,131,168.00		33,132,768,154.00	23,018,191,716.00	33,979,707,606.00
5 RSJD Soedjarwadi	6,293,412,672.00	(447,100.00)	5,815,187,721.00	6,160,771,872.00	5,947,381,421.00



6	RSUD Kelet/Donorejo	3,688,242,649.00		4,621,181,554.00	3,688,242,649.00	4,621,181,554.00
7	RSJD Surakarta	2,987,183,672.00		3,994,614,001.00	2,987,183,672.00	3,994,614,001.00
	Jumlah	84,991,153,745.25	2,753,167,334.00	650,461,946,746.00	584,283,133,347.75	53,923,134,477.50

c) Piutang Denda Retribusi Terminal

Saldo sebesar Rp873.560,00 merupakan piutang per 31 Desember 2017 atas denda retribusi sewa kios dan lahan Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Dinas Perhubungan	873.560,00	-
	Jumlah	873.560,00	-

d) Piutang Gor Jatidiri

Saldosebesar Rp370.051.571,00merupakan piutang per 31 Desember 2017 atas pendapatan hasil kerjasama Pemanfaatan Aset GOR Jatidiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6/11936//059/V/PM/2010 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Puramas Mahardhika tanggal 29 Mei 2010, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	370.051.571,00	370.051.571,00
	Jumlah	370.051.571,00	370.051.571,00

e) Piutang Dana Talangan

Saldo sebesarRp397.909.092,00merupakan hak atasdana talangan yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Kabupaten Cilacap	397.909.092,00	400.636.365,00
	Jumlah	397.909.092,00	400.636.365,00



f) Piutang Hasil Penjualan Aset

Saldo sebesar Rp0,00 merupakan piutang per 31 Desember 2017 atas penjualan aset tahun 2016 yang sudah dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	4.251.000,00
	Jumlah	-	4.251.000,00

g) Piutang Tempat Pelelangan Ikan

Rp4.182.248.718,00

Saldo sebesar Rp4.182.248.718,00 turun sebesar Rp3.000.000,- atau 0,07% dari saldo tahun 2016 sebesar Rp4.185.248.718,00 merupakan hak atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2009 dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sejak 1 Januari 2010 kewenangan pengelolaan TPI telah diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.182.248.718,00	4.185.248.718,00
	Jumlah	4.182.248.718,00	4.185.248.718,00

h) Piutang Bunga Deposito

Saldo sebesar Rp1.939.719.178,08 merupakan hak atas bunga deposito bank yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2017.

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	SKPKD	1.730.856.164,38	28.561.643,84
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	196.780.821,92	146.678.082,19
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	3.178.082,19	3.178.082,19
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.904.109,59	16.027.397,26
	Jumlah	1.939.719.178,08	194.445.205,48

i) Piutang Ketep Pass

Saldo sebesar Rp1.197.321.036,00 merupakan hak dari bagi hasil pengelolaan obyek wisata Ketep Pass sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa



Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2006 dan 02/PERJ/II/2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2017.

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	SKPKD	1.197.321.036,00	755.070.643,00
Jumlah		1.197.321.036,00	755.070.643,00

j) Piutang lain-lain rumah sakit

Saldo sebesar Rp345.701.648,00 merupakan piutang Instansi Penerima Wajib Laport, AMU dan sewa lahan pada rumah sakit yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2017.

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	RSUD Kelet	104.670.494,00	45.775.000,00
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL)	59.781.154,00	69.039.797,00
3	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan)	163.250.000,00	61.250.000,00
4	RSUD Dr Margono (sewa)	18.000.000,00	-
Jumlah		345.701.648,00	176.064.797,00

5.3.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lain-Lain (Rp16.041.275.295,73)

Penyisihan piutang lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar (Rp16.041.275.295,73) naik sebesar (Rp2.162.213.332,42) atau 15,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar (Rp13.879.061.963,31) dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Piutang Retribusi-Pasien	8.944.507.457,48	7.370.182.188,47
2	Piutang Retribusi-Askes	2.123.388.130,14	1.545.351.212,61
3	Piutang GOR Jatidiri	370.051.571,00	370.051.571,00
4	Piutang Dana Talangan	397.909.092,00	400.636.365,00
5	Piutang Sewa pada Rumah Sakit	-	-
6	Piutang Hasil Penjualan Aset	-	21.255,00
7	Piutang TPTGR	-	-
8	Piutang Bunga Deposito	9.698.595,89	972.226,03
9	Piutang Ketep Pass	5.986.605,18	3.775.353,22
10	Piutang Denda Retribusi Terminal	4.367,80	-
11	Piutang TPI	4.182.248.718,00	4.185.248.718,00
12	Piutang Lain-lain pada Rumah Sakit	7.480.758,24	2.823.073,99
Jumlah		16.041.275.295,73	13.879.061.963,31



a) Piutang Pasien

(Dalam Rupiah)

		2017		2016	
		Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1	RSUD Moewardi Surakarta				
	- lancar	2.436.801.578,00	(12.184.007,89)	1.988.968.201,00	(9.944.841,01)
	- menunggak 1-2 tahun	2.053.179.885,00	(205.317.988,50)	1.347.024.148,00	(134.702.414,80)
	- menunggak 2-5 tahun	634.512.109,00	(317.256.054,50)	1.390.495.733,00	(695.247.866,50)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	2.288.161.922,00	(2.288.161.922,00)	1.046.441.489,00	(1.046.441.489,00)
2	RSUD Margono Sekarjo				
	- lancar	459.792.921,00	(2.298.964,61)	745.572.488,00	(3.727.862,44)
	- menunggak 1-2 tahun	505.585.042,00	(50.558.504,20)	439.160.142,91	(43.916.014,29)
	- menunggak 2-5 tahun	1.342.543.168,91	(671.271.584,45)	1.531.479.576,00	(765.739.788,00)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	3.337.682.280,00	(3.337.682.280,00)	2.736.174.775,00	(2.736.174.775,00)
3	RSUD Amino Gondohutomo				
	- lancar	70.375.916,00	(351.879,58)	43.443.069,00	(217.215,35)
	- menunggak 1-2 tahun	158.836.801,00	(15.883.680,10)	166.047.842,00	(16.604.784,20)
	- menunggak 2-5 tahun	200.188.533,00	(100.094.266,50)	201.721.664,00	(100.860.832,00)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	338.943.304,00	(338.943.304,00)	287.061.919,00	(287.061.919,00)
4	RSUD Tugurejo				
	- lancar	329.726.700,00	(1.648.633,50)	356.998.470,00	(1.784.992,35)
	- menunggak 1-2 tahun	539.645.980,00	(53.964.598,00)	217.806.550,00	(21.780.655,00)
	- menunggak 2-5 tahun	478.308.145,00	(239.154.072,50)	493.377.395,00	(246.688.697,50)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	481.190.120,60	(481.190.120,60)	481.190.120,60	(481.190.120,60)
5	RSJD Soedjarwadi				
	- lancar	9.986.722,00	(49.933,61)	18.308.936,00	(91.544,68)
	- menunggak 1-2 tahun	18.308.936,00	(1.830.893,60)	11.917.400,00	(1.191.740,00)
	- menunggak 2-5 tahun	41.438.500,00	(20.719.250,00)	37.927.000,00	(18.963.500,00)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	120.213.730,00	(120.213.730,00)	115.036.330,00	(115.036.330,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo				
	- lancar	272.131,99	(1.360,66)	4.442.549,00	(22.212,75)
	- menunggak 1-2 tahun	4.331.196,88	(433.119,69)	14.486.591,00	(1.448.659,10)
	- menunggak 2-5 tahun	36.266.042,00	(18.133.021,00)	21.779.451,00	(10.889.725,50)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	43.752.300,00	(43.752.300,00)	43.752.300,00	(43.752.300,00)
7	RSJD Surakarta				
	- lancar	30.934.819,00	(154.674,10)	35.962.623,00	(179.813,12)
	- menunggak 1-2 tahun	34.195.084,00	(3.419.508,40)	40.086.978,00	(4.008.697,80)
	- menunggak 2-5 tahun	115.605.311,00	(57.802.655,50)	117.265.969,00	(58.632.984,50)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	562.035.150,00	(562.035.150,00)	523.880.414,00	(523.880.414,00)
Jumlah		16.672.814.328,38	(8.944.507.457,48)	14.457.810.123,51	(7.370.182.188,47)



b) Piutang ASKES

(Dalam Rupiah)

		2017		2016	
		Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1	RSUD Moewardi Surakarta				
	- lancar	74.918.163.756,00	(374.590.818,78)	22.801.743.624,00	(114.008.718,12)
	- menunggak 1-2 tahun		-	830.417,00	(83.041,70)
	- menunggak 2-5 tahun	830.417,00	(415.208,50)		
2	RSUD Margono Sekarjo				
	- lancar	28.622.559.272,75	(143.112.796,36)	21.451.910.659,75	(107.259.553,30)
	- menunggak 1-2 tahun	62.074.890,25	(6.207.489,03)	1.370.059,00	(137.005,90)
	- menunggak 2-5 tahun	902.418.801,50	(451.209.400,75)	901.048.742,50	(450.524.371,25)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	19.530.880,00	(19.530.880,00)	19.530.880,00	(19.530.880,00)
3	RSUD Amino Gondohutomo				
	- lancar	467.925.974,00	(2.339.629,87)	2.594.003.298,00	(12.970.016,49)
	- menunggak 1-2 tahun	14.190.949,00	(1.419.094,90)	16.500.489,00	(1.650.048,90)
	- menunggak 2-5 tahun	90.659.439,00	(45.329.719,50)	370.245.415,00	(185.122.707,50)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	281.895.516,00	(140.947.758,00)		
4	RSUD Tugurejo				
	- lancar	33.132.768.154,00	(165.663.840,77)	23.146.897.337,00	(115.734.486,69)
	- menunggak 1-2 tahun	282.759.253,00	(28.275.925,30)	146.766.488,00	(14.676.648,80)
	- menunggak 2-5 tahun	486.297.832,00	(243.148.916,00)	488.381.071,00	(244.190.535,50)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	77.882.367,00	(77.882.367,00)	83.086.272,00	(83.086.272,00)
5	RSJD Soedjarwadi				
	- lancar	5.815.187.721,00	(29.075.938,61)	6.161.218.972,00	(30.806.094,86)
	- menunggak lebih dari 5 tahun	132.193.700,00	(132.193.700,00)	132.193.700,00	(132.193.700,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo				
	- lancar	4.621.181.554,00	(23.105.907,77)	3.688.242.649,00	(18.441.213,25)
7	RSJD Surakarta				
	- lancar	3.994.614.001,00	(19.973.070,01)	2.987.183.672,00	(14.935.918,36)
Jumlah		153.923.134.477,50	(1.904.422.461,14)	84.991.153.745,25	(1.545.351.212,61)

c) Piutang Pendapatan Pemanfaatan GOR Jatidiri

(Dalam Rupiah)

		2017		2016	
		Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					
	- menunggak 2-3 tahun	-	-	-	-
	- menunggak 3-5 tahun	-	-	-	-
	- menunggak 5 tahun	370.051.571,00	(370.051.571,00)	370.051.571,00	(370.051.571,00)
Jumlah		370.051.571,00	(370.051.571,00)	370.051.571,00	(370.051.571,00)



d) Piutang Dana Talangan

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
Sekretariat Daerah				
- menunggak 3-5 tahun	-	-	-	-
- menunggak lebih dari 5 tahun	397.909.092,00	(397.909.092,00)	400.636.365,00	(400.636.365,00)
Jumlah	397.909.092,00	(397.909.092,00)	400.636.365,00	(400.636.365,00)

e) Piutang Hasil Penjualan Aset

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	4.251.000,00	(21.255,00)
Jumlah	0,00	0,00	4.251.000,00	(21.255,00)

f) Piutang TPI

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Dinas Kelautan dan Perikanan				
- menunggak 3-5 tahun	-	-	-	-
- menunggak lebih dari 5 tahun	4.182.248.718,00	(4.182.248.718,00)	4.185.248.718,00	(4.185.248.718,00)
Jumlah	4.182.248.718,00	(4.182.248.718,00)	4.185.248.718,00	(4.185.248.718,00)

g) Piutang Bunga Deposito

(Dalam Rupiah)

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1 Tugurejo				
2 SKPKD	1.730.856.164,38	(8.654.280,82)	28.561.643,84	(142.808,22)
3 Margono	196.780.821,92	(983.904,11)	146.678.082,19	(733.390,41)
4 Amino	3.178.082,19	(15.890,41)	3.178.082,19	(15.890,41)
5 Soedjarwadi	8.904.109,59	(44.520,55)	16.027.397,26	(80.136,99)
Jumlah	1.939.719.178,08	(9.698.595,89)	194.445.205,48	(972.226,03)



h) Piutang Ketep Pass

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	SKPKD	1.197.321.036,00	(5.986.605,18)
	Jumlah	1.197.321.036,00	(5.986.605,18)

i) Piutang Lain-lain Rumah Sakit

(Dalam Rupiah)

		2017		2016	
		Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
1.	RSUD Kelet (Lahan)				
	- lancar	70.370.494,00	(351.852,47)	25.325.000,00	(126.625,00)
	- menunggak 1-2 tahun	34.300.000,00	(3.430.000,00)	20.450.000,00	(2.045.000,00)
2.	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruang)				
	- lancar	137.000.000,00	(685.000,00)	61.250.000,00	(306.250,00)
	- menunggak 1-2 tahun	26.250.000,00	(2.625.000)		-
3.	RSUD Dr Margono (Sewa)				
	- lancar	18.000.000,00	(90.000)		-
	- menunggak 1-2 tahun		-		-
4.	RSJD Soedjarwadi (ipwl)				
	- lancar	59.781.154,00	(298.905,77)	69.039.797,00	(345.198,99)
	Jumlah	345.701.648,00	(7.480.758,24)	176.064.797,00	(2.823.073,99)

j) Piutang Denda Retribusi Terminal

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	Dinas Perhubungan	873.560,00	(4.367,80)
	Jumlah	873.560,00	(4.367,80)

5.3.1.1.4. Belanja dibayar dimuka

Rp4.330.424.760,08

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	168.903.117,00	-
2	Dinas Kesehatan	433.581.800,00	305.499.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	569.104.001,67	494.732.786,67
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	387.558.833,33	350.009.083,33
5	RSUD Tugurejo Semarang	61.196.750,00	55.050.828,33
6	RSJD Surakarta	-	86.039.891,67
7	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	90.504.000,00	82.600.283,33



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
8	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	70.721.667,00	49.780.833,33
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	60.592.000,00	54.821.000,00
10	Dinas Perhubungan	202.537.630,67	160.498.398,33
11	Satuan Polisi Pamong Praja	41.776.000,00	42.736.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.316.266,67	13.295.333,33
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	121.938.916,58	153.452.325,50
14	Dinas Sosial	26.956.416,67	18.126.166,67
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.205.937,00	56.619.790,42
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.617.500,00	32.243.688,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	22.267.000,00	37.294.583,33
18	Dinas Ketahanan Pangan	60.406.250,00	63.510.696,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.155.000,00	44.573.250,00
20	Dinas Koperasi dan UKM	46.452.087,33	51.914.666,85
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	51.030.666,70
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	159.833.332,00	62.143.333,33
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.397.583,33	10.971.833,35
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	208.931.688,33	80.027.500,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	52.631.360,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	106.685.733,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	146.482.910,83	136.556.245,00
28	Sekretariat Daerah	318.089.250,00	320.290.245,83
29	Sekretariat DPRD	319.628.653,00	384.931.207,17
30	Inspektorat	78.648.542,00	82.457.868,33
31	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	450.210.742,00	424.177.587,50
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.818.799,00	
33	Badan Penghubung	83.592.085,67	67.243.260,25
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	31.949.750,00
35	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	24.750.000,00
36	Badan Koordinasi Wilayah III	-	42.340.000,00
37	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	8.255.525,00
38	Dinas Perkebunan	-	45.180.166,67
	Jumlah	4.330.424.760,08	4.084.420.887,23

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.330.424.760,08 naik sebesar Rp246.003.872,85 atau 6,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.084.420.887,23 merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2018 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa belanja Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS dan Belanja Sewa dengan masa pertanggungan berlaku sampai Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	BMD 2017	NON PNS 2017	BARJAS	TOTAL 2017
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	168.903.117,00			168.903.117,00
Dinas Kesehatan	433.581.800,00			433.581.800,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	BMD 2017	NON PNS 2017	BARJAS	TOTAL 2017
RSUD Dr. Moewardi Surakarta	266.237.958,75		302.866.042,92	569.104.001,67
RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	266.153.500,00	121.405.333,33		387.558.833,33
RSUD Tugurejo Semarang	61.196.750,00			61.196.750,00
RSJD Surakarta				-
RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	90.504.000,00			90.504.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	70.721.667,00			70.721.667,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	60.592.000,00			60.592.000,00
Dinas Perhubungan	202.537.630,67			202.537.630,67
Satuan Polisi Pamong Praja	41.776.000,00			41.776.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.316.266,67			13.316.266,67
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	121.938.916,58			121.938.916,58
Dinas Sosial	26.956.416,67			26.956.416,67
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.205.937,00			49.205.937,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.617.500,00			41.617.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	22.267.000,00			22.267.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	60.406.250,00			60.406.250,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.155.000,00			76.155.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	46.452.087,33			46.452.087,33
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-			-
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	159.833.332,00			159.833.332,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.397.583,33			10.397.583,33
Dinas Pertanian dan Perkebunan	208.931.688,33			208.931.688,33
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-			-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-			-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	146.482.910,83			146.482.910,83
Sekretariat Daerah	318.089.250,00			318.089.250,00
Sekretariat DPRD	319.628.653,00			319.628.653,00
Inspektorat	78.648.542,00			78.648.542,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	450.210.742,00			450.210.742,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.818.799,00			9.818.799,00
Badan Penghubung	83.592.085,67			83.592.085,67
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-			-
Badan Penelitian dan Pengembangan	-			-
Badan Koordinasi Wilayah III	-			-
Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-			-
Dinas Perkebunan	-			-
Jumlah	3.906.153.383,83	121.405.333,33	302.866.042,92	4.330.424.760,08

5.3.1.1.5. Persediaan

Rp218.858.516.077,14

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional serta barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari bahan habis pakai, bahan material, cetak, pakaian dinas, makanan dan minuman serta hibah barang yang belum dapat disalurkan kepada masyarakat Berdasarkan hasil stock opnameper 31 Desember 2017saldo persediaan sebesar Rp218.858.516.077,14naik sebesar Rp5.692.453.967,75 atau 2,67%



dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp213.166.062.109,39 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	19.400.806.089,67	17.537.177.408,87
2	Persediaan Bahan/Material	180.041.069.466,59	177.559.758.333,72
3	Persediaan Cetak	13.723.681.003,85	9.611.742.076,87
4	Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	30.866.000,00	79.082.600,00
5	Persediaan Makanan dan Minuman	1.321.693.793,03	1.234.811.896,93
6	Persediaan Hibah	4.340.399.724,00	7.143.489.793,00
Jumlah		218.858.516.077,14	213.166.062.109,39

5.3.1.1.4.1 Persediaan Bahan Habis Pakai

Rp19.400.806.089,67

Saldo sebesar Rp19.400.806.089,67 merupakan persediaan bahan habis pakai antara lain berupa alat tulis kantor, alat listrik, peranko, materai dan peralatan kebersihan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	395.873.100,00	196.214.700,00
2	Dinas Kesehatan	5.298.803.970,00	4.672.352.966,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	186.689.615,00	228.349.871,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	6.005.768.746,20	3.609.802.608,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.053.310.235,00	188.190.709,77
6	RSUD Tugurejo Semarang	3.016.321.727,54	993.249.199,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	129.904.135,93	3.840.295.442,00
8	RSJD Surakarta	105.255.980,00	23.537.250,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	199.470.426,00	252.966.145,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	57.350.330,00	38.301.513,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	52.217.250,00	48.440.860,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.491.200,00	5.940.700,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	22.910.615,00	16.510.900,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.037.600,00	12.693.850,00
15	Dinas Sosial	355.000,00	4.803.500,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.711.235,00	3.487.910,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.761.081,00	16.872.650,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	871.000,00	1.017.700,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.038.500,00	5.408.100,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.235.000,00	2.692.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	12.493.000,00	7.696.500,00
22	Dinas Perhubungan	73.094.750,00	99.481.450,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	8.385.100,00	16.573.656,00
24	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.454.000,00	-
25	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	28.444.200,00	1.165.700,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.861.400,00	9.734.900,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	62.272.650,00	542.742.300,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.870.200,00	23.451.080,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	51.471.180,00	50.344.220,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23.245.000,00	26.442.000,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.386.530,00	252.816.944,77
32	Sekretariat Daerah	42.787.915,00	805.200,00
33	Sekretariat DPRD	25.989.280,00	13.666.870,00
34	Inspektorat	609.500,00	311.000,00
35	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	42.948.765,00	13.365.020,00
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.054.299.638,00	1.763.634.166,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	140.937.775,00	367.746.750,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	125.842.710,00	124.984.350,00
39	Badan Penghubung	2.517.000,00	4.349.900,00
40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	820.000,00
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	194.800,00
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.518.750,00	-
43	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
44	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	1.356.000,00
45	Dinas Perkebunan	-	51.144.100,00
46	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-
47	Dinas Kehutanan	-	3.221.928,33
Jumlah		19.400.806.089,67	17.537.177.408,87

5.3.1.1.4.2 Persediaan Bahan/Material

Rp180.041.069.466,59

Saldo sebesar Rp180.041.069.466,59 merupakan persediaan bahan/material antara lain berupa bahan baku bangunan, bibit tanaman dan ternak, bahan obat-obatan, kimia dan laboratorium pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-
2	Dinas Kesehatan	105.936.360.893,00	87.057.502.871,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	30.249.083.286,97	44.400.773.813,39
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	21.850.751.252,62	22.912.660.782,34
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.919.981.630,00	1.974.088.971,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	2.519.442.016,54	3.363.223.180,57
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.357.509.772,46	4.857.272.201,00
8	RSJD Surakarta	39.632.500,00	2.081.844.714,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.441.332.706,00	3.312.901.083,72
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.382.681.713,00	1.270.088.140,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	879.345.879,00	519.896.850,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	1.205.000,00	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.698.000,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	490.703.492,00	359.460.238,69
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
21	Dinas Ketahanan Pangan	762.524.235,00	584.937.548,00
22	Dinas Perhubungan	-	6.672.500,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
25	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.754.221.794,00	1.120.542.419,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	411.652.322,00	919.798.500,00
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.843.508.227,00	2.373.679.215,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.935.700,00	64.117.331,00
32	Sekretariat Daerah	12.532.438,00	4.372.528,00
33	Sekretariat DPRD	-	-
34	Inspektorat	-	-
35	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30.691.385,00	33.963.607,00
39	Badan Penghubung	-	-
40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
43	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
44	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
45	Dinas Perkebunan	-	341.961.840,00
46	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-
47	Dinas Kehutanan	-	-
Jumlah		180.041.069.466,59	177.559.758.333,72

5.3.1.1.4.3 Persediaan Cetak

Rp13.723.681.003,85

Saldo sebesar Rp13.723.681.003,85 merupakan persediaan cetak dan penggandaan pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	211.590.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	2.629.204.405,00	2.398.197.262,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	127.040.500,00	242.066.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	300.872.917,00	616.145.872,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	88.585.000,00	233.717.800,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	245.837.170,85	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	147.379.900,00	50.489.796,21
8	RSJD Surakarta	2.332.943.582,00	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	562.410.557,00	687.866.680,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.881.200,00	6.391.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.460.400,00	72.500,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.671.000,00	-



	2017	2016
13 Satuan Polisi Pamong Praja	3.307.500,00	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.983.500,00	16.868.000,00
15 Dinas Sosial	517.000,00	-
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	471.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.123.750,00	-
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
21 Dinas Ketahanan Pangan	-	10.792.500,00
22 Dinas Perhubungan	33.628.300,00	63.329.100,00
23 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24 Dinas Komunikasi dan Informasi	231.000,00	-
25 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.920.000,00	1.200.000,00
29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.405.750,00	24.837.500,00
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	661.000,00	811.850,00
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.151.500,00	38.849.721,66
32 Sekretariat Daerah	7.038.000,00	42.294.500,00
33 Sekretariat DPRD	-	-
34 Inspektorat	505.000,00	686.250,00
35 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.655.668.322,00	28.942.500,00
36 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	27.297.500,00	5.089.364.245,00
37 Badan Kepegawaian Daerah	267.918.250,00	-
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	55.988.000,00
39 Badan Penghubung	-	-
40 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.720.000,00	2.360.000,00
41 Badan Penelitian dan Pengembangan	728.000,00	-
42 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
43 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
44 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
45 Dinas Perkebunan	-	-
46 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	-
47 Dinas Kehutanan	-	-
Jumlah	13.723.681.003,85	9.611.742.076,87

5.3.1.1.4.4 Persediaan Pakaian Dinas/Kerja

Rp30.866.000,00

Saldo sebesar Rp30.866.000,00 merupakan Persediaan pakaian dinas/kerja pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.225.000,00	24.174.700,00
2 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	47.494.400,00
3 Dinas Sosial	3.901.000,00	6.959.500,00
4 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan	498.500,00	-
5 Dinas Komunikasi dan Informasi	25.241.500,00	-
6 Sekretariat Daerah	-	454.000,00



Jumlah

30.866.000,00

79.082.600,00

5.3.1.1.4.5 Persediaan Makanan dan Minuman

Rp1.321.693.793,03

Saldo sebesarRp1.321.693.793,03merupakan persediaan makanan dan minuman pasien pada unit pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017, dengan rinciansebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Kesehatan	63.617.950,00	217.208.544,00
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	310.459.722,50	448.649.693,75
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	80.942.851,00	73.490.738,50
4 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	78.196.395,00	38.184.401,28
5 RSUD Tugurejo Semarang	62.335.204,07	52.833.076,00
6 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	55.242.202,39	74.786.538,00
7 RSJD Surakarta	604.067.498,07	306.080.205,40
8 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	35.827.669,00	23.578.700,00
9 Dinas Sosial	904.600,00	-
10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.099.701,00	-
Jumlah	1.321.693.793,03	1.234.811.896,93

5.3.1.1.4.6 Persediaan Barang yang D hibahkan

Rp4.340.399.724,00

Saldo sebesarRp4.340.399.724,00merupakan persediaan barang yang akan dihibahkan kepada masyarakat sampai dengan 31 Desember 2017 belum diserahkan kepada penerima hibah, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Bina Marga	-	5.370.091.093,00
2 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.700.379.024,00	-
3 Badan Arsip Daerah dan Perpustakaan	1.640.020.700,00	1.640.020.700,00
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	30.530.000,00
5 Dinas Kehutanan	-	102.848.000,00
Jumlah	4.340.399.724,00	7.143.489.793,00

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Rp5.915.900.631.546,25

Saldo per 31 Desember 2017sebesarRp5.915.900.631.546,25naik sebesar Rp977.375.147.516,60 atau 19,79% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.938.525.484.029,65 dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Investasi Non Permanen	-	-
2 Investasi Permanen	5.915.900.631.546,25	4.938.525.484.029,65
Jumlah	5.915.900.631.546,25	4.938.525.484.029,65

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen **Rp0,00**

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang terdiri dari investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dan investasi non permanen lainnya-diragukan tertagih, dengan rincian saldo sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Invest Non Permanen Lain-Dana Bergulir	12.317.184.307,00	12.767.221.630,00
2 Invest Non Permanen Lain-Diragukan Tertagih	(12.317.184.307,00)	(12.767.221.630,00)
Jumlah	-	-

5.3.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lain-Dana Bergulir **Rp12.317.184.307,00**

Saldo sebesarRp12.317.184.307,00turun sebesar Rp450.037.323,00 atau 3,52% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.767.221.630,00merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per31 Desember 2017, dengan rincian saldo sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Biro Perekonomian-UMKM	1.986.989.766,00	2.234.769.766,00
2 Dinas Koperasi dan UKM	2.040.979.120,00	2.121.929.120,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.403.855.800,00	1.403.855.800,00
4 Dinas Ketahanan Pangan	60.200.000,00	71.500.000,00
5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.234.833.401,00	2.234.833.401,00
6 Dinas Kehutanan	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.707.826.220,00	1.817.833.543,00
Jumlah	12.317.184.307,00	12.767.221.630,00

5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen – Diragukan Tertagih (Rp12.317.184.307,00)

Saldo sebesar(Rp12.317.184.307,00)turun sebesar Rp450.037.323,00atau 3,52% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar (Rp12.767.221.630,00)merupakan saldo Investasi Non Permanen–Diragukan Tertagihyang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi



Jawa Tengah per 31 Desember 2017. Kebijakan pencadangan ini sesuai dengan kebijakan Cadangan Piutang Tidak Tertagih pada Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut :

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Biro Perekonomian-UMKM		
	- menunggak 3-5 tahun	-	-
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(1.986.989.766,00)	(2.234.769.766,00)
2	Dinas Koperasi dan UMKM		
	- menunggak 3-5 tahun	-	-
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(2.040.979.120,00)	(2.121.929.120,00)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(1.403.855.800,00)	(1.403.855.800,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(60.200.000,00)	(71.500.000,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	- menunggak 2-3 tahun	-	-
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(2.234.833.401,00)	(2.234.833.401,00)
5	Dinas Kehutanan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(2.882.500.000,00)	(2.882.500.000,00)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	(1.707.826.220,00)	(1.817.833.543,00)
Jumlah		(12.317.184.307,00)	(12.767.221.630,00)

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Rp5.915.900.631.546,25

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa perusahaan daerah. Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.929.778.731.387,26 naik sebesar Rp991.253.247.357,61 atau 20,07% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.938.525.484.029,65, dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	PT. Bank Jateng	3.752.155.263.620,40	2.980.083.525.895,22
2	PD BPR BKK	693.075.829.432,23	582.536.672.952,19
3	PT. Asuransi Bangun Askrida	13.240.000.000,00	13.240.000.000,00
4	PT. PRPP	36.833.459.858,40	35.560.149.541,90
5	PDAB Slawi Tegal	57.526.049.885,00	50.945.850.121,00
6	Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah	158.020.412.948,00	139.897.187.901,48
7	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00
8	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.021.855.668.334,35	1.012.823.913.827,99
9	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	45.766.601.225,70	39.783.968.344,01
10	PT. Jamkrida	127.127.346.242,17	73.354.215.445,85
Jumlah		5.915.900.631.546,25	4.938.525.484.029,65



Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37 sebagai berikut :

- Paragraf 36 : Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (b) Metode ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- Paragraf 37 : Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida dan PT KIW yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

No	Nama BUMD	Opini	Kantor Akuntan Publik	Ekuitas	Kepemilikan	Jumlah
1	PDAB Slawi			Rp 57.526.049.885,00	100,00	57.526.049.885,00
2	PT Sarana Patra Hulu Cepu	WTP	Riza, Adi, Syahril dan Rekan	Rp 50.226.735.322,32	91,12	45.766.601.225,70
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (persero)	WTP	Helianto dan Rekan	Rp 201.178.529.547,00	40,39	10.300.000.000,00
4	PT PRPP Jawa Tengah	WDP	Sodikin & Harijanto	Rp 46.918.975.057,00	78,50	36.833.459.858,40
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan entitas anak	WTP	Djoko, Sidik & Indra	Rp 1.022.596.742.760,00	99,93	1.021.855.668.334,35
6	PT BPD Jawa Tengah	WTP	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan	Rp 6.650.399.262.000,00	56,42	3.752.155.263.620,40
7	PT Citra Mandiri Jawa Tengah	WTP	Riza, Adi, Syahril dan Rekan	Rp 158.020.412.948,00	100,00	158.020.412.948,00
8	Jamkrida	WTP	Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Rp 128.191.334.317,00	99,17	127.127.346.242,17
9	Bangun Askrida	WTP	Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono	Rp 814.881.420.911,00	6,65	13.240.000.000,00
10	BPR BKK			Rp		693.075.829.432,23
	KABUPATEN BATANG					
1	BPR BKK BATANG	WTP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan	Rp 17.639.081.650,00	53,09	9.364.568.628,79
2	BKK BANDAR	WDP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp 4.819.446.969,00	42,74	2.059.592.721,79
	KOTA MAGELANG					
3	BPR BKK KOTA MAGELANG	WTP	Sukardi Hasan Dan Rekan	Rp 7.718.980.949,00	58,37	4.505.569.179,93
	KABUPATEN PEKALONGAN					
4	BPR BKK KAB. PEKALONGAN	WTP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan	Rp 42.449.192.582,00	51,00	21.649.088.216,82
5	BKK KAJEN	WTP	Ijang Soetikno	Rp 10.353.219.451,00	51,00	5.280.141.920,01
	KABUPATEN KENDAL					
6	BPR BKK KENDAL	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp 35.446.400.732,00	58,39	20.698.016.503,08
7	BKK KENDAL KOTA	WDP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan	Rp 734.850.368,00	40,60	298.378.840,70
	KOTA PEKALONGAN					
8	BPR BKK KOTA PEKALONGAN	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp 7.714.022.095,25	56,73	4.375.790.311,34
9	BKK PEKALONGAN UTARA	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp 14.256.958.775,00	46,61	6.644.710.327,27
	KOTA TEGAL					
10	BPR BKK KOTA TEGAL	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp 6.892.140.931,00	67,93	4.681.947.729,22
11	BKK TEGAL BARAT	WTP	Tarmizi Achmad	Rp 6.027.536.841,00	54,34	3.275.510.094,74
	KABUPATEN SEMARANG					
12	BPR BKK UNGARAN	WTP	Rama Wendra	Rp 31.681.089.184,85	80,53	25.514.146.675,27
13	BKK SUSUKAN	WDP	WARTONO	Rp 7.245.954.555,00	34,70	2.514.335.621,57
	KABUPATEN TEGAL					
14	BPR BKK KABUPATEN TEGAL	WTP	Tarmizi Achmad	Rp 21.409.612.900,00	50,10	10.726.608.499,80



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Nama BUMD	Opini	Kantor Akuntan Publik		Ekuitas	Kepemilikan	Jumlah
15	BKK SLAWI	WDP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	27.861.902.894,00	36,36	10.131.601.052,36
	KABUPATEN PEMALANG						
16	BPR BKK TAMAN	WDP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	21.919.822.124,00	51,00	11.179.109.283,24
17	BKK PEMALANG	WDP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	1.248.464.552,00	24,56	306.589.832,25
	KABUPATEN SRAGEN						
18	BPR BKK KARANGMALANG	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	66.298.389.751,09	59,77	39.625.362.086,33
19	BKK TANON	WDP	Tarmizi Achmad	Rp	19.429.683.410,27	57,92	11.253.463.350,25
	KABUPATEN PURWOREJO						
20	BPR BKK PURWOREJO	WDP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	10.749.279.631,00	50,90	5.471.577.206,96
21	BKK BUTUH	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	5.389.396.289,00	44,30	2.387.408.005,21
	KABUPATEN KARANGANYAR						
22	BPR BKK TASIKMADU	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	23.543.471.364,00	52,73	12.413.582.059,09
23	BKK KARANGANYAR	WDP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	14.929.563.857,00	39,71	5.928.149.420,60
	KABUPATEN WONOGIRI						
24	BPR BKK WONOGIRI	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	52.772.442.121,00	50,60	26.705.409.218,49
25	BKK EROMOKO	WTP	WARTONO	Rp	25.538.248.348,00	32,20	8.224.181.671,39
	KOTA SURAKARTA						
26	BKK PASAR KLIWON	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	9.720.416.724,00	28,50	2.770.507.879,51
	KABUPATEN KLATEN						
27	BPR BKK TULUNG	WTP	WARTONO	Rp	12.802.860.032,00	68,21	8.732.348.142,13
28	BKK KLATEN	WDP	Tarmizi Achmad	Rp	(24.584.848.424,89)	64,41	(15.835.569.972,30)
	KABUPATEN SUKOHARJO						
29	BPR BKK GROGOL	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	20.366.781.549,00	35,03	7.133.747.363,14
30	BKK SUKOHARJO	WTP	WARTONO	Rp	24.121.353.135,00	41,74	10.067.294.976,48
	KABUPATEN BOYOLALI						
31	BPR BKK BOYOLALI	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	30.056.157.359,00	51,00	15.328.640.253,09
32	BKK MOJOSONGO	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	6.572.700.290,00	46,64	3.065.669.645,25
	KABUPATEN MAGELANG						
33	BPR BKK MUNTILAN	WTP	Tarmizi Achmad	Rp	26.051.229.621,00	51,06	13.302.755.551,15
34	BKK TEMPURAN	WTP	Tarmizi Achmad	Rp	9.416.973.914,00	48,45	4.562.863.649,05



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Nama BUMD	Opini	Kantor Akuntan Publik	Ekuitas		Kepemilikan	Jumlah
	KABUPATEN PURBALINGGA						
35	BPR BKK PURBALINGGA	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	56.321.288.605,00	57,88	32.600.958.434,68
36	BKK KARANGMONCOL	WTP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan	Rp	758.339.791,00	39,29	297.958.135,42
	KOTA SALATIGA						
37	BKK SIDOREJO	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	7.970.376.013,00	31,31	2.495.893.227,11
	KABUPATEN BANJARNEGARA						
38	BPR BKK MANDIRAJA	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	48.542.394.153,00	51,00	24.756.621.018,03
39	BKK BANJARNEGARA	WDP	WARTONO	Rp	14.366.296.617,00	48,69	6.995.107.776,86
	KABUPATEN TEMANGGUNG						
40	BPR BKK TEMANGGUNG	WTP	Drs. Henry & Sugeng	Rp	26.622.222.258,00	44,09	11.736.976.959,52
41	BKK PRINGSURAT	Tidak Wajar	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	(74.697.403.936,00)	42,37	(31.649.917.096,79)
	KABUPATEN BREBES						
42	BPR BKK BANJARHARJO	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	18.371.583.500,00	64,03	11.763.320.325,98
43	BKK BREBES	WDP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	24.518.177.027,00	39,24	9.621.567.823,44
	KABUPATEN CILACAP						
44	BPR BKK CILACAP	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	54.732.821.161,00	51,00	27.913.738.792,11
45	BKK KESUGIHAN	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	20.631.919.898,00	35,35	7.293.539.771,37
	KABUPATEN KEBUMEN						
46	BPR BKK KEBUMEN	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	45.777.569.881,00	53,25	24.378.587.510,59
47	BKK SRUWENG	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	1.614.086.128,00	47,40	765.155.015,70
	KABUPATEN BANYUMAS						
48	BPR BKK PURWOKERTO	WTP	Tarmizi Achmad	Rp	97.718.076.199,00	44,29	43.282.131.067,68
49	BKK PURWOKERTO SELATAN	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	24.374.944.673,00	28,15	6.862.154.512,05
	KABUPATEN WONOSOBO						
50	BPR BKK WONOSOBO	WDP	Tarmizi Achmad	Rp	26.002.455.566,00	39,57	10.288.095.394,15
51	BKK KERTEK	WTP	WARTONO	Rp	12.166.444.089,00	40,32	4.905.455.370,47
	KABUPATEN GROBOGAN						
52	BPR BKK PURWODADI	WTP	Heliantono & Rekan	Rp	97.087.843.069,00	49,42	47.982.720.129,48
	KABUPATEN KUDUS						



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No	Nama BUMD	Opini	Kantor Akuntan Publik		Ekuitas	Kepemilikan	Jumlah
53	BPR BKK KUDUS	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	17.072.393.928,00	69,06	11.789.369.436,02
	KABUPATEN DEMAK						
54	BPR BKK DEMAK	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	39.604.774.479,00	44,59	17.660.176.482,72
55	BKK DEMPET	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	25.419.242.280,00	35,99	9.148.270.735,65
	KABUPATEN PATI						
56	BPR BKK PATI	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	28.002.120.791,00	48,30	13.524.920.849,07
57	BKK TAYU	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	(1.286.031.805,00)	60,68	(780.362.651,25)
	KOTA SEMARANG						
58	BPR BKK KOTA SEMARANG	WTP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan	Rp	35.216.600.016,00	51,00	17.960.466.631,03
	KABUPATEN JEPARA						
59	BPR BKK JEPARA	WTP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan	Rp	32.353.477.799,32	51,00	16.500.273.677,65
	KABUPATEN REMBANG						
60	BPR BKK LASEM	WTP	Darsono & Budi Cahyo Santoso	Rp	60.720.058.087,00	51,00	30.967.229.624,37
61	BKK KALIORI	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	9.329.074.110,00	67,28	6.276.488.925,43
	KABUPATEN BLORA						
62	BPR BKK BLORA	WTP	Ruchendi, Mardjito & Rushadi	Rp	45.874.187.470,00	51,00	23.395.835.609,70
	Jumlah						5.915.900.631.546,25

Dengan menggunakan metode biaya (*Cost Method*) penyertaan modal kepada BUMD maupun non BUMD disajikan sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

(*Cost Method*)

- 1 PT. Bank Jateng
- 2 PD BPR BKK
- 3 PT. Asuransi Bangun Askrida
- 4 PT. PRPP
- 5 PDAB Tegal
- 6 Perusda Jawa Tengah
- 7 PT. KIW
- 8 PT. Sarana Pembangunan Jateng
- 9 PT Jamkrida

Jumlah

	2017	2016
1	995.721.000.000,00	995.721.000.000,00
2	490.707.718.716,00	391.707.718.716,00
3	13.240.000.000,00	13.240.000.000,00
4	39.252.200.004,00	39.252.200.004,00
5	33.805.000.000,00	28.805.000.000,00
6	31.861.846.791,00	31.861.846.791,00
7	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00
8	689.442.000.000,00	689.442.000.000,00
9	120.000.000.000,00	70.000.000.000,00
Jumlah	2.424.329.765.511,00	2.200.329.765.511,00



5.3.1.3 Aset Tetap

Rp35.432.575.942.570,00

Saldo sebesar Rp35.432.575.942.570,00 naik sebesar Rp2.639.335.584.009,00 atau 8,05% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp32.793.240.378.561,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Tanah	14.082.405.659.121,00	14.047.602.867.753,00
2	Peralatan dan Mesin	4.550.345.023.097,00	4.137.036.035.629,00
3	Gedung dan Bangunan	5.730.805.806.182,00	5.220.907.723.607,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.735.406.904.806,00	8.936.327.703.915,00
5	Aset Tetap Lainnya	980.536.910.439,00	261.991.131.016,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	353.075.638.925,00	189.374.916.641,00
Jumlah		35.432.575.942.570,00	32.793.240.378.561,00

Mutasi murni selama tahun 2017 yang terdiri dari belanja modal tahun 2017, kapitalisasi, mutasi, hibah, dengan rincian sebagai berikut :

	Total
Saldo Awal	32.793.240.378.561,00
Penambahan	
Belanja Modal	1.453.840.203.964,00
Belanja Barang/Jasa	27.326.227.592,00
Hibah	1.023.386.516.669,00
Mutasi Masuk	1.684.281.223.664,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	120.881.795.956,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	3.298.006.267,00
Koreksi	1.049.789.752.895,00
Jumlah	5.362.803.727.007,00
Berkurang	
Ekstrakontable	27.272.373.950,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	120.881.795.956,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	18.657.992.226,00
Mutasi Keluar	1.684.281.223.664,00
Koreksi	872.374.777.202,00
Jumlah	2.723.468.162.998,00
Grand Total	35.432.575.942.570,00



Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2017
- Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2017 terjadi penerimaan hibah dalam jumlah signifikan sehubungan adanya pelimpahan kewenangan beberapa urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terjadi pengalihan Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017.
- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017.



- Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

Aset Tetap sebesar Rp35.432.575.942.570,00 didalamnya belum termasuk aset tetap SMA dan SMK Tahun 2016, dikarenakan belum ada Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Kewenangan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsisebesar Rp346.003.289.790,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	64.955.624.658,00
Peralatan Mesin	70.069.538.146,00
Gedung Bangunan	189.108.886.363,00
Jalan Irigasi Jaringan	4.250.570.292,00
ATL	17.618.670.331,00
KDP	-
Jumlah	346.003.289.790,00

5.3.1.3.1 Tanah

Rp14.082.405.659.121,00

Saldo Aset Tanah pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.082.405.121,00naik sebesar Rp34.802.791.368,00 atau 0,25% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp14.047.602.867.753,00dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.831.252.496.078,00	223.074.944.658,00	66.555.624.658,00	1.674.733.176.078,00
2 Dinas Kesehatan	61.324.740.000,00	225.000.000,00	-	61.099.740.000,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	105.667.750.000,00	-	-	105.667.750.000,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	105.738.750.000,00	-	-	105.738.750.000,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	90.572.000.000,00	-	-	90.572.000.000,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	45.948.850.675,00	-	-	45.948.850.675,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	656.775.000.000,00	-	-	656.775.000.000,00
8 RSJD Surakarta	50.269.000.000,00	-	-	50.269.000.000,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	14.192.500.000,00	-	-	14.192.500.000,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.228.556.606.714,00	10.608.994.776,00	1.488.988.000,00	3.219.436.599.938,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.249.691.800.809,00	6.756.238.648,00	-	5.242.935.562.161,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.513.941.740,00	-	750.000.000,00	2.263.941.740,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	3.076.000.000,00	-	-	3.076.000.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.786.143.000,00	-	-	11.786.143.000,00
15 Dinas Sosial	133.464.140.440,00	126.000.000,00	-	133.338.140.440,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	3.100.000.000,00	-	-	3.100.000.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.352.753.000,00	-	-	90.352.753.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.969.078.750,00	3.360.000.000,00	-	609.078.750,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.634.300.000,00	18.634.300.000,00	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	599.040.000,00	-	-	599.040.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.849.500.000,00	-	-	7.849.500.000,00
22	Dinas Perhubungan	120.502.979.689,00	229.400.000,00	2.912.800.000,00	123.186.379.689,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	7.764.500.000,00	-	-	7.764.500.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.300.000.000,00	-	-	8.300.000.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	75.266.690.500,00	24.761.342.000,00	443.600.000,00	50.948.948.500,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.546.500.000,00	-	-	4.546.500.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	114.984.794.150,00	3.368.510.000,00	74.707.000,00	111.690.991.150,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	830.100.041.363,00	323.471.816.500,00	-	506.628.224.863,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	292.483.342.500,00	-	737.500.000,00	293.220.842.500,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.444.550.000,00	1.310.300.000,00	-	2.134.250.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.198.564.587,00	-	-	25.198.564.587,00
33	SKPKD Aset	261.498.602.544,00	277.007.479.600,00	15.508.877.056,00	-
34	Sekretariat Daerah	167.604.640.000,00	-	2.692.500.000,00	170.297.140.000,00
35	Sekretariat DPRD	12.678.250.000,00	3.390.000.000,00	-	9.288.250.000,00
36	Inspektorat	-	-	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	120.185.000.000,00	4.100.000.000,00	-	116.085.000.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	108.872.812.582,00	179.200.000,00	280.766.679.600,00	389.460.292.182,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70.152.500.000,00	70.152.500.000,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	6.421.500.000,00	-	-	6.421.500.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	124.074.000.000,00	-	-	124.074.000.000,00
42	Badan Penghubung	7.015.000.000,00	-	-	7.015.000.000,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	68.898.342.000,00	68.898.342.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	38.442.500.000,00	38.442.500.000,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	54.645.000.000,00	54.645.000.000,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	58.785.000.000,00	58.785.000.000,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	1.429.500.000,00	1.429.500.000,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	323.471.816.500,00	323.471.816.500,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	21.226.800.000,00	21.226.800.000,00
Jumlah		14.082.405.659.121,00	977.733.026.182,00	942.930.234.814,00	14.047.602.867.753,00

Mutasi Aset Tanah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Tanah	
Saldo Awal	14.047.602.867.753,00
Penambahan	
Belanja Modal	21.650.743.424,00
Belanja Barang/Jasa	-



Hibah	67.601.110.658,00
Mutasi Masuk	867.106.238.100,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	21.374.934.000,00
Jumlah	977.733.026.182,00

Berkurang

Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	74.707.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	4.165.897.656,00
Mutasi Keluar	867.106.238.100,00
Koreksi	71.583.392.058,00
Jumlah	942.930.234.814,00

Grand Total	14.082.405.659.121,00

- Saldo aset tanah sebesar Rp14.047.602.867.753,00 termasuk didalamnya:
 1. Tanah jalan akses Bandara A. Yani Semarang pada Dinas Bina Marga seluas 11.888 m² senilai Rp4.160.800.000,00. Tanah tersebut merupakan pembebasan tanah milik PT PRPP pada tahun 2008. Berdasarkan surat klaim PT PRPP nomor 33/DIR/PRPP/E/IV/13 perihal Kepastian Kekurangan Pembayaran Aset Tanah PT.PRPP Jateng bahwa total luas tanah yang digunakan untuk jalan akses Bandara A. Yani Semarang seluas 42.730 m² sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran seluas 30.852 m². Dinas Bina Marga belum dapat melakukan pencatatan atas tanah seluas 30.852 m² dan belum dapat mengakui hutang sebesar nilai tanah tersebut karena sampai akhir Mei 2016 PT PRPP belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Selain itu atas seluruh tanah PRPP pada saat ini masih dalam sengketa dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (PT IPU). Pencatatan tanah tersebut akan dilakukan setelah diperoleh kepastian status hukum tanah dimaksud.
 2. Aset Tanah di Jalan Pleburan Nomor 5 Semarang yang tercatat di KIB Sekretariat Daerah sebesar Rp37.019.000,00 saat ini dalam kondisi tidak dimanfaatkan karena



masih dalam sengketa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/PK/TUN/2006 tanggal 4 Mei 2007 menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan jual beli aset tanah tersebut. Putusan tersebut belum dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan aset tanah tersebut.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp4.550.345.023.097,00

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.550.345.023.097,00 naik sebesar Rp413.308.987.468,00 atau 9,99% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.137.036.035.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Alat Berat	263.530.310.636,00	30.130.085.110,00	10.454.964.209,00	243.855.189.735,00
2 Alat Angkut	440.155.850.599,00	153.123.765.884,00	124.239.232.453,00	411.271.317.168,00
3 Alat Bengkel dan Ukur	298.305.894.472,00	51.309.191.701,00	96.734.843.381,00	343.731.546.152,00
4 Alat Pertanian dan Peternakan	47.604.703.249,00	7.711.457.052,00	3.478.114.310,00	43.371.360.507,00
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.683.709.426.478,00	468.654.086.834,00	224.085.937.598,00	1.439.141.277.242,00
6 Alat Studio dan Komunikasi	181.660.012.307,00	33.671.619.611,00	21.398.510.845,00	169.386.903.541,00
7 Alat Kedokteran	1.278.895.934.200,00	234.476.919.604,00	6.345.200.013,00	1.050.764.214.609,00
8 Alat Laboratorium	351.098.634.170,00	71.575.332.524,00	150.874.002.693,00	430.397.304.339,00
9 Alat Keamanan	5.384.256.986,00	527.825.000,00	260.490.350,00	5.116.922.336,00
Jumlah	4.550.345.023.097,00	1.051.180.283.320,00	637.871.295.852,00	4.137.036.035.629,00

5.3.1.3.2.1 Alat-alat Berat

Rp263.530.310.636,00

Saldo Aset Alat Berat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp263.530.310.636,00 naik sebesar Rp20.123.380.902,00 atau 8,07% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp243.855.189.735,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.752.662.930,00	2.892.959.287,00	456.685.739,00	9.316.389.382,00
2 Dinas Kesehatan	5.405.055.750,00	139.250.000,00	200.000,00	5.266.005.750,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	14.128.342.579,00	7.935.762.000,00	-	6.192.580.579,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	19.532.494.133,00	192.421.650,00	1.069.378.000,00	20.409.450.483,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.589.521.000,00	542.000.000,00	-	3.047.521.000,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	8.618.240.367,00	2.200.000.000,00	-	6.418.240.367,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.366.243.889,00	-	-	3.366.243.889,00
8 RSJD Surakarta	1.095.810.000,00	-	-	1.095.810.000,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	568.297.049,00	52.950.000,00	-	515.347.049,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	106.244.149.935,00	4.398.213.000,00	715.000.000,00	102.560.936.935,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	22.390.489.615,00	2.072.229.115,00	-	20.318.260.500,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	1.764.652.115,00	1.764.652.115,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	640.150.000,00	-	-	640.150.000,00
15	Dinas Sosial	1.187.216.500,00	138.250.000,00	-	1.048.966.500,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	2.972.653.000,00	93.483.000,00	-	2.879.170.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	367.622.146,00	70.625.000,00	475.000,00	297.472.146,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	637.400.000,00	-	-	637.400.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	461.648.000,00	273.842.000,00	-	187.806.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.258.167.018,00	296.448.000,00	-	961.719.018,00
22	Dinas Perhubungan	1.575.011.500,00	74.958.000,00	-	1.500.053.500,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	295.459.000,00	334.942.400,00	39.483.400,00	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	592.700.000,00	-	-	592.700.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	189.525.000,00	9.025.000,00	8.500.000,00	189.000.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.528.445.000,00	492.354.000,00	-	3.036.091.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.065.823.260,00	-	-	4.065.823.260,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.769.756.490,00	333.872.000,00	-	1.435.884.490,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.678.360.526,00	1.496.875.295,00	7.684.000,00	3.189.169.231,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	570.248.262,00	23.125.000,00	5.045.000,00	552.168.262,00
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.001.059.500,00	578.050.000,00	-	2.423.009.500,00
32	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6.195.285.101,00	2.200.000,00	-	6.193.085.101,00
33	SKPKD Aset	665.815.500,00	750.496.500,00	84.681.000,00	-
34	Sekretariat Daerah	7.047.009.623,00	856.002.500,00	296.448.000,00	6.487.455.123,00
35	Sekretariat DPRD	1.212.845.100,00	198.378.000,00	-	1.014.467.100,00
36	Inspektorat	169.042.000,00	-	-	169.042.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.023.099.500,00	498.380.000,00	-	2.524.719.500,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.978.095.003,00	1.239.595.003,00	2.598.934.060,00	17.337.434.060,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.943.398.360,00	1.943.398.360,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	810.245.000,00	-	-	810.245.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.804.497.000,00	-	-	1.804.497.000,00
42	Badan Penghubung	198.426.000,00	-	17.973.000,00	216.399.000,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	457.374.000,00	457.374.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	498.380.000,00	498.380.000,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	230.471.000,00	230.471.000,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	48.851.600,00	48.851.600,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	15.422.000,00	15.422.000,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	142.225.000,00	142.225.000,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	1.496.875.295,00	1.496.875.295,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	96.800.000,00	96.800.000,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	403.426.000,00	403.426.000,00
Jumlah		263.530.310.636,00	30.130.085.110,00	10.454.964.209,00	243.855.189.735,00

Mutasi Aset Alat Berat selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Berat

Saldo Awal

243.855.189.735,00

Penambahan



Belanja Modal	7.191.933.960,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	3.019.980.599,00
Mutasi Masuk	8.026.094.070,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	11.482.030.593,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	256.630.000,00
Koreksi	153.415.888,00
Jumlah	30.130.085.110,00

Berkurang	
Ekstrakontable	14.145.738,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	817.983.400,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	1.148.481.000,00
Mutasi Keluar	8.026.094.070,00
Koreksi	448.260.001,00
Jumlah	10.454.964.209,00

Grand Total 263.530.310.636,00

5.3.1.3.2.2 Alat Angkut

Rp440.155.850.599,00

Saldo Alat Angkut pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp440.155.850.599,00 naik sebesar Rp38.884.533.421,00 atau 7,02% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp411.271.317.168,00, dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)			
		2017	Bertambah	Berkurang	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.843.104.882,00	18.127.641.901,00	2.900.914.255,00	55.616.377.236,00
2	Dinas Kesehatan	8.164.213.519,00	239.000.000,00	172.750.000,00	8.097.963.519,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	7.570.247.609,00	295.000.000,00	295.000.000,00	7.570.247.609,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	5.899.796.963,00	-	324.850.000,00	6.224.646.963,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.942.614.750,00	781.543.000,00	-	3.161.071.750,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	5.046.097.553,00	342.800.000,00	-	4.703.297.553,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.033.489.235,00	520.000.000,00	20.000.000,00	5.533.489.235,00
8	RSJD Surakarta	4.589.903.873,00	16.000.000,00	124.850.000,00	4.698.753.873,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.239.011.623,00	350.530.000,00	23.228.000,00	2.911.709.623,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.601.348.338,00	1.326.409.600,00	23.000.000,00	8.297.938.738,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	6.161.863.802,00	1.530.326.045,00	-	4.631.537.757,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.100.984.406,00	414.678.000,00	179.750.000,00	3.866.056.406,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.178.693.447,00	968.020.000,00	15.244.000,00	3.225.917.447,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.911.381.900,00	354.068.500,00	987.330.064,00	3.544.643.464,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
15	Dinas Sosial	9.727.312.516,00	2.671.173.036,00	25.000.000,00	7.081.139.480,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.042.385.043,00	5.499.021.500,00	-	7.543.363.543,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.142.985.404,00	687.917.618,00	327.925.000,00	3.782.992.786,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.452.661.768,00	699.347.523,00	292.012.500,00	2.045.326.745,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.057.255.311,00	13.249.656.561,00	268.750.000,00	3.076.348.750,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	6.560.197.200,00	-	-	6.560.197.200,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.922.028.223,00	886.600.500,00	-	2.035.427.723,00
22	Dinas Perhubungan	31.445.763.871,00	625.004.314,00	3.848.546.442,00	34.669.305.999,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.926.225.788,00	5.926.225.788,00	-	-
24	Dinas Koperasi Dan UKM	2.731.000.626,00	297.970.000,00	-	2.433.030.626,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.289.921.080,00	-	-	2.289.921.080,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.679.395.397,00	2.553.988.241,00	-	3.125.407.156,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.135.342.844,00	256.318.733,00	-	3.879.024.111,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	16.275.628.483,00	3.375.703.700,00	15.000.000,00	12.914.924.783,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.119.457.342,00	4.105.731.441,00	287.755.000,00	5.301.480.901,00
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.845.429.372,00	153.755.000,00	-	3.691.674.372,00
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	4.569.114.164,00	414.678.000,00	216.100.000,00	4.370.536.164,00
32	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.551.010.467,00	414.678.000,00	292.400.000,00	5.428.732.467,00
33	SKPKD Aset	31.093.756.803,00	44.596.408.886,00	13.502.652.083,00	-
34	Sekretariat Daerah	49.785.316.086,00	8.950.522.661,00	12.200.125.456,00	53.034.918.881,00
35	Sekretariat DPRD	17.626.400.686,00	11.330.330.500,00	31.793.737.017,00	38.089.807.203,00
36	Inspektorat	2.548.133.456,00	297.970.000,00	496.110.945,00	2.746.274.401,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.801.716.093,00	2.139.632.043,00	654.109.000,00	3.316.193.050,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	25.121.982.386,00	8.684.884.550,00	19.548.723.309,00	35.985.821.145,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.956.794.243,00	8.415.794.243,00	459.000.000,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	2.868.244.768,00	-	-	2.868.244.768,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.505.799.138,00	30.655.000,00	-	2.475.144.138,00
42	Badan Penghubung	7.091.840.141,00	1.593.781.000,00	734.370.000,00	6.232.429.141,00
43	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	2.850.384.553,00	2.850.384.553,00
44	Badan Penelitian Dan Pengembangan	-	-	2.215.313.543,00	2.215.313.543,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	3.504.414.118,00	3.504.414.118,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	3.399.016.488,00	3.399.016.488,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	2.713.740.688,00	2.713.740.688,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	1.145.312.146,00	1.145.312.146,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	3.626.865.441,00	3.626.865.441,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	2.682.832.844,00	2.682.832.844,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	12.072.119.561,00	12.072.119.561,00
Jumlah		440.155.850.599,00	153.123.765.884,00	124.239.232.453,00	411.271.317.168,00

Mutasi Aset Alat Angkut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Angkut	
Saldo Awal	411.271.317.168,00
Penambahan	
Belanja Modal	10.427.816.145,00
Belanja Barang/Jasa	25.655.000,00



Hibah	17.316.290.325,00
Mutasi Masuk	120.203.929.114,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	715.000.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	854.900.000,00
Koreksi	3.580.175.300,00
Jumlah	153.123.765.884,00

Berkurang	
Ekstrakontable	7.336.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	622.897.000,00
Mutasi Keluar	120.203.929.114,00
Koreksi	3.405.070.339,00
Jumlah	124.239.232.453,00

Grand Total	440.155.850.599,00

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur

Rp298.305.894.472,00

Saldo Aset Alat Bengkel dan Ukur pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp298.305.894.472,00 turun sebesar Rp45.425.651.680,00 atau 13,22% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp343.731.546.152,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253.424.567.819,00	43.361.121.810,00	90.503.202.220,00	300.566.648.229,00
2 Dinas Kesehatan	34.100.000,00	215.966.950,00	215.966.950,00	34.100.000,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.647.101.868,00	362.069.000,00	794.000,00	1.285.826.868,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.569.706.200,00	66.560.000,00	-	2.503.146.200,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	20.205.500,00	3.000.000,00	-	17.205.500,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	542.586.859,00	46.673.418,00	2.048.938,00	497.962.379,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	206.781.750,00	-	-	206.781.750,00
8 RSJD Surakarta	33.900.500,00	-	-	33.900.500,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	18.488.200,00	4.009.500,00	-	14.478.700,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.605.200,00	-	-	9.605.200,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.497.252.000,00	663.923.000,00	645.673.000,00	1.479.002.000,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.700.000,00	-	-	85.700.000,00
15 Dinas Sosial	520.673.350,00	-	14.000.000,00	534.673.350,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	309.100.000,00	-	-	309.100.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.351.231.547,00	73.523.250,00	13.135.000,00	4.290.843.297,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.233.859.674,00	2.555.460.573,00	1.200.000,00	1.679.599.101,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	6.116.897.200,00	45.430.000,00	-	6.071.467.200,00
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	31.575.000,00	31.575.000,00	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	45.300.000,00	-	-	45.300.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.192.949.000,00	1.080.450.000,00	-	112.499.000,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	931.865.600,00	-	-	931.865.600,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.975.005.300,00	2.472.435.300,00	154.935.000,00	657.505.000,00
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	671.393.332,00	162.120.000,00	-	509.273.332,00
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	5.752.768.450,00	37.800.000,00	-	5.714.968.450,00
32	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.751.025.623,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.751.025.623,00
33	SKPKD Aset	-	98.700.000,00	98.700.000,00	-
34	Sekretariat Daerah	98.898.000,00	-	-	98.898.000,00
35	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36	Inspektorat	71.400.000,00	-	-	71.400.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.850.000,00	-	-	5.850.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	138.025.000,00	-	-	138.025.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	4.942.400,00	4.942.400,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.431.500,00	8.431.500,00	-	-
42	Badan Penghubung	9.650.000,00	-	-	9.650.000,00
43	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	4.975.000,00	4.975.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	31.575.000,00	31.575.000,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	2.396.180.000,00	2.396.180.000,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	91.005.300,00	91.005.300,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	2.530.710.573,00	2.530.710.573,00
Jumlah		298.305.894.472,00	51.309.191.701,00	96.734.843.381,00	343.731.546.152,00

Mutasi Aset Alat Bengkel dan Ukur selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Bengkel dan Ukur

Saldo Awal 343.731.546.152,00

Penambahan

Belanja Modal 5.371.178.368,00

Belanja Barang/Jasa 5.500.000,00

Hibah 31.960.613.270,00

Mutasi Masuk 8.114.401.068,00



Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	404.999.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	5.348.857.595,00
Jumlah	51.205.549.301,00

Berkurang	
Ekstrakontable	597.383.209,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	807.039.305,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	18.271.295,00
Mutasi Keluar	8.114.401.068,00
Koreksi	87.094.106.104,00
Jumlah	96.631.200.981,00

Grand Total	298.305.894.472,00

5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian/Peternakan

Rp47.604.703.249,00

Saldo Alat Pertanian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp47.604.703.249,00 naik sebesar Rp4.233.342.742,00 atau 9,76% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp43.371.360.507,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.485.690.109,00	2.397.548.417,00	384.133.060,00	8.472.274.752,00
2 Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	26.410.500,00	-	-	26.410.500,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	-
6 RSUD Tugurejo Semarang	292.492.795,00	-	-	292.492.795,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	192.643.130,00	-	-	192.643.130,00
8 RSJD Surakarta	-	-	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.448.000,00	990.000,00	-	3.458.000,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	146.548.000,00	-	-	146.548.000,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15 Dinas Sosial	36.220.000,00	-	-	36.220.000,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.341.115.993,00	64.700.000,00	9.460.000,00	2.285.875.993,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.149.500,00	129.949.500,00	1.800.000,00	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	308.025.000,00	-	-	308.025.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.148.000,00	-	-	3.148.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	837.730.000,00	543.827.000,00	-	293.903.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	27.073.178.898,00	3.326.964.935,00	358.369.915,00	24.104.583.878,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.544.198.324,00	1.115.554.800,00	717.905.000,00	5.146.548.524,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	140.625.000,00	98.700.000,00	98.700.000,00	140.625.000,00
33	SKPKD Aset	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36	Inspektorat	-	-	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	4.942.400,00	4.942.400,00	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.280.000,00	28.280.000,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.800.000,00	-	-	15.800.000,00
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	26.295.000,00	26.295.000,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	1.743.835.060,00	1.743.835.060,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	18.724.375,00	18.724.375,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	110.949.500,00	110.949.500,00
Jumlah		47.604.703.249,00	7.711.457.052,00	3.478.114.310,00	43.371.360.507,00

Mutasi Aset Alat Pertanian/Peternakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Pertanian	
Saldo Awal	43.371.360.507,00
Penambahan	
Belanja Modal	3.349.404.700,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	1.964.351.517,00
Mutasi Masuk	2.127.303.935,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-



Koreksi	270.396.900,00
Jumlah	7.711.457.052,00

Berkurang	
Ekstrakontable	203.242.015,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	817.554.400,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	2.127.303.935,00
Koreksi	330.013.960,00
Jumlah	3.478.114.310,00

Grand Total	47.604.703.249,00

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp1.683.709.426.478,00

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.683.709.426.478,00 naik sebesar Rp244.568.149.236,00 atau 16,99% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.439.141.277.242,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	884.109.756.117,00	296.174.138.009,00	90.450.485.330,00	678.386.103.438,00
2 Dinas Kesehatan	42.540.805.019,00	2.164.249.782,00	115.846.800,00	40.492.402.037,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	48.112.008.835,00	13.698.965.351,00	9.247.319.499,00	43.660.362.983,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	54.187.025.599,00	8.009.662.339,00	168.746.363,00	46.346.109.623,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	12.547.003.534,00	1.972.022.061,00	1.069.526.500,00	11.644.507.973,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	34.530.849.436,00	2.822.260.232,00	63.854.950,00	31.772.444.154,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	12.758.336.873,00	484.062.877,00	-	12.274.273.996,00
8 RSJD Surakarta	21.038.881.272,00	1.907.681.431,00	168.883.500,00	19.300.083.341,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	13.708.009.181,00	1.925.813.011,00	537.825.800,00	12.320.021.970,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.402.844.811,00	827.839.500,00	48.400.000,00	4.623.405.311,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	13.198.181.513,00	2.732.769.824,00	305.417.540,00	10.770.829.229,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.702.584.001,00	168.299.520,00	803.610.195,00	4.337.894.676,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	3.722.880.068,00	386.375.068,00	-	3.336.505.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.134.204.209,00	103.910.000,00	127.358.614,00	5.157.652.823,00
15 Dinas Sosial	22.379.864.110,00	509.956.726,00	277.364.662,00	22.147.272.046,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.929.008.971,00	410.611.400,00	-	5.518.397.571,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.125.871.700,00	1.913.583.086,00	1.205.824.950,00	21.418.113.564,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.414.473.000,00	23.620.000,00	-	2.390.853.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.979.172.055,00	14.174.018.124,00	24.165.750,00	5.829.319.681,00
20 Dinas Ketahanan Pangan	5.435.460.449,00	15.239.524,00	-	5.420.220.925,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.522.286.117,00	2.246.139.080,00	-	5.276.147.037,00
22	Dinas Perhubungan	10.354.303.946,00	2.318.786.524,00	9.072.896.523,00	17.108.413.945,00
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	18.813.508.575,00	18.813.772.575,00	264.000,00	-
24	Dinas Koperasi Dan UKM	10.251.139.924,00	193.553.524,00	196.795.000,00	10.254.381.400,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.656.416.566,00	1.253.120.304,00	764.967.677,00	6.168.263.939,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	15.910.031.221,00	9.716.776.616,00	73.881.212,00	6.267.135.817,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.125.330.136,00	342.693.024,00	69.312.497,00	17.851.949.609,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.995.908.234,00	633.187.202,00	-	10.362.721.032,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	21.653.100.948,00	10.076.734.386,00	2.151.551.425,00	13.727.917.987,00
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	10.921.344.605,00	1.430.141.104,00	28.590.400,00	9.519.793.901,00
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	14.450.124.290,00	1.538.692.524,00	-	12.911.431.766,00
32	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	27.328.656.110,00	461.184.320,00	123.866.948,00	26.991.338.738,00
33	SKPKD Aset	5.455.451.698,00	9.347.954.790,00	3.892.503.092,00	-
34	Sekretariat Daerah	54.088.973.250,00	1.740.270.054,00	10.215.264.465,00	62.563.967.661,00
35	Sekretariat DPRD	38.839.234.497,00	3.884.923.670,00	218.100.000,00	35.172.410.827,00
36	Inspektorat	5.759.981.551,00	615.795.000,00	5.700.000,00	5.149.886.551,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.990.548.885,00	4.110.124.494,00	153.641.502,00	7.034.065.893,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	90.497.447.244,00	12.145.797.200,00	32.575.647.002,00	110.927.297.046,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.234.277.795,00	33.256.787.795,00	22.510.000,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	10.028.296.900,00	2.813.841.000,00	489.712.751,00	7.704.168.651,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.427.599.349,00	776.554.250,00	64.944.000,00	20.715.989.099,00
42	Badan Penghubung	7.448.243.884,00	512.179.533,00	1.013.373.846,00	7.949.438.197,00
43	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	16.243.380.965,00	16.243.380.965,00
44	Badan Penelitian Dan Pengembangan	-	-	3.664.013.672,00	3.664.013.672,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	2.031.250.198,00	2.031.250.198,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	4.093.043.734,00	4.093.043.734,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	2.124.857.031,00	2.124.857.031,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	3.977.107.500,00	3.977.107.500,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	8.515.859.362,00	8.515.859.362,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	2.555.347.840,00	2.555.347.840,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	15.132.924.503,00	15.132.924.503,00
Jumlah		1.683.709.426.478,00	468.654.086.834,00	224.085.937.598,00	1.439.141.277.242,00

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Kantor & Rumah Tangga

Saldo Awal	1.439.141.277.242,00
Penambahan	
Belanja Modal	68.207.175.462,00
Belanja Barang/Jasa	291.265.063,00
Hibah	219.841.049.335,00
Mutasi Masuk	126.953.910.284,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	13.407.422.669,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	2.050.699.567,00
Koreksi	37.902.564.454,00



Jumlah 468.654.086.834,00

Berkurang

Ekstrakontable 21.293.275.953,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap 9.022.995.486,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya 6.834.731.569,00

Mutasi Keluar 126.953.910.284,00

Koreksi 59.981.024.306,00

Jumlah 224.085.937.598,00

Grand Total 1.683.709.426.478,00

5.3.1.3.2.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Rp181.660.012.307,00

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp181.660.012.307,00 naik sebesar Rp12.273.108.766,00 atau 7,25% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp169.386.903.541,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.900.138.247,00	15.797.663.795,00	5.237.877.320,00	79.340.351.772,00
2 Dinas Kesehatan	3.831.903.456,00	3.500.000,00	5.073.800,00	3.833.477.256,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.846.878.974,00	172.473.500,00	8.100.000,00	3.682.505.474,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.315.189.749,00	666.587.500,00	-	648.602.249,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	787.764.955,00	55.900.000,00	-	731.864.955,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	3.148.851.530,00	49.728.850,00	-	3.099.122.680,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.562.081.538,00	-	-	1.562.081.538,00
8 RSJD Surakarta	1.054.839.068,00	-	-	1.054.839.068,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	338.576.500,00	37.306.250,00	-	301.270.250,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	363.994.100,00	4.005.000,00	-	359.989.100,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.312.113.200,00	261.140.000,00	73.630.000,00	2.124.603.200,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	509.322.496,00	58.700.000,00	87.771.737,00	538.394.233,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	546.845.000,00	-	-	546.845.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.910.905.000,00	-	-	1.910.905.000,00
15 Dinas Sosial	601.328.000,00	15.400.000,00	21.450.200,00	607.378.200,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.625.556.949,00	14.988.000,00	-	1.610.568.949,00
17 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan	1.985.349.601,00	160.055.500,00	34.996.000,00	1.860.290.101,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	301.780.000,00	-	-	301.780.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.862.290.808,00	2.261.835.591,00	501.000,00	600.956.217,00
20 Dinas Ketahanan Pangan	608.260.500,00	-	-	608.260.500,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.501.187.483,00	190.094.000,00	-	1.311.093.483,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
22	Dinas Perhubungan	2.095.387.006,00	235.198.000,00	1.167.930.586,00	3.028.119.592,00
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.645.184.455,00	2.645.184.455,00	-	-
24	Dinas Koperasi Dan UKM	848.281.500,00	12.270.000,00	-	836.011.500,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	618.638.684,00	28.311.125,00	17.762.630,00	608.090.189,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.897.911.584,00	3.006.741.082,00	400.000,00	891.570.502,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.013.290.610,00	70.460.000,00	-	3.942.830.610,00
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.133.893.000,00	38.800.000,00	-	1.095.093.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.745.020.710,00	2.135.688.509,00	176.450.000,00	1.785.782.201,00
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	978.238.000,00	24.832.000,00	-	953.406.000,00
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.848.329.299,00	643.103.000,00	-	3.205.226.299,00
32	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.000.328.649,00	3.235.895,00	18.598.530,00	1.015.691.284,00
33	SKPKD Aset	112.961.000,00	166.128.095,00	53.167.095,00	-
34	Sekretariat Daerah	19.394.731.778,00	280.850.000,00	1.316.014.225,00	20.429.896.003,00
35	Sekretariat DPRD	2.328.796.400,00	544.986.000,00	458.286.000,00	2.242.096.400,00
36	Inspektorat	644.266.165,00	379.800.000,00	185.700.000,00	450.166.165,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.446.585.495,00	605.150.500,00	-	841.434.995,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.129.915.214,00	305.768.900,00	1.029.088.595,00	5.853.234.909,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.245.824.274,00	2.247.924.274,00	2.100.000,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	344.766.656,00	22.905.000,00	6.930.000,00	328.791.656,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.893.613.084,00	472.554.790,00	960.000,00	2.422.018.294,00
42	Badan Penghubung	1.378.891.590,00	52.350.000,00	26.768.570,00	1.353.310.160,00
43	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	3.901.462.749,00	3.901.462.749,00
44	Badan Penelitian Dan Pengembangan	-	-	605.150.500,00	605.150.500,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	231.127.950,00	231.127.950,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	902.848.935,00	902.848.935,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	235.015.380,00	235.015.380,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	354.300.500,00	354.300.500,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	1.994.488.509,00	1.994.488.509,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	919.431.500,00	919.431.500,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	2.325.128.534,00	2.325.128.534,00
	Jumlah	181.660.012.307,00	33.671.619.611,00	21.398.510.845,00	169.386.903.541,00

Mutasi Alat Studio dan Komunikasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Studio dan Komunikasi

Saldo Awal 169.386.903.541,00

Penambahan

Belanja Modal 5.020.253.815,00

Belanja Barang/Jasa 19.650.000,00

Hibah 10.809.841.231,00

Mutasi Masuk 15.234.380.058,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap 426.751.600,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya 5.400.000,00

Koreksi 2.155.342.907,00

Jumlah 33.671.619.611,00



Berkurang

Ekstrakontable	604.947.913,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	826.861.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	168.328.137,00
Mutasi Keluar	15.234.380.058,00
Koreksi	4.563.993.737,00
Jumlah	21.398.510.845,00

Grand Total **181.660.012.307,00**

5.3.1.3.2.7 Alat-Alat Kedokteran

Rp1.278.895.934.200,00

Saldo Alat Kedokteran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.278.895.934.200,00 naik sebesar Rp228.131.719.591,00 atau 21,71% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.050.764.214.609,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.820.984.097,00	825.122.836,00	158.291.136,00	4.154.152.397,00
2 Dinas Kesehatan	32.238.267.882,00	1.056.260.077,00	9.323.200,00	31.191.331.005,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	414.562.604.300,00	73.894.445.937,00	4.707.964.273,00	345.376.122.636,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	446.384.682.450,00	110.035.663.762,00	21.600.000,00	336.370.618.688,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	41.374.604.465,00	5.055.857.807,00	7.088.500,00	36.325.835.158,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	170.392.628.722,00	38.205.825.165,00	1.433.372.904,00	133.620.176.461,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	80.691.692.219,00	2.017.305.522,00	-	78.674.386.697,00
8 RSJD Surakarta	30.917.840.447,00	173.960.100,00	-	30.743.880.347,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	54.929.602.927,00	2.434.433.398,00	-	52.495.169.529,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15 Dinas Sosial	661.392.129,00	448.415.000,00	-	212.977.129,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	637.903.912,00	238.870.000,00	-	399.033.912,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22 Dinas Perhubungan	-	-	-	-
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	404.292.000,00	60.100.000,00	-	344.192.000,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78.235.000,00	-	-	78.235.000,00
33 SKPKD Aset	-	-	-	-
34 Sekretariat Daerah	257.615.000,00	-	-	257.615.000,00
35 Sekretariat DPRD	295.495.000,00	23.100.000,00	-	272.395.000,00
36 Inspektorat	-	-	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	460.000,00	460.000,00
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	460.000,00	460.000,00	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	56.498.650,00	-	-	56.498.650,00
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	184.035.000,00	-	-	184.035.000,00
42 Badan Penghubung	-	-	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	-	7.100.000,00	7.100.000,00
50 Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51 Dinas Kehutanan	-	-	-	-
Jumlah	1.278.895.934.200,00	234.476.919.604,00	6.345.200.013,00	1.050.764.214.609,00

Mutasi Aset Alat Kedokteran selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Kedokteran

Saldo Awal 1.050.764.214.609,00

Penambahan

Belanja Modal 203.046.191.751,00

Belanja Barang/Jasa -

Hibah 16.886.559.657,00

Mutasi Masuk 397.975.000,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap 1.169.187.000,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -

Koreksi 12.977.006.196,00

Jumlah 234.476.919.604,00

Berkurang

Ekstrakontable 87.661.896,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap 2.531.186.684,00

Reklasifikasi keluar ke Aset 3.210.135.493,00



Lainnya	
Mutasi Keluar	397.975.000,00
Koreksi	118.240.940,00
Jumlah	6.345.200.013,00
Grand Total	1.278.895.934.200,00

5.3.1.3.2.8 Alat-Alat Laboratorium

Rp351.098.634.170,00

Saldo Alat Laboratorium pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp351.098.634.170,00 naik sebesar Rp79.298.670.169,00 atau 18,42% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp430.397.304.339,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.757.603.727,00	41.337.159.795,00	135.470.477.278,00	295.890.921.210,00
2	Dinas Kesehatan	19.107.514.864,00	1.188.456.300,00	1.980.000,00	17.921.038.564,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	10.401.074.052,00	1.884.507.046,00	56.000.000,00	8.572.567.006,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.254.308.866,00	-	42.750.000,00	2.297.058.866,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.809.053.000,00	476.700.000,00	-	2.332.353.000,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	16.737.285.473,00	270.164.838,00	-	16.467.120.635,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.123.865.174,00	-	-	2.123.865.174,00
8	RSJD Surakarta	2.477.768.600,00	1.334.108.300,00	156.350.000,00	1.300.010.300,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.892.483.855,00	17.180.000,00	-	1.875.303.855,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.030.372.400,00	2.616.750.000,00	-	4.413.622.400,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.476.494.355,00	644.743.000,00	-	1.831.751.355,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	2.333.775.000,00	2.333.775.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Dinas Sosial	112.290.000,00	-	-	112.290.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	103.445.000,00	103.445.000,00	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.163.072.562,00	2.856.815.770,00	24.849.400,00	5.331.106.192,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.378.959.408,00	521.941.500,00	20.985.000,00	13.878.002.908,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	163.343.000,00	-	-	163.343.000,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	95.420.359,00	-	-	95.420.359,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.951.519.665,00	-	-	8.951.519.665,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.502.069.564,00	11.941.919.415,00	287.635.500,00	2.847.785.649,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.860.528.005,00	3.079.341.560,00	-	11.781.186.445,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.543.771.800,00	-	-	3.543.771.800,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.630.502.841,00	3.287.200.000,00	20.598.600,00	13.363.901.441,00
33	SKPKD Aset	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36	Inspektorat	122.022.000,00	-	-	122.022.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	14.900.000,00	14.900.000,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	507.310.600,00	-	-	507.310.600,00
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	70.285.000,00	70.285.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	11.941.919.415,00	11.941.919.415,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	328.052.500,00	328.052.500,00
	Jumlah	351.098.634.170,00	71.575.332.524,00	150.874.002.693,00	430.397.304.339,00

Mutasi Aset Alat Laboratorium selama tahun 2017 adalah sebagai berikut

(Dalam Rupiah)

Alat Laboratorium

Saldo Awal 430.397.304.339,00

Penambahan

Belanja Modal 18.812.149.400,00

Belanja Barang/Jasa -

Hibah 32.135.195.499,00

Mutasi Masuk 14.961.667.415,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap 2.397.467.780,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset -

Lainnya

Koreksi 3.253.952.430,00

Jumlah 71.560.432.524,00

Berkurang

Ekstrakontable 1.699.666.942,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap 10.052.998.240,00

Reklasifikasi keluar ke Aset 130.969.505,00

Lainnya

Mutasi Keluar 14.961.667.415,00



Koreksi	124.013.800.591,00
Jumlah	150.859.102.693,00

Grand Total	351.098.634.170,00

5.3.1.3.2.9 Alat-Alat Keamanan

Rp5.384.256.986,00

Saldo Alat Keamanan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.384.256.986,00 naik sebesar Rp267.334.650,00 atau 5,22% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.116.922.336,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.018.761.253,00	340.045.000,00	81.160.000,00	1.759.876.253,00
2 Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-	-	-
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	-
6 RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	187.829.055,00	-	-	187.829.055,00
8 RSJD Surakarta	-	-	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-	-	-
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.175.000,00	6.175.000,00	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.335.400,00	-	155.350,00	7.490.750,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.400.000,00	-	7.175.000,00	9.575.000,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	179.710.000,00	-	-	179.710.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15 Dinas Sosial	-	-	-	-
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	1.561.776.003,00	97.105.000,00	1.500.000,00	1.466.171.003,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.950.000,00	1.950.000,00	-
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67.650.000,00	67.650.000,00	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22 Dinas Perhubungan	31.204.725,00	-	-	31.204.725,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.734.000,00	-	-	14.734.000,00
33 SKPKD Aset	-	-	-	-
34 Sekretariat Daerah	1.265.031.550,00	-	-	1.265.031.550,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
35 Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36 Inspektorat	-	-	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.650.000,00	-	-	23.650.000,00
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	14.900.000,00	14.900.000,00	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
42 Badan Penghubung	-	-	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	82.500.000,00	82.500.000,00
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	-	-	-
50 Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51 Dinas Kehutanan	-	-	67.650.000,00	67.650.000,00
Jumlah	5.384.256.986,00	527.825.000,00	260.490.350,00	5.116.922.336,00

Mutasi Alat Keamanan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Alat Keamanan	
Saldo Awal	5.116.922.336,00
Penambahan	
Belanja Modal	14.900.000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	245.475.000,00
Mutasi Masuk	159.825.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	97.105.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	10.520.000,00
Jumlah	527.825.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	13.565.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	14.900.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	1.155.350,00
Mutasi Keluar	159.825.000,00
Koreksi	71.045.000,00
Jumlah	260.490.350,00
Grand Total	5.384.256.986,00



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp5.730.805.806.182,00

Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.730.805.806.182,00 naik sebesar Rp509.898.082.575,00 atau 9,77% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.220.907.723.607,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Gedung	5.638.788.639.272,00	1.419.642.782.669,00	915.965.267.064,00	5.135.111.123.667,00
2 Monumen	92.017.166.910,00	18.943.423.834,00	12.722.856.864,00	85.796.599.940,00
Jumlah	5.730.805.806.182,00	1.438.586.206.503,00	928.688.123.928,00	5.220.907.723.607,00

5.3.1.3.3.1 Gedung

Rp5.638.788.639.272,00

Saldo Gedung pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017sebesar Rp5.638.788.639.272,00 naik sebesar Rp791.524.436.537,00 atau 9,81% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.135.111.123.667,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.173.408.413.571,00	727.387.321.458,00	216.458.973.638,00	2.662.480.065.751,00
2 Dinas Kesehatan	91.803.827.954,00	9.876.293.595,00	600.000.000,00	82.527.534.359,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	127.804.470.200,00	119.416.246.178,00	109.474.684.278,00	117.862.908.300,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	194.067.644.000,00	1.113.045.700,00	355.164.100,00	193.309.762.400,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	24.285.944.743,00	19.380.381.456,00	19.256.716.409,00	24.162.279.696,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	134.235.568.464,00	19.401.245.822,00	4.694.546.120,00	119.528.868.762,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	84.787.702.093,00	24.741.077.940,00	13.545.607.160,00	73.592.231.313,00
8 RSJD Surakarta	33.933.223.102,00	14.706.175.073,00	12.015.837.700,00	31.242.885.729,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	44.944.610.980,00	2.320.569.140,00	-	42.624.041.840,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	19.784.671.966,00	1.546.002.000,00	303.204.000,00	18.541.873.966,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	18.434.850.000,00	2.726.445.000,00	73.928.000,00	15.782.333.000,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.177.034.550,00	-	835.133.000,00	11.012.167.550,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	18.073.518.000,00	491.418.000,00	-	17.582.100.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.563.661.875,00	-	-	5.563.661.875,00
15 Dinas Sosial	170.752.208.781,00	-	-	170.752.208.781,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.877.783.968,00	-	-	6.877.783.968,00
17 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan	52.623.013.646,00	2.392.697.710,00	17.821.970,00	50.248.137.906,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	21.069.203.665,00	1.452.082.900,00	-	19.617.120.765,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.783.509.157,00	17.188.609.346,00	110.540.000,00	12.705.439.811,00
20 Dinas Ketahanan Pangan	9.219.530.900,00	283.484.000,00	-	8.936.046.900,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.141.365.037,00	777.971.860,00	-	8.363.393.177,00
22	Dinas Perhubungan	82.554.954.257,00	2.952.999.300,00	1.975.826.590,00	81.577.781.547,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.343.961.874,00	5.442.697.874,00	98.736.000,00	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	30.569.418.577,00	235.926.000,00	-	30.333.492.577,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.688.280.035,00	138.441.000,00	-	5.549.839.035,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	111.603.742.036,00	113.588.830.556,00	103.380.491.360,00	101.395.402.840,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.330.515.647,00	198.990.000,00	-	22.131.525.647,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	65.503.837.588,00	2.282.910.950,00	174.050.000,00	63.394.976.638,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	127.129.063.914,00	31.903.133.735,00	9.798.243.321,00	105.024.173.500,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	64.591.648.988,00	8.974.315.505,00	134.733.100,00	55.752.066.583,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.664.142.199,00	4.873.106.550,00	910.661.300,00	23.701.696.949,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	82.819.349.888,00	551.779.000,00	-	82.267.570.888,00
33	SKPKD Aset	184.666.562.638,00	187.953.967.638,00	3.287.405.000,00	-
34	Sekretariat Daerah	100.883.135.170,00	-	1.623.955.560,00	102.507.090.730,00
35	Sekretariat DPRD	31.184.509.665,00	2.041.119.700,00	-	29.143.389.965,00
36	Inspektorat	12.508.329.700,00	-	-	12.508.329.700,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.510.677.308,00	7.023.512.000,00	-	12.487.165.308,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	224.055.234.595,00	1.500.674.500,00	249.875.170.146,00	472.429.730.241,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84.682.191.183,00	84.682.191.183,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	7.566.703.700,00	-	-	7.566.703.700,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	55.130.827.632,00	-	-	55.130.827.632,00
42	Badan Penghubung	12.029.796.026,00	97.120.000,00	-	11.932.676.026,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	52.100.931.473,00	52.100.931.473,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	6.434.267.500,00	6.434.267.500,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	9.330.691.900,00	9.330.691.900,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	20.576.908.100,00	20.576.908.100,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	28.573.261.713,00	28.573.261.713,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	746.998.400,00	746.998.400,00
49	Dinas Perkebunan	-	-	31.551.225.735,00	31.551.225.735,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-	261.004.000,00	261.004.000,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	17.388.549.491,00	17.388.549.491,00
Jumlah		5.638.788.639.272,00	1.419.642.782.669,00	915.965.267.064,00	5.135.111.123.667,00

Mutasi Aset Gedung selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Gedung	
Saldo Awal	5.135.111.123.667,00
Penambahan	
Belanja Modal	307.972.943.265,00
Belanja Barang/Jasa	26.984.157.529,00
Hibah	459.608.764.658,00
Mutasi Masuk	455.647.662.163,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	19.247.719.263,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	129.150.700,00
Koreksi	150.052.385.091,00



Jumlah **1.419.642.782.669,00**

Berkurang

Ekstrakontable 2.589.037.737,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap 78.773.153.448,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya 1.360.421.866,00
Mutasi Keluar 455.647.662.163,00
Koreksi 377.594.991.850,00
Jumlah **915.965.267.064,00**

Grand Total **5.638.788.639.272,00**

5.3.1.3.3.2 Monumen

Rp92.017.166.910,00

Saldo Aset Monumen pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp92.017.166.910,00 naik sebesar Rp7.124.722.953,00 atau 8,30% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp85.796.599.940,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.867.806.417,00	3.481.097.719,00	1.037.054.619,00	13.423.763.317,00
2 Dinas Kesehatan	5.114.828.040,00	-	-	5.114.828.040,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	709.981.000,00	-	-	709.981.000,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	508.200.000,00	-	10.000.000,00	518.200.000,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	175.858.000,00	-	-	175.858.000,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	423.613.269,00	-	-	423.613.269,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.648.531.000,00	-	-	4.648.531.000,00
8 RSJD Surakarta	814.052.600,00	-	-	814.052.600,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.068.611.081,00	-	-	1.068.611.081,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.009.139.375,00	-	-	1.009.139.375,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.153.018.000,00	-	-	1.153.018.000,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101.650.000,00	-	-	101.650.000,00
15 Dinas Sosial	303.099.000,00	-	-	303.099.000,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	459.123.000,00	-	-	459.123.000,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	728.802.000,00	728.802.000,00	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	367.060.000,00	-	-	367.060.000,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22 Dinas Perhubungan	14.405.571.873,00	1.987.911,00	1.987.911,00	14.405.571.873,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	55.937.000,00	55.937.000,00	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	110.020.000,00	-	88.121.000,00	198.141.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.900.478.411,00	3.267.528.820,00	-	632.949.591,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	342.880.670,00	-	-	342.880.670,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.911.094.000,00	387.755.000,00	10.000.000,00	1.533.339.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.449.691.812,00	6.855.997.000,00	327.309.950,00	5.921.004.762,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.099.476.678,00	-	-	4.099.476.678,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
33	SKPKD Aset	1.812.804.200,00	1.812.804.200,00	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	1.813.015.000,00	-	-	1.813.015.000,00
36	Inspektorat	14.310.000,00	-	-	14.310.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.220.000,00	-	-	94.220.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.533.434.510,00	-	3.528.869.384,00	15.062.303.894,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.351.514.184,00	2.351.514.184,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.534.288.150,00	-	-	1.534.288.150,00
42	Badan Penghubung	2.055.757.640,00	-	-	2.055.757.640,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	191.440.000,00	191.440.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	6.799.272.000,00	6.799.272.000,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	728.802.000,00	728.802.000,00
Jumlah		92.017.166.910,00	18.943.423.834,00	12.722.856.864,00	85.796.599.940,00

Mutasi Aset Alat Monumen selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Monumen	
Saldo Awal	85.796.599.940,00
Penambahan	
Belanja Modal	961.816.000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	2.533.104.680,00
Mutasi Masuk	11.518.968.334,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	3.411.578.820,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	517.956.000,00
Jumlah	18.943.423.834,00
Berkurang	
Ekstrakontable	162.111.547,00



Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	66.725.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	11.518.968.334,00
Koreksi	975.051.983,00
Jumlah	12.722.856.864,00
Grand Total	92.017.166.910,00

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp9.735.406.904.806,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.735.406.904.806,00 naik sebesar Rp803.329.771.183,00 atau 8,94% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.936.327.703.915,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Jalan dan Jembatan	8.591.878.823.227,00	679.058.681.493,00	37.683.946.854,00	7.950.504.088.588,00
2 Bangunan Air/Irigasi	965.157.856.469,00	146.093.342.928,00	7.405.415.926,00	826.469.929.467,00
3 Instalasi	112.652.461.547,00	15.124.958.982,00	6.402.446.761,00	103.929.949.326,00
4 Jaringan	65.717.763.563,00	14.184.423.508,00	3.890.396.479,00	55.423.736.534,00
Jumlah	9.735.406.904.806,00	854.461.406.911,00	55.382.206.020,00	8.936.327.703.915,00

5.3.1.3.4.1. Jalan dan Jembatan

Rp8.591.878.823.227,00

Saldo Jalan dan Jembatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.591.878.823.227,00 naik sebesar Rp641.374.734.639,00 atau 8,07% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.950.504.088.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.489.089.522,00	3.506.905.475,00	833.671.719,00	7.815.855.766,00
2 Dinas Kesehatan	117.825.000,00	-	-	117.825.000,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-	-	-
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.895.101.000,00	-	-	2.895.101.000,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	121.968.158,00	-	-	121.968.158,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.620.339.625,00	-	-	3.620.339.625,00
8 RSJD Surakarta	2.053.018.611,00	-	-	2.053.018.611,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	96.997.000,00	-	-	96.997.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	8.513.537.767,18,00	639.855.874.548,00	2.211.531.159,00	7.875.893.423.789,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Dinas Sosial	52.859.000,00	-	-	52.859.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.618.606.500,00	5.618.606.500,00	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	12.936.978.095,00	519.062.000,00	-	12.417.916.095,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	817.042.818,00	99.615.000,00	-	717.427.818,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.871.170.500,00	967.166.500,00	-	1.904.004.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.357.656.500,00	1.520.933.500,00	1.102.200.000,00	3.938.923.000,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.701.476.250,00	69.891.000,00	-	2.631.585.250,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
33	SKPKD Aset	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	387.415.000,00	-	-	387.415.000,00
36	Inspektorat	-	-	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.302.885.500,00	-	-	2.302.885.500,00
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	301.830.006,00	301.830.006,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	771.780.500,00	771.780.500,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	5.562.306.500,00	5.562.306.500,00
Jumlah		8.591.878.823.227,00	679.058.681.493,00	37.683.946.854,00	7.950.504.088.588,00

Mutasi Aset Jalan dan Jembatan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Jalan dan Jembatan



Saldo Awal	7.950.504.088.588,00
Penambahan	
Belanja Modal	640.661.327.541,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	2.301.089.476,00
Mutasi Masuk	34.638.743.976,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	1.037.057.500,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	420.463.000,00
Jumlah	679.058.681.493,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.211.531.159,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	34.638.743.976,00
Koreksi	833.671.719,00
Jumlah	37.683.946.854,00
Grand Total	8.591.878.823.227,00

- Saldo Akhir sebesar Rp7.950.504.088.588,00 termasuk didalamnya Jalan akses menuju Bandara A Yani Semarang seluas 11.878m² yang diklaim berada di atas tanah milik PT PRPP seluas 42.730m².

5.3.1.3.4.2. Bangunan Air/Irigasi

Rp965.157.856.469,00

Saldo Bangunan Air/Irigasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp965.157.856.469,00 naik sebesar Rp138.687.927.002,00 atau 16,78% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp826.469.929.467,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.780.482.215,00	2.964.082.746,00	2.031.460.823,00	7.847.860.292,00
2 Dinas Kesehatan	618.435.000,00	119.272.000,00	119.272.000,00	618.435.000,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.831.352.415,00	784.472.000,00	-	1.046.880.415,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	98.529.000,00	-	-	98.529.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
6	RSUD Tugurejo Semarang	1.346.355.625,00	-	-	1.346.355.625,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.019.596.500,00	196.653.000,00	-	3.822.943.500,00
8	RSJD Surakarta	100.621.000,00	-	-	100.621.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.180.539.500,00	-	-	1.180.539.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	133.641.422.953,00	2.162.994.159,00	-	131.478.428.794,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	672.243.705.167,00	129.434.611.769,00	1.234.831.351,00	544.043.924.749,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Dinas Sosial	1.449.336.069,00	-	-	1.449.336.069,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	89.000.000,00	-	-	89.000.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.317.600,00	-	-	4.317.600,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.306.887.254,00	1.306.887.254,00	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	164.387.000,00	-	-	164.387.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	15.025.499.030,00	49.646.000,00	-	14.975.853.030,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	223.370.000,00	-	-	223.370.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85.794.000,00	-	-	85.794.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	51.080.091,00	-	-	51.080.091,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	190.275.000,00	-	-	190.275.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	88.591.020.122,00	2.116.453.000,00	1.178.466.500,00	87.653.033.622,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.163.344.744,00	4.395.196.600,00	155.416.000,00	9.923.564.144,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.015.766.400,00	259.213.400,00	19.950.000,00	776.503.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.485.119.784,00	2.293.711.000,00	-	15.191.408.784,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
33	SKPKD Aset	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	1.173.201.000,00	-	-	1.173.201.000,00
36	Inspektorat	-	-	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.150.000,00	10.150.000,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	93.269.000,00	-	-	93.269.000,00
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	142.931.998,00	142.931.998,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	10.150.000,00	10.150.000,00
48	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	1.290.073.000,00	1.290.073.000,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	1.222.864.254,00	1.222.864.254,00
Jumlah		965.157.856.469,00	146.093.342.928,00	7.405.415.926,00	826.469.929.467,00

Mutasi Aset Bangunan Irigasi/Air selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :



(Dalam Rupiah)

Bangunan Air	
Saldo Awal	826.469.929.467,00
Penambahan	
Belanja Modal	137.609.060.769,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	2.326.073.025,00
Mutasi Masuk	2.821.435.252,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	2.947.466.159,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	389.307.723,00
Jumlah	146.093.342.928,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	2.552.519.851,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	9.330.000,00
Mutasi Keluar	2.821.435.252,00
Koreksi	2.022.130.823,00
Jumlah	7.405.415.926,00
Grand Total	965.157.856.469,00

5.3.1.3.4.3. Instalasi

Rp112.652.461.547,00

Saldo Instalasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp112.652.461.547,00 naik sebesar Rp8.722.512.221,00 atau 8,39% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp103.929.949.326,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.586.997.476,00	1.461.914.243,00	282.160.500,00	7.407.243.733,00
2 Dinas Kesehatan	3.466.848.800,00	160.165.000,00	-	3.306.683.800,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	293.039.000,00	1.921.700.000,00	1.921.700.000,00	293.039.000,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	15.520.702.735,00	-	-	15.520.702.735,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	44.538.000,00	-	-	44.538.000,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	23.421.906.495,00	7.004.079.750,00	2.617.514.122,00	19.035.340.867,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.017.002.965,00	-	-	3.017.002.965,00
8 RSJD Surakarta	4.158.260.291,00	-	-	4.158.260.291,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.592.316.129,00	-	-	3.592.316.129,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta	137.554.120,00	-	-	137.554.120,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
	Karya				
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	435.967.567,00	21.516.000,00	-	414.451.567,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.870.000,00	-	-	111.870.000,00
15	Dinas Sosial	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	91.433.000,00	-	-	91.433.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	565.340.192,00	53.476.393,00	-	511.863.799,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.236.215.713,00	545.238.913,00	-	690.976.800,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	25.900.000,00	-	-	25.900.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	5.784.706.878,00	64.479.200,00	-	5.720.227.678,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	265.412.000,00	265.412.000,00	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	225.454.455,00	-	-	225.454.455,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.599.171.000,00	211.300.000,00	-	1.387.871.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	224.022.086,00	176.345.000,00	106.057.143,00	153.734.229,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.058.699.475,00	607.906.400,00	-	1.450.793.075,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	33.480.368.054,00	2.215.207.000,00	-	31.265.161.054,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.595.200,00	-	-	27.595.200,00
33	SKPKD Aset	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah	1.669.450.925,00	-	-	1.669.450.925,00
35	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36	Inspektorat	-	-	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	647.598.000,00	-	-	647.598.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	233.186.880,00	-	349.824.083,00	583.010.963,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	416.219.083,00	416.219.083,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	799.998.000,00	-	-	799.998.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	444.025.550,00	-	-	444.025.550,00
42	Badan Penghubung	45.661.478,00	-	-	45.661.478,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	53.000.000,00	53.000.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	18.800.000,00	18.800.000,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	66.395.000,00	66.395.000,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	176.345.000,00	176.345.000,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	810.650.913,00	810.650.913,00
Jumlah		112.652.461.547,00	15.124.958.982,00	6.402.446.761,00	103.929.949.326,00

Mutasi Aset Instalasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Instalasi

Saldo Awal

103.929.949.326,00



Penambahan

Belanja Modal	11.930.574.150,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	883.563.000,00
Mutasi Masuk	1.581.072.139,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	290.071.593,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	439.678.100,00
Jumlah	15.124.958.982,00

Berkurang

Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	4.539.214.122,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	1.581.072.139,00
Koreksi	282.160.500,00
Jumlah	6.402.446.761,00

Grand Total **112.652.461.547,00**

5.3.1.3.4.4. Jaringan

Rp65.717.763.563,00

Saldo Aset Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp65.717.763.563,00 naik sebesar Rp10.294.027.029,00 atau 18,57% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp55.423.736.534,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.770.376.520,00	2.637.201.844,00	1.112.607.250,00	10.245.781.926,00
2 Dinas Kesehatan	874.544.650,00	-	-	874.544.650,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	3.843.470.949,00	1.619.262.000,00	-	2.224.208.949,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.369.161.390,00	-	-	1.369.161.390,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.520.825.550,00	-	-	1.520.825.550,00
8 RSJD Surakarta	-	-	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-	-	-
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	17.774.664,00	17.774.664,00	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15 Dinas Sosial	82.834.000,00	-	-	82.834.000,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.470.000,00	-	-	84.470.000,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.245.760.100,00	1.245.760.100,00	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	98.208.800,00	-	-	98.208.800,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22 Dinas Perhubungan	10.071.885.940,00	5.195.247.500,00	-	4.876.638.440,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	113.983.400,00	113.983.400,00	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.744.873,00	-	-	5.744.873,00
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	588.306.177,00	-	-	588.306.177,00
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.700.000,00	-	-	16.700.000,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	427.930.000,00	-	-	427.930.000,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.238.625.000,00	1.215.725.000,00	108.245.129,00	131.145.129,00
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	912.443.000,00	48.237.000,00	-	864.206.000,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.383.346.100,00	1.957.673.000,00	-	28.425.673.100,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	291.919.700,00	-	-	291.919.700,00
33 SKPKD Aset	-	-	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36 Inspektorat	-	-	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	732.367.750,00	121.159.000,00	-	611.208.750,00
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.685.000,00	-	-	14.685.000,00
42 Badan Penghubung	-	-	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	121.159.000,00	121.159.000,00
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	-	1.215.725.000,00	1.215.725.000,00
50 Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	12.400.000,00	12.400.000,00
51 Dinas Kehutanan	-	-	1.320.260.100,00	1.320.260.100,00
Jumlah	65.717.763.563,00	14.184.423.508,00	3.890.396.479,00	55.423.736.534,00

Mutasi Aset Jaringan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Jaringan

Saldo Awal 55.423.736.534,00

Penambahan

Belanja Modal 8.818.244.164,00

Belanja Barang/Jasa -



Hibah	2.037.787.745,00
Mutasi Masuk	2.777.789.229,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	59.433.400,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	491.168.970,00
Jumlah	14.184.423.508,00

Berkurang

Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	2.777.789.229,00
Koreksi	1.112.607.250,00
Jumlah	3.890.396.479,00

Grand Total	65.717.763.563,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp980.536.910.439,00

Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp980.536.910.439,00 naik sebesar Rp718.545.779.423,00 atau 274,26% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp261.991.131.016,00, dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>				
	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Buku Perpustakaan	926.546.531.149,00	736.554.116.046,00	22.056.565.865,00	212.048.980.968,00
2 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	43.193.527.122,00	7.569.214.533,00	4.375.460.191,00	39.999.772.780,00
3 Hewan, Ternak dan Tanaman	10.796.852.168,00	2.140.523.345,00	1.286.048.445,00	9.942.377.268,00
Jumlah	980.536.910.439,00	746.263.853.924,00	27.718.074.501,00	261.991.131.016,00

5.3.1.3.5.1. Buku Perpustakaan

Rp926.546.531.149,00

Saldo Buku Perpustakaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp926.546.531.149,00 naik sebesar Rp741.497.550.181,00 atau 336,95% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp212.048.980.968,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	907.730.745.376,00	734.101.732.864,00	20.207.243.755,00	193.836.256.267,00
2	Dinas Kesehatan	152.321.050,00	-	241.413.505,00	393.734.555,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	388.670.790,00	19.984.600,00	-	368.686.190,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	291.614.996,00	-	-	291.614.996,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	37.495.350,00	-	-	37.495.350,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	285.969.831,00	4.950.000,00	-	281.019.831,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	337.390.600,00	-	-	337.390.600,00
8	RSJD Surakarta	12.632.230,00	-	-	12.632.230,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	63.672.830,00	1.325.800,00	-	62.347.030,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	279.267.300,00	279.073.300,00	-	194.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	87.972.866,00	-	-	87.972.866,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	76.329.400,00	19.202.000,00	279.073.300,00	336.200.700,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	16.204.000,00	-	-	16.204.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.619.400,00	-	-	80.619.400,00
15	Dinas Sosial	450.199.800,00	-	-	450.199.800,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	53.422.955,00	-	-	53.422.955,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.827.720,00	1.537.000,00	-	122.290.720,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	50.373.000,00	776.000,00	-	49.597.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	839.192.765,00	619.789.600,00	-	219.403.165,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	103.501.200,00	-	-	103.501.200,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103.040.000,00	1.340.000,00	-	101.700.000,00
22	Dinas Perhubungan	26.090.000,00	-	-	26.090.000,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	231.610.185,00	9.970.000,00	-	221.640.185,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	135.443.600,00	23.009.000,00	-	112.434.600,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	188.157.500,00	141.302.900,00	-	46.854.600,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.496.069.639,00	838.709.000,00	-	9.657.360.639,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	598.731.670,00	-	-	598.731.670,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	171.050.031,00	119.457.810,00	115.291.853,00	166.884.074,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	109.674.250,00	-	-	109.674.250,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	304.657.000,00	4.380.000,00	-	300.277.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	187.221.890,00	9.908.350,00	-	177.313.540,00
33	SKPKD Aset	-	-	-	-
34	Sekretariat Daerah	1.321.958.620,00	26.347.600,00	-	1.295.611.020,00
35	Sekretariat DPRD	253.942.983,00	-	-	253.942.983,00
36	Inspektorat	32.061.050,00	-	-	32.061.050,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	327.609.950,00	215.474.850,00	-	112.135.100,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	55.984.000,00	-	-	55.984.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.670.872,00	77.670.872,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	27.993.100,00	2.464.500,00	-	25.528.600,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	436.141.350,00	35.710.000,00	-	400.431.350,00
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	172.760.400,00	172.760.400,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	206.630.850,00	206.630.850,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	1.537.000,00	1.537.000,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	21.216.920,00	21.216.920,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	860.982,00	860.982,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	113.937.810,00	113.937.810,00



	2017	Bertambah	Berkurang	2016
50 Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	76.809.890,00	76.809.890,00
51 Dinas Kehutanan	-	-	619.789.600,00	619.789.600,00
Jumlah	926.546.531.149,00	736.554.116.046,00	22.056.565.865,00	212.048.980.968,00

Mutasi Aset Buku Perpustakaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Buku Perpustakaan	
Saldo Awal	212.048.980.968,00
Penambahan	
Belanja Modal	1.015.675.050,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	138.994.696.650,00
Mutasi Masuk	1.607.908.605,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	1.325.800,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	594.934.509.941,00
Jumlah	736.554.116.046,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	241.413.505,00
Mutasi Keluar	1.607.908.605,00
Koreksi	20.207.243.755,00
Jumlah	22.056.565.865,00
Grand Total	926.546.531.149,00

5.3.1.3.5.2. Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan

Rp43.193.527.122,00

Saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.193.527.122,00 naik sebesar Rp3.193.754.342,00 atau 7,98% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp39.999.772.780,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.944.188.429,00	6.524.158.243,00	1.406.569.291,00	26.826.599.477,00
2 Dinas Kesehatan	195.101.000,00	4.550.000,00	-	190.551.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	38.409.000,00	-	-	38.409.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	241.178.500,00	278.066.000,00	56.087.500,00	19.200.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	224.335.750,00	-	-	224.335.750,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	109.355.500,00	-	-	109.355.500,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	739.760.250,00	-	-	739.760.250,00
8	RSJD Surakarta	137.915.000,00	-	-	137.915.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	117.295.000,00	-	-	117.295.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.197.000,00	-	-	2.197.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000,00	-	820.000,00	990.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	350.000,00	-	-	350.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
15	Dinas Sosial	761.934.101,00	-	21.000.000,00	782.934.101,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	875.000,00	-	-	875.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79.613.505,00	5.764.500,00	-	73.849.005,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	22.215.000,00	-	-	22.215.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	365.984.500,00	365.984.500,00	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	3.481.000,00	-	-	3.481.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	171.000,00	-	-	171.000,00
22	Dinas Perhubungan	396.311.440,00	-	-	396.311.440,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.721.371.990,00	74.912.000,00	-	1.646.459.990,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.688.571,00	-	-	10.688.571,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.484.000,00	-	-	200.484.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	113.216.475,00	62.725.000,00	53.880.000,00	104.371.475,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.750.000,00	-	-	23.750.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	154.311.000,00	-	-	154.311.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	332.094.780,00	-	-	332.094.780,00
33	SKPKD Aset	13.985.000,00	15.211.000,00	1.226.000,00	-
34	Sekretariat Daerah	417.159.342,00	10.500.000,00	-	406.659.342,00
35	Sekretariat DPRD	518.273.000,00	-	-	518.273.000,00
36	Inspektorat	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.800.000,00	24.800.000,00	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	369.395.000,00	1.226.000,00	19.861.000,00	388.030.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.897.290,00	94.897.290,00	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	160.500.000,00	-	86.620.000,00	247.120.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	439.635.970,00	86.620.000,00	-	353.015.970,00
42	Badan Penghubung	3.214.573.729,00	19.800.000,00	-	3.194.773.729,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	1.726.093.142,00	1.726.093.142,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	9.800.000,00	9.800.000,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	101.783.500,00	101.783.500,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	430.732.468,00	430.732.468,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	90.247.290,00	90.247.290,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-	364.740.000,00	364.740.000,00
Jumlah		43.193.527.122,00	7.569.214.533,00	4.375.460.191,00	39.999.772.780,00

Mutasi Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Barang Bercorak Budaya	
Saldo Awal	39.999.772.780,00
Penambahan	
Belanja Modal	313.366.000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	4.100.345.685,00
Mutasi Masuk	2.889.512.400,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	74.875.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	1.226.000,00
Koreksi	189.889.448,00
Jumlah	7.569.214.533,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	56.087.500,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	23.046.000,00
Mutasi Keluar	2.889.512.400,00
Koreksi	1.406.814.291,00
Jumlah	4.375.460.191,00
Grand Total	43.193.527.122,00



5.3.1.3.5.3. Hewan Ternak dan Tanaman

Rp10.796.852.168,00

Saldo Hewan Ternak dan Tanaman pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.796.852.168,00naik sebesar Rp854.474.900,00 atau 8,59% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.942.377.268,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	603.421.900,00	144.671.245,00	30.398.495,00	489.149.150,00
2 Dinas Kesehatan	37.950.000,00	-	-	37.950.000,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-	-	-
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	-
6 RSUD Tugurejo Semarang	295.101.633,00	-	-	295.101.633,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	-	-
8 RSJD Surakarta	-	-	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-	-	-
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15 Dinas Sosial	-	-	-	-
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	148.822.000,00	148.822.000,00	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
22 Dinas Perhubungan	39.465.000,00	-	-	39.465.000,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	70.950.000,00	70.950.000,00	-	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.549.338.435,00	1.465.450.000,00	722.913.850,00	8.806.802.285,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
33 SKPKD Aset	-	310.630.100,00	310.630.100,00	-
34 Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36 Inspektorat	-	-	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-
39 Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-



	2017	Bertambah	Berkurang	2016
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.303.200,00	-	-	42.303.200,00
42 Badan Penghubung	-	-	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	2.334.000,00	2.334.000,00
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	-	70.950.000,00	70.950.000,00
50 Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	-	-
51 Dinas Kehutanan	-	-	148.822.000,00	148.822.000,00
Jumlah	10.796.852.168,00	2.140.523.345,00	1.286.048.445,00	9.942.377.268,00

Mutasi Aset Hewan Ternak dan Tanaman selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Hewan Ternak & Tanaman

Saldo Awal 9.942.377.268,00

Penambahan

Belanja Modal 1.465.450.000,00

Belanja Barang/Jasa -

Hibah 131.989.345,00

Mutasi Masuk 532.736.100,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -

Koreksi 10.347.900,00

Jumlah 2.140.523.345,00

Berkurang

Ekstrakontable -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya 722.913.850,00

Mutasi Keluar 532.736.100,00

Koreksi 30.398.495,00

Jumlah 1.286.048.445,00

Grand Total 10.796.852.168,00

5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Rp353.075.638.925,00



Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp353.075.638.925,00 naik sebesar Rp163.700.722.284,00 atau 86,44% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp189.374.916.641,00, dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)			
		2017	Bertambah	Berkurang	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.631.845.871,00	16.486.393.236,00	2.520.323.400,00	22.665.776.035,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	5.688.297.961,00	5.688.297.961,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	140.262.415.110,00	140.262.415.110,00	115.433.090.500,00	115.433.090.500,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	47.367.485.101,00	17.981.779.750,00	-	29.385.705.351,00
4	RSUD Tugurejo	3.972.508.700,00	3.972.508.700,00	-	-
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.597.044.380,00	2.488.694.380,00	333.608.000,00	441.958.000,00
7	RSJD Surakarta	12.072.532.250,00	11.949.091.000,00	-	123.441.250,00
8	RSJD RM Soedjarwadi Klaten	40.911.600,00	-	-	40.911.600,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.267.784.000,00	48.537.000	-	4.219.247.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.579.936.373,00	1.084.353.351,00	-	1.495.583.022,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70.086.000,00	-	-	70.086.000,00
12	Dinas Perhubungan	745.747.500,00	-	-	745.747.500,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	275.026.500,00	226.192.500,00	-	48.834.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.736.000,00	98.736.000,00	-	-
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	6.711.699.922,00	6.711.699.922,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	101.513.982.540,00	100.057.012.540,00	-	1.456.970.000,00
17	Sekretariat Dewan	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
18	Badan Penghubung	36.548.000,00	-	-	36.548.000,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	229.773.000,00	-	-	229.773.000,00
20	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	41.779.000,00	41.779.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	133.276.000,00	-	-	133.276.000,00
22	Dinas Kehutanan	-	-	226.192.500,00	226.192.500,00
Jumlah		353.075.638.925,00	294.655.713.567,00	130.954.991.283,00	189.374.916.641,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal 189.374.916.641,00

Penambahan

Belanja Modal -

Belanja Barang/Jasa -



Hibah	8.688.635.314,00
Mutasi Masuk	6.979.671.422,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	63.712.304.779,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	215.316.881.052,00
Jumlah	294.697.492.567,00

Berkurang

Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	7.716.339.361,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	6.979.671.422,00
Koreksi	116.300.759.500,00
Jumlah	130.996.770.283,00

Grand Total	353.075.638.925,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp11.021.353.520.343,90)

Saldo Akumulasi Penyusutan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp(11.021.353.520.343,90) naik sebesar (Rp1.090.315.362.290,00) atau 10,98% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp(9.931.038.158.053,56). Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
	2017	2016
1 Alat Besar	155.517.191.726,60	134.430.616.538,26
2 Alat Angkut	313.462.681.724,89	277.482.555.342,72
3 Alat Bengkel	235.840.064.057,80	233.798.111.467,10
4 Alat Pertanian	40.609.316.602,25	36.141.033.932,25
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.374.982.479.197,75	1.201.527.719.134,40
6 Alat Studio dan Komunikasi	152.500.820.362,80	134.960.010.544,50
7 Alat Kedokteran	870.801.380.250,60	669.717.419.790,43
8 Alat Laboratorium	247.933.254.688,42	242.988.228.380,15
9 Alat Keamanan	4.551.473.236,50	3.863.767.218,00
10 Gedung	1.498.359.021.875,27	1.393.967.735.681,83
11 Monumen	12.580.638.829,19	12.054.848.876,36
12 Jalan dan Jembatan	5.901.795.404.188,20	5.418.766.672.060,23
13 Bangunan Air dan Irigasi	187.167.993.299,69	150.992.192.976,37
14 Instalasi	16.552.603.723,88	13.352.316.855,06
15 Jaringan	8.699.196.580,06	6.994.929.255,90



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Jumlah	11.021.353.520.343,90	9.931.038.158.053,56
Saldo Awal		9.931.038.158.053,56	
Bertambah		363.018.834,99	
Berkurang		255.961.964.363,82	
Saldo Awal Setelah Koreksi		9.675.439.212.524,73	
Mutasi Tahun berjalan			
Penambahan			
Hibah		51.296.782.420,74	
Mutasi Masuk		373.168.649.304,70	
Aset Lainnya		3.206.374.777,00	
Koreksi		49.465.996.430,47	
Jumlah		477.137.802.932,91	
Berkurang			
Ekstrakontable		2.656.802.200,72	
Mutasi Keluar		373.168.649.304,70	
Aset Lainnya		12.361.616.337,17	
Koreksi		107.042.917.035,68	
Jumlah		495.229.984.878,27	
Beban Penyusutan		1.364.006.489.764,53	
Grand Total		11.021.353.520.343,90	

a. Alat Besar

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.520.932.775,00	6.430.655.309,10
2	Dinas Kesehatan	3.099.602.100,00	2.578.530.325,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	5.703.951.829,00	4.238.207.408,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	11.716.028.278,76	10.574.349.930,76
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.963.012.125,00	1.042.253.250,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	4.639.512.846,38	3.792.968.396,13
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.250.114.420,25	1.897.262.326,50
8	RSJD Surakarta	1.049.422.500,00	939.890.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	562.483.549,00	445.342.334,63
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	55.826.072.198,32	47.667.452.229,85
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	14.361.146.348,00	13.025.002.525,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	189.965.211,50
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	240.056.250,00	160.037.500,00
15	Dinas Sosial	612.960.000,00	483.614.625,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	2.225.157.612,50	1.987.552.450,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	244.634.646,00	164.577.521,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	630.318.750,00	625.112.500,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	325.210.125,00	187.806.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	907.776.518,00	523.730.893,00
22	Dinas Perhubungan	1.453.214.300,00	1.272.417.062,50
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	147.729.500,00	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	228.312.500,00	154.225.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	181.628.125,00	189.000.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.589.505.750,00	1.002.614.875,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.583.698.260,00	3.487.273.260,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.257.069.430,00	1.067.104.718,75
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.712.638.183,50	2.863.937.356,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	468.460.962,00	434.128.562,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.659.301.887,50	1.361.810.875,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.693.845.961,00	4.104.914.571,00
33	SKPKD Aset	615.018.187,50	-
34	Sekretariat Daerah	5.167.880.435,50	5.005.324.873,00
35	Sekretariat DPRD	941.920.100,00	890.435.850,00
36	Inspektorat	169.042.000,00	169.042.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.745.990.250,00	2.487.895.125,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.454.042.562,62	9.989.218.766,41
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.770.495.023,27	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	290.267.000,00	189.916.500,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.347.379.937,50	1.217.087.250,00
42	Badan Penghubung	161.358.500,00	162.771.500,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	146.210.250,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	188.507.750,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	145.166.000,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	48.851.600,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	15.422.000,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	53.334.375,00
49	Dinas Perkebunan	-	608.365.308,13
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	60.500.000,00
51	Dinas Kehutanan	-	160.830.375,00
Jumlah		155.517.191.726,60	134.430.616.538,26

Saldo Awal	134.430.616.538,26
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	134.430.616.538,26

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	689.966.948,63
Mutasi Masuk	4.193.968.792,13
Aset Lainnya	256.630.000,00
Koreksi	10.657.500,00

Jumlah



5.151.223.240,76

Berkurang

Ekstrakontable	857.668,75
Mutasi Keluar	4.193.968.792,13
Aset Lainnya	1.148.031.000,00
Koreksi	25.736.559,88

Jumlah

5.368.594.020,76

Beban Penyusutan

21.303.945.968,34

Grand Total

155.517.191.726,60

b. Alat Angkutan

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.413.212.259,02	39.101.733.428,13
2 Dinas Kesehatan	5.618.851.682,13	4.787.762.004,75
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	5.725.348.530,89	5.110.200.136,25
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	3.453.250.086,76	3.174.537.249,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.173.315.750,00	2.092.676.250,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	3.443.861.224,88	2.726.372.803,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.992.481.766,25	3.391.800.747,50
8 RSJD Surakarta	3.249.617.950,63	2.956.478.939,52
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.975.276.080,50	1.698.327.983,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.467.673.238,00	4.500.104.138,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.429.022.873,15	2.853.736.884,65
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.480.078.406,00	3.101.915.438,52
13 Satuan Polisi Pamong Praja	3.028.108.696,00	2.250.642.195,76
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.988.577.025,00	2.734.203.464,00
15 Dinas Sosial	8.602.484.766,07	5.911.555.542,50
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	10.956.059.676,75	4.887.427.789,63
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.069.488.866,50	2.473.630.586,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.531.867.093,00	1.076.480.620,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.056.865.958,06	2.069.140.031,26
20 Dinas Ketahanan Pangan	5.815.030.387,50	5.596.942.337,50
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.999.823.973,00	1.416.007.598,00
22 Dinas Perhubungan	29.156.445.206,00	31.876.963.919,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	5.285.929.163,00	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	2.025.007.734,75	1.734.766.006,50
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.623.439.642,52	1.434.137.007,50
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.279.382.207,50	1.999.524.656,00
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.023.934.406,50	2.464.703.361,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	7.431.100.179,67	5.496.710.430,09
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.619.375.654,50	2.934.094.025,89



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.180.368.872,00	2.966.709.059,50
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.920.077.851,50	2.707.869.289,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.839.659.029,50	2.344.832.610,75
33 SKPKD Aset	23.966.260.053,00	-
34 Sekretariat Daerah	37.283.471.990,50	36.871.271.293,50
35 Sekretariat DPRD	10.453.931.436,00	23.759.520.734,25
36 Inspektorat	1.646.308.456,01	1.749.765.776,00
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.451.696.880,75	2.237.124.462,50
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.427.375.303,60	22.152.684.439,38
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.143.654.345,50	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	2.164.282.268,00	1.954.879.268,00
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.533.935.888,00	1.297.974.138,00
42 Badan Penghubung	5.536.748.866,00	4.170.548.591,00
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(0,00)	1.960.070.303,03
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	1.644.605.769,88
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	2.896.588.118,00
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	2.622.818.988,00
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	2.177.288.688,00
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	757.822.146,00
49 Dinas Perkebunan	-	1.956.840.066,00
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	1.677.421.519,00
51 Dinas Kehutanan	-	7.723.344.509,98
Jumlah	313.462.681.724,89	277.482.555.342,72

Saldo Awal	277.482.555.342,72
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	277.482.555.342,72

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	2.855.720.727,00
Mutasi Masuk	65.368.499.662,39
Aset Lainnya	854.900.000,00
Koreksi	540.987.412,50

Jumlah 69.620.107.801,89

Berkurang

Ekstrakontable	1.670.000,00
Mutasi Keluar	65.368.499.662,39
Aset Lainnya	507.306.250,00
Koreksi	1.273.148.578,50

Jumlah 67.150.624.490,89



Beban Penyusutan **33.510.643.071,17**

Grand Total **313.462.681.724,89**

c. Alat Bengkel

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.314.261.116,30	202.015.461.261,70
2 Dinas Kesehatan	6.820.000,00	3.410.000,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	661.966.583,20	503.170.181,90
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.268.214.080,20	2.170.036.040,20
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	10.161.500,00	8.313.500,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	426.402.745,90	368.754.399,60
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	128.915.450,00	115.007.400,00
8 RSJD Surakarta	31.987.500,00	31.031.000,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	13.568.450,00	12.427.200,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.605.200,00	9.605.200,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	667.362.999,40	412.024.799,60
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.700.000,00	85.700.000,00
15 Dinas Sosial	430.869.860,00	419.925.870,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	278.190.000,00	247.280.000,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.770.430.377,00	3.503.967.602,50
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.737.686.995,60	1.317.390.413,20
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	5.866.503.780,00	5.675.271.940,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	25.260.000,00	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.060.000,00	4.530.000,00
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	164.426.300,00	43.712.500,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	553.941.020,00	466.097.560,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.890.220.300,00	508.640.000,00
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	336.500.932,00	251.062.732,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.041.320.050,00	4.417.083.850,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.837.732.668,20	7.951.271.275,00
33 SKPKD Aset	-	-
34 Sekretariat Daerah	98.898.000,00	98.898.000,00
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	28.560.000,00	14.280.000,00
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.925.000,00	2.340.000,00
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	138.025.000,00	138.025.000,00
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	843.150,00	-
42 Badan Penghubung	3.705.000,00	2.270.000,00
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	2.985.000,00
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	9.720.000,00
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	18.945.000,00
49 Dinas Perkebunan	-	959.195.000,00
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	81.919.300,00
51 Dinas Kehutanan	-	1.928.359.441,40
Jumlah	235.840.064.057,80	233.798.111.467,10

Saldo Awal	233.798.111.467,10
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	233.798.111.467,10

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	3.120.937.734,30
Mutasi Masuk	3.062.513.741,40
Aset Lainnya	-
Koreksi	2.245.297.178,80

Jumlah 8.428.748.654,50

Berkurang

Ekstrakontable	39.806.828,40
Mutasi Keluar	3.062.513.741,40
Aset Lainnya	18.271.295,00
Koreksi	21.232.354.177,50

Jumlah 24.352.946.042,30

Beban Penyusutan 17.966.149.978,50

Grand Total 235.840.064.057,80

d. Alat Pertanian

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.809.388.789,75	7.560.937.007,25
2 Dinas Kesehatan	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	26.410.500,00	26.410.500,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
6 RSUD Tugurejo Semarang	292.492.795,00	292.492.795,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	160.782.222,50	141.352.690,00
8 RSJD Surakarta	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.705.500,00	3.458.000,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	146.548.000,00	146.548.000,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	36.220.000,00	30.470.000,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.192.573.493,00	1.962.949.743,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	112.287.125,00	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	248.725.000,00	219.075.000,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	-	-
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.148.000,00	3.148.000,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	397.908.250,00	196.505.750,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	23.219.947.953,00	19.696.984.438,00
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.774.473.974,00	4.227.148.499,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	140.625.000,00	140.625.000,00
33 SKPKD Aset	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.280.000,00	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00
42 Badan Penghubung	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	3.000.000,00
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	26.295.000,00
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	1.341.540.635,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	18.724.375,00
51	Dinas Kehutanan	-	87.568.500,00
	Jumlah	40.609.316.602,25	36.141.033.932,25

Saldo Awal	36,141,033,932.25
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	36,141,033,932.25

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	108,253,490.00
Mutasi Masuk	1,689,703,510.00
Aset Lainnya	-
Koreksi	71,285,900.00
Jumlah	1,869,242,900.00

Berkurang

Ekstrakontable	112,619,815.00
Mutasi Keluar	1,689,703,510.00
Aset Lainnya	-
Koreksi	39,003,490.00
Jumlah	1,841,326,815.00

Beban Penyusutan	4,440,366,585.00

Grand Total	40,609,316,602.25

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	697.364.617.182,10	583.361.147.700,80
2	Dinas Kesehatan	35.896.330.655,10	31.893.867.091,85
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	38.310.441.462,80	34.875.668.399,40
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	41.289.356.377,55	33.979.966.084,90
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	10.749.445.554,40	9.708.029.781,40
6	RSUD Tugurejo Semarang	28.239.996.922,90	23.912.884.134,50
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	9.843.666.873,75	8.187.135.869,60
8	RSJD Surakarta	16.786.758.107,20	14.548.636.250,80
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	10.860.686.349,35	8.997.110.276,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.682.841.466,00	3.950.746.581,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	9.617.250.403,85	8.173.237.268,70
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.306.339.789,00	3.737.506.376,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.800.486.003,60	2.243.100.700,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.337.334.709,00	4.030.165.623,00
15	Dinas Sosial	20.964.148.615,60	19.543.864.126,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	5.562.185.876,60	4.880.394.862,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.526.332.526,00	19.207.127.649,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.265.559.550,00	2.132.108.125,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.866.954.508,95	4.272.295.121,20
20	Dinas Ketahanan Pangan	5.297.091.734,60	5.110.830.750,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.439.928.018,90	4.035.593.901,15
22	Dinas Perhubungan	7.995.422.142,40	13.092.768.479,20
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.755.139.722,70	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	9.329.351.253,35	8.687.929.776,35
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.117.650.855,85	4.985.535.596,50
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.232.369.227,60	3.953.813.016,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.343.319.016,55	16.578.285.422,70
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.202.636.875,55	8.079.590.922,80
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	17.876.621.302,40	10.837.982.375,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.178.952.256,60	8.162.036.961,20
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.812.303.010,30	10.416.443.233,70
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.466.168.914,00	24.994.533.859,20
33	SKPKD Aset	5.419.617.098,00	-
34	Sekretariat Daerah	47.475.081.040,30	52.696.931.500,15
35	Sekretariat DPRD	33.637.988.137,00	30.222.668.867,00
36	Inspektorat	4.617.294.151,00	3.998.584.451,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.470.624.040,90	6.142.712.700,65
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	77.717.211.237,80	91.090.629.760,30
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.886.848.714,80	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	7.372.213.826,80	6.248.333.054,50
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.608.521.029,00	16.679.107.494,00
42	Badan Penghubung	6.459.392.657,60	6.537.526.771,40
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	13.812.141.663,35
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	2.464.807.518,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	1.793.322.323,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	3.851.966.042,90
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	1.801.792.159,40
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	3.746.905.312,15
49	Dinas Perkebunan	-	6.141.853.272,40
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	2.221.504.364,00
51	Dinas Kehutanan	-	11.506.595.565,25
Jumlah		1.374.982.479.197,75	1.201.527.719.134,40

Saldo Awal	1.201.527.719.134,40
Bertambah	699.520,00
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	1.201.528.418.654,40



Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	18.411.353.400,30
Mutasi Masuk	93.138.976.777,65
Aset Lainnya	2.050.699.567,00
Koreksi	5.308.167.983,05
Jumlah	118.909.197.728,00

Berkurang

Ekstrakontable	2.072.173.201,80
Mutasi Keluar	93.138.976.777,65
Aset Lainnya	6.783.579.299,25
Koreksi	14.691.497.507,30
Jumlah	116.686.226.786,00

Beban Penyusutan	171.231.089.601,35

Grand Total	1.374.982.479.197,75

f. Alat Studio dan Komunikasi

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.151.837.755,40	65.193.622.039,40
2	Dinas Kesehatan	3.388.615.626,00	2.978.796.206,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.855.631.024,00	2.364.403.214,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	780.614.269,00	631.313.329,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	563.544.061,00	430.587.214,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	2.816.060.045,00	2.501.944.970,10
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.217.828.338,00	1.014.360.083,20
8	RSJD Surakarta	854.669.268,00	756.890.868,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	264.291.700,00	219.208.750,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	245.239.100,00	198.332.600,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.767.634.200,00	1.597.319.100,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	457.595.096,00	527.606.433,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	393.299.000,00	311.516.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.723.361.000,00	1.629.701.000,00
15	Dinas Sosial	565.869.000,00	524.738.200,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	1.414.865.149,00	1.304.050.549,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.769.140.701,00	1.585.065.501,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	266.008.000,00	241.972.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.205.815.841,20	499.370.538,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	607.670.500,00	598.707.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.210.158.723,00	961.480.943,00
22	Dinas Perhubungan	1.762.425.706,00	2.447.658.677,60
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.111.331.203,80	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	760.824.300,00	686.775.100,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	480.647.184,00	435.076.289,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.449.529.780,80	506.935.701,20
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.357.089.658,00	1.778.099.471,80
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	889.085.600,00	757.502.200,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.005.693.988,40	1.526.348.201,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	753.243.800,00	615.186.100,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.092.613.699,00	2.724.128.799,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	975.063.649,00	924.755.284,00
33	SKPKD Aset	112.961.000,00	-
34	Sekretariat Daerah	18.311.338.298,00	18.660.200.124,20
35	Sekretariat DPRD	1.920.903.400,00	1.687.901.800,00
36	Inspektorat	324.535.165,00	205.073.365,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.187.091.895,00	770.086.495,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.970.508.620,40	3.964.423.856,20
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.994.184.590,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	264.720.104,80	221.637.753,60
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.036.524.452,00	1.672.519.494,00
42	Badan Penghubung	1.220.755.872,00	1.114.483.724,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	3.045.290.969,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	275.143.200,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	188.287.750,00
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	742.544.935,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	190.005.396,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	296.338.900,00
49	Dinas Perkebunan	-	1.238.507.731,60
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	813.464.200,00
51	Dinas Kehutanan	-	1.400.648.489,60
Jumlah		152.500.820.362,80	134.960.010.544,50

Saldo Awal	134.960.010.544,50
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	134.960.010.544,50

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	1.389.828.126,20
Mutasi Masuk	11.048.398.836,00
Aset Lainnya	5.400.000,00
Koreksi	534.270.406,20
Jumlah	12.977.897.368,40



Berkurang	
Ekstrakontable	44.266.329,40
Mutasi Keluar	11.048.398.836,00
Aset Lainnya	168.328.137,00
Koreksi	1.153.884.931,40
Jumlah	12.414.878.233,80
Beban Penyusutan	16.977.790.683,70
Grand Total	152.500.820.362,80

g. Alat Kedokteran

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.899.628.738,20	3.404.290.890,20
2 Dinas Kesehatan	27.407.377.475,80	24.143.761.672,80
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	280.288.824.157,80	219.245.746.694,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	297.015.654.581,60	224.305.494.423,20
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	32.709.063.816,20	23.761.070.419,63
6 RSUD Tugurejo Semarang	110.323.468.740,60	84.135.691.730,40
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	62.889.826.573,00	49.872.765.424,80
8 RSJD Surakarta	18.527.797.012,80	13.318.702.794,60
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	35.405.898.463,60	25.943.244.049,80
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	612.872.129,00	209.137.129,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	600.493.912,00	381.413.912,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	-	-
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.100.000,00	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	324.626.000,00	265.940.000,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78.235.000,00	78.235.000,00
33 SKPKD Aset	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
34	Sekretariat Daerah	247.529.000,00	239.621.000,00
35	Sekretariat DPRD	241.135.000,00	215.425.000,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	460.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	460.000,00	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	55.098.650,00	52.420.650,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	166.291.000,00	136.899.000,00
42	Badan Penghubung	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	7.100.000,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	-
Jumlah		870.801.380.250,60	669.717.419.790,43

Saldo Awal	669.717.419.790,43
Bertambah	-
Berkurang	0,60
Saldo Awal Setelah Koreksi	669.717.419.789,83

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	8.146.395.342,00
Mutasi Masuk	397.975.000,00
Aset Lainnya	-
Koreksi	12.909.185.699,20
Jumlah	21.453.556.041,20

Berkurang

Ekstrakontable	31.838.699,20
Mutasi Keluar	397.975.000,00
Aset Lainnya	3.210.135.493,00
Koreksi	14.427.164,00
Jumlah	3.654.376.356,20

Beban Penyusutan	183.284.780.775,77

Grand Total	870.801.380.250,60



h. Alat Laboratorium

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.976.107.918,88	161.388.709.377,37
2 Dinas Kesehatan	13.448.279.112,38	11.771.140.315,21
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	7.407.847.942,01	6.668.372.492,88
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.169.408.866,00	2.200.018.866,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.106.830.787,50	1.474.779.654,13
6 RSUD Tugurejo Semarang	8.719.180.482,31	7.006.898.043,16
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.782.152.034,00	1.667.817.592,75
8 RSJD Surakarta	1.371.571.993,75	1.193.679.987,50
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.105.710.679,38	889.111.772,50
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.064.518.650,04	3.820.124.275,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.064.282.903,37	808.642.891,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	798.136.250,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	112.290.000,00	112.290.000,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.557.090.037,90	4.170.750.775,61
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.271.579.674,45	5.483.138.699,50
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	161.849.250,00	160.355.500,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	87.745.359,00	81.592.959,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	5.327.050.096,76	4.557.105.567,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.058.571.948,42	2.193.552.523,75
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.892.677.188,75	7.435.446.420,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.193.761.850,00	3.021.206.175,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.561.579.888,52	9.092.567.870,33
33 SKPKD Aset	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	68.922.000,00	60.072.000,00
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	424.246.025,00	360.832.200,00
42 Badan Penghubung	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	50.845.000,00
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	6.400.520.005,79
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	120.521.166,67
	Jumlah	247.933.254.688,42	242.988.228.380,15

Saldo Awal	242.988.228.380,15
Bertambah	332.475,00
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	242.988.560.855,15

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	5.400.560.179,87
Mutasi Masuk	7.548.580.922,21
Aset Lainnya	-
Koreksi	1.311.891.587,62
Jumlah	14.261.032.689,70

Berkurang

Ekstrakontable	147.729.216,25
Mutasi Keluar	7.548.580.922,21
Aset Lainnya	130.887.005,00
Koreksi	32.531.178.436,97
Jumlah	40.358.375.580,43

Beban Penyusutan	31.042.036.724,00

Grand Total	247.933.254.688,42

i. Alat Keamanan

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.708.709.517,25	1.343.726.662,50
2 Dinas Kesehatan	-	-
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
6 RSUD Tugurejo Semarang	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	140.871.791,25	93.914.527,50
8 RSJD Surakarta	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.175.000,00	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.335.400,00	7.490.750,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.400.000,00	9.575.000,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	89.352.500,00	56.815.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	-	-
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	1.233.805.753,00	990.850.503,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.670.000,00	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	31.204.725,00	31.204.725,00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.000.000,00	18.000.000,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.367.000,00	3.683.500,00
33 SKPKD Aset	-	-
34 Sekretariat Daerah	1.247.931.550,00	1.242.231.550,00
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.650.000,00	23.650.000,00
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42 Badan Penghubung	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	20.625.000,00
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	3.150.000,00
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	-
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51 Dinas Kehutanan	-	18.850.000,00
Jumlah	4.551.473.236,50	3.863.767.218,00



Saldo Awal	3.863.767.218,00
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	3.863.767.218,00

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	50.361.250,00
Mutasi Masuk	48.800.000,00
Aset Lainnya	-
Koreksi	273.000,00
Jumlah	99.434.250,00

Berkurang

Ekstrakontable	3.450.000,00
Mutasi Keluar	48.800.000,00
Aset Lainnya	1.155.350,00
Koreksi	17.761.250,00
Jumlah	71.166.600,00

Beban Penyusutan	659.438.368,50

Grand Total	4.551.473.236,50

j. Gedung

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	791.944.110.774,32	708.794.389.295,35
2 Dinas Kesehatan	15.594.939.637,32	13.594.669.639,48
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	39.552.883.321,55	36.898.287.217,01
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	40.298.950.501,09	36.039.172.718,90
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	7.905.209.034,34	7.077.669.271,55
6 RSUD Tugurejo Semarang	20.692.828.817,65	18.039.576.644,09
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	10.417.311.799,22	8.757.190.837,29
8 RSJD Surakarta	10.679.229.868,09	9.993.514.118,96
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	9.040.848.516,86	8.071.685.995,96
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.239.469.561,57	9.879.419.120,27
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.973.980.787,92	7.651.228.095,68
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.290.318.151,27	2.240.173.316,18
13 Satuan Polisi Pamong Praja	2.824.564.325,57	2.461.494.000,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.650.764.642,50	1.539.491.405,00
15 Dinas Sosial	70.310.982.973,77	66.858.641.542,05
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	998.226.290,79	860.053.167,08
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.515.366.608,20	12.182.813.596,58
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.255.070.154,70	7.062.163.475,40
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.928.685.318,08	2.437.407.322,36



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
20	Dinas Ketahanan Pangan	1.534.490.727,40	1.310.730.070,44
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.617.597.819,87	2.263.985.955,64
22	Dinas Perhubungan	23.886.594.662,88	22.486.768.720,20
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.458.100.807,17	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	8.633.731.464,03	8.005.246.291,78
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.653.089.759,81	2.514.672.643,65
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.187.004.313,35	3.058.923.776,98
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.264.213.075,83	8.811.753.361,89
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.031.073.008,40	16.572.481.731,33
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.808.682.693,70	31.935.363.762,18
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.234.557.074,25	14.812.630.035,86
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.501.289.964,02	4.395.936.186,16
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.451.333.960,31	17.227.708.354,34
33	SKPKD Aset	64.258.987.948,81	-
34	Sekretariat Daerah	47.327.551.590,70	45.869.081.439,41
35	Sekretariat DPRD	14.634.120.061,53	13.387.118.389,19
36	Inspektorat	4.782.757.922,17	4.463.034.348,09
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.597.357.241,15	6.427.725.958,01
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	49.170.977.557,11	125.169.714.797,63
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.450.849.481,88	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	3.454.538.590,90	3.299.854.671,79
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	27.359.766.383,91	26.243.789.475,05
42	Badan Penghubung	5.946.614.681,28	5.673.686.479,89
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	15.502.004.655,29
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	3.621.266.948,57
45	Badan Koordinasi Wilayah I	0,00	5.826.317.748,96
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	7.902.926.166,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	(0,00)	26.106.361.147,85
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	224.099.520,00
49	Dinas Perkebunan	-	6.259.235.154,47
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	128.541.920,00
51	Dinas Kehutanan	-	4.027.735.191,99
Jumlah		1.498.359.021.875,27	1.393.967.735.681,83

Saldo Awal	1.393.967.735.681,83
Bertambah	209.748.407,51
Berkurang	10.307.235.987,80
Saldo Awal Setelah Koreksi	1.383.870.248.101,54

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	10.290.823.393,04
Mutasi Masuk	154.953.113.778,50
Aset Lainnya	38.745.210,00
Koreksi	26.490.964.674,96
Jumlah	191.773.647.056,50



Berkurang	
Ekstrakontable	199.573.892,60
Mutasi Keluar	154953.113.778,50
Aset Lainnya	384.592.507,92
Koreksi	35.512.185.695,05
Jumlah	191.049.465.874,07
Beban Penyusutan	113.764.592.591,30
Grand Total	1.498.359.021.875,27

k. Monumen

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.368.717.765,72	3.785.996.697,37
2 Dinas Kesehatan	408.782.003,20	306.485.442,40
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	125.674.220,00	111.474.600,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	121.968.000,00	115.404.000,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	17.585.800,00	14.068.640,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	44.434.721,52	35.962.456,14
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	479.398.854,00	387.550.716,00
8 RSJD Surakarta	65.124.208,00	48.843.156,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	350.411.982,17	333.122.526,39
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	450.000,00	420.000,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	193.246.032,50	173.063.245,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	46.120.720,00	23.060.360,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.462.000,00	26.429.000,00
15 Dinas Sosial	123.126.840,00	117.064.860,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.817.280,00	62.188.264,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.600.000,00	9.800.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	88.022.640,00	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	36.595.600,00	29.254.400,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	2.953.872.796,92	2.233.928.905,90
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	2.796.850,00	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.601.200,00	9.014.640,00
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	103.642.040,04	18.442.491,82
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	56.506.625,19	49.374.889,52
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	140.954.271,20	102.911.260,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.666.288.262,53	551.808.830,10
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	560.671.540,22	479.093.777,42
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.184.000,00	2.028.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD Aset	95.717.932,00	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	166.559.760,00	97.762.004,00
36	Inspektorat	1.717.200,00	1.431.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.959.600,00	15.075.200,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.165.678.250,56	1.121.796.791,30
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	174.355.666,62	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	432.327.486,00	402.676.555,00
42	Badan Penghubung	452.266.680,80	411.151.528,00
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	23.344.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	888.045.440,00
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	66.775.200,00
	umlah	12.580.638.829,19	12.054.848.876,36

Saldo Awal	12.054.848.876,36
Bertambah	-
Berkurang	1.818.289.976,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	10.236.558.900,36

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	28.813.668,98
Mutasi Masuk	1.187.175.767,94
Aset Lainnya	-
Koreksi	3.600.000,00
Jumlah	1.219.589.436,92

Berkurang

Ekstrakontable	2.816.549,32
Mutasi Keluar	1.187.175.767,94
Aset Lainnya	-
Koreksi	24.118.959,66
Jumlah	1.214.111.276,92

Beban Penyusutan	2.338.601.768,83

Grand Total	12.580.638.829,19



I. Jalan dan Jembatan

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.774.940.357,00	4.964.606.746,00
2	Dinas Kesehatan	117.825.000,00	117.825.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.319.714.300,00	1.057.358.200,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	55.711.452,64	49.276.089,48
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.794.180.762,50	1.480.467.633,33
8	RSJD Surakarta	799.121.111,00	606.584.561,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	58.198.200,00	48.498.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.843.706.498.670,46	5.364.272.429.658,45
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	52.859.000,00	52.859.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.042.648.218,00	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	11.971.433.103,00	11.215.276.832,50
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	107.570.743,60	48.804.621,80
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.053.892.450,00	776.211.500,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.860.990.900,00	2.145.644.500,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	672.795.550,00	402.647.925,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD Aset	26.900.626.970,00	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	348.336.000,00	338.566.250,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	26.900.626.970,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.158.061.400,00	2.133.924.050,00
42	Badan Penghubung	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	301.830.006,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	172.600.600,00
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51 Dinas Kehutanan	-	1.680.633.416,67
Jumlah	5.901.795.404.188,20	5.418.766.672.060,23

Saldo Awal	5.418.766.672.060,23
Bertambah	-
Berkurang	243.765.588.837,09
Saldo Awal Setelah Koreksi	5.175.001.083.223,14

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	372.376.850,00
Mutasi Masuk	29.773.795.618,00
Aset Lainnya	-
Koreksi	17.500.000,00
Jumlah	30.163.672.468,00

Berkurang

Ekstrakontable	-
Mutasi Keluar	29.773.795.618,00
Aset Lainnya	-
Koreksi	106.424.450,00
Jumlah	29.880.220.068,00

Beban Penyusutan	726.510.868.565,06

Grand Total	5.901.795.404.188,20

m. Bangunan Air

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.948.176.324,89	1.663.537.554,17
2 Dinas Kesehatan	101.458.070,00	87.585.630,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	184.966.405,30	144.416.997,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	175.000.000,00	175.000.000,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	22.990.100,00	19.705.800,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	131.685.395,00	100.259.192,50
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	674.327.670,01	568.164.860,40
8 RSJD Surakarta	29.196.800,00	26.006.275,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	132.049.425,00	94.217.260,84
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	31.958.759.230,53	29.287.137.715,01



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	132.358.646.979,95	102.997.574.588,20
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	1.030.854.884,58	985.190.003,51
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	28.925.000,00	26.700.000,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.598.000,00	3.454.080,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	120.333.875,80	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	85.728.800,00	75.726.600,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	2.340.827.178,21	1.963.453.401,42
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	34.455.165,00	29.311.910,00
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.439.200,00	8.579.400,00
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.812.554,55	3.159.127,28
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	61.162.903,23	55.331.451,61
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	11.039.781.587,16	8.721.174.370,66
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.146.836.137,02	1.752.838.334,09
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	95.357.613,93	71.189.666,13
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.030.534.324,54	1.559.277.714,95
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33 SKPKD Aset	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-
35 Sekretariat DPRD	400.323.074,99	340.771.516,67
36 Inspektorat	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.776.250,00	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.990.350,00	11.658.625,00
42 Badan Penghubung	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	41.545.039,56
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	1.522.500,00
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	93.199.326,65
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51 Dinas Kehutanan	-	84.504.035,72
Jumlah	187.167.993.299,69	150.992.192.976,37

Saldo Awal 150.992.192.976,37
Bertambah 21.980.160,00



Berkurang	22.102.833,58
Saldo Awal Setelah Koreksi	150.992.070.302,79

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	397.910.712,50
Mutasi Masuk	228.541.701,93
Aset Lainnya	-
Koreksi	11.914.597,30
Jumlah	638.367.011,73

Berkurang

Ekstrakontable	-
Mutasi Keluar	228.541.701,93
Aset Lainnya	9.330.000,00
Koreksi	389.222.662,50
Jumlah	627.094.364,43

Beban Penyusutan	36.164.650.349,60

Grand Total	187.167.993.299,69

n. Instalasi

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.292.100,07	1.432.641.665,82
2 Dinas Kesehatan	561.792.310,00	447.065.950,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	146.519.500,00	136.751.533,33
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.803.561.457,25	2.290.755.083,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	20.784.400,00	19.299.800,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	2.940.136.585,58	2.313.278.255,91
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	595.293.651,09	482.998.383,50
8 RSJD Surakarta	783.464.450,30	652.887.457,61
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	661.869.267,17	577.503.258,75
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	17.194.265,00	13.755.412,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	99.124.738,87	88.738.985,35
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.039.333,33	40.143.666,67
15 Dinas Sosial	20.000.000,00	19.666.666,67
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	16.000.775,00	13.714.950,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94.036.285,92	78.826.427,43
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	333.103.996,87	179.404.680,00
20 Dinas Ketahanan Pangan	6.043.333,33	5.180.000,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22 Dinas Perhubungan	753.929.196,77	607.977.474,70
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	46.450.983,34	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	16.249.697,00	8.734.548,50
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	451.742.108,34	402.376.425,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	55.012.290,32	21.828.588,22
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	176.425.762,19	101.938.898,08
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.960.534.998,88	2.084.308.713,05
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.588.680,00	6.898.800,00
33	SKPKD Aset	-	-
34	Sekretariat Daerah	455.010.704,39	413.311.931,25
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	127.734.607,50	110.918.355,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	54.914.067,07	131.535.826,83
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	110.346.143,25	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	279.892.650,00	259.892.700,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	143.703.128,75	132.602.490,00
42	Badan Penghubung	38.812.256,30	37.670.719,35
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	19.175.000,00
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	13.160.000,00
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	9.959.250,00
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	39.717.858,33
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	-
51	Dinas Kehutanan	0,00	157.697.100,71
umlah		16.552.603.723,88	13.352.316.855,06

Saldo Awal	13352.316.855,06
Bertambah	130.258.272,48
Berkurang	48.746.728,75
Saldo Awal Setelah Koreksi	13.433.828.398,79

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	8.626.566,67
Mutasi Masuk	340.256.771,68
Aset Lainnya	-
Koreksi	3.299.123,34
Jumlah	352.182.461,69

Berkurang

Ekstrakontable	-
Mutasi Keluar	340.256.771,68



Aset Lainnya	-
Koreksi	7.119.141,67
Jumlah	347.375.913,35

Beban Penyusutan	3.113.968.776,75

Grand Total	16.552.603.723,88

o. Jaringan

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.577.806.670,61	2.233.548.677,75
2	Dinas Kesehatan	125.317.730,42	103.116.069,99
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	243.892.017,13	131.604.948,62
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	194.598.051,00	156.160.775,50
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	386.484.853,75	356.257.226,88
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	444.366,60	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	21.247.566,67	18.486.433,33
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.800.000,00	24.270.166,67
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	147.042.773,33	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	26.548.288,33	24.072.235,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	728.804.606,23	469.921.109,01
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.574.585,00	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.154.327,38	2.010.705,55
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	44.366.521,65	29.638.485,83
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.602.500,00	9.185.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	36.414.275,00	25.716.025,02
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	76.100.416,68	28.011.820,70
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	124.062.841,67	94.690.558,34
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.665.207.646,05	2.905.164.373,96
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	72.705.734,17	65.045.241,66
33	SKPKD Aset	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	174.253.475,00	148.651.631,25



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.893.333,39	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.874.000,00	5.384.500,00
42 Badan Penghubung	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	6.057.950,00
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	41.276.041,67
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	2.480.000,00
51 Dinas Kehutanan	-	114.179.279,17
Jumlah	8.699.196.580,06	6.994.929.255,90

Saldo Awal	6.994.929.255,90
Bertambah	-
Berkurang	-
Saldo Awal Setelah Koreksi	6.994.929.255,90

Mutasi Tahun berjalan

Penambahan

Hibah	24.854.031,25
Mutasi Masuk	188.348.424,87
Aset Lainnya	-
Koreksi	6.701.367,50
Jumlah	219.903.823,62

Berkurang

Ekstrakontable	-
Mutasi Keluar	188.348.424,87
Aset Lainnya	-
Koreksi	24.854.031,25
Jumlah	213.202.456,12

Beban Penyusutan	1.697.565.956,66

Grand Total	8.699.196.580,06

5.3.1.4. Dana Cadangan Rp382.861.505.239,00

Saldo Dana Cadangan sebesar Rp382.861.505.239,00 merupakan dana cadangan yang dibentuk untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2018.



5.3.1.5. Aset Lainnya

Rp352.544.058.652,41

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp352.544.058.652,41 turun sebesar Rp35.840.835.396,34 atau 11,32% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp316.703.223.256,07 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

ASET LAINNYA

	2017	2016
1 Aset Dikerjasamakan	304.791.745.656,00	300.625.848.000,00
	304.791.745.656,00	300.625.848.000,00
2 Aset Tak Berwujud	17.360.650.573,00	13.624.344.073,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.489.310.263,86)	(7.818.018.959,66)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	6.871.340.309,14	5.806.325.113,34
3 Aset Lain-Lain	143.557.960.389,00	91.784.991.687,09
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(102.676.987.701,73)	(81.513.941.544,36)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Netto	40.880.972.687,27	10.271.050.142,73

5.3.1.5.1. Aset Lainnya – Aset yang Dikerjasamakan

Rp304.791.745.656,00

Saldosebesar Rp304.791.745.656,00naik Rp4.165.897.656,00 atau 1,39% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp300.625.848.000,00 merupakan aset yang dikerjasamakan yang terdapat pada :

- Pengelola Barang Daerah (BPKAD) meliputi :
 - 1) Tanah Kawasan PRPP seluas 187,74 Ha dengan nilai sebesar Rp298.784.000.000,00 dikerjasamakan dengan PT IPU, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 03/YAY/Tahun 1987 tanggal 7 Mei 1987 dengan masa perjanjian 75 tahun mulai Tahun 1987. Kerjasama ini masih dalam proses penyelesaian sengketa.
 - 2) Pemanfaatan tanah untuk Skylight Plaza di Kota Magelang dengan mekanisme Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan CV. MSS berdasarkan perjanjian Nomor 593.4/14 tanggal 9 Januari 2007. Obyek kerjasama ini berupa pemanfaatan tanah milik Pemprov Jateng di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Kota



- Magelang seluas 2.425 m² senilai Rp17.297.656,00. Kesepakatan ini berlaku selama 20 tahun, atau sampai dengan 9 Januari 2027.
- 3) Pemanfaatan tanah untuk Pasar Kalierang di Kabupaten Brebes antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Brebes berdasarkan perjanjian nomor 176/2012 dan Nomor 003.A/I/2012 tanggal 18 Januari 2012. Obyek kerjasama ini berupa pemanfaatan tanah milik Pemprov Jateng di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes seluas 13.000 m² senilai Rp3.705.000.000,00 oleh Pemkab Brebes, untuk penyediaan sarana perekonomian yang berupa pasar. Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun dan telah dilakukan perpanjangan kesepakatan pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor 032/508 dan Nomor 032/2060/V/2017.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi Tanah di Desa Clering Kecamatan Keling Kabupaten Jepara seluas 127.150 m² senilai Rp1.841.848.000,00 dikerjakamkan dengan PT Semarang Mineral Pembangunan sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Semarang Mineral Pembangunan Nomor 540/98/PKS/VI Tahun 2016 dan 088/SMP/VI/2016 tentang Kontrak Produksi Pertambangan Feldspar di Gunung Ragas, Desa Clering Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2016 dengan masa perjanjian 20 (dua puluh) tahun dengan ketentuan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata meliputi pemanfaatan tanah untuk Kompleks Masjid Agung Demak (Bintoro) dan Kompleks Makam Sunan Kalijaga (Kadilangu) di Kabupaten Demak. Kerjasama ini dilaksanakan antara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Demak berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 556/7294 dan nomor 556/902.1/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Obyek kerjasama ini berupa pemanfaatan tanah milik Pemprov Jateng di Kelurahan Bintoro (Kompleks Masjid Agung Demak) seluas 1.115 m² senilai Rp223.000.000,00 dan di Kelurahan Kadilangu (Kompleks Makam Sunan Kalijaga) seluas 1.103 m² senilai Rp220.600.000,00. Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun sampai dengan 17 Desember 2020.



5.3.1.5.2. Aset Lainnya – Barang Tidak Berwujud

Rp17.360.650.573,00

Saldo sebesar Rp17.360.650.573,00 naik sebesar Rp3.736.306.500,00 atau 27,42% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.624.344.073,00 merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk aktivitas operasional SKPD per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	887.545.991,00	52.988.500,00	-	834.557.491
2 Dinas Kesehatan	1.137.027.200,00	94.110.000,00	-	1.042.917.200,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.295.626.378,00	141.600.000,00	-	3.154.026.378,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	295.750.000,00	295.750.000,00	-	-
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	760.000.000,00	175.000.000,00	-	585.000.000
6 RSUD Tugurejo Semarang	1.320.090.000,00	196.000.000,00	-	1.124.090.000,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.618.521.000,00	97.550.000,00	-	1.520.971.000,00
8 RSJD Surakarta	496.235.000,00	275.600.000,00	-	220.635.000
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.246.042.169,00	492.000.000,00	-	754.042.169,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.700.000,00	-	-	39.700.000,00
15 Dinas Sosial	474.700.500,00	87.270.500,00	-	387.430.000,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	191.445.000,00	-	-	191.445.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
20 Dinas Ketahanan Pangan	195.580.000,00	-	-	195.580.000,00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.941.000,00	-	-	50.941.000
22 Dinas Perhubungan	43.457.500,00	43.457.500,00	-	-
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.206.030.000,00	1.206.030.000,00	-	-
24 Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	474.592.500,00	-	-	474.592.500
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	140.950.000,00	140.950.000,00	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.081.344.220,00	-	-	1.081.344.220,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.500.000,00	39.500.000,00	-	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	147.850.000,00	100.000.000,00	-	47.850.000
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	189.150.000,00	-	-	189.150.000,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47.740.000,00	-	-	47.740.000
33 SKPKD Aset	-	-	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-	-	-
36 Inspektorat	97.480.865,00	-	-	97.480.865
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	358.815.000,00	113.350.000,00	-	245.465.000
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	501.362.000,00	198.500.000,00	361.900.000,00	664.762.000,00
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	578.200.000,00	578.200.000,00	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	Bertambah	Berkurang	2016
40	Badan Kepegawaian Daerah	151.539.500,00	-	-	151.539.500
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	293.434.750,00	-	-	293.434.750,00
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	113.350.000,00	113.350.000,00
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	-	-	-
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	-	-
50	Badan Koordinasi Penyuluh	-	-	116.300.000,00	116.300.000,00
51	Dinas Kehutanan	-	-	-	-
Jumlah		17.360.650.573,00	4.327.856.500,00	591.550.000,00	13.624.344.073,00

5.3.1.5.2.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp10.489.310.263,86)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan amortisasi aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar (Rp10.489.310.263,86) dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	665.062.824,60	512.230.595,80
2	Dinas Kesehatan	848.931.320,00	719.797.880,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.948.704.841,55	1.499.730.995,98
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	59.150.000,00	-
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	245.600.000,00	117.000.000,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	1.113.690.000,00	975.490.000,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	992.086.800,00	668.382.600,00
8	RSJD Surakarta	153.001.000,00	53.754.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	456.506.376,04	242.369.927,88
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.760.000,00	23.820.000,00
15	Dinas Sosial	254.985.166,67	168.577.200,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	191.445.000,00	191.445.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	195.580.000,00	156.464.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.376.400,00	10.188.200,00
22	Dinas Perhubungan	43.457.500,00	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	241.206.000,00	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	292.533.000,00	195.491.500,00
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	28.190.000,00	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.068.144.220,00	1.054.944.220,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.900.000,00	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39.140.000,00	9.570.000,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	87.660.000,00	49.830.000,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.096.000,00	9.548.000,00
33 SKPKD Aset	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	97.480.865,00	97.480.865,00
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	264.583.000,00	134.883.375,00
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	287.339.600,00	476.587.200,00
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	498.200.000,00	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	151.539.500,00	151.539.500,00
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	185.960.850,00	127.273.900,00
42 Badan Penghubung	-	-
43 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
44 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	55.320.000,00
45 Badan Koordinasi Wilayah I	-	-
46 Badan Koordinasi Wilayah II	-	-
47 Badan Koordinasi Wilayah III	-	-
48 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	-
49 Dinas Perkebunan	-	-
50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi	-	116.300.000,00
51 Dinas Kehutanan	-	-
Jumlah	10.489.310.263,86	7.818.018.959,66

5.3.1.5.3. Aset Lain-lain

Rp143.557.960.389,00

Saldo sebesar Rp143.557.960.389,00 naik sebesar Rp51.772.968.701,91 atau 56,41% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp91.784.991.687,09 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dan aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima Barangnya, dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)	
	2017	2016
Aset Lain-lain	143.557.960.389,00	91.784.991.687,09
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(102.676.987.701,73)	(81.513.941.544,36)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	40.880.972.687,27	10.271.050.142,73



Aset Lain-Lain merupakan aset tetap kondisi rusak berat sebesar Rp90.542.481.719,00 dan aset Jembatan Timbang Dinas Perhubungan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp53.015.478.670,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jembatan Timbang	Tanah (Rp)	Peralatan & Mesin (Rp)	Gedung & Bangunan (Rp)	Jaringan Jembatan & Irigasi (Rp)	Total Aset (Rp)
1	Sambong	1,250,000,000.00	1,204,363,596.00	373,618,936.00		2,827,982,532.00
2	Gubug	1,548,000,000.00	1,097,375,630.00	217,460,113.00		2,862,835,743.00
3	Banyudono	1,650,000,000.00	1,255,846,460.00	854,960,800.00	34,750,000.00	3,795,557,260.00
4	Klepu	1,250,000,000.00	1,851,586,885.00	929,583,431.00	8,600,000.00	4,039,770,316.00
5	Sarang	2,675,250,000.00	237,149,031.00	1,835,574,547.00		4,747,973,578.00
6	Lebawu	1,180,000,000.00	1,138,055,062.00	977,500,000.00		3,295,555,062.00
7	Pringsurat	1,400,000,000.00	1,067,907,999.00	531,478,400.00		2,999,386,399.00
8	Salam	1,238,250,000.00	1,213,881,900.00	888,845,580.00	81,608,238.00	3,422,585,718.00
9	Toyoga	1,788,750,000.00	1,350,561,702.00	1,149,302,500.00	39,600,000.00	4,328,214,202.00
10	Subah	1,700,000,000.00	1,144,455,911.00	673,597,770.00		3,518,053,681.00
11	Tanjung	2,375,000,000.00	1,796,104,041.00	1,060,719,180.00		5,231,823,221.00
12	Selogiri	2,362,500,000.00	1,638,912,369.00	946,324,500.00		4,947,736,869.00
13	Wanareja	1,477,500,000.00	1,409,972,869.00	1,079,319,500.00		3,966,792,369.00
14	Ajibarang	1,196,000,000.00	1,123,664,970.00	676,796,750.00	34,750,000.00	3,031,211,720.00
Jumlah		23,091,250,000.00	17,529,838,425.00	12,195,082,007.00	199,308,238.00	53,015,478,670.00

5.3.1.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp102.676.987.701,73)

Saldo sebesar (Rp102.676.987.701,73) merupakan akumulasi penyusutan atas aset lainnya yang rusak berat per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Alat Besar	3.246.215.614,00	2.054.128.239,00
2	Alat Angkut	8.320.137.526,50	10.093.306.589,00
3	Alat Bengkel	17.219.665.414,60	1.910.122.162,90
4	Alat Pertanian	1.685.022.316,00	1.685.022.316,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.196.992.133,00	35.436.352.192,90
6	Alat Studio dan Komunikasi	1.951.257.174,20	3.559.351.577,00
7	Alat Kedokteran	15.930.881.401,00	12.717.517.108,00
8	Alat Laboratorium	5.633.160.550,35	5.438.560.739,17
9	Alat Keamanan	14.830.350,00	13.675.000,00
10	Gedung	11.250.723.213,05	2.192.662.702,14
11	Monumen	4.154.731.530,00	6.403.808.200,00
12	Jalan dan Jembatan	-	-
13	Bangunan Air dan Irigasi	14.030.000,00	4.112.500,00
14	Instalasi	59.340.479,03	5.322.218,25
15	Jaringan	-	-
Jumlah		102.676.987.701,73	81.513.941.544,36

5.3.2. Kewajiban

Rp369.458.500.479,00



Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar Rp369.458.500.479,00 turun sebesar Rp88.196.296.634,11 atau 19,27% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp457.654.797.113,73 termasuk didalamnya klaim PT PRPP atas tanah jalan akses Bandara A. Yani Semarang seluas 30.852 m² (ref 5.3.2.2 Kewajiban Kontijensi). Rincian Kewajiban sebesar adalah sebagai berikut :

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Rp369.458.500.479,62

Saldo Rp369.458.500.479,62 turun sebesar Rp88.196.296.634,11 atau 19,27% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp457.654.797.113,73 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp0,00

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Rp0,00 tahun 2016 dan 2017.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Rp29.298.716.441,33

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp29.298.716.441,33 naik sebesar Rp28.945.907.307,67 atau 8204,41% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp352.809.133,66 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.243.816.655,33	1.243.816.655,33	167.666.666,66	167.666.666,66
2 RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto	1.046.251.933,00	1.046.251.933,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	34.907.575,00	34.907.575,00	20.855.164,00	20.855.164,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	248.051.050,00	248.051.050,00	62.000.000,00	62.000.000,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.641.061,00	4.641.061,00	4.970.636,00	4.970.636,00
6 RSJD Surakarta	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
7 Dinas Koperasi dan UMKM	158.826.667,00	158.826.667,00	22.316.667,00	22.316.667,00
8 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.552.221.500,00	26.552.221.500,00	-	-
Jumlah	29.298.716.441,33	29.298.716.441,33	352.809.133,66	352.809.133,66



5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp340.159.784.038,29

Saldo sebesar Rp340.159.784.038,29 turun sebesar Rp117.142.203.941,77 atau 25,62% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp457.301.987.980,06, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Utang Jasa Pelayanan	41,176,825,829.00	41,176,825,829.00	23,433,921,290.87	23,433,921,290.87
2 Utang Bagi Hasil Pajak/Retribusi kpd Pemerintah Kab/Kota	247,335,147,639.29	4,647,755,116,731.10	4,812,323,251,641.00	411,903,282,549.19
3 Utang Belanja	51,647,799,901.00	51,584,499,901.00	21,964,775,660.00	21,964,775,660.00
4 Utang Lain-lain	10,669.00	10,669.00	8,480.00	8,480.00
Jumlah	340,159,784,038.29	4,740,516,453,130.10	4,857,721,957,071.87	457,301,987,980.06

5.3.2.1.3.1 Utang Jasa Pelayanan

Rp41.176.825.829,00

Saldo sebesar Rp41.176.825.829,00 merupakan kewajiban pembayaran jasa pelayanan atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2017 akan tetapi belum dilakukan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Kesehatan	3.250.625.800,00	3.250.625.800,00	6.489.886.716,00	6.489.886.716,00
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.177.877.024,00	3.177.877.024,00	2.579.038.196,00	2.579.038.196,00
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	27.277.157.954,00	27.277.157.954,00	8.469.452.473,87	8.469.452.473,87
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.211.623.280,00	2.211.623.280,00	867.298.948,00	867.298.948,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	-	-	2.014.730.216,00	2.014.730.216,00
8 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.612.845.648,00	2.612.845.648,00	810.266.599,00	810.266.599,00
6 RSJD Surakarta	295.668.961,00	295.668.961,00	852.988.423,00	852.988.423,00
7 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	2.351.027.162,00	2.351.027.162,00	1.350.259.719,00	1.350.259.719,00
Jumlah	41.176.825.829,00	41.176.825.829,00	23.433.921.290,87	23.433.921.290,87

5.3.2.1.3.2 Utang Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kpd Kab/Kota

Rp247.335.147.639,29

Saldo sebesar Rp247.335.147.639,29 merupakan hak Pemerintah Kab/Kota se-Jateng dan pihak lainnya atas bagi hasil pajak dan retribusi yang pembayarannya belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

2017	Bertambah	Berkurang	2016



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

1	Pajak Kendaraan Bermotor	72.371.430.881,18	1.153.520.574.225,00	1.194.966.668.661,00	113.817.525.317,18
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.728.247.170,67	909.365.752.200,00	979.684.690.003,00	119.047.184.973,67
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	122.846.155.289,29	1.157.484.791.967,00	1.212.677.813.900,00	178.039.177.222,29
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	623.975.629,55	5.711.386.099,50	5.984.070.946,00	896.660.476,05
5	Pajak Rokok	2.368.345.899,60	1.421.275.619.470,60	1.418.907.273.571,00	-
6	E- Samsat	313.308.225,00	313.308.225,00	-	-
7	Kapal Cepat Kartini I kepada Kabupaten Jepara	83.684.544,00	83.684.544,00	102.734.560,00	102.734.560,00
Jumlah		247.335.147.639,29	4.647.755.116.731,10	4.812.323.251.641,00	411.903.282.549,19

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja

Rp51.647.799.901,00

Saldo sebesar Rp51.647.799.901,00 merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga per 31 desember 2017 belum dibayarkan.

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,012,464,000.00	3,012,464,000.00	-
2 Dinas Kesehatan	15,810,072.00	15,810,072.00	-
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	41,848,834,094.00	41,848,834,094.00	10,560,621,208.00
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2,939,117,084.00	2,875,817,084.00	2,777,093,756.00
4 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	138,021,610.00	138,021,610.00	165,665,000.00
5 RSUD Tugurejo Semarang	354,979,057.00	354,979,057.00	7,283,966,436.00
6 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	674,988,414.00	674,988,414.00	1,051,241,968.00
7 RSJD Surakarta	23,386,000.00	23,386,000.00	8,134,550.00
8 RSJD RM Soedjarwadi Klaten	2,640,199,570.00	2,640,199,570.00	118,052,742.00
Jumlah	51,647,799,901.00	51,584,499,901.00	21,964,775,660.00

5.3.2.1.3.4 Utang Lain-lain

Rp10.669,00

Saldo sebesar Rp10.669,00 merupakan kewajiban yang masih harus ditanggung oleh SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 dan dibayarkan pada Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			8.000,00	8.000,00
2 Badan Kepegawaian Daerah			480,00	480,00
3 Sekretariat Daerah	2.087,00	2.087,00		-
4 Dinas Pertanian	8.582,00	8.582,00		-
Jumlah	10.669,00	10.669,00	8.480,00	8.480,00



5.3.2.2 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- Aset tanah di kawasan PRPP yang dikerjasamakan dan tercatat pada DPPAD digugat oleh PT IPU melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 September 2014, dengan tergugat Gubernur Jawa Tengah, Yayasan PRPP, PT PRPP, BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan Kota Semarang. Atas Gugatan tersebut, PT IPU meminta tertugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp789.181.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp873.213.350.000,00. Saat ini Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jateng yang bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 dan memori kontra kasasi telah disampaikan tanggal 23 Mei 2016. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan kalah, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali Perkara dimaksud.
- Aset Tanah Batusari Mranggen Demak yang tercatat pada KIB DPPAD digugat diajukan oleh Ang Budi Santoso dkk melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Februari 2015, dengan tergugat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, PT Perum Perumnas, CV Megah Perkasa Utama dan TVRI Jawa Tengah. Obyek sengketa adalah tanah bekas Hak Erpacht seluas $\pm 423.000 \text{ m}^2$. Atas Gugatan tersebut, Ang Budi Santoso dkk meminta tertugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp635.602.000,00 dan immateriil sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan putusan perdata no 75/Pdt.G/2015/Pn. Smg dengan amar putusan menyatakan Gugatan para penggugat tidak diterima. Ang Budi Santoso saat ini telah mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Semarang. Putusan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kurang pihak dan terhadap Aset tsb diajukan kembali dengan gugatan perkara. Nomor perkara 133/pdt.G/2016/PN.Smg yang boleh diputus tgl 20 April 2017. Atas putusan perkara tersebut ditengah upaya hukum banding.



- Aset tanah Durian Raya Banyumanik Kota Semarang yang tercatat pada KIB PSDA digugat diajukan oleh Yosef Soewarto dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Obyek sengketa tersebut adalah : Tanah SHM Nomor 5334/Srondol Wetan seluas 2.257 m²; tanah SHM Nomor 5335/Srondol Wetan seluas 762 m²; dan tanah SHM Nomor 5336/Srondol Wetan seluas 1.500 m². Berdasarkan putusan banding penggugat pada Pengadilan Tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan kalah. Upaya hukum selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kasasi.

5.3.3. Ekuitas

Rp33.824.129.032.178,70

Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017 sebesar **Rp33.824.129.032.178,70** naik sebesar Rp3.532.541.752.394,99 atau 11,66% dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar 30.291.587.279.783,70.



5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Pendapatan	25.144.782.615.441,90	27.069.938.085.735,80	(1.925.155.470.294)	(7,11)
2	Beban	22.633.928.232.052,20	19.870.897.097.033,60	2.763.031.135.019	13,90
	Surplus/(Defisit) Operasional	2.510.854.383.389,74	7.199.040.988.702,29	(4.688.186.605.313)	(65,12)
3	Kegiatan Non Operasional	347.556.825,80	35.190.274.536,34	(34.842.717.711)	(99,01)
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	2.511.201.940.215,54	7.234.231.263.238,63	(4.723.029.323.023)	(65,29)
4	Pos Luar Biasa	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	2.511.201.940.215,54	7.234.231.263.238,63	(4.723.029.323.023)	(65,29)

5.4.1. PENDAPATAN LO

Rp25,144,782,615,441.90

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Asli daerah	13.553.066.373.226,90	12.615.661.007.053,80	937.405.366.173	7,43
2 Pendapatan Transfer	11.117.984.434.093,00	8.056.244.781.983,00	3.061.739.652.110	38,00
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	473.731.808.122,00	6.398.032.296.699,00	(5.924.300.488.577)	(92,60)
Jumlah	25.144.782.615.441,90	27.069.938.085.735,80	(1.925.155.470.294)	(7,11)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rp13,553,066,373,226.90

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2017. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp13,553,066,373,226.90, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Pajak Daerah	10,623,601,257,149.00	9,830,061,697,221.00	793,539,559,928	8.07
2 Pendapatan Retribusi Daerah	106,570,603,817.00	108,487,175,881.00	(1,916,572,064)	(1.77)



	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,194,438,135,141.92	1,299,884,255,263.01	(105,446,120,121)	(8.11)
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,628,456,377,118.98	1,377,227,878,688.80	251,228,498,430	18.24
Jumlah	13,553,066,373,226.90	12,615,661,007,053.80	937,405,366,173.09	7.43

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Rp10.623.601.257.149,00

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2017, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2017 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2016. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp10.623.601.257.149,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp106.570.603.817,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp106.570.603.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.857.286.000,00	747.935.000,00	1.109.351.000	148,32
2 Dinas Kesehatan	26.961.776.988,00	24.645.897.430,00	2.315.879.558	9,40
3 Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	7.194.267.663,00	7.361.181.925,00	(166.914.262)	(2,27)
4 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	4.090.328.708,00	3.820.579.155,00	269.749.553	7,06
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	489.711.000,00	(489.711.000)	(100,00)
6 Satuan Polisi Pamong Praja	403.808.600,00	336.287.600,00	67.521.000	20,08
7 Dinas Sosial	247.215.000,00	181.725.000,00	65.490.000	36,04
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.618.953.901,00	4.992.090.308,00	626.863.593	12,56
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.542.207.710,00	1.886.817.000,00	2.655.390.710	140,73
10 Dinas Koperasi dan UMKM	595.505.000,00	757.148.333,00	(161.643.333)	(21,35)
11 Dinas Perhubungan	2.764.463.750,00	1.681.260.000,00	1.083.203.750	64,43
12 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.796.956.555,00	1.046.289.500,00	1.750.667.055	167,32
13 Badan Arsip dan Perpustakaan	89.753.940,00	79.638.592,00	10.115.348	12,70
14 Dinas Kelautan dan Perikanan	10.197.491.980,00	5.084.644.464,00	5.112.847.516	100,55



		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.584.521.421,00	15.891.706.461,00	(4.307.185.040)	(27,10)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.714.218.140,00	5.627.350.550,00	86.867.590	1,54
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.934.628.135,00	1.016.150.000,00	918.478.135	90,39
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.536.282.820,00	8.400.946.300,00	(5.864.663.480)	(69,81)
19	Sekretariat Daerah	2.236.180.000,00	1.940.000.000,00	296.180.000	15,27
20	Sekretariat DPRD	1.448.925.000,00	1.324.050.000,00	124.875.000	9,43
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.600.000,00	19.630.000,00	6.970.000	35,51
22	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.928.459.541,00	8.641.563.377,00	(3.713.103.836)	(42,97)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.136.253.725,00	-	5.136.253.725	100,00
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.655.919.240,00	2.557.529.000,00	98.390.240	3,85
25	Badan Penghubung	1.008.600.000,00	843.800.000,00	164.800.000	19,53
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	2.789.450.699,00	(2.789.450.699)	(100,00)
27	Badan Koordinasi Wilayah I	-	34.815.000,00	(34.815.000)	(100,00)
28	Badan Koordinasi Wilayah II	-	277.100.000,00	(277.100.000)	(100,00)
29	Badan Koordinasi Wilayah III	-	284.400.000,00	(284.400.000)	(100,00)
30	Dinas Perkebunan	-	2.670.431.037,00	(2.670.431.037)	(100,00)
31	Dinas Kehutanan	-	3.057.048.150,00	(3.057.048.150)	(100,00)
	Jumlah	106.570.603.817,00	108.487.175.881,00	(1.916.572.064,00)	(1,77)

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Kekaayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp1.194.438.135.141,92**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan diterima oleh PPKD pada Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp1.194.438.135.141,92 merupakan pendapatan deviden dari penyertaan modal BUMD dan selisih nilai metode ekuitas dan metode cost yang digunakan dalam perhitungan penyertaan modal.

5.4.1.1.4. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp1.628.456.377.118,98**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diterima oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp1.628.456.377.118,98 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.194.064.100,00	-	23.194.064.100,00	100,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	594.827.171.774,33	574.709.572.969,01	20.117.598.805,32	3,50
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	373.007.105.141,30	279.479.160.034,85	93.527.945.106,45	33,47
4	RSUD Tugurejo Semarang	143.280.414.630,60	144.083.618.330,00	(803.203.699,40)	(0,56)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	36.935.984.760,00	28.958.369.110,00	7.977.615.650,00	27,55
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	33.087.768.936,87	28.767.213.971,00	4.320.554.965,87	15,02
7	RSJD Surakarta	33.035.381.486,00	28.112.665.544,00	4.922.715.942,00	17,51



		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	40.753.623.238,33	35.775.818.207,00	4.977.805.031,33	13,91
9	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	333.279.165,00	490.332.450,00	(157.053.285,00)	(32,03)
10	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	60.377.600,00	468.160,00	59.909.440,00	12.796,79
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.100.000,00	11.920.000,00	3.180.000,00	26,68
13	Dinas Ketahanan Pangan	-	25.500.000,00	(25.500.000,00)	(100,00)
14	Dinas Perhubungan	2.156.406.766,00	4.059.756.407,00	(1.903.349.641,00)	(46,88)
15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	261.771.988,00	-	261.771.988,00	#DIV/0!
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.096.071,00	350.000,00	2.746.071,00	784,59
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	48.123.366,00	74.235.148,00	(26.111.782,00)	(35,17)
18	SKPKD	179.896.607.331,55	147.469.018.784,94	32.427.588.546,61	21,99
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	76.504.871.997,00	1.665.000,00	76.503.206.997,00	4.594.787,21
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	84.785.796.816,00	(84.785.796.816,00)	(100,00)
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71.797.000.507,00	-	71.797.000.507,00	100,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	920.400.000,00	735.300.000,00	185.100.000,00	25,17
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.337.828.260,00	19.628.195.000,00	(1.290.366.740,00)	(6,57)
24	Dinas Kehutanan	-	58.622.757,00	(58.622.757,00)	(100,00)
Jumlah		1.628.456.377.118,98	1.377.227.878.688,80	251.228.498.430,18	18,24

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Rp11.117.984.434.093,00

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.117.984.434.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	11.067.786.491.093,00	8.017.297.595.983,00	3.050.488.895.110	38,05
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	50.197.943.000,00	38.947.186.000,00	11.250.757.000	28,89
Jumlah		11.117.984.434.093,00	8.056.244.781.983,00	3.061.739.652.110	38,00

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Rp11.067.786.491.093,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.067.786.491.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dana Bagi Hasil Pajak	834.422.861.130,00	879.355.173.005,00	(44.932.311.875)	(5,11)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	13.887.050.263,00	14.318.048.913,00	(430.998.650)	(3,01)
3	Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	1.859.907.223.000,00	1.792.679.208.000	96,39



	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
4 Dana Alokasi Khusus	6.566.890.148.700,00	5.263.717.151.065,00	1.303.172.997.635	24,76
Jumlah	11.067.786.491.093,00	8.017.297.595.983,00	3.050.488.895.110	38,05

5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Rp50.197.943.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.197.943.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
2 Dana Penyesuaian	-	-	-	-
3 Dana Insentif Daerah	50.197.943.000,00	38.947.186.000,00	11.250.757.000	28,89
Jumlah	50.197.943.000,00	38.947.186.000,00	11.250.757.000	28,89

5.4.1.3 LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Rp473.731.808.122,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp473,731,808,122.00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Hibah	472,993,923,952.00	6,397,277,226,056.00	(5,924,283,302,104)	(92.61)
2 Pendapatan Lainnya (Bagi Hasil Pemda Lain)	737,884,170.00	755,070,643.00	(17,186,473)	(2.28)
Jumlah	473,731,808,122.00	6,398,032,296,699.00	(5,924,300,488,577)	(92.60)

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Rp472.993.923.952,00

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp472,993,923,952.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Hibah Uang	36,938,923,844.00	47,360,623,204.00	(10,421,699,360)	(22.00)
2 Hibah Barang/Jasa	436,055,000,108.00	6,349,916,602,852.00	(5,913,861,602,744)	(93.13)
Jumlah	472,993,923,952.00	6,397,277,226,056.00	(5,924,283,302,104)	(92.61)

5.4.1.3.1.1. Hibah Uang

Rp36.938.923.844,00

Realisasi Hibah Uang pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.938.923.844,00. Hibah Uang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada SKPKD.

5.4.1.3.1.2. Hibah Barang / Jasa

Rp436.055.000.108,00



Realisasi Hibah Barang /Jasa pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp436,055,000,108.00 merupakan hibah aset dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	271,024,470,195.00	5,883,106,535,252.00	(5,612,082,065,057)	(95.39)
2	Dinas Kesehatan	121,645,756,804.00	175,782,844,930.00	(54,137,088,126)	(30.80)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	16,707,633,730.00	1,986,129,054.00	14,721,504,676	741.22
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	496,135,000.00	(496,135,000)	(100.00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	336,067,338.00	253,997,000.00	82,070,338	32.31
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	4,596,052,752.00	9,762,952,000.00	(5,166,899,248)	(52.92)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	2,389,995,000.00	-	2,389,995,000	100.00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	15,925,405.00	(15,925,405)	(100.00)
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	7.00	-	7	100.00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	1,749,652,115.00	(1,749,652,115)	(100.00)
12	Dinas Sosial	1,306,373,036.00	-	1,306,373,036	100.00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	2,093,685,097.00	(2,093,685,097)	(100.00)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,954,008,370.00	-	3,954,008,370	100.00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	37,842,000.00	226,150,000.00	(188,308,000)	(83.27)
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	273,960,000.00	(273,960,000)	(100.00)
17	Dinas Perhubungan	3,549,473,211.00	127,268,609,606.00	(123,719,136,395)	(97.21)
18	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	8,309,078,665.00	465,300,000.00	7,843,778,665	1,685.75
19	Badan Arsip dan Perpustakaan	-	2,593,405,848.00	(2,593,405,848)	(100.00)
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	98,155,423,312.00	(98,155,423,312)	(100.00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	3,704,340,000.00	(3,704,340,000)	(100.00)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	21,241,611,700.00	(21,241,611,700)	(100.00)
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1,280,249,000.00	45,144,000.00	1,235,105,000	2,735.92
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	918,000,000.00	-	918,000,000	100.00
25	Dinas Perkebunan	-	1,301,118,276.00	(1,301,118,276)	(100.00)
26	Dinas Kehutanan	-	19,393,684,257.00	(19,393,684,257)	(100.00)
Jumlah		436,055,000,108.00	6,349,916,602,852.00	(5,913,861,602,744.00)	(93.13)

5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Rp737.884.170,00

Realisasi Pendapatan Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp737.884.170,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Retribusi dari pengelolaan tempat wisata Ketep Pass Tahun 2017 yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017 .



5.4.2. BEBAN LO

Rp22.633.928.232.052,20

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Operasional	16,034,502,481,572.90	13,856,614,541,082.40	2,177,887,940,490	15.72
2 Beban Transfer	6,599,425,750,479.29	6,014,282,555,951.19	585,143,194,528	9.73
Jumlah	22,633,928,232,052.20	19,870,897,097,033.60	2,763,031,135,018.59	13.90

5.4.2.1. BEBAN OPERASIONAL

Rp16.034.502.481.572,90

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp16,034,502,481,572.90 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Pegawai	6,120,397,772,800.00	2,568,789,725,395.00	3,551,608,047,405	138.26
2 Beban Persediaan	1,159,304,252,796.95	1,134,406,801,016.04	24,897,451,781	2.19
3 Beban Jasa	1,567,256,021,526.93	851,719,757,624.04	715,536,263,903	84.01
4 Beban Pemeliharaan	311,393,352,455.00	359,646,193,617.00	(48,252,841,162)	(13.42)
5 Beban Perjalanan Dinas	286,252,574,896.00	304,481,294,882.00	(18,228,719,986)	(5.99)
6 Beban Bunga	-	-	-	
7 Bunga Subsidi	-	-	-	
8 Beban Hibah	4,953,383,231,751.00	5,241,635,439,376.00	(288,252,207,625)	(5.50)
9 Beban Bantuan Sosial	238,268,220,000.00	36,531,500,000.00	201,736,720,000	552.23
10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,367,763,205,123.53	3,143,845,306,863.24	(1,776,082,101,740)	(56.49)
11 Beban Lainnya	30,483,850,223.47	215,558,522,309.06	(185,074,672,086)	(85.86)
Jumlah	16,034,502,481,572.90	13,856,614,541,082.40	2,177,887,940,490.49	15.72

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Rp6.120.397.772.800,00

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp6,120,397,772,800.00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,792,526,864,391.00	213,425,431,102.00	3,579,101,433,289	1,676.98
2 Dinas Kesehatan	103,591,619,013.00	106,669,667,877.00	(3,078,048,864)	(2.89)
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	166,890,341,351.00	163,103,862,302.00	3,786,479,049	2.32
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	118,177,957,153.00	116,649,635,950.00	1,528,321,203	1.31
5 RSUD Tugurejo Semarang	86,997,613,718.00	85,367,278,948.00	1,630,334,770	1.91
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	54,978,227,329.00	54,613,836,271.00	364,391,058	0.67



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	29,301,616,705.00	27,652,064,445.00	1,649,552,260	5.97
8	RSJD Surakarta	62,316,563,241.00	63,645,338,097.00	(1,328,774,856)	(2.09)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	37,270,657,495.00	36,979,725,283.00	290,932,212	0.79
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	115,041,350,380.00	116,178,773,890.00	(1,137,423,510)	(0.98)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	97,044,015,230.00	91,317,278,528.00	5,726,736,702	6.27
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16,404,273,903.00	28,308,392,719.00	(11,904,118,816)	(42.05)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	15,224,939,167.00	13,972,688,242.00	1,252,250,925	8.96
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,433,017,881.00	20,253,668,232.00	(3,820,650,351)	(18.86)
15	Dinas Sosial	127,763,720,348.00	137,527,895,356.00	(9,764,175,008)	(7.10)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,255,074,770.00	10,400,015,546.00	(1,144,940,776)	(11.01)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74,862,473,724.00	64,025,150,579.00	10,837,323,145	16.93
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	15,479,218,682.00	14,285,261,799.00	1,193,956,883	8.36
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	125,835,727,760.00	15,012,389,930.00	110,823,337,830	738.21
20	Dinas Ketahanan Pangan	14,800,041,411.00	15,577,722,454.00	(777,681,043)	(4.99)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	19,172,153,745.00	15,291,280,820.00	3,880,872,925	25.38
22	Dinas Perhubungan	53,584,358,273.00	90,023,631,337.00	(36,439,273,064)	(40.48)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	23,521,396,963.00	-	23,521,396,963	100.00
24	Dinas Koperasi dan UMKM	21,462,070,796.00	24,412,458,240.00	(2,950,387,444)	(12.09)
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	14,516,274,287.00	13,004,261,171.00	1,512,013,116	11.63
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	46,450,409,194.00	20,143,396,551.00	26,307,012,643	130.60
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	25,658,492,647.00	26,222,773,707.00	(564,281,060)	(2.15)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	53,745,308,910.00	52,463,847,488.00	1,281,461,422	2.44
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	155,673,470,553.00	128,471,124,167.00	27,202,346,386	21.17
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	37,650,346,307.00	41,045,877,587.00	(3,395,531,280)	(8.27)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26,598,966,750.00	21,073,150,758.00	5,525,815,992	26.22
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	48,378,896,853.00	71,243,175,724.00	(22,864,278,871)	(32.09)
33	KDH dan Wakil KDH	14,709,657,315.00	15,668,743,979.00	(959,086,664)	(6.12)
34	DPRD	55,475,495,474.00	42,607,794,144.00	12,867,701,330	30.20
35	Sekretariat Daerah	100,407,404,174.00	146,289,179,053.00	(45,881,774,879)	(31.36)
36	Sekretariat DPRD	24,374,391,762.00	23,454,836,128.00	919,555,634	3.92
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	31,086,598,101.00	21,439,586,851.00	9,647,011,250	45.00
38	Inspektorat	18,060,477,759.00	19,434,244,539.00	(1,373,766,780)	(7.07)
39	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	169,272,158,796.00	179,705,468,799.00	(10,433,310,003)	(5.81)
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34,571,971,050.00	-	34,571,971,050	100.00
41	Badan Kepegawaian Daerah	24,406,721,860.00	24,060,516,881.00	346,204,979	1.44
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31,239,589,230.00	31,137,446,082.00	102,143,148	0.33
43	Badan Penghubung	10,185,848,349.00	11,365,190,897.00	(1,179,342,548)	(10.38)



		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
44	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	35,272,566,096.00	(35,272,566,096)	(100.00)
45	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	12,589,101,158.00	(12,589,101,158)	(100.00)
46	Badan Koordinasi Wilayah I	-	6,282,155,426.00	(6,282,155,426)	(100.00)
47	Badan Koordinasi Wilayah II	-	11,828,292,139.00	(11,828,292,139)	(100.00)
48	Badan Koordinasi Wilayah III	-	7,948,058,488.00	(7,948,058,488)	(100.00)
49	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	-	4,140,146,181.00	(4,140,146,181)	(100.00)
50	Dinas Perkebunan	-	32,189,151,555.00	(32,189,151,555)	(100.00)
51	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	19,869,685,940.00	(19,869,685,940)	(100.00)
52	Dinas Kehutanan	-	25,146,505,959.00	(25,146,505,959)	(100.00)
Jumlah		6,120,397,772,800.00	2,568,789,725,395.00	3,551,608,047,405	138.26

5.4.2.1.2. Beban Persediaan

Rp1.159.304.252.796,95

Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan (*use of goods*) periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Beban persediaan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp1.159.304.252.796,95 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.647.614.887,00	27.206.276.144,00	1.441.338.743	5,30
2	Dinas Kesehatan	135.155.811.521,00	191.659.619.874,00	(56.503.808.353)	(29,48)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	328.830.677.350,67	293.231.208.739,10	35.599.468.612	12,14
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	128.606.795.798,02	110.504.327.454,97	18.102.468.343	16,38
5	RSUD Tugurejo Semarang	58.166.914.568,26	72.555.211.519,74	(14.388.296.951)	(19,83)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	13.052.290.847,00	12.240.006.193,00	812.284.654	6,64
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	17.374.867.048,49	16.056.023.984,96	1.318.843.064	8,21
8	RSJD Surakarta	12.949.302.990,33	11.918.609.552,80	1.030.693.438	8,65
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	12.283.704.270,72	16.579.899.983,89	(4.296.195.713)	(25,91)
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	12.987.629.497,00	7.322.416.477,00	5.665.213.020	77,37
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	13.984.651.159,00	9.699.615.246,00	4.285.035.913	44,18
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.411.972.500,00	13.524.485.255,00	(11.112.512.755)	(82,17)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.958.880.433,00	1.777.237.810,00	181.642.623	10,22
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.741.899.050,00	7.535.917.915,00	(3.794.018.865)	(50,35)
15	Dinas Sosial	46.846.601.256,00	49.359.723.695,00	(2.513.122.439)	(5,09)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.340.944.366,00	4.231.760.193,00	(890.815.827)	(21,05)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.176.629.385,00	10.663.246.037,00	(2.486.616.652)	(23,32)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.475.879.950,00	2.479.132.050,00	(3.252.100)	(0,13)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.222.313.626,52	8.778.298.852,34	4.444.014.774	50,63
20	Dinas Ketahanan Pangan	8.516.694.913,00	7.445.727.002,00	1.070.967.911	14,38
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	3.635.521.300,00	3.231.563.708,00	403.957.592	12,50



		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
22	Dinas Perhubungan	5.404.129.475,00	15.015.987.481,00	(9.611.858.006)	(64,01)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.648.807.467,00	-	3.648.807.467	100,00
24	Dinas Koperasi dan UMKM	5.775.623.264,00	11.028.430.364,00	(5.252.807.100)	(47,63)
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	2.007.974.705,00	1.851.364.530,00	156.610.175	8,46
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	24.701.073.267,00	11.009.152.156,00	13.691.921.111	124,37
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	3.950.387.460,00	3.139.840.380,00	810.547.080	25,81
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.306.344.817,00	11.841.714.096,00	(535.369.279)	(4,52)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	96.517.890.177,00	14.576.749.907,00	81.941.140.270	562,14
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.129.902.066,00	18.700.519.985,00	8.429.382.081	45,08
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.285.430.650,00	12.311.557.650,00	5.973.873.000	48,52
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.937.231.175,43	10.321.141.183,57	(1.383.910.008)	(13,41)
33	Sekretariat Daerah	23.182.716.005,00	25.015.660.280,00	(1.832.944.275)	(7,33)
34	Sekretariat DPRD	12.881.859.914,00	12.334.174.845,00	547.685.069	4,44
35	Inspektorat	2.328.910.501,00	1.286.112.750,00	1.042.797.751	81,08
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.982.717.204,00	2.963.619.243,00	5.019.097.961	169,36
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	24.158.076.287,00	26.064.869.149,00	(1.906.792.862)	(7,32)
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.291.315.312,00	-	6.291.315.312	100,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	3.576.624.343,00	3.604.572.714,00	(27.948.371)	(0,78)
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.320.351.724,00	10.905.240.831,00	1.415.110.893	12,98
41	Badan Penghubung	2.018.043.601,00	1.979.030.793,00	39.012.808	1,97
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33.710.000,00	7.355.177.318,00	(7.321.467.318)	(99,54)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	194.800,00	7.325.150.790,00	(7.324.955.990)	(100,00)
44	Badan Koordinasi Wilayah I	-	861.697.000,00	(861.697.000)	(100,00)
45	Badan Koordinasi Wilayah II	-	814.337.039,00	(814.337.039)	(100,00)
46	Badan Koordinasi Wilayah III	-	875.525.285,00	(875.525.285)	(100,00)
47	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	1.356.000,00	739.631.000,00	(738.275.000)	(99,82)
48	Dinas Perkebunan	393.105.940,00	28.685.096.776,00	(28.291.990.836)	(98,63)
49	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	7.766.740.530,00	(7.766.740.530)	(100,00)
50	Dinas Kehutanan	102.879.925,50	8.033.399.253,67	(7.930.519.328)	(98,72)
Jumlah		1.159.304.252.796,95	1.134.406.801.016,04	24.897.451.781	2,19

5.4.2.1.3. Beban Jasa

Rp1.567.256.021.526,93

Beban Jasa merupakan beban jasa yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, beban jasa konsultasi dan lain-lain yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1,567,256,021,526.93 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	688,776,460,387.00	63,814,083,188.00	624,962,377,199	979.35
2 Dinas Kesehatan	87,544,981,867.00	71,136,243,340.00	16,408,738,527	23.07
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	197,394,024,532.00	193,868,810,466.00	3,525,214,066	1.82
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	129,301,373,537.13	113,745,213,387.20	15,556,160,150	13.68
5 RSUD Tugurejo Semarang	50,818,528,954.33	51,316,201,743.75	(497,672,789)	(0.97)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	15,886,825,752.00	12,535,481,970.67	3,351,343,781	26.73
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	14,484,122,267.00	14,047,335,243.00	436,787,024	3.11
8 RSJD Surakarta	19,651,337,383.67	16,171,794,045.33	3,479,543,338	21.52
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	18,852,763,301.33	13,728,235,829.67	5,124,527,472	37.33
10 Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	19,512,541,708.00	20,025,497,103.00	(512,955,395)	(2.56)
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	7,305,270,087.33	5,546,898,137.67	1,758,371,950	31.70
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9,441,367,989.00	13,722,843,952.00	(4,281,475,963)	(31.20)
13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,686,537,552.66	6,016,206,707.33	1,670,330,845	27.76
14 Satuan Polisi Pamong Praja	2,040,245,074.00	1,393,618,737.67	646,626,336	46.40
15 Dinas Sosial	8,936,026,537.00	10,512,620,338.00	(1,576,593,801)	(15.00)
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,560,271,254.50	2,681,996,231.00	(121,724,977)	(4.54)
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,866,847,609.00	9,005,464,317.33	(1,138,616,708)	(12.64)
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2,982,794,026.33	3,009,888,061.83	(27,094,035)	(0.90)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5,464,693,100.59	3,480,887,821.33	1,983,805,279	56.99
20 Dinas Ketahanan Pangan	2,737,051,655.00	1,811,530,031.00	925,521,624	51.09
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	6,023,321,760.00	3,626,547,240.00	2,396,774,520	66.09
22 Dinas Perhubungan	11,594,305,816.67	10,936,757,735.08	657,548,082	6.01
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	12,305,636,875.00	79,700,000.00	12,225,936,875	100.00
24 Dinas Koperasi dan UMKM	11,023,487,882.53	11,826,783,407.80	(803,295,525)	(6.79)
25 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	2,031,420,941.70	2,127,753,775.47	(96,332,834)	(4.53)
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	67,595,083,051.33	12,910,414,248.67	54,684,668,803	423.57
27 Badan Arsip dan Perpustakaan	4,218,914,871.01	2,753,698,019.66	1,465,216,851	53.21
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	5,125,742,564.00	6,134,185,686.33	(1,008,443,122)	(16.44)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	11,957,290,270.67	4,052,391,640.00	7,904,898,631	195.07
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7,202,750,441.00	3,615,370,184.00	3,587,380,257	99.23
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7,450,439,378.00	7,522,495,636.25	(72,056,258)	(0.96)
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13,091,917,802.17	19,684,162,719.50	(6,592,244,917)	(33.49)
33 Sekretariat Daerah	21,518,133,620.83	26,119,671,575.92	(4,601,537,955)	(17.62)
34 Sekretariat DPRD	20,112,126,426.17	19,733,198,770.50	378,927,656	1.92
35 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6,970,638,872.00	5,300,389,100.00	1,670,249,772	31.51
36 Inspektorat	1,827,052,595.66	1,277,031,577.00	550,021,019	43.07
37 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26,919,175,014.50	25,406,900,082.17	1,512,274,932	5.95
38 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,547,390,935.00	-	2,547,390,935	100.00
39 Badan Kepegawaian Daerah	4,794,618,639.00	4,368,756,522.00	425,862,117	9.75
40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18,218,317,312.24	17,586,742,756.67	631,574,556	3.59



		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
41	Badan Penghubung	5,225,646,512.58	4,058,129,423.15	1,167,517,089	28.77
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31,949,750.00	14,536,564,300.67	(14,504,614,551)	(99.78)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	24,750,000.00	4,254,092,135.00	(4,229,342,135)	(99.42)
44	Badan Koordinasi Wilayah I	-	637,191,168.00	(637,191,168)	(100.00)
45	Badan Koordinasi Wilayah II	-	1,338,135,559.00	(1,338,135,559)	(100.00)
46	Badan Koordinasi Wilayah III	42,340,000.00	1,050,543,490.75	(1,008,203,491)	(95.97)
47	Sekretariat Komita Penyiaran Indonesia Daerah	8,255,525.00	1,869,187,449.00	(1,860,931,924)	(99.56)
48	Dinas Perkebunan	45,180,166.67	4,937,948,197.33	(4,892,768,031)	(99.09)
49	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	3,620,331,192.83	(3,620,331,193)	(100.00)
50	Dinas Kehutanan	106,069,928.33	2,783,833,379.50	(2,677,763,451)	(96.19)
Jumlah		1,567,256,021,526.93	851,719,757,624.04	715,536,263,903	84.01

5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Rp311.393.352.455,00

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp311.393.552.455,00 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.783.219.640,00	1.164.180.085,00	4.619.039.555	396,76
2	Dinas Kesehatan	4.679.607.360,00	5.568.286.826,00	(888.679.466)	(15,96)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	21.541.347.702,00	27.283.577.739,00	(5.742.230.037)	(21,05)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	18.141.581.139,00	15.393.406.757,00	2.748.174.382	17,85
5	RSUD Tugurejo Semarang	2.945.989.562,00	5.958.664.095,00	(3.012.674.533)	(50,56)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.599.383.900,00	2.968.091.055,00	(368.707.155)	(12,42)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.750.351.876,00	2.270.685.346,00	(520.333.470)	(22,92)
8	RSJD Surakarta	3.142.406.471,00	7.404.878.411,00	(4.262.471.940)	(57,56)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.119.037.716,00	899.572.510,00	219.465.206	24,40
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	107.097.088.561,00	134.628.708.301,00	(27.531.619.740)	(20,45)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	38.382.307.123,00	32.415.897.451,00	5.966.409.672	18,41
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	856.355.550,00	726.705.325,00	129.650.225	17,84
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.442.521.405,00	1.376.554.825,00	65.966.580	4,79
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.041.564.471,00	3.330.935.338,00	(2.289.370.867)	(68,73)
15	Dinas Sosial	3.733.561.876,00	5.149.856.208,00	(1.416.294.332)	(27,50)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	556.596.339,00	1.388.103.553,00	(831.507.214)	(59,90)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.305.361.223,00	3.026.743.698,00	(721.382.475)	(23,83)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	482.357.725,00	613.618.754,00	(131.261.029)	(21,39)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.425.034.716,00	748.030.900,00	677.003.816	90,50
20	Dinas Ketahanan Pangan	426.119.722,00	590.128.821,00	(164.009.099)	(27,79)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	2.118.799.547,00	1.185.537.198,00	933.262.349	78,72
22	Dinas Perhubungan	3.796.818.874,00	3.551.461.389,00	245.357.485	6,91
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.274.925.051,00	-	1.274.925.051	100,00
24	Dinas Koperasi dan UMKM	1.180.290.707,00	1.618.100.499,00	(437.809.792)	(27,06)
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	737.977.346,00	696.466.039,00	41.511.307	5,96
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.290.556.157,00	1.621.311.565,00	669.244.592	41,28
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	1.061.292.800,00	1.437.233.075,00	(375.940.275)	(26,16)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.426.215.092,00	2.643.253.017,00	8.782.962.075	332,28
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.002.799.755,00	11.439.264.057,00	(4.436.464.302)	(38,78)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.418.912.483,00	1.771.020.697,00	(352.108.214)	(19,88)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.883.936.775,00	1.571.141.611,00	312.795.164	19,91
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.308.832.490,00	1.935.624.563,00	(626.792.073)	(32,38)
33	Sekretariat Daerah	8.470.486.790,00	13.186.729.791,00	(4.716.243.001)	(35,77)
34	Sekretariat DPRD	11.354.671.528,00	7.902.531.207,00	3.452.140.321	43,68
35	Inspektorat	1.285.356.354,00	1.783.260.130,00	(497.903.776)	(27,92)
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.658.902.585,00	1.489.532.015,00	169.370.570	11,37
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	22.425.171.087,00	28.774.073.115,00	(6.348.902.028)	(22,06)
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.306.601.436,00	-	2.306.601.436	100,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.723.815.772,00	1.558.832.251,00	164.983.521	10,58
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.426.884.119,00	5.227.461.655,00	(800.577.536)	(15,31)
41	Badan Penghubung	2.788.311.630,00	2.564.352.678,00	223.958.952	8,73
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	3.304.944.713,00	(3.304.944.713)	(100,00)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	614.046.800,00	(614.046.800)	(100,00)
44	Badan Koordinasi Wilayah I	-	1.093.156.337,00	(1.093.156.337)	(100,00)
45	Badan Koordinasi Wilayah II	-	1.460.373.227,00	(1.460.373.227)	(100,00)
46	Badan Koordinasi Wilayah III	-	893.285.915,00	(893.285.915)	(100,00)
47	Sekretariat Komita Penyiaran Indonesia Daerah	-	235.397.752,00	(235.397.752)	(100,00)
48	Dinas Perkebunan	-	2.976.774.014,00	(2.976.774.014)	(100,00)
49	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	160.273.680,00	(160.273.680)	(100,00)
50	Dinas Kehutanan	-	4.044.128.629,00	(4.044.128.629)	(100,00)
Jumlah		311.393.352.455,00	359.646.193.617,00	(48.252.841.162)	(13,42)

5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Rp286.252.574.896,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp286.252.574.896,00 dan termasuk sebagai Beban Barang dan Jasa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.225.056.522,00	7.475.387.508,00	1.749.669.014	23,41
2 Dinas Kesehatan	8.481.535.935,00	9.148.263.993,00	(666.728.058)	(7,29)
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	933.119.690,00	799.936.535,00	133.183.155	16,65
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.335.900.639,00	1.291.085.775,00	44.814.864	3,47
5 RSUD Tugurejo Semarang	235.027.526,00	304.558.635,00	(69.531.109)	(22,83)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	456.526.791,00	449.050.710,00	7.476.081	1,66
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	809.199.820,00	1.617.127.750,00	(807.927.930)	(49,96)
8 RSJD Surakarta	558.423.583,00	651.381.360,00	(92.957.777)	(14,27)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	769.133.960,00	1.352.154.926,00	(583.020.966)	(43,12)
10 Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	3.261.279.186,00	3.059.022.516,00	202.256.670	6,61
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	12.185.387.247,00	7.742.627.508,00	4.442.759.739	57,38
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.643.147.264,00	3.421.488.170,00	(1.778.340.906)	(51,98)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	4.314.175.517,00	4.261.273.978,00	52.901.539	1,24
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.618.882.572,00	6.478.413.140,00	(859.530.568)	(13,27)
15 Dinas Sosial	4.190.390.944,00	7.003.769.545,00	(2.813.378.601)	(40,17)
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.739.815.591,00	4.316.628.047,00	(1.576.812.456)	(36,53)
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.724.047.340,00	10.319.418.143,00	(2.595.370.803)	(25,15)
18 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	1.936.361.022,00	2.083.400.630,00	(147.039.608)	(7,06)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.673.591.011,00	5.100.424.122,00	3.573.166.889	70,06
20 Dinas Ketahanan Pangan	1.539.483.362,00	2.342.052.127,00	(802.568.765)	(34,27)
21 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.785.580.052,00	4.347.065.673,00	438.514.379	10,09
22 Dinas Perhubungan	4.465.033.647,00	7.791.258.981,00	(3.326.225.334)	(42,69)
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	4.280.510.469,00	-	4.280.510.469	100,00
24 Dinas Koperasi dan UMKM	9.801.413.410,00	10.892.574.020,00	(1.091.160.610)	(10,02)
25 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	2.577.377.808,00	3.718.551.786,00	(1.141.173.978)	(30,69)
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10.452.719.870,00	2.166.947.832,00	8.285.772.038	382,37
27 Badan Arsip dan Perpustakaan	1.518.011.000,00	2.135.342.200,00	(617.331.200)	(28,91)
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	3.603.434.896,00	6.280.238.354,00	(2.676.803.458)	(42,62)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.542.650.918,00	5.623.733.718,00	8.918.917.200	158,59
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.032.052.040,00	4.440.386.760,00	(408.334.720)	(9,20)
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.034.878.319,00	6.957.033.964,00	77.844.355	1,12
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.795.213.407,00	11.473.938.166,00	(7.678.724.759)	(66,92)
33 Sekretariat Daerah	27.755.343.078,00	36.290.534.376,00	(8.535.191.298)	(23,52)
34 Sekretariat DPRD	59.470.990.160,00	46.602.649.145,00	12.868.341.015	27,61
35 Inspektorat	13.120.225.228,00	13.378.069.019,00	(257.843.791)	(1,93)
36 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.401.516.466,00	5.720.511.785,00	4.681.004.681	81,83
37 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.015.274.954,00	16.133.529.408,00	(3.118.254.454)	(19,33)
38 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.576.603.559,00	-	4.576.603.559	100,00
39 Badan Kepegawaian Daerah	3.924.998.870,00	3.759.608.669,00	165.390.201	4,40
40 Badan Pengembangan Sumber Daya	5.005.992.680,00	3.773.408.658,00	1.232.584.022	32,67



	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
Manusia				
41 Badan Penghubung	1.462.268.543,00	1.798.826.517,00	(336.557.974)	(18,71)
42 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	5.727.140.800,00	(5.727.140.800)	(100,00)
43 Badan Penelitian dan Pengembangan	-	3.643.964.187,00	(3.643.964.187)	(100,00)
44 Badan Koordinasi Wilayah I	-	1.601.406.250,00	(1.601.406.250)	(100,00)
45 Badan Koordinasi Wilayah II	-	1.523.922.690,00	(1.523.922.690)	(100,00)
46 Badan Koordinasi Wilayah III	-	2.090.487.047,00	(2.090.487.047)	(100,00)
47 Sekretariat Komita Penyiaran Indonesia Daerah	-	1.206.907.803,00	(1.206.907.803)	(100,00)
48 Dinas Perkebunan	-	8.817.346.937,00	(8.817.346.937)	(100,00)
49 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	2.701.289.077,00	(2.701.289.077)	(100,00)
50 Dinas Kehutanan	-	4.667.155.942,00	(4.667.155.942)	(100,00)
Jumlah	286.252.574.896,00	304.481.294.882,00	(18.228.719.986)	(5,99)

5.4.2.1.6. Beban Bunga

Rp0,00

Beban Bunga merupakan Beban Bunga periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 bernilai Nihil.

5.4.2.1.7. Beban Subsidi

Rp0,00

Beban Subsidi merupakan Beban Subsidi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 bernilai Nihil.

5.4.2.1.8. Beban Hibah

Rp4.953.383.231.751,00

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 4,953,383,231,751.00.

5.4.2.1.9. Beban Bantuan Sosial

Rp238.268.220.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp238.268.220.000,00.

5.4.2.1.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp1.367.763.205.123,53

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi Beban pada tahun 2017 sebesar Rp1.367.763.205.123,53, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Penyusutan Aset Tetap	1.364.006.489.764,53	2.981.854.374.695,19	(1.617.847.884.931)	(54,26)
2 Beban Amortisasi	2.671.291.304,19	2.096.000.416,59	575.290.888	27,45



3	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.085.424.054,81	159.894.931.751,46	(158.809.507.697)	(99,32)
	Jumlah	1.367.763.205.123,53	3.143.845.306.863,24	(1.776.082.101.739,71)	(56,49)

5.4.2.1.10.1. Beban Penyusutan Aset Tetap

Rp1.364.006.489.764,53

Beban Penyusutan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.364.006.489.764,53 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.121.870.335,14	1.673.111.699.185,00	(1.462.989.828.850)	(87,44)
2 Dinas Kesehatan	12.693.139.388,07	11.375.416.515,44	1.317.722.873	11,58
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	70.440.309.366,21	56.451.238.129,92	13.989.071.236	24,78
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	74.736.153.921,68	57.671.038.229,05	17.065.115.693	29,59
5 RSUD Tugurejo Semarang	37.184.909.476,31	30.387.469.229,61	6.797.440.247	22,37
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	9.205.303.561,63	14.063.157.427,21	(4.857.853.866)	(34,54)
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	18.385.233.370,73	18.284.738.830,09	100.494.541	0,55
8 RSJD Surakarta	9.283.419.926,78	8.562.306.993,78	721.112.933	8,42
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	13.223.200.294,59	12.157.154.813,25	1.066.045.481	8,77
10 Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	735.719.628.966,03	929.849.973.381,46	(194.130.344.415)	(20,88)
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	33.680.473.655,38	27.913.600.018,30	5.766.873.637	20,66
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	929.832.706,57	1.489.010.630,84	(559.177.924)	(37,55)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	1.238.107.180,61	3.341.142.473,01	(2.103.035.292)	(62,94)
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	906.519.416,66	911.565.612,17	(5.046.196)	(0,55)
15 Dinas Sosial	5.446.413.196,83	5.933.059.911,90	(486.646.715)	(8,20)
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.779.731.332,13	3.403.757.920,57	(1.624.026.588)	(47,71)
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.702.755.422,98	3.691.205.459,40	11.549.964	0,31
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	797.625.323,30	734.212.508,92	63.412.814	8,64
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.662.447.594,65	3.224.291.677,91	4.438.155.917	137,65
20 Dinas Ketahanan Pangan	646.523.073,42	836.736.784,90	(190.213.711)	(22,73)
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	1.605.393.975,44	1.249.031.102,95	356.362.872	28,53
22 Dinas Perhubungan	5.602.808.189,90	431.864.122,70	5.170.944.067	1.197,35
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	3.081.424.905,74	-	3.081.424.906	100,00
24 Dinas Koperasi dan UMKM	1.859.921.177,70	1.107.308.814,49	752.612.363	67,97
25 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.288.535.584,81	1.053.697.310,74	234.838.274	22,29
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.319.112.128,21	3.874.881.852,57	1.444.230.276	37,27
27 Badan Arsip dan Perpustakaan	2.387.977.785,98	2.373.798.990,67	14.178.795	0,60
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	8.306.219.223,73	14.140.828.838,83	(5.834.609.615)	(41,26)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.040.813.051,98	10.208.406.112,89	1.832.406.939	17,95
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.459.222.868,28	4.780.905.648,87	678.317.219	14,19



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.867.158.945,18	7.599.746.251,41	(1.732.587.306)	(22,80)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.781.187.644,75	(11.554.335.048,69)	18.335.522.693	(158,69)
33	SKPKD	5.833.119.564,29	-	5.833.119.564	100,00
34	Sekretariat Daerah	10.929.927.643,07	10.216.346.771,59	713.580.871	6,98
35	Sekretariat DPRD	5.921.897.436,16	2.935.082.670,79	2.986.814.765	101,76
36	Inspektorat	1.297.958.149,09	1.254.154.674,06	43.803.475	3,49
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.107.692.622,34	1.153.799.927,72	953.892.695	82,67
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.037.550.455,21	32.439.591.081,72	(13.402.040.627)	(41,31)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.193.104.434,91	-	4.193.104.435	100,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	1.722.952.492,61	1.394.418.687,32	328.533.805	23,56
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.930.112.959,11	3.993.109.822,35	(62.996.863)	(1,58)
42	Badan Penghubung	1.648.801.016,34	1.784.931.630,22	(136.130.614)	(7,63)
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	3.267.641.570,36	(3.267.641.570)	(100,00)
44	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	1.020.457.391,92	(1.020.457.392)	(100,00)
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	516.430.961,20	(516.430.961)	(100,00)
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	959.793.069,60	(959.793.070)	(100,00)
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	403.272.180,28	(403.272.180)	(100,00)
48	Sekretariat Komita Penyiaran Indonesia Daerah	-	524.219.690,35	(524.219.690)	(100,00)
49	Dinas Perkebunan	-	5.319.051.999,29	(5.319.051.999)	(100,00)
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	530.138.887,76	(530.138.888)	(100,00)
51	Dinas Kehutanan	-	15.483.023.948,50	(15.483.023.949)	(100,00)
Jumlah		1.364.006.489.764,53	2.981.854.374.695,19	(1.617.847.884.930,66)	(54,26)

5.4.2.1.10.2 Beban Amortisasi

Rp2.671.291.304,19

Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.671.291.304,19 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	152.832.228,80	287.863.395,80	(135.031.167)	(46,91)
2	Dinas Kesehatan	129.133.440,00	125.637.040,00	3.496.400	2,78
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	448.973.845,48	413.573.845,51	35.400.000	8,56
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	59.150.000,00	-	59.150.000	100,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	138.200.000,00	99.000.000,00	39.200.000	39,60
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	128.600.000,00	117.000.000,00	11.600.000	9,91
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	323.704.200,00	304.194.200,00	19.510.000	6,41
8	RSJD Surakarta	99.247.000,00	44.127.000,00	55.120.000	124,91
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	214.136.448,24	135.753.060,28	78.383.388	57,74
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.940.000,00	7.940.000,00	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
11	Dinas Sosial	86.407.966,67	69.357.200,00	17.050.767	24,58
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.116.000,00	39.116.000,00	-	-
13	Dinas Ketahanan Pangan	10.188.200,00	10.188.200,00	-	-
14	Dinas Perhubungan	43.457.500,00	-	43.457.500	100,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	241.206.000,00	-	241.206.000	100,00
16	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	97.041.500,00	97.041.500,00	-	-
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.900.000,00	-	7.900.000	100,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29.570.000,00	9.570.000,00	20.000.000	208,99
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37.830.000,00	37.830.000,00	-	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.548.000,00	9.548.000,00	-	-
22	Inspektorat	-	9.042.000,00	(9.042.000)	(100,00)
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	74.379.625,00	51.709.625,00	22.670.000	43,84
24	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	100.272.400,00	132.952.400,00	(32.680.000)	(24,58)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	92.380.000,00	-	92.380.000	100,00
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.686.950,00	58.686.950,00	-	-
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	22.670.000,00	(22.670.000)	(100,00)
28	Badan Arsip dan Perpustakaan	28.190.000,00	-	28.190.000	100,00
Jumlah		2.671.291.304,19	2.096.000.416,59	575.290.888	27,45

5.4.2.1.10.3 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Rp1.085.424.054,81

Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.085.424.054,81 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	176.543.953,06	18.294.736.930,62	(18.118.192.978)	(99,04)
2	Dinas Kesehatan	12.000.000,00	2.026.610.465,00	(2.014.610.465)	(99,41)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	5.529.600,00	-	5.529.600	100,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	7.220.268,00	95.445.210,00	(88.224.942)	(92,44)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	3.088.000,00	793.586.950,00	(790.498.950)	(99,61)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.235.406,09	25.155.558,80	(20.920.153)	(83,16)
8	RSJD Surakarta	20.848.332,00	313.126.040,00	(292.277.708)	(93,34)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.794.538,80	1.050.959.009,20	(1.045.164.470)	(99,45)
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	-	31.000.000,00	(31.000.000)	(100,00)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.952.400,00	-	1.952.400	100,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.905.500,00	-	1.905.500	100,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
15	Dinas Sosial	1.776.000,00	3.568.400,00	(1.792.400)	(50,23)
	Sekretariat Badan	-	-	-	-
16	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
	Daerah	-	-	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan	-	2.398,00	(2.398)	(100,00)
	Transmigrasi	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan	-	65.430.000,00	(65.430.000)	(100,00)
18	Perempuan, Perlindungan	-	-	-	-
	Anak, Pengendalian Penduduk	-	-	-	-
19	dan KB	-	-	-	-
	Dinas Lingkungan Hidup dan	-	-	-	-
	Kehutanan	-	-	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	104.836.411,00	(104.836.411)	(100,00)
	Dinas Pemberdayaan	-	-	-	-
21	Masyarakat Desa, Administrasi	-	-	-	-
	Kependudukan dan Capil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	805.827.631,64	23.599.216.751,48	(22.793.389.120)	(96,59)
	Dinas Komunikasi dan	-	-	-	-
23	Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan UMKM	-	999.049.000,00	(999.049.000)	(100,00)
	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	-
25	Daerah dan PTSP	-	-	-	-
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	-	-	-	-
26	Pariwisata	-	-	-	-
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.689.149,36	805.983.411,73	(785.294.262)	(97,43)
	Dinas Pertanian dan	5.169.333,34	-	5.169.333	100,00
29	Perkebunan	-	-	-	-
	Dinas Peternakan dan	3.999.330,00	-	3.999.330	100,00
30	Kesehatan Hewan	-	-	-	-
	Dinas Energi dan Sumber	-	-	-	-
31	Daya Mineral	-	-	-	-
	Dinas Perindustrian dan	5.978.000,00	18.718.952.243,13	(18.712.974.243)	(99,97)
32	Perdagangan	-	-	-	-
33	SKPKD	175.500,02	-	175.500	100,00
34	Sekretariat Daerah	-	2.077.135.651,75	(2.077.135.652)	(100,00)
35	Sekretariat DPRD	-	1.112.250.018,00	(1.112.250.018)	(100,00)
36	Inspektorat	-	-	-	-
	Badan Perencanaan,	-	-	-	-
37	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
	Daerah	-	-	-	-
	Badan Pengelola Pendapatan	1.224.112,50	89.345.760.000,00	(89.344.535.888)	(100,00)
38	Daerah	-	-	-	-
	Badan Pengelola Keuangan	620.000,00	-	620.000	100,00
39	dan Aset Daerah	-	-	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	847.000,00	1.228.000,00	(381.000)	(31,03)
	Badan Pengembangan	-	-	-	-
41	Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	-	153,00	(153)	(100,00)
	Dinas Kebudayaan dan	-	-	-	-
43	Pariwisata	-	49.245.000,00	(49.245.000)	(100,00)
	Badan Penelitian dan	-	-	-	-
44	Pengembangan	-	-	-	-
45	Badan Koordinasi Wilayah I	-	2.595.499,75	(2.595.500)	(100,00)
46	Badan Koordinasi Wilayah II	-	-	-	-
47	Badan Koordinasi Wilayah III	-	-	-	-
48	Sekretariat Komita Penyiaran	-	-	-	-
	Indonesia Daerah	-	-	-	-
49	Dinas Perkebunan	-	-	-	-
	Sekretariat Badan Koordinasi	-	259.718.650,00	(259.718.650)	(100,00)
50	Penyuluh	-	-	-	-
51	Dinas Kehutanan	-	119.340.000,00	(119.340.000)	(100,00)



	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
Jumlah	1.085.424.054,81	159.894.931.751,46	(158.809.507.696,65)	(99,32)

5.4.2.1.11. Beban Lain-Lain

Rp30.483.850.223,47

Beban Lain-Lain merupakan Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp30.483.850.223,47 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Penyisihan Piutang	2.092.196.273,47	209.683.115.991,56	(207.590.919.718,09)	(99,00)
2 Beban Diragukan Tertagih	-	1.005.771.990,50	(1.005.771.990,50)	(100,00)
3 Investasi Non Permanen	-	-	-	-
3 Beban Lain-Lain	28.391.653.950,00	4.869.634.327,00	23.522.019.623,00	483,03
Jumlah	30.483.850.223,47	215.558.522.309,06	(185.074.672.086)	(85,86)

5.4.2.1.11.1 Beban Penyisihan Piutang

Rp2.092.196.273,47

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.092.196.273,47 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Kesehatan	-	7.495.646,45	(7.495.646)	(100,00)
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.200.501.379,05	328.482.303,67	872.019.075	265,47
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	774.065.091,35	1.381.493.351,17	(607.428.260)	(43,97)
4 RSUD Tugurejo Semarang	81.796.065,23	413.289.768,72	(331.493.703)	(80,21)
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	27.052.978,91	44.998.130,37	(17.945.151)	(39,88)
6 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	12.481.826,00	18.015.572,32	(5.533.746)	(30,72)
7 RSJD Surakarta	41.747.230,23	29.020.327,53	12.726.903	43,86
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.720.862,12	13.673.661,34	(7.952.799)	(58,16)
9 Satuan Polisi Pamong Praja	36.750,00	-	36.750	-
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	817.752,05	(817.752)	(100,00)
11 Dinas Perhubungan	219.932,80	-	219.933	-
12 Dinas Koperasi dan UMKM	-	34.740.000,00	(34.740.000)	(100,00)
13 Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.000.000,00)	-	(3.000.000)	-
14 SKPKD	10.722.724,57	-	10.722.725	-
15 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(432.404.297,77)	207.411.089.477,95	(207.843.493.776)	(100,21)
16 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	370.051.571,00	-	370.051.571	-
17 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.204.160,00	-	3.204.160	-
Jumlah	2.092.196.273,47	209.683.115.991,56	(207.590.919.718,09)	(99,00)



5.4.2.1.11.1 Beban diragukan tertagih Investasi non Permanen

Rp0,00

Beban diragukan tertagih Investasi non Permanen merupakan Beban diragukan tertagih Investasi non Permanen periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar nihil.

5.4.2.1.11.1 Beban Lain-Lain

Rp28.391.653.950,00

Beban Lain-lain merupakan Beban Tidak Terduga pada SKPKD dan beban atas belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp28.391.653.950,00.

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.558.149.732,00	-	24.558.149.732	-
2	Dinas Kesehatan	105.323.800,00	-	105.323.800	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	283.795.000,00	-	283.795.000	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	137.505.000,00	-	137.505.000	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	75.503.888,00	-	75.503.888	-
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	82.242.909,00	-	82.242.909	-
7	RSJD Surakarta	68.992.200,00	-	68.992.200	-
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	44.500.000,00	-	44.500.000	-
9	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	48.400.000,00	-	48.400.000	-
10	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	192.660.000,00	-	192.660.000	-
11	Dinas Sosial	39.150.000,00	-	39.150.000	-
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.840.000,00	-	7.840.000	-
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.039.400,00	-	179.039.400	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	27.396.500,00	-	27.396.500	-
15	Dinas Perhubungan	326.495.911,00	-	326.495.911	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	264.000,00	-	264.000	-
17	Dinas Koperasi dan UMKM	196.795.000,00	-	196.795.000	-
18	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	29.825.670,00	-	29.825.670	-
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.091.212,00	-	9.091.212	-
20	Badan Arsip dan Perpustakaan	69.312.497,00	-	69.312.497	-
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.593.840,00	-	200.593.840	-
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84.970.500,00	-	84.970.500	-
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	114.314.078,00	-	114.314.078	-
24	SKPKD	1.131.200.000,00	4.869.634.327,00	(3.738.434.327)	(76,77)
25	Sekretariat Daerah	48.412.697,00	-	48.412.697	-
26	Inspektorat	5.700.000,00	-	5.700.000	-
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	37.041.716,00	-	37.041.716	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.160.000,00	-	6.160.000	-



	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
29 Badan Kepegawaian Daerah	7.230.000,00	-	7.230.000	-
30 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.904.000,00	-	65.904.000	-
31 Badan Penghubung	207.844.400,00	-	207.844.400	-
Jumlah	28.391.653.950,00	4.869.634.327,00	23.522.019.623,00	(76,77)

5.4.2.2. BEBAN TRANSFER

Rp6.599.425.750.479,29

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.599.425.750.479,29 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	4.647.671.432.187,29	3.913.475.917.026,19	734.195.515.161	18,76
2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
3 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.440.988.755.292,00	1.971.252.109.925,00	(530.263.354.633)	(26,90)
4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	501.416.075.000,00	120.205.041.000,00	381.211.034.000	317,13
5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	9.349.488.000,00	9.349.488.000,00	-	-
Jumlah	6.599.425.750.479,29	6.014.282.555.951,19	585.143.194.528	9,73

5.4.3. SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN

Rp2.510.854.383.389,74

OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan	25,144,782,615,441.90	27,069,938,085,735.80	(1,925,155,470,294)	(7.11)
2 Beban	22,633,928,232,052.20	19,870,897,097,033.60	2,763,031,135,019	13.90
Jumlah	2,510,854,383,389.74	7,199,040,988,702.28	837,875,664,725	11.64

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rp347.556.825,80

Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2017 sebesar Rp347.556.825,80 merupakan Surplus Pemulihan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Pemulihan Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih karena adanya perubahan metode perhitungan penyisihan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	452.764.596,00	93.931.081.752,81	(93.478.317.157)	(99,52)



	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(105.207.770,20)	(58.740.807.216,47)	58.635.599.446	(99,82)
Jumlah	347.556.825,80	35.190.274.536,34	(34.842.717.711)	(99,01)

5.4.5. SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA **Rp2.511.201.940.215,54**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.511.201.940.215,54.

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT LO **Rp2.511.201.940.215,54**

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2017 surplus sebesar Rp2.511.201.940.215,54, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Surplus/Defisit Operasional	2,510,854,383,389.74	7,199,040,988,702.28	(1,925,155,470,294)	(26.74)
2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	347,556,825.80	35,190,274,536.34	(34,842,717,711)	(99.01)
3 Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah	2,511,201,940,215.54	7,234,231,263,238.63	(1,959,998,188,004)	(27.09)



5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2017 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2017.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Rp2.233.860.954.054,42

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.233.860.954.054,42 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

	(Dalam Rupiah)	
	2017	2016
Arus Masuk Kas	23.679.436.479.370,42	19.628.062.392.852,00
Arus Keluar Kas	21.445.575.525.316,00	16.538.696.645.533,00
	<u>2.233.860.954.054,42</u>	<u>3.089.365.747.319,00</u>

5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Rp23.679.436.479.370,40

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp23.679.436.479.370,40 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp19.628.062.392.852,00 yang terdiri dari:

	(Dalam Rupiah)	
	2017	2016
1. Pendapatan Pajak Daerah	10.572.698.332.610,00	9.672.518.189.424,00
2. Pendapatan Retribusi Daerah	107.294.704.820,00	106.223.052.566,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	371.072.481.501,00	340.397.111.367,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	1.472.709.718.332,42	1.417.376.622.915,00



	2017	2016
5. Dana Bagi Hasil Pajak	834.422.861.130,00	879.355.173.005,00
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	13.887.050.263,00	14.318.048.913,00
7. Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	1.859.907.223.000,00
8. Dana Alokasi Khusus	6.566.890.148.700,00	5.263.717.151.065,00
9. Dana Penyesuaian	-	-
10. Dana Insentif Daerah	50.197.943.000,00	38.947.186.000,00
11. Pendapatan Hibah	36.938.923.844,00	34.228.172.341,00
12. Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	737.884.170,00	1.074.462.256,00
Jumlah	23.679.436.479.370,40	19.628.062.392.852,00

Total arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2017 bila dibandingkan dengan total pada LRA tahun 2017 (5.1.1.1) sebesar Rp23.680.200.297.407,00 terdapat perbedaan sebesar 763.818.037,60. Perbedaan tersebut karena dalam total masuk arus kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang kasnya masih berada di Bendahara Penerimaan sebesar Rp385.508.164,60 dan pendapatan yang masuk dalam arus aktivitas non keuangan sebesar Rp378.309.872,00 (5.5.2.1).

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah **Rp10.572.698.332.610,00**

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.572.698.332.610,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp9.672.518.189.424,00 dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)	
	2017	2016
1. Pajak Kendaraan Bermotor	3.846.112.941.500,00	3.417.260.595.050,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.031.219.174.000,00	2.877.756.190.725,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.653.549.702.810,00	1.538.890.231.827,00
4. Pajak Air Permukaan	11.422.772.199,00	9.251.016.832,00
5. Pajak Rokok	2.030.393.742.101,00	1.829.360.154.990,00
Jumlah	10.572.698.332.610,00	9.672.518.189.424,00

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah **Rp107.294.704.820,00**

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp107.294.704.820,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp106.223.052.566,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.820.041.491,00	21.876.172.140,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	-	687.600,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	667.475.000,00	364.650.000,00
4	Retribusi Tera/Tera Ulang	-	6.449.705.700,00
5	Retribusi Pelayanan Pendidikan	668.607.500,00	1.503.330.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.535.240.364,00	48.444.106.641,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan	569.572.000,00	537.359.400,00
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	3.042.002.500,00	5.733.215.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.400.000,00	2.500.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.179.118.015,00	18.425.641.745,00
11	Retribusi Ijin Trayek	927.486.000,00	1.241.479.000,00
12	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	5.055.191.800,00	985.925.440,00
13	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	772.476.400,00	658.279.900,00
14	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal	1.056.093.750,00	-
Jumlah		107.294.704.820,00	106.223.052.566,00

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan Rp371.072.481.501,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp371.072.481.501,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2016 sebesar Rp340.397.111.367,00 dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.224.814.706,00	4.681.391.200,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	265.246.817.254,00	254.064.436.218,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	57.031.441.365,00	53.282.374.574,00
4	Bagian Laba PDAB Slawi	3.058.025.665,00	2.476.547.002,00
5	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	4.295.992.206,00	1.500.000.000,00
6	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	6.974.113.531,00	6.662.014.558,00
7	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	20.886.360.443,00	15.971.980.700,00
8	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	5.750.789.290,00	1.258.367.115
9	Deviden PT. Jamkrida	1.604.127.041,00	500.000.000
Jumlah		371.072.481.501,00	340.397.111.367,00

5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Rp1.472.709.718.332,42



Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.472.709.718.332,42 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2016 sebesar Rp1.417.376.622.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	343.279.165,00	91.954.500,00
2	Penerimaan Jasa Giro	71.422.612.976,00	40.613.871.012,00
3	Penerimaan Bunga	148.358.292.756,00	88.693.861.950,00
4	Tuntutan Ganti Rugi	6.500.000,00	9.000.000,00
5	Pendapatan Denda keterlambatan	1.647.983.674,00	1.734.310.512,00
6	Pendapatan Denda Pajak	76.503.535.952,00	83.840.129.658,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	40.249.695,00	11.184.340,00
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-
9	Pendapatan dari Pengembalian	8.671.337.519,00	4.721.668.286,00
10	Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	182.077.031,00	781.655.946,00
11	Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	19.258.228.260,00	20.363.495.000,00
12	Penerimaan dari BLUD	1.142.248.888.562,42	1.157.757.650.468,00
13	Penerimaan Lain-Lain	4.026.732.742,00	18.757.841.243,00
Jumlah		1.472.709.718.332,42	1.417.376.622.915,00

5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak

Rp834.422.861.130,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp834.422.861.130,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2016 sebesar Rp879.355.173.005,00 dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	65.474.849.091,00	104.219.824.520,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	564.809.952.859,00	579.926.953.794,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	204.138.059.180,00	195.208.394.691,00
Jumlah		834.422.861.130,00	879.355.173.005,00

5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Rp13.887.050.263,00



Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp13.887.050.263,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp14.318.048.913,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.900.637.875,00	1.502.824.314,00
2 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	57.819.224,00	117.593.150,00
3 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	33.287.692,00	3.162.750,00
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	514.742.868,00	615.184.300,00
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	8.171.221.124,00	11.743.682.317,00
6 Bagi Hasil dari Panas Bumi	1.209.341.480,00	335.602.082,00
Jumlah	13.887.050.263,00	14.318.048.913,00

5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum

Rp3.652.586.431.000,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.652.586.431.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp1.859.907.223.000,00.

5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus

Rp6.566.890.148.700,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.566.890.148.700,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp5.263.717.151.065,00.

5.5.1.1.9. Dana Penyesuaian

Rp0,00

Tidak ada Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dan tahun 2016.



5.5.1.1.10. Dana Insentif Daerah

Rp50.197.943.000,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Insentif Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp50.197.943.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp38.947.186.000,00.

5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah

Rp36.938.923.844,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp36.938.923.844,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp34.228.172.341,00

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Hibah dari pemerintah	15.982.123.844,00	7.158.233.937,00
2	Sumbangan pihak ketiga kayu	-	7.109.138.404,00
3	Sumbangan pihak ketiga jasa raharja	20.956.800.000,00	19.960.800.000,00
4	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-
5	Hibah dari CSR/Perusahaan	-	-
6	Hibah dari Kelompok	-	-
Jumlah		36.938.923.844,00	34.228.172.341,00

5.5.1.1.12. Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya

Rp737.884.170,00

Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp737.884.170,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp1.074.462.256,00.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Rp21.445.575.525.316,00

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp21.445.575.525.316,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp16.538.696.645.533,00 dengan rincian sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Belanja Pegawai	6.092.077.750.517,00	2.567.876.390.675,00



2	Belanja Barang	3.397.323.250.875,00	2.493.431.626.164,00
3	Belanja Hibah	4.952.781.468.535,00	5.246.848.624.464,00
4	Belanja Bantuan Sosial	238.268.220.000,00	36.531.500.000,00
5	Belanja Tak Terduga	1.130.950.000,00	4.867.408.385,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	4.812.323.251.641,00	4.088.437.191.480,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.951.670.633.748,00	2.100.703.904.365,00
Jumlah		21.445.575.525.316,00	16.538.696.645.533,00

5.5.1.2.1. Belanja Pegawai

Rp6.092.077.750.517,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.092.077.750.517,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp2.567.876.390.675,00.

5.5.1.2.2. Belanja Barang

Rp3.397.323.250.875,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.397.323.250.875,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp2.493.431.626.164,00.

5.5.1.2.3. Belanja Hibah

Rp4.952.781.468.535,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.952.781.468.535,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp5.246.848.624.464,00.

5.5.1.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Rp238.268.220.000,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp238.268.220.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp36.531.500.000,00.



5.5.1.2.5. Belanja Tidak Terduga

Rp1.130.950.000,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.130.950.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp4.867.408.385,00.

5.5.1.2.6. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

Rp4.812.323.251.641,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.812.323.251.641,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp4.088.437.191.480,00.

5.5.1.2.7. Belanja Bantuan Keuangan

Rp1.951.670.633.748,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.951.670.633.748,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp2.100.703.904.365,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)		
	2017	2016
1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	1.440.905.070.748,00	1.971.149.375.365,00
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	501.416.075.000,00	120.205.041.000,00
3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.271.055.000,00	2.271.055.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya	7.078.433.000,00	7.078.433.000,00
Jumlah	1.951.670.633.748,00	2.100.703.904.365,00

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

(Rp1.454.219.774.592,00)

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan



merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar (Rp1.454.219.774.592,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar (Rp2.814.716.391.267,00) dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Arus Masuk Kas	378.309.872,00	961.789.183,00
2	Arus Keluar Kas	1.454.598.084.464,00	2.815.678.180.450,00
		(1.454.219.774.592,00)	(2.814.716.391.267,00)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Rp378.309.872,00

Total Arus Masuk dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp378.309.872,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp961.789.183,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	378.309.872,00	718.705.183,00
2.	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	243.084.000,00
Jumlah		378.309.872,00	961.789.183,00

5.5.2.1.1. Penjualan Peralatan dan Mesin

Rp378.309.872,00

Arus kas masuk dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp378.309.872,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp718.705.183,00.

5.5.2.1.2. Penjualan Gedung dan Bangunan

Rp0,00

Tidak ada arus kas masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp243.084.000,00.



5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Rp1.454.598.084.464,00

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.454.375.062.476,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp2.815.678.180.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)	
	2017	2016
1. Belanja Tanah	21.650.743.424.00	9.126.628.025.00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	321.441.003.601.00	321.146.639.091.00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	308.934.759.265.00	245.973.084.291.00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	799.019.206.624.00	2.235.056.391.658.00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	2.794.491.050.00	3.821.647.385.00
6. Belanja Aset Tidak Berwujud	757.880.500.00	553.790.000.00
Jumlah	1.454.598.084.464,00	2.815.678.180.450,00

5.5.2.2.1. Belanja Tanah

Rp21.650.743.424,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp21.650.743.424,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp9.126.628.025,00.

5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Rp321.441.003.601,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp321.441.003.601,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp321.146.639.091,00.

5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Rp308.934.759.265,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp308.934.759.265,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp245.973.084.291,00.



5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp799.019.206.624,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp799.019.206.624,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp2.235.056.391.658,00.

5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp2.794.491.050.00,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.794.491.050.00,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp3.821.647.385,00.

5.5.2.2.6. Belanja Aset Tidak Berwujud

Rp757.880.500,00

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp757.880.500,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 Rp553.790.000,00.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

(Rp303.547.235.404,00)

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar (Rp303.547.235.404,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar (Rp48.909.728.310,00) dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1	Arus Masuk Kas	452.764.596,00	1.090.271.690,00
2	Arus Keluar Kas	304.000.000.000,00	50.000.000.000,00
		(303.547.235.404,00)	(48.909.728.310,00)



5.5.3.1. Arus Masuk Kas

Rp452.764.596,00

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp452.764.596,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp1.090.271.690,00 terdiri dari :

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Pengembalian Dana Talangan	2.727.273,00	905.850.000,00
3.	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	450.037.323,00	184.421.690,00
Jumlah		452.764.596,00	1.090.271.690,00

5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan

Rp0,00

Arus kas masuk dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 tidak ada pencairan dana cadangan.

5.5.3.1.2. Pengembalian Dana Talangan

Rp2.727.273,00

Arus kas masuk dari Pengembalian dana talangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 pengembalian dana talangan pangan sebesar Rp2.727.273,00 dari Kabupaten Cilacap dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp905.850.000,00.

5.5.3.1.3. Pengembalian Dana Bergulir

Rp450.037.323,00

Arus kas masuk dari penerimaan Pengembalian dana Bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp450.037.323,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar dan untuk Rp184.421.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM	328.730.000,00	123.354.123,00
2.	Penerimaan Dana Bergulir Sapi Kereman	-	850.000,00
3.	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	110.007.323,00	60.217.567,00
4.	Penerimaan Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani di Seluruh Kec. Se- Jateng	11.300.000,00	-
		450.037.323,00	184.421.690,00



5.5.3.2. Arus Keluar Kas

Rp304.000.000.000,00

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp304.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	154.000.000.000,00	50.000.000.000,00
2.	Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	150.000.000.000,00	-
Jumlah		304.000.000.000,00	50.000.000.000,00

5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Rp154.000.000.000,00

Arus kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp154.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	PT. Bank Jateng	-	-
2.	BPR-BKK	99.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.	PDAB Slawi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.	PT. Jamkrida	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.	PD. Citra Mandiri	-	-
6.	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	-	-
Jumlah		154.000.000.000,00	50.000.000.000,00

5.5.3.2.2. Pembentukan Dana Cadangan

Rp150.000.000.000,00

Arus kas Keluar untuk Pembentukan Dana Cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp150.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 tidak ada Pembentukan Dana Cadangan.



5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Rp3.505.019.994,68

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.505.019.994,68 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp129.397.476,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1 Arus Masuk Kas	678.531.086.040,68	542.606.423.986,00
2 Arus Keluar Kas	675.026.066.046,00	542.477.026.510,00
	3.505.019.994,68	129.397.476,00

5.5.4.1. Arus Masuk Kas

Rp678.531.086.040,68

Total arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp678.531.086.040,68 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp542.606.423.986,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	674.974.211.759,00	542.473.107.083,00
2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	3.919.427,00	133.316.903,00
3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	3.552.954.854,68	-
4. Setoran BLUD Ke Kas daerah	-	-
Jumlah	678.531.086.040,68	542.606.423.986,00

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Rp674.974.211.759,00

Arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp674.974.211.759,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp542.473.107.083,00 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1. Pajak-pajak	398.023.054.791,00	442.460.202.827,00
2. IWP	209.746.177.446,00	75.790.984.022,00
3. Taperum	4.140.587.000,00	1.400.943.000,00



4. Askes	63.064.392.522,00	22.820.977.234,00
Jumlah	674.974.211.759,00	542.473.107.083,00

5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran Sebelumnya

Rp 3.919.427,00

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.919.427,00 dan untuk periode yang sama pada tahun2016 sebesar Rp 133.316.903,00dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		2017	2016
1.	Dinas Kesehatan	48.150,00	117.195.300,00
2.	Badan Lingkungan Hidup	430.000,00	-
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan	18,00	-
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50,00	-
5.	Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah	-	16.046.003,00
6.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	100,00	-
7.	Badan Koordinasi Wilayah III	-	75.600,00
8.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	800.000,00	-
9.	Badan Koordinasi Penyuluh	500,00	-
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.616.153,00	-
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.456,00	-
Jumlah		3.919.427,00	133.316.903,00

5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun Anggaran Sebelumnya

Rp3.552.954.854,68

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.552.954.854,68 dan untuk periode yang sama pada tahun2016tidak ada saldo kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

		2017	2016
1.	Dinas Kesehatan	1.716.000,00	-
2.	Dinas Perhubungan	290.000,00	-
3.	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	943.337.552,00	-



4.	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	2.368.954.899,68	-
		2017	2016
5.	RSUD Tugurejo Semarang	165.045.550,00	-
6.	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	34.548.814,00	-
7.	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	21.685.641,00	-
8.	RSJD Surakarta	-	-
9.	RSJD Soedjarwadi Klaten	17.376.398,00	-
	Jumlah	3.552.954.854,68	-

5.5.4.2. Arus Keluar Kas

Rp675.026.066.046,00

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp675.026.066.046,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp542.477.026.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	674.974.211.759,00	542.473.107.083,00
2. Kas di Bend Pengeluaran – Sisa UUDP Tahun Berjalan	51.854.287,00	3.919.427,00
Jumlah	675.026.066.046,00	542.477.026.510,00

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp674.974.211.759,00

Arus kas keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp674.974.211.759,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp542.473.107.083,00 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016
1. Pajak-pajak	398.023.054.791,00	442.460.202.827,00
2. IWP	209.746.177.446,00	75.790.984.022,00
3. Taperum	4.140.587.000,00	1.400.943.000,00
4. Askes	63.064.392.522,00	22.820.977.234,00
Jumlah	674.974.211.759,00	542.473.107.083,00



5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan

Rp51.854.287,00

Arus kas keluar berupa pengiriman kas ke Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum dipertanggungjawabkan dan disetor kembali ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp51.854.287,00 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp3.919.427,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas

Rp479.598.964.053,10

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp479.598.964.053,10 dan untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp225.869.025.218,00 yang berasal dari:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	2.233.860.954.054	3.089.365.747.319
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(1.454.219.774.592)	(2.814.716.391.267)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	(303.547.235.404,00)	(48.909.728.310,00)
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	3.505.019.994,68	129.397.476,00
Jumlah		479.598.964.053,10	225.869.025.218,00

5.5.6. Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD

Rp1.122.164.964.930,10

Saldo Akhir Kas di BUD pada posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.122.164.964.930,10 sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp642.566.000.877,00 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2017 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
		2017	2016
1.	Saldo Awal Kas BUD	502.823.976.126,00	172.754.747.212,00
2.	Saldo Awal Kas BLUD	139.742.024.751,00	243.942.228.447,00
2.	Kenaikan/Penurunan Kas	479.598.964.053,10	225.869.025.218,00
Jumlah		1.122.164.964.930,10	642.566.000.877,00



5.5.7. Saldo Akhir Kas Rp

1.163.279.517.549,00

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BLUD pada posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.163.279.517.549,02 sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp646.645.231.065,68, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2017	2016
1	Kas Di Kas Daerah	1.001.596.763.923,00	502.823.976.126,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	51.864.956,00	5.219.569,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2.627.762.536,90	3.552.954.854,68
4	Kas Di Bendahara BLUD	120.568.201.006,80	139.742.024.751,00
5	Kas Di Bendahara Sekolah	38.434.925.126,00	521.055.765,00
Jumlah		1.163.279.517.549,00	646.645.231.065,68

Dari saldo akhir kas sebesar Rp1.163.279.517.549,00 tersebut terdapat SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp1.161.037.252.508,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.242.265.041,00. Selisih tersebut terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran kewajiban kepada pihak lain sebesar Rp10.669,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan berupa uang muka pasien RSUD/RSJD sebesar Rp2.242.254.372,00.



5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	30.291.587.279.783,70	22.998.422.169.941,80	7.293.165.109.841,93	31,71
2	Surplus/Defisit-LO	2.511.201.940.215,53	7.234.231.263.238,68	(4.723.029.323.023,15)	(65,29)
3	RK-PPKD	-	-	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	1.021.339.812.179,47	58.933.846.603,23	962.405.965.576,24	1.633,03
	Ekuitas Akhir	33.824.129.032.178,70	30.291.587.279.783,70	3.532.541.752.395,02	11,66

5.6.1. Ekuitas Awal

Rp30.291.587.279.783,70

Saldo Ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp30.291.587.279.783,70 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	5.246.050.204.143,58	4.215.783.021.296,17	1.030.267.182.846,81	24,44
2	Dinas Pendidikan	4.274.731.369.573,27	279.164.465.737,09	3.995.566.903.836,18	1.431,26
3	Dinas Kesehatan	265.643.892.223,74	260.057.055.596,62	5.586.836.627,12	2,15
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	533.395.135.212,27	489.475.608.911,46	43.919.526.300,81	8,97
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	553.290.806.486,15	558.636.228.395,79	(5.345.421.909,64)	(0,96)
6	RSUD Tugurejo Semarang	271.402.618.864,14	276.810.313.985,99	(5.407.695.121,85)	(1,95)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	783.987.775.634,41	794.680.655.246,60	(10.692.879.612,19)	(1,35)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	168.173.711.660,24	154.937.197.899,49	13.236.513.760,76	8,54
9	RSJD Surakarta	110.445.731.031,31	106.389.091.419,76	4.056.639.611,55	3,81
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	99.676.144.924,85	93.499.838.749,93	6.176.306.174,92	6,61
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	5.913.062.667.697,42	4.380.078.940.800,88	1.532.983.726.896,54	35,00
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	5.709.810.067.841,15	5.588.239.958.194,12	121.570.109.647,03	2,18
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	17.119.574.734,80	17.847.539.850,64	(727.965.115,84)	(4,08)
14	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	125.569.949.813,59	126.143.956.115,31	(574.006.301,72)	(0,46)
15	Dinas Perhubungan	227.812.365.074,00	146.114.076.457,40	81.698.288.616,60	55,91
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.886.604.366,18	19.889.106.105,76	2.997.498.260,42	15,07
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	14.634.517.822,93	15.072.216.952,69	(437.699.129,76)	(2,90)
18	Dinas Sosial	244.051.306.884,61	245.970.521.132,51	(1.919.214.247,90)	(0,78)
19	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.401.369.418,71	15.256.787.479,28	(855.418.060,57)	(5,61)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	135.942.846.300,16	135.570.712.675,94	372.133.624,22	0,27



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
21	Dinas Koperasi dan UMKM	33.451.043.859,23	34.437.677.978,53	(986.634.119,30)	(2,86)
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.259.334.100,50	13.493.127.143,71	766.206.956,79	5,68
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	119.048.984.121,77	115.050.919.758,80	3.998.064.362,97	3,48
24	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	160.504.387.269,92	27.735.884.427,16	132.768.502.842,76	478,69
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.784.360.136,66	18.939.069.432,17	(154.709.295,51)	(0,82)
26	Satuan Polisi Pamong Praja	20.712.361.401,24	2.424.777.355,92	18.287.584.045,32	754,20
27	KDH dan Wakil KDH	-	-	-	-
28	DPRD	-	-	-	-
29	Sekretariat Daerah	259.697.687.197,32	260.464.125.854,83	(766.438.657,51)	(0,29)
30	Sekretariat DPRD	49.007.091.144,06	64.872.002.728,35	(15.864.911.584,29)	(24,46)
31	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.558.303.144.508,75	2.339.746.981.407,80	218.556.163.100,95	9,34
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	9.737.300.728,55	10.039.235.348,47	(301.934.619,92)	(3,01)
33	Inspektorat	10.687.664.045,24	11.163.707.659,30	(476.043.614,06)	(4,26)
34	Badan Penghubung	22.003.127.217,61	23.421.887.566,98	(1.418.760.349,37)	(6,06)
35	Badan Pengembangan SDM Daerah	162.815.140.118,95	164.917.070.011,97	(2.101.929.893,02)	(1,27)
36	Badan Kepegawaian Daerah	14.970.458.177,11	15.162.059.244,43	(191.601.067,32)	(1,26)
37	Badan Koordinasi Wilayah I	43.026.519.726,04	43.529.498.182,24	(502.978.456,20)	(1,16)
38	Badan Koordinasi Wilayah II	68.998.263.513,10	69.940.372.582,70	(942.109.069,60)	(1,35)
39	Badan Koordinasi Wilayah III	62.354.938.942,75	62.251.862.987,78	103.075.954,97	0,17
40	Dinas Ketahanan Pangan	10.929.863.376,06	10.774.200.566,96	155.662.809,10	1,44
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	16.786.370.197,21	17.340.183.826,16	(553.813.628,95)	(3,19)
42	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	35.278.356.981,82	34.247.117.862,15	1.031.239.119,67	3,01
43	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	2.739.184.817,85	3.241.851.508,20	(502.666.690,35)	(15,51)
44	Dinas Pertanian dan Perkebunan	607.634.492.348,07	601.160.461.555,96	6.474.030.792,11	1,08
45	Dinas Perkebunan	371.962.888.293,63	369.496.560.769,25	2.466.327.524,38	0,67
46	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	364.679.076.510,47	349.387.769.474,34	15.291.307.036,13	4,38
47	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	1.714.260.571,00	2.484.458.060,59	(770.197.489,59)	(31,00)
48	Dinas Kehutanan	53.736.305.136,67	40.918.918.885,34	12.817.386.251,33	31,32
49	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.871.988.392,18	71.178.429.769,84	28.693.558.622,34	40,31
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	259.936.139.017,31	165.866.080.819,91	94.070.058.197,40	56,71
51	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	105.867.888.225,15	135.118.584.168,53	(29.250.695.943,38)	(21,65)
Jumlah		30.291.587.279.783,70	22.998.422.169.941,80	7.293.165.109.841,33	31,71

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Rp2.511.201.940.215,53

Surplus/defisit – LO sebesar Rp2.511.201.940.215,53 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	732.619.301.145,27	(1.761.605.864.531,93)	2.494.225.165.677,20	(141,59)
2	Dinas Pendidikan	(4.463.892.741.781,00)	3.896.514.447.163,58	(8.360.407.188.944,58)	(214,56)
3	Dinas Kesehatan RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(203.890.826.302,27)	(199.343.567.484,89)	(4.547.258.817,38)	2,28
4		(176.433.814.312,08)	(158.784.988.037,19)	(17.648.826.274,89)	11,11



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(98.270.597.405,88)	(136.756.351.079,54)	38.485.753.673,66	(28,14)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(93.028.001.789,53)	(101.896.258.609,83)	8.868.256.820,30	(8,70)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(49.358.043.582,44)	(51.508.126.959,17)	2.150.083.376,73	(4,17)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(54.887.504.556,54)	(59.103.887.597,25)	4.216.383.040,71	(7,13)
9	RSJD Surakarta	(72.706.911.872,00)	(80.823.379.103,34)	8.116.467.231,34	(10,04)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(43.035.025.648,48)	(47.105.385.464,63)	4.070.359.816,15	(8,64)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(986.140.371.463,03)	(1.203.262.877.293,46)	217.122.505.830,43	(18,04)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(198.684.435.793,71)	(170.815.037.733,97)	(27.869.398.059,74)	16,32
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(31.688.902.312,57)	(58.953.562.936,84)	27.264.660.624,27	(46,25)
14	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(60.235.987.475,34)	(37.953.693.814,72)	(22.282.293.660,62)	58,71
15	Dinas Perhubungan	(77.158.361.524,01)	(48.123.531.258,39)	(29.034.830.265,62)	60,33
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	(48.552.121.730,74)	-	(48.552.121.730,74)	
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(157.768.996.598,76)	(34.457.506.303,58)	(123.311.490.295,18)	357,87
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(24.116.394.728,63)	(23.044.793.803,75)	(1.071.600.924,88)	4,65
19	Dinas Sosial Sekretariat	(195.490.460.088,50)	(214.989.165.653,90)	19.498.705.565,40	(9,07)
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(20.240.273.652,63)	(24.328.576.393,57)	4.088.302.740,94	(16,80)
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(95.229.091.832,98)	(95.728.038.075,78)	498.946.242,80	(0,52)
22	Dinas Koperasi dan UMKM	(50.500.897.237,23)	(61.181.996.012,30)	10.681.098.775,07	(17,46)
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(23.286.427.842,51)	(22.549.136.112,21)	(737.291.730,30)	3,27
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(65.659.750,00)	(66.669.829.099,03)	66.604.169.349,03	(99,90)
25	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(146.043.311.230,54)	(50.214.514.705,24)	(95.828.796.525,30)	190,84
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(35.490.226.193,32)	(44.666.396.944,50)	9.176.170.751,18	(20,54)
27	Satuan Polisi Pamong Praja	(25.702.759.576,61)	(25.654.010.305,68)	(48.749.270,93)	0,19
28	KDH dan Wakil KDH	(14.709.657.315,00)	(15.668.743.979,00)	959.086.664,00	(6,12)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
29	DPRD	(55.475.495.474,00)	(42.607.794.144,00)	(12.867.701.330,00)	30,20
30	Sekretariat Daerah	(190.076.244.007,90)	(257.281.713.541,51)	67.205.469.533,61	(26,12)
31	Sekretariat DPRD	(132.667.012.226,33)	(112.750.672.784,29)	(19.916.339.442,04)	17,66
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	10.431.781.297.162,60	9.407.462.799.741,16	1.024.318.497.421,44	10,89
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.261.903.345,09	-	23.261.903.345,09	100,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	(24.944.800,00)	(29.469.482.461,92)	29.444.537.661,92	(99,92)
35	Inspektorat	(37.945.538.586,75)	(38.566.074.421,06)	620.535.834,31	(1,61)
36	Badan Penghubung	(22.528.164.051,92)	(22.706.662.091,37)	178.498.039,45	(0,79)
37	Badan Pengembangan SDM Daerah	(54.272.091.474,35)	(50.496.372.755,02)	(3.775.718.719,33)	7,48
38	Badan Kepegawaian Daerah	(39.237.408.976,61)	(38.012.633.724,32)	(1.224.775.252,29)	3,22
39	Badan Koordinasi Wilayah I	-	(10.962.032.141,95)	10.962.032.141,95	(100,00)
40	Badan Koordinasi Wilayah II	-	(17.647.753.723,60)	17.647.753.723,60	(100,00)
41	Badan Koordinasi Wilayah III	(42.340.000,00)	(12.977.111.423,93)	12.934.771.423,93	(99,67)
42	Dinas Ketahanan Pangan	(28.705.030.136,42)	(28.343.553.219,90)	(361.476.916,52)	1,28
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(37.350.958.579,44)	(29.047.791.152,95)	(8.303.167.426,49)	28,58
44	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(38.802.825.120,99)	(35.389.641.932,33)	(3.413.183.188,66)	9,64
45	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	(9.611.525,00)	(8.715.489.875,35)	8.705.878.350,35	(99,89)
46	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(286.364.056.477,99)	(155.151.255.140,89)	(131.212.801.337,10)	84,57
47	Dinas Perkebunan	(438.286.106,67)	(78.953.820.165,62)	78.515.534.058,95	(99,44)
48	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(77.297.507.895,28)	(68.736.300.311,87)	(8.561.207.583,41)	12,46
49	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	-	(34.908.177.957,59)	34.908.177.957,59	(100,00)
50	Dinas Kehutanan	(208.949.853,83)	(37.768.031.947,66)	37.559.082.093,83	(99,45)
51	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(65.224.012.682,18)	(34.848.000.070,66)	(30.376.012.611,52)	87,17
52	Dinas Kelautan dan Perikanan	(83.343.566.601,09)	8.292.645.882,80	(91.636.212.483,89)	(1.105,03)
53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(79.838.713.264,35)	(137.509.045.267,38)	57.670.332.003,03	(41,94)
Jumlah		2.511.201.940.215,53	7.234.231.263.238,68	(4.723.029.323.023,15)	(65,29)



5.6.3. Koreksi Kesalahan/Penyesuaian

Rp1.021.339.812.179,47

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp1.021.339.812.179,47 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Koreks/Penyesuaian Kas	(522.347.427,00)	(1.844.727.958,58)	1.322.380.531,58	(71,68)
2 Koreks/Penyesuaian Piutang	2.754.030.561,00	(118.119.280.549,42)	120.873.311.110,42	(102,33)
3 Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	(13.051.583,12)	(585.528.180,37)	572.476.597,25	(97,77)
4 Koreks/Penyesuaian Persediaan	323.463.347,12	(38.151.736,91)	361.615.084,03	(947,83)
5 Koreks/Penyesuaian Non Permanen	-	-	-	-
6 Koreks/Penyesuaian Penyisihan Non Permanen	-	-	-	-
7 Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	9.493.875,68	-	9.493.875,68	-
8 Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	722.351.522.715,00	177.048.304.125,00	545.303.218.590,00	308,00
9 Koreks/Penyesuaian Penyusutan	268.492.599.446,46	207.322.572,60	268.285.276.873,86	129.404,76
10 Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	42.889.633.978,45	1.098.628.520,00	41.791.005.458,45	3.803,93
11 Koreks/Penyesuaian Amortisasi	19.687.697,00	53.308.433,80	(33.620.736,80)	(63,07)
12 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	(14.986.486.600,64)	3.724.346.620,67	(18.710.833.221,31)	100,00
13 Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	21.266.169,52	(2.610.375.243,57)	2.631.641.413,09	(100,81)
Jumlah	1.021.339.812.179,47	58.933.846.603,23	962.405.965.576,24	1.633,03

5.6.3.1. Koreksi/Penyesuaian Kas

Rp(522.347.427,00)

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar Rp(522.347.427,00) dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 SKPKD	(521.055.765,00)	-	(521.055.765,00)	
2 Dinas Pendidikan	-	(33.200.000,00)	33.200.000,00	(100,00)
3 Dinas Kesehatan	-	(423.385.900,00)	423.385.900,00	(100,00)
4 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	(820.634.500,00)	820.634.500,00	(100,00)
5 RSUD Dr. Margono Soekarno Purwokerto	-	(257.986.449,68)	257.986.449,58	(100,00)
6 RSUD Tugurejo Semarang	-	(114.712.750,00)	114.712.750,00	(100,00)
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	(14.843.299,00)	14.843.299,00	(100,00)
8 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	(65.035.882,00)	65.035.882,00	(100,00)
9 RSJD Surakarta	-	(13.478.743,00)	13.478.743,00	(100,00)
10 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	(16.395.577,00)	16.395.577,00	(100,00)
11 Dinas Perhubungan	-	(2.180.000,00)	2.180.000,00	(100,00)
12 Dinas Koperasi dan UMKM	-	(80.325.000,00)	80.325.000,00	(100,00)
13 Badan Kepegawaian Daerah	-	480,00	(480,00)	(100,00)



14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	8.000,00	(8.000,00)	(100,00)
15	Sekretariat Daerah	-	(3.850.000,00)	3.850.000,00	(100,00)
16	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(806.590,00)	806.590,00	(1.613.180,00)	(200,00)
17	Dinas Sosial	(219.020,00)	219.020,00	(438.040,00)	(200,00)
18	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(187.750,00)	187.750,00	(375.500,00)	(200,00)
19	Dinas Kehutanan	(59.026,00)	59.026,00	(118.052,00)	(200,00)
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	(19.276,00)	19.276,00	(38.552,00)	(200,00)
Jumlah		(522.347.427,00)	(1.844.727.958,68)	1.322.380.531,58	(71,68)

5.6.3.2. Koreksi/Penyesuaian Piutang

Rp2.754.030.561,00

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar Rp2.754.030.561,00 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>					
		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	20.548.112,00	(255.069.456,66)	275.617.568,66	(108,06)
2	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.753.766.022,00	3.496.974.821,00	(743.208.799,00)	(21,25)
3	RSJD Surakarta	(2.650.000,00)	-	(2.650.000,00)	-
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(447.100,00)	377.600,00	(824.700,00)	(218,41)
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	370.051.571,00	-	370.051.571,00	-
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(406.344.171,00)	360.578.245.930,25	(360.984.590.101,25)	(100,11)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.292.600,00	-	36.292.600,00	-
8	SKPKD	(17.186.473,00)	(481.939.809.444,00)	481.922.622.971,00	(100,00)
Jumlah		2.754.030.561,00	(118.119.280.549,42)	120.873.311.110,42	(102,33)

5.6.3.3. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang

(Rp13.051.583,12)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp13.051.583,12) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>					
		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(102.740,56)	(438.666.022,76)	438.563.282,20	(99,98)
2	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(13.768.830,11)	(17.484.874,11)	3.716.043,99	(21,25)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.235,50	(131.532.731,50)	131.534.967,00	(100,00)
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	2.155.448,00	(2.155.448,00)	(100,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	817.752,05	-	817.752,05	-
Jumlah		(13.051.583,12)	(585.528.180,37)	572.476.597,25	(97,77)



5.6.3.4. Koreksi/Penyesuaian Persediaan

Rp323.463.347,12

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp323.463.347,12 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 RSUD Kelet/Donorejo	(82.055.655,78)	-	(82.055.655,78)	-
2 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(50.941.602,10)	-	(50.941.602,10)	-
3 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	456.460.605,00	(38.151.736,91)	494.612.341,91	(1.296,43)
Jumlah	323.463.347,12	(38.151.736,91)	361.615.084,03	(947,83)

5.6.3.5. Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen

Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi atas penghitungan Investasi Non Permanen pada SKPKD.

5.6.3.6. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen

Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi atas penghitungan penyisihan Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih sesuai dengan pada SKPKD.

5.6.3.7. Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen

Rp 9.493.875,68

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar Rp 9.493.875,68 merupakan koreksi atas saldo awal dana bergulir pada SKPKD.

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
SKPKD	9.493.875,68	-	9.493.875,68	-
Jumlah	9.493.875,68	-	9.493.875,68	(100,00)

5.6.3.8. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Rp722.351.522.715,00

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp 722.351.522.715,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 SKPKD	(4.045.779.400,00)	-	(4.045.779.400,00)	-
2 Dinas Pendidikan	711.750.429.815,00	(200.062.367.954,00)	911.812.797.769,00	(455,76)
3 Dinas Kesehatan	-	(233.888.053,00)	233.888.053,00	(100,00)
4 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	(292.200.000,00)	292.200.000,00	(100,00)
5 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	13.888.426.700,00	(75.570.620,00)	13.963.997.320,00	(18.478,08)
6 RSUD Tugurejo Semarang	-	(38.301.675,00)	38.301.675,00	(100,00)
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	(14.227.390,00)	14.227.390,00	(100,00)
8 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	(593.667.500,00)	593.667.500,00	(100,00)
9 RSJD Surakarta	-	-	280.121.600,00	(100,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
			(280.121.600,00)		
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(492.000.000,00)	(492.890.000,00)	890.000,00	(0,18)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(186.119.000,00)	373.045.270.295,00	(373.231.389.295,00)	(100,05)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	-	(614.835.646,00)	614.835.646,00	(100,00)
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	(3.879.098.000,00)	3.879.098.000,00	(100,00)
14	Dinas Perhubungan	(34.000.000,00)	(82.204.928,00)	48.204.928,00	(58,64)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(21.255.250,00)	-	(21.255.250,00)	-
16	Dinas Sosial	-	(5.900.000,00)	5.900.000,00	(100,00)
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(49.460.000,00)	49.460.000,00	(100,00)
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.506.056.250,00	(7.829.000,00)	1.513.885.250,00	(19.336,89)
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(175.575.483,00)	175.575.483,00	(100,00)
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	214.830.000,00	(214.830.000,00)	(100,00)
21	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	87.997.442.122,00	(87.997.442.122,00)	(100,00)
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(6.160.000,00)	6.160.000,00	(100,00)
23	Satuan Polisi Pamong Praja	-	20.644.750.000,00	(20.644.750.000,00)	(100,00)
24	Sekretariat Daerah	(749.300.000,00)	(265.044.400,00)	(484.255.600,00)	182,71
25	Sekretariat DPRD	-	(27.392.859.941,00)	27.392.859.941,00	(100,00)
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(78.142.267.660,00)	78.142.267.660,00	(100,00)
27	Badan Penghubung	17.308.600,00	(6.790.000,00)	24.098.600,00	(354,91)
28	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	113.818.060,00	(113.818.060,00)	(100,00)
29	Badan Kepegawaian Daerah	-	(450.000,00)	450.000,00	(100,00)
30	Badan Koordinasi Wilayah III	-	(1.430.000,00)	1.430.000,00	(100,00)
31	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	(26.017.421,00)	26.017.421,00	(100,00)
32	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(245.000,00)	5.585.701.200,00	(5.585.946.200,00)	(100,00)
33	Dinas Perkebunan	-	(19.052.200,00)	19.052.200,00	(100,00)
34	Dinas Kehutanan	-	2.276.333.962,00	(2.276.333.962,00)	(100,00)
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	(840.000,00)	840.000,00	(100,00)
36	Dinas Kelautan	718.000.000,00		825.146.943,00	(770,11)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
dan Perikanan		(107.146.943,00)		
37 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	36.354.900,00	(36.354.900,00)	(100,00)
Jumlah	722.351.522.715,00	177.048.304.125,00	545.303.218.590,00	(41.971,92)

5.6.3.9. Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Rp268.492.599.446,46

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp268.492.599.446,46 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)				
	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 SKPKD	(115.536.069.625,02)	-	(115.536.069.625,02)	100,00
2 Dinas Pendidikan	985.868.111,54	-	985.868.111,54	100,00
3 Dinas Kesehatan RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(441.617.916,80)	-	(441.617.916,80)	100,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(5.562.471.428,57)	-	(5.562.471.428,57)	100,00
5 RSUD Tugurejo Semarang	(12.960.952.623,08)	-	(12.960.952.623,08)	100,00
6 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	38.296.610,96	-	38.296.610,96	100,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	55.890.130,40	-	55.890.130,40	100,00
8 RSJD Surakarta	(4.791.201.661,60)	-	(4.791.201.661,60)	100,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	128.604.566,00	-	128.604.566,00	100,00
10 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	121.460.039,43	-	121.460.039,43	100,00
11 Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	242.298.214.949,09	-	242.298.214.949,09	100,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(225.571.768,45)	-	(225.571.768,45)	100,00
13 Dinas Komunikasi dan Informasi	1.531.933.697,50	-	1.531.933.697,50	100,00
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(7.324.410.440,55)	-	(7.324.410.440,55)	100,00
15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	10.067.171.227,60	-	10.067.171.227,60	100,00
16 Dinas Sosial	(21.757.887.909,27)	-	(21.758.151.909,27)	100,00
17	(28.162.506.650,17)	-	(28.162.506.650,17)	100,00
18	(1.016.161.504,00)	-	(1.016.161.504,00)	100,00
	(2.938.133.302,80)	-	(2.938.133.302,80)	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
19	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.735.660.530,80)	-	(5.735.660.530,80)	100,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.937.011.485,75)	-	(2.937.011.485,75)	100,00
21	Dinas Koperasi dan UMKM	146.492.845,20	-	146.492.845,20	100,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	779.182.154,45	-	779.182.154,45	100,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34.926.066.886,23	-	34.926.066.886,23	100,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.055.096.115,50	-	1.055.096.115,50	100,00
25	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(18.069.259.407,27)	-	(18.069.259.407,27)	100,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	(581.757.448,80)	-	(581.757.448,80)	100,00
27	Sekretariat Daerah	14.412.106.745,19	-	14.412.106.745,19	100,00
28	Sekretariat DPRD	14.116.850.877,75	-	14.116.850.877,75	100,00
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	144.706.663.631,10	-	144.706.663.631,10	100,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(73.371.039.113,80)	-	(73.371.039.113,80)	100,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	8.200.389.136,45	-	8.200.389.136,45	100,00
32	Inspektorat	320.104.195,00	-	320.104.195,00	100,00
33	Badan Penghubung	(60.744.184,00)	-	(60.744.184,00)	100,00
34	Badan Pengembangan SDM Daerah	(6.896.000,00)	103.276.952,00	(110.172.952,00)	(106,68)
35	Badan Kepegawaian Daerah	68.874.000,00	-	68.874.000,00	100,00
36	Badan Koordinasi Wilayah I	10.865.551.939,96	-	10.865.551.939,96	100,00
37	Badan Koordinasi Wilayah II	15.182.267.731,90	-	15.182.267.731,90	100,00
38	Badan Koordinasi Wilayah III	30.328.646.141,25	-	30.328.646.141,25	100,00
39	Dinas Ketahanan Pangan	(40.882.904,80)	-	(40.882.904,80)	100,00
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(2.369.091.786,54)	104.836.411,00	(2.473.928.197,54)	(2.359,80)
41	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(204.408.640,80)	-	(204.408.640,80)	100,00
42	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia	5.097.445.253,15	-	5.097.445.253,15	100,00
43	Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan	(21.966.232.223,56)	-	(21.966.232.223,56)	100,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
44	Dinas Perkebunan	26.147.996.440,04	-	26.147.996.440,04	100,00
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.897.695,20	-	5.897.695,20	100,00
46	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	5.004.555.678,00	-	5.004.555.678,00	100,00
47	Dinas Kehutanan	29.078.242.272,16	-	29.078.242.272,16	100,00
48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(416.713.126,79)	-	(416.713.126,79)	100,00
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	(284.941.467,70)	(790.790,40)	(284.150.677,30)	35.932,49
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(415.646.473,67)	-	(415.646.473,67)	-
	Jumlah	268.492.599.446,46	207.322.572,60	268.285.012.873,86	129.404,63

5.6.3.10. Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya

Rp42.889.633.978,45

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar Rp42.889.633.978,45 dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>					
		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(4.021.768.901,00)	-	(4.021.768.901,00)	100,00
2	Dinas Pendidikan	477.613.196,00	15.263.520,00	462.349.676,00	3.029,12
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	295.750.000,00	-	295.750.000,00	100,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	585.000.000,00	(585.000.000,00)	(100,00)
5	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	503.852.700,00	-	503.852.700,00	100,00
6	Dinas Perhubungan	53.015.478.670,00	-	53.015.478.670,00	100,00
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.206.030.001,00	-	1.206.030.001,00	100,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.800.000,00	-	14.800.000,00	100,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	99.960.000,00	(99.960.000,00)	(100,00)
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	(54.000.000,00)	54.000.000,00	(100,00)
11	Sekretariat Daerah	(7.936.839.790,00)	-	(7.936.839.790,00)	(100,00)
12	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(1.089.620.024,55)	(27.995.000,00)	(1.061.625.024,55)	3.792,20
13					



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.320.220.274,00		1.320.220.274,00	100,00
15	Badan Penelitian dan Pengembangan	(503.852.700,00)	-	(503.852.700,00)	(100,00)
16	Badan Koordinasi Wilayah I	(423.625.499,00)	-	(423.625.499,00)	(100,00)
17	Badan Koordinasi Wilayah II	(13.000.000,00)	-	(13.000.000,00)	(100,00)
18	Badan Koordinasi Wilayah III	(19.687.697,00)	-	(19.687.697,00)	(100,00)
19	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	(1,00)		(1,00)	(100,00)
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.099.640.000,00	-	1.099.640.000,00	100,00
21	Dinas Perkebunan	(1.099.640.000,00)		(1.099.640.000,00)	(100,00)
22	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	(412.916.250,00)	-	(412.916.250,00)	(100,00)
23	Dinas Kehutanan	(14.800.000,00)	-	(14.800.000,00)	(100,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		(7.100.000,00)	7.100.000,00	100,00
	Jumlah	42.889.633.978,45	1.098.628.520,00	41.791.005.458,45	3.803,93

5.6.3.11. Koreksi/Penyesuaian Amortisasi

Rp19.687.697,00

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar Rp19.687.697,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	53.308.433,80	(53.308.433,80)	(100,00)
2	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(55.320.000,00)	-	(55.320.000,00)	100,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	289.520.000,00	-	289.520.000,00	100,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(405.820.000,00)		(405.820.000,00)	100,00
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	55.320.000,00	-	55.320.000,00	100,00
6	Badan Koordinasi Wilayah III	19.687.697,00	-	19.687.697,00	100,00
7	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	116.300.000,00	-	116.300.000,00	100,00
	Jumlah	19.687.697,00	53.308.433,80	(33.620.736,80)	(63,07)



5.6.3.12. Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya

Rp(14.986.486.600,64)

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp(14.986.486.600,64) dengan rincian sebagai berikut :

		<i>(Dalam Rupiah)</i>			
		2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(458.732.000,64)	-	(458.732.000,64)	(100)
2	Dinas Pendidikan	(455.317.196,00)	10.755.981,60	(466.073.177,60)	(4.333)
3	RSUD Tugurejo Semarang	-	(0,13)	0,13	100
4	RSJD Surakarta	-	197.287.620,00	(197.287.620,00)	(100)
5	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(390.502.700,00)	-	(390.502.700,00)	(100)
6	Dinas Perhubungan	(22.939.352.085,67)	-	(22.939.352.085,67)	100
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	(1,00)	-	(1,00)	100
8	Dinas Sosial	15.340.000,00	75.890.400,00	(60.550.400,00)	(80)
9	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	841.000,00	(841.000,00)	100
10	Sekretariat Daerah	7.824.231.590,00	112.608.200,00	7.711.623.390,00	6.848
11	Sekretariat DPRD	172.100.000,00	-	172.100.000,00	100
12	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	730.502.300,00	32.920.159,55	697.582.140,45	2.119
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(737.560.274,00)	-	(737.560.274,00)	(100)
14	Badan Penelitian dan Pengembangan	390.502.700,00	-	390.502.700,00	100
15	Badan Kepegawaian Daerah	-	2.075.000,00	(2.075.000,00)	(100)
16	Badan Koordinasi Wilayah I	422.629.499,00	5.805.999,75	416.823.499,25	7.179
17	Badan Koordinasi Wilayah II	13.000.000,00	-	13.000.000,00	100
18	Badan Koordinasi Wilayah III	-	339.017,90	(339.017,90)	(100)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	-	(103.095.611,00)	103.095.611,00	(100)
20	Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah	1,00	-	1,00	(100)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(610.375.333,33)	625.632.000,00	(1.236.007.333,33)	(198)
22	Dinas Perkebunan	617.290.000,00	482.350.000,00	134.940.000,00	28
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.996.650,00	2.225.210.953,00	(2.205.214.303,00)	(99)
24	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	292.156.250,00	4.620.000,00	287.536.250,00	6.224
25	Dinas Kehutanan	-	14.800.000,00	(14.800.000,00)	100
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	32.805.900,00	(32.805.900,00)	100
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107.604.000,00	3.500.000,00	104.104.000,00	100
Jumlah		(14.986.486.600,64)	3.724.346.620,67	(18.710.833.221,31)	(502,39)



5.6.3.13. Koreksi/Penyesuaian Lain-lain

Rp 21.266.169,52

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar Rp21.266.169,52 dengan rincian sebagai berikut :

<i>(Dalam Rupiah)</i>				
	2017	2016	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 SKPKD	-	(382.719.794,57)	382.719.794,57	(100,00)
RSJD Dr.				
2 Amino	27.266.169,52	-	27.266.169,52	100,00
Gondohutomo				
Semarang				
RSUD				
3 Tugurejo	(6.000.000,00)	(2.233.411.384,00)	2.227.411.384,00	(99,73)
Semarang				
4 RSJD	-	5.755.935,00	(5.755.935,00)	(100,00)
Surakarta				
Jumlah	21.266.169,52	(2.610.375.243,57)	2.631.641.413,09	(100,81)



BAB 6

PENJELASAN ATAS

INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara geografis Wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur. Garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sepanjang 791,76 Km, terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 Km dan pantai selatan sepanjang 289,07 Km. Secara administratif, Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/ kota (29 kabupaten dan 6 kota) yang mempunyai 573 kecamatan dengan 750 kelurahan dan 7.809 desa

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, peruntukan lahan terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha dan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 berdasarkan Proyeksi BPS sebanyak 34.257.865 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.988.093 jiwa (49,59%) dan perempuan sebanyak 17.269.772 jiwa (50,41%). Pada tahun 2017 jumlah penduduk mengalami kenaikan 238.770 jiwa atau 1,39% dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 34.019.095 jiwa. Adapun komposisi jenis laki-laki mengalami peningkatan 116.899 jiwa atau 0,69%, sedangkan komposisi jenis perempuan 121.871 atau 0,71% dari Tahun 2016.

Sedangkan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.796.004 jiwa, diikuti Kota Semarang (1.757.686 jiwa) dan Cilacap (1.711.627 jiwa). Dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kota Magelang sebanyak 121.474 jiwa, diikuti Salatiga (188.928 jiwa) dan Kota Tegal (248.094 jiwa). Urutan mengenai jumlah penduduk terbanyak maupun yang paling sedikit tidak banyak mengalami perubahan.

Adapun tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar 1.052,90 jiwa/km², atau bertambah 7,58 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 1.045,32 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan wilayah terpadat dengan tingkat kepadatan sebesar 11.721,60 jiwa/km², selanjutnya diikuti Kota Tegal (7.193,22 jiwa/km²) dan Kota Pekalongan (6.714,19 jiwa/km²). Sedangkan wilayah dengan kepadatan paling jarang adalah Blora (478,64 jiwa/km²), Wonogiri (523,88 jiwa/km²) dan Rembang (620,18 jiwa/km²).



Pertambahan tingkat kepadatan di wilayah kota dengan kabupaten cukup berbeda. Di wilayah kota rata-rata bertambah 50,44 jiwa/km², sedangkan wilayah kabupaten hanya bertambah rata-rata 7,98 jiwa/km². Kota Semarang merupakan kota dengan pertambahan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 76,55 jiwa/km², diikuti Kota Pekalongan (58,90 jiwa/km²) dan Salatiga (47,36 jiwa/km²).

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 23.198.081 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) yang jumlahnya 11.062.740 jiwa. Dengan demikian rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 47,69 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47-48 penduduk usia non produktif. Bila dibandingkan dengan Angka Rasio Ketergantungan Tahun 2016 sebesar 47,86 masih relatif kecil sehingga masih berpengaruh positif bagi pembangunan daerah.

6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagai suatu Provinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

a. Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet* 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewest* (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District / Standgeemente* (Kotapraja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

b. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawakecuali Vorstenkendeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrikdan Ku* (Kelurahan).

c. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.



6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sejak merdeka sampai dengan sekarang, Jawa Tengah dipimpin oleh 15 (lima belas) Kepala Pemerintahan yaitu :

- a. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
- b. KRT MrWongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
- c. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
- d. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954s/d 1958;
- e. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
- f. RM Hadisoebeno Sosrowerdojo, Tahun 1958 s/d 1960;
- g. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
- h. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
- i. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
- j. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
- k. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
- l. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
- m. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
- n. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;
- o. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2013 s/d 2018.

Sejak Pemilu Tahun 1955 sampai sekarang DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin 9 (sembilan) orang, yaitu :

- a. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
- b. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
- c. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
- d. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
- e. Drs. H. SoepartoTjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
- f. AlipPandoyoTahun 1997 s/d 1999;
- g. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
- h. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012.
- i. Drs. Rukma Setya Budi MM, 2014 s/d 2019.



6.4 VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 bahwa **Visi** Jawa Tengah adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, maka telah ditetapkan **7 (tujuh) Misi**, yaitu :

- a. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi";
- d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang ditetapkan tanggal 23 Nopember 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat;
- b. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang ditetapkan tanggal 10 Juli 1948, dengan prinsip otonomi sebanyak banyaknya;



- c. UU. No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan tanggal 4 Juli 1950, dengan prinsip mengatur karisidenan di Jawa Tengah;
- d. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan tanggal 17 Januari 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya;
- e. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 1 September 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.
- f. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, yang disahkan tanggal 23 Juli 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab;
- g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 7 Mei 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab;
- h. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 15 Oktober 2004, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan tanggal 30 September 2014, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.



BAB 7

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2017, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.